

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2020 ini, garis besarnya hal dominan yang dilaporkan adalah Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output dan Outcome, Laporan Standar Pelayanan Minimal serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam memberikan panduan dan pembinaan serta sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah di tahun-tahun selanjutnya.

Sarilamak, Maret 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Jumlah Penduduk.....	3
D. Jumlah Kecamatan dan Desa	3
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	8
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	12
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	12
B. Visi dan Misi	18
C. Program Pembangunan Daerah.....	22
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	31
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	44
A. Dasar Hukum.....	44
B. Kebijakan Umum.....	45
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 47
2.1. Capaian Kinerja Makro	47
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	51
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	51
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	79
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	85
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	86
2.3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	86

2.3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	87
2.3.1.2. Capaian Kinerja.....	88
2.3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	90
2.3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran.....	234
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	254
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	255
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	255
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	255
4.1.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi	256
4.1.3. Realisasi.....	256
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	256
4.1.5. Dukungan Personil	257
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	257
4.2. Bidang Urusan Kesehatan.....	257
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	257
4.2.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi.....	258
4.2.3. Kesimpulan dan Saran.....	277
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	278
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	278
4.3.2. Target Pencapaian SPM.....	278
4.3.3. Realisasi.....	279
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	281
4.3.5. Dukungan Personil	281
4.3.6. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	281
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	282
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	282
4.4.2. Target Pencapaian SPM.....	282
4.4.3. Realisasi.....	282
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	284
4.4.5. Permasalahan dan Solusi.....	284
4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
Masyarakat.....	284
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	284

4.5.1.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	284
4.5.1.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	285
4.5.1.3. Dinas Pemadam Kebakaran	285
4.5.2. Target Pencapaian SPM.....	286
4.5.3. Realisasi.....	286
4.5.3.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	286
4.5.3.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	287
4.5.3.3. Dinas Pemadam Kebakaran	288
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	288
4.5.4.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	288
4.5.4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	288
4.5.4.3. Dinas Pemadam Kebakaran	290
4.5.5. Dukungan Personil.....	290
4.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	290
4.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	290
4.5.5.3. Dinas Pemadam Kebakaran	291
4.5.6. Permasalahan Dan Solusi.....	291
4.5.6.1. Satuan Polisi Pamong Praja.....	291
4.5.6.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	291
4.5.6.3. Dinas Pemadam Kebakaran	292
4.6. Bidang Urusan Sosial.....	294
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	294
4.6.2. Target Pencapaian SPM.....	294
4.6.3. Realisasi.....	295
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	298
4.6.5. Dukungan Personil	299
4.6.6. Permasalahan Dan Solusi	300
4.7. Program Dan Kegiatan.....	300
4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan.....	300
4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan.....	301
4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	301
4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	301
4.7.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	302
4.7.6. Bidang Urusan Sosial	303

BAB V PENUTUP.....	309
5.1.Kesimpulan	309
5.2.Saran	311

DAFTAR TABEL

1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	3
1.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan	4
1.3. Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan	4
1.4. Nama nagari dan Jorong menurut Kecamatan	5
1.5. Pendapatan Asli Daerah	11
1.6. Belanja Daerah	11
1.7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM.....	24
1.8. Rencana Kinerja Tahun 2020	27
1.9. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	28
1.10. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	32
1.11. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020	32
1.12. Program-program prioritas Pembangunan daerah Tahun 2020	34
1.13. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2020.....	46
2.1. Indikator Kinerja Makro	47
2.3.1.1. Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indicator kinerja	87
2.3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	88
2.3.2. Target, Realisasi, dan Capaian Strategis 1.1	91
2.3.2.1. Jumlah TPQ, MDTA dan Surau serta jumlah murid tahun 2020	93
2.3.5. Target, Realisasi, dan Capaian sasaran strategis 2.2	110
2.3.6. Target, Realisasi, dan Capaian sasaran strategis 2.3	122
2.3.6.1. Daftar nama-nama IKM Sehat Tahun 2020	123
2.3.6.2. Data Pertumbuhan IKM Tahun 2020	137
2.3.7. Terget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.4.....	141
2.3.7.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	143
2.3.7.2.Daftar Daya Tarik Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota.....	143
2.3.7.3.Kontribusi Pariwisata terhadap PAD.	152
2.3.7.4.Data Hunian Home Stay tahun 2020	154

2.3.8.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1	158
2.3.9. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.2	163
2.3.10.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.3.....	169
2.3.11.Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.4.....	174
2.3.12.Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.1	181
2.3.12.1. Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi	181
2.3.12.1.Komponen Penilaian SAKIP	182
2.3.13.Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.2.....	188
2.3.13.1.Rekapitulasi IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	189
2.3.13.2.Rata-Rata Nilai Interval Unsur SKM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	192
2.3.14. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5.1	199
2.3.14.1.Evaluasi Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) 2018/2019 Desa (Nagari) di Kabupaten Lima Puluh Kota	200
2.3.14.2. Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNAG/BUMDES) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	206
2.3.14.3.Rekapitulasi Nagari dengan Status Lembaga Sosial Kemasyarakatan Aktif.....	212
2.3.15.Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6.1.....	214
2.3.15.1.Jumlah RTL yang direhab Tahun 2020	222
2.3.16.Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6.2.....	229
2.3.16.1.Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air Tahun 2020.....	232
2.3.16.2.Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2020	232
2.3.17..Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....	235
2.3.18. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	235
2.3.19.Sasaran Strategis Per Program, Rencana dan Realisasi Anggaran 2020	236
2.3.20. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019.....	247
2.3.21. Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	252

DAFTAR GRAFIK

2.3.1. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2019	90
2.3.2. APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau MDA/TPQ	92
2.3.3. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	97
2.3.4. Persentase Usaha Mikro yang Potensial Menjadi Usaha Kecil	105
2.3.5. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	112
2.3.6. Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB	114
2.3.7. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	123
2.3.8. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	137
2.3.9. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Wisatawan Nusantara	142
2.3.10. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	151
2.3.11. Reranking Rata-Rata UN	159
2.3.12. Angka Usia Harapan Hidup	163
2.3.13. Indeks Pembangunan Gender	170
2.3.14. Angka Kemiskinan	175
2.3.15. Indeks Reformasi Birokrasi	182
2.3.16. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	189
2.3.17. Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju	200
2.3.18. Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	215
2.3.19. Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	218
2.3.20. Persentase Cakupan Air Bersih	220
2.3.21. Rasio Rumah Layak Huni	222
2.3.22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	230

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1. PENJELASAN UMUM

A. UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi pada wilayah Kecamatan yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kecamatan Guguk, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian pada tahun 1983 di samping Kecamatan Definitif, ada pula Kecamatan Perwakilan sebanyak 5 (lima) buah, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Situjuah (Perwakilan Kecamatan Luhak), Kecamatan Bukik Bulek (Perwakilan Kecamatan Suliki), Kecamatan Mungka (Perwakilan Kecamatan Guguk), dan Kecamatan Akabiluru (Perwakilan Kecamatan Payakumbuh).

Pada zaman Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara prinsip terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke wilayah sendiri yang selama ini berada di wilayah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Semenjak itu dilakukan upaya pemindahan wilayah Ibukota serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini dimulai dengan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan diikuti oleh pembangunan sejumlah gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT, dan berada di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261m), Gunung Bungsu (1.253m), dan Gunung Sanggul (1.495m). Selain itu juga terdapat 17 (tujuh belas) buah sungai yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sungai terpanjang adalah Batang Sinamar (96,13km) yang melintasi Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Nenan (5km) di Kecamatan Bukik Barisan.

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan dengan luas 168,145Ha atau 50,13%, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 114,667Ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata seluas 20.673Ha, serta Hutan Produksi seluas 32,805Ha. Sedangkan penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai lahan basah yang digunakan untuk sawah beririgasi produktif seluas 14.090Ha, sawah beririgasi tidak produktif seluas 6.641Ha, sawah non irigasi seluas 1.555Ha, daerah rawa seluas 171Ha, kolam/tebat/embung seluas 1.320Ha, waduk/danau seluas 1.814Ha, lahan kering untuk perkebunan seluas 40.250Ha, pemukiman/pekarangan seluas 9.140Ha, kawasan industri seluas 171Ha, serta kawasan pertambangan 395Ha. Selain itu terdapat pula lahan terlantar/semak belukar seluas 54.825Ha dan areal untuk penggunaan lainnya seluas 36.913Ha.

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2020 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 385.986 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 192.658 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 193.328 jiwa.

Tabel . 1.1
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin
Per - Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Payakumbuh	18.744	18.733	100
2.	Akabiluru	14.576	14.578	99,98
3.	Luak	13.927	14.352	97,03
4.	Lareh Sago Halaban	19.443	19.425	100
5.	Situjuah Limo Nagari	11.593	11.786	98,36
6.	Harau	27.317	27.039	101
7.	Guguak	18.029	18.518	97,35
8.	Mungka	13.579	13.882	97,81
9.	Suliki	7.486	7.660	97,72
10.	Bukik Barisan	11.561	11.820	97,8
11.	Gunuang Omeh	7.107	7.088	100
12.	Kapur IX	14.243	13.941	102
13.	Pangkalan Koto Baru	15.053	14.506	103
J u m l a h		192.658	193.328	99,65

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU- 0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang beribukota di Nagari Sarilamak ini mencapai 3.354,30 KM² dan diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Dengan batas-batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Di samping itu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya daerah yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh berada di tengah-tengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapur IX (723,36KM²), sedangkan

Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luak (61,68KM²). Tabel berikut menggambarkan luas wilayah masing-masing Kecamatan :

Tabel 1.2
Luas Wilayah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Payakumbuh	99,47
2.	Akabiluru	94,26
3.	Luak	61,68
4.	Lareh Sago Halaban	394,85
5.	Situjuah Limo Nagari	74,18
6.	Harau	416,80
7.	Guguak	106,20
8.	Mungka	83,76
9.	Suliki	136,94
10.	Bukik Barisan	294,20
11.	Gunuang Omeh	156,54
12.	Kapur IX	723,36
13.	Pangkalan Koto Baru	712,06
J u m l a h		3.354,30

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Untuk Nagari terbanyak berada di Kecamatan Harau, yaitu 11 (sebelas) Nagari, dan Jorong terbanyak berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, sejumlah 49 (empat puluh sembilan) Jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Nagari dan Jorong paling sedikit berada di Kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 (tiga) Nagari dan 17 (tujuh belas) Jorong, sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Payakumbuh	7	27
2.	Akabiluru	7	29
3.	Luak	4	34
4.	Lareh Sago Halaban	8	49
5.	Situjuah Limo Nagari	5	27
6.	Harau	11	47
7.	Guguak	5	30
8.	Mungka	5	20
9.	Suliki	6	32
10.	Bukik Barisan	5	39
11.	Gunuang Omeh	3	17
12.	Kapur IX	7	31
13.	Pangkalan Koto Baru	6	33
J u m l a h		79	415

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Tabel 1.4
Nama Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1.	Payakumbuh	a) Sungai Beringin b) Koto Baru Simalanggang c) Simalanggang d) Koto Tengah Simalanggang e) Taeh Baruah f) Piobang g) Taeh Bukik	a) Lareh nan panjang, Koto Tengah, Guguak, Tanjung Munti b) Koto Baru, Tabek Panjang, Parumpung c) Api-Api, Balai Rupih, Koto, Tabiang Ranah d) Batu nan Limo, Kapalo Koto, Tambun Ijuk e) Parik Dalam, Koto Kaciak, Dalam Koto, Kubu Gadang, Padang Parik Panjang, Koto Puji f) Piobang, Gando, Ampang g) Pogang, Talago, Bukik Tapung, Pebatungan
2.	Akabiluru	a) Koto Tengah Batu Ampa b) Batu Hampar c) Sariak Laweh d) Sungai Balantiak e) Suayan f) Pauh Sangik g) Durian Gadang	a) Koto Tengah, Seberang Parit, Batu Tanyuh, Tambun Ijuk b) Menara Agung, Beringin Indah, Simpang Ganti c) Nagari Gadang, Sawah Padang, Baruah Andaleh d) Simpang Tigo, Nur Kapalo Koto, Koto Baru, Koto Malintang e) Ateh, Bawah, Suayan Tinggi, Suayan Soriak, Suayan Rondah, Suayan Sabar f) Pauh Sangik, Ambacang Kunyik g) Bungo Tanjuang, Kapalo Koto, Beringin
3.	Luak	a) Mungo b) Andaleh c) Sungai Kamuyang d) Tanjung Haro Sikabu-kabu	a) Indo Baleh Barat, Indobaleh Timur, Pincuran Tinggi, Koto Bakuruang, Batu Labi, Talaweh, Bukik Gombak Situak, Tanjuang Tengah, Balai Gadang Ateh, Balai Gadang Bawah, Kayu Bajaja Padang Laweh b) Tarok, Tabek Buruak, Kapalo Koto, Kampuang Tengah, Gato Gandang, Tanjuang Baruah,, Pincuran Gadang, Baliak Bukik c) Tabiang, Sibaladuang, Batang Tabik, Tanjuang Kalias, VI Kampuang, VIII Kampuang, XII Kampuang, Rageh, Madang Kadok d) Sikabu-kabu, Tanjuang Haro Selatan, Tanjuang Haro Utara, Bukik Kanduang, Lokuak Dama, Padang Panjang
4.	Lareh Sago Halaban	a) Halaban b) Ampalu c) Tanjung Gadang d) Sitanang e) Batu Payung f) Labuah Gunuang	a) Padang Tengah, Kabun, Atas Laban, Kapalo Koto, Lambuk, Lompek, Aie Baba, Alang laweh b) Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Siaur, Padang Aur, Koto, Guguak c) Parak Lubang, Bulakan, Taratak, Tanjung Gadang Rumah d) Balai Malintang, Kampai, Tanah Mungguk, Coran, Batu Kabau, Sungai Ipuah e) Batu Payuang, Subarang Air, Koto Malintang, Pakan Rabaa, Lareh Nan Panjang, Kapalo Bukik f) Kayu Tanam, Lareh nan

		g) Balai Panjang	Panjang, Dusun nan Enam, Talaweh, Banjar Sari, Simpang Empat Balai Jariang, Simpang Empat Kabindu
		h) Bukik Sikumpa	g) Balai Panjang, Air Randah, Koto Malintang, Sawah Laweh, Kubang Rasau, Tareh, Tampung Todok, Lurah Bukit h) Pakan Sinayan, Rogeh, Padang Belimbing, Padang Cubadak
5.	Situjuah Limo Nagari	a) Situjuah Gadang b) Situjuah Banda Dalam c) Situjuah Batua d) Tungka e) Situjuah Ladang Laweh	a) Tanjuang Sumantuang, Tanjuang Bungo, Situjuah Gadang, Padang Jariang, Kociak, Padang Kuniang b) Padang Ambacang, Talaweh, Tengah Padang, Banda Dalam, Subarang Tabek, Sungai Jiliatang, Gurun, Koto Baru c) Koto, Kubang Bungkuak, Tepi, Tengah, Lakung, Bumbung d) Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Lansek, Sialang, Taratak e) Ateh, Bawah
6.	Harau	a) Taram b) Bukik Limbuku c) Pilubang d) Batu Balang e) Koto Tuo f) Lubuak Batingkok g) Gurun h) Sarilamak i) Tarantang j) Solok Bio-Bio k) Harau	a) Balai Cubadak, Subarang, Tanjung Kubang, Parak Baru, Tanjung Ateh, Sipatai, Gantiang b) Pintu Koto, Koto Malintang, Koto Panyaringan c) Balai, Janjang Tinggi, Koto Nan Gadang d) Balai, Koto Kaciak, Bancah, Koto Harau, Tigo Alur, Padang Ambacang e) Tanjung Pati, Koto Tuo, Padang Rantang, Pulutan f) Lubuak Batingkok, Koto Tengah, Tigo Balai g) Gurun, Lubuak Jantan, Balai Tinggi h) Purwajaya, Sarilamak, Ketinggian, Aie Putiah, Buluah Kasok i) Tarantang, Lubuk Limpato j) Solok Dalam, Padang Laweh, Bio-Bio, Sungai Rambai k) Harau, Padang Torok, Landai, Sungai Data, Hulu Aia Koto Marapak, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Batu Badukuang
7.	Guguak	a) Kubang b) Simpang Sugiran c) Sungai Talang d) Guguak VIII Koto e) VII Koto Talago	a) Siamang Bunyi, Taratak, Kubang, Koto Baru, Tanjung Barulak, Koto Sarikat, Limo Koto b) Boncah, Baliak, Lokuang c) Sungai Talang, Kaludan, Bukik Apik, Belubus, Guguak Nunang d) Kuranji, Tiakar, Guguak, Kubang Tngkek, Ketinggian, Pincuran Botuang, Balai Mansiro, Balai Talang e) Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Jopang, Koto Kociak, Padang Kandi, Sipingai
8.	Mungka	a) Jopang Manganti b) Mungka c) Talang Maua d) Simpang Kapuak	a) Jopang, Manganti b) Mungka Tengah, Koto Tuo, Koto Baru, Padang Koto Tuo, Padang Harapan c) Kampung Tengah, Maur, Talang d) Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Balai Tampuak Pinang, Lobuah

		e) Sungai Antuan	Tunggang, Koto Tinggi Kubang Balambak e) Labuah Lintang, Lubuak Simato, Simpang tiga kenanga
9.	Suliki	a) Kurai b) Suliki c) Limbanang d) Sungai Rimbang e) Tanjuang Bungo f) Andiang	a) Kurai, Mudiak Liki, Botuang b) Suliki Baruah, Padang Loweh, Suliki Pasar, Jariangau Ateh Koto, Taratak, Soriak, Guguak Palano c) Ekor Parit, Penago, Saut, Kampuang Dalam, Limbanang Baruah d) Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Ateh Koto, Lombah, Tanan Longih, Sam Panjang e) Lancaran, Kubu Tongah, Korek Hilir, Batang Linjuang f) Siboka, Simpang Limo, Kampuang Baru, Padang Bungo
10.	Bukik Barisan	a) Koto Tangah b) Banja Laweh c) Maek d) Sungai Naniang e) Baruah Gunuang	a) Koto Tangah, Datar, Tabiang Tinggi, Paninjauan, Padang Laweh, Ngalau Godang b) Banja Loweh Gadang, Banja Loweh Ketek, Jambak, Bukik Bulek, Tobek, Guntuang c) Ampang Gadang, I, Ampang Gadang II, Aur Duri, Bunga Tanjung, Koto Godang, Nenah, Ronah, Sopan Godang, Sopan Tanah, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III d) Batu Balabuah I, Batu Balabuah II, Kampuang Baru, Pematang Aur, Apar e) Bandar Rait, Bigau, Pauah, Bukik Kambuik, Baruah Gunuang I, Baruah Gunuang II, Tobek Godang, Kubu Baru, Padang Tongah, Parontian Kubu Baru
11.	Gunuang Omeh	a) Pandam Gadang b) Talang Anau c) Koto Tinggi	a) Koto Panjang, Kampuang Gaduang, Ikan Banyak, Kampuang Patai, Sungai Mangkirai, Koto Marapak b) Talang Anau, Simpang Padang, Luak Begak c) Lubuak Aua, Lakung, Kampung Melayu, Kampuang Muaro, Pua Data, Aie Angek, Sungai Siriah, Sungai Dadok
12.	Kapur IX	a) Koto Lamo b) Lubuak Alai c) Muaro Paiti d) Koto Bangun e) Durian Tinggi f) Sialang g) Galugua	a) Koto Tuo, Sei Nyanyiang, Tanjuang Bungo, Koto Tangah, Lolo b) Alai Baru, Suka Karya, Rumbai, Koto Tinggi, Balai Tangah, Sei Dua Anau c) Kampung Duri, Kampung Baru, Kampung Dalam, Kampung Talawi, Koto Tinggi, Sungai Panjang Indah d) Jorong I Koto Bangun, Jorong II Koto Bangun, Jorong III Koto Bangun e) Bintungan Sakti, Ronah Pembangunan, Cinta Maju f) Sialang Bawah, Sialang Atas, Ronah Bengkek, Lubuk Koto g) Mongan, Koto Tangah, Tanjung Jajaran, Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	a) Koto Alam	a) Simpang Tigo, Koto Tangah, Koto Ronah, Polong Duo

b) Manggilang	b) Pasar Manggilang, Mudiak
c) Pangkalan	Pasar, Seberang Pasar, Lubuk Jantan
d) Gunung Malintang	c) Sopang, Pauh Anok, Tigo Balai, Pasar Usang, Pasar Baru, Lubuak Tabuan, Kampuang Baru, koto Panjang, Lakuak Gadang, Lubuak Nago, Banjaranah
e) Tanjung Balik	d) Lubuk Ameh, Koto Lamo, Bencah Lumpur, Bukit Talao, Balik Bukit, Koto Mesjid, Sungai Pimping, Batu Balah
f) Tanjung Pauah	e) Panang, Kulangan, Koto Lamo
	f) Pasar Buyuh, Koto Lamo, Pulau Panjang
J u m l a h	79
	415

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pegawai atau Aparatur merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keadaan Pegawai setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh mutasi luar daerah, pensiun, mau pun meninggal dunia. Keadaan jumlah Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota tahun per 31 Desember 2020 berjumlah sebanyak 6.319 orang. Berdasarkan Jabatannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari jabatan fungsional tertentu sebanyak 2904 orang PNS (Guru) , 581 orang PNS (Kesehatan), 164 Orang PNS (Teknis), Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2018 Orang PNS, Jabatan Eselon IV sebanyak 464 Orang PNS, Jabatan Eselon III sebanyak 158 Orang PNS, dan Jabatan eselon II Sebanyak 30 orang PNS.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. Selain itu Bupati juga dibantu oleh 3 (Tiga) orang Staf Ahli yang membidangi bidang Pemerintahan, bidang Hukum dan Politik, dan bidang pembangunan Kemasyarakatan dan SDM. Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.

Sedangkan Dinas-Dinas yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis membantu Bupati Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, ketiga Asisten tersebut mengkoordinasi 10 (sepuluh) Bagian yang ada pada Sekretariat Daerah, yaitu :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Organisasi;
- 4) Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan;
- 5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Bagian Perekonomian;
- 7) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 9) Bagian Keuangan;
- 10) Bagian Humas dan Protokoler;

Dan perangkat daerah terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Sosial;
- 3) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- 7) Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- 11) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Dinas Perhubungan;
- 16) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan;
- 17) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 18) Dinas Perikanan;
- 19) Dinas Pangan; dan
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang bersifat koordinasi diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah, yaitu :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Badan Keuangan;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Selanjutnya anggota DPRD dalam mengurus administrasi dan kelancaran tugas dibantu oleh Sekretariat DPRD, yang dikepalai oleh Sekretaris DPRD. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang telah diberikan beberapa kewenangan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Kapur IX;
- 2) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- 3) Kecamatan Harau;
- 4) Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- 5) Kecamatan Luak;
- 6) Kecamatan Akabiluru;
- 7) Kecamatan Payakumbuh;
- 8) Kecamatan Guguak;
- 9) Kecamatan Mungka;
- 10) Kecamatan Suliki;
- 11) Kecamatan Bukik Barisan;
- 12) Kecamatan Gunuang Omeh; dan
- 13) Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 1.5
Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis	2019 Realisasi (Rp.)	2020		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	85.168.153.332,25	86.666.035.373,00	77.429.483.703,61	89,34
	a. Pajak Daerah	24.181.111.740,00	30.241.808.019,00	23.556.949.207,00	77,90
	b. Retribusi Daerah	4.534.569.182,00	4.793.237.109,00	3.691.643.431,00	77,02
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.675.284.188,00	3.353.697.260,00	3.226.731.006,00	96,21
	d. Lain-lain PAD yang Sah	53.777.188.222,25	48.277.292.985,00	46.954.160.059,61	97,26
2	Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	1.016.024.131.816,00	976.499.906.392,00	948.966.938.909,00	97,18
	a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	12.671.760.175,00	18.731.092.292,00	15.160.737.197,00	80,94
	b. DAU	768.836.012.000,00	702.365.062.000,00	696.866.984.000,00	99,22
	c. DAK	234.516.359.641,00	255.403.752.100,00	236.939.217.712,00	92,77
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	208.410.492.584,00	197.003.716.013,00	183.074.974.378,00	92,93
	a. Pendapatan Hibah	9.642.270.290,00	22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.554.994.575,00	46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62
	c. Dana Penyesuaian dan Otsus	174.095.960.290,00	127.396.498.000,00	127.263.525.500,00	100,18
	Total	1.336.485.510.303,25	1.260.169.657.778,00	1.209.111.396.990,61	95,95

Tabel 1.6
Belanja Daerah

No.	Jenis	2020		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	860.797.067.856,00	830.202.297.012,00	96,45
	1. Belanja Pegawai	614.558.637.197,00	590.402.059.279,00	96,07
	2. Belanja Hibah	47.575.616.000,00	47.055.184.406,00	98,91
	3. Belanja Bantuan Sosial	4.031.630.000,00	3.691.625.000,00	91,57
	4. Belanja Bagi Hasil	3.530.620.013,00	2.363.287.249,00	77,88
	5. Belanja Bantuan Keuangan	151.082.687.021,00	150.578.396.473,00	99,67
	6. Belanja Tidak Terduga	40.017.877.625,00	36.111.744.605,00	90,24
B.	Belanja Langsung	436.907.482.019,00	386.563.042.653,37	88,48
	1. Belanja Pegawai	27.931.667.128,00	24.118.182.371,00	86,35
	2. Belanja Barang dan Jasa	231.325.860.333,00	209.732.770.637,37	90,67
	3. Belanja Modal	177.649.954.558,00	152.712.089.645,00	85,96
	Total	1.297.704.549.875,00	1.216.765.339.665,37	93,76

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri nomor 86 tahun 2017, penyelenggaraan pembangunan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Dalam proses penyusunan perencanaan, permasalahan pembangunan daerah yang selalu ada dan dihadapi daerah setiap tahunnya kelihatan menjadi suatu kenyataan yang tidak akan pernah berakhir, meskipun dari waktu ke waktu Pemerintah Daerah mencurahkan perhatian dan sekaligus anggaran. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi pembangunan yang dihadapi selalu mengalami

perkembangan. Perkembangan itu sendiri bisa saja menunjukkan peningkatan, atau penurunan dan bahkan stagnasi. Dan mungkin saja kondisi yang terjadi menunjukkan gabungan tendensi-tendensi tersebut. Saat ini perencanaan pembangunan dimulai dari sebuah visi dan misi, dan visi serta misi tersebut digali dari berbagai hal, diantaranya permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi sampai saat ini dan menjadi tantangan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara karakter atau kualitas moral spritual erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai agama, adat, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas fisik sumber daya manusia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat, yaitu 69,47. IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita yang pada tahun 2020.

Rendahnya IPM ini menunjukkan rendahnya kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap pencapaian target IPM dan sekaligus menyatakan bahwa belum optimalnya pelayanan/penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Rendahnya kontribusi sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM daerah antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya kuantitas guru profesional sesuai indeks kependidikan. Sampai saat ini, baru 75 % dari keseluruhan guru yang memiliki status profesional, sehingga cukup berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan dan hasil proses belajar mengajar. Disamping itu, kondisi sarana

prasarana sekolah masih belum memadai untuk mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan terutama di lokasi pinggiran.

Kontribusi kesehatan dalam pencapaian target IPM yang masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari masih banyaknya penderita penyakit yang belum tertangani dengan baik, angka kematian bayi yaitu 16,38 bayi per-seribu kelahiran dan kasus kematian ibu melahirkan yaitu 4 kasus, yang dirasa masih tinggi, demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada periode RPJMD 2016-2021.

Disamping permasalahan yang telah disebutkan diatas, masih ada kondisi lainnya yang menjadi permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah secara fisik yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi sosial kemasyarakatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan yaitu 6,86%, terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terlihatnya keberdayaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam menjalani kehidupan, masih adanya warga masyarakat yang hidup dalam pasungan, dan masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum dilayani sebagaimana mestinya.

Pemenuhan harapan terhadap terciptanya kualitas sumber daya manusia secara non- fisik dapat dilihat dari gambaran kualitas karakter atau mental spiritual yang akan banyak dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris, semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang, keberadaan fungsi dan peran *tungku tigo sajarangan* semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya.

Semuanya itu merupakan Kondisi ini diyakini menjadi penyebab dari berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat, makin melemahnya

pengamalan filosofi *ABS-SBK*, dan makin tingginya degradasi mental dan dekadensi moral. Semuanya itu bermuara kepada tingginya pelanggaran hukum, kriminal dan upaya-upaya melawan hukum. Perbaikan terhadap kualitas karakter atau moral spiritual yang merupakan kualitas non-fisik dari sumber daya manusia adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, karena akan sangat mendukung kepada pembangunan fisik.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah

Perkembangan perekonomian daerah dalam 3 tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencatat pertumbuhan 5,32%, namun setelah itu terus menunjukkan penurunan sampai pada angka pertumbuhan -1,16% pada tahun 2020. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka Kemiskinan masih berada pada angka 6,86%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka tahun 2020 berada pada kisaran 3,03% mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang pada kisaran 2.28%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Fakta diatas terjadi karena potensi daerah belum secara maksimal dimanfaatkan, baik potensi sebagai daerah agraris, potensi wisata, dan sumberdaya alam lainnya. Potensi agraris daerah yang belum terolah secara optimal dapat dilihat dari upaya peningkatan produksi pangan yang belum mencapai standar secara nasional, seperti produktifitas padi yang sampai saat ini baru mencapai 4,93 ton/ha, jagung 6,25 ton/ha sedangkan kondisi ideal produktifitas padi secara nasional 6 ton/ha dan jagung 6-8 ton/ha. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya penguatan sektor pertanian untuk mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan daerah.

Pengolahan potensi sumber daya daerah tidak saja dilihat dari sisi hulunya saja, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta

masih kurangnya dukungan investasi yang masuk ke daerah menggambarkan bahwa daerah belum optimal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing produk daerah serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan perhatian dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengatasinya. Kedepan upaya akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat serta daerah dalam persaingan produk dan jasa yang dihasilkan terutama dalam menyongsong peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota menurut lapangan usaha yaitu 0,6% atau sekitar 65,379 Milyar sedangkan pengeluaran sektor pariwisata mencapai 2,21% atau sekitar 163,392 Milyar. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya di belanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Kelemahan pengelolaan dan pengembangan terhadap ketiga potensi diatas akan memberikan kontribusi terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dan yang tidak kalah pentingnya juga untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi- kondisi yang tidak kondusif tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan dicarikan jalan keluarnya dalam bentuk upaya-upaya strategis untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana ketepatan, ketertiban, dan kecepatan pelayanan dilakukan terhadap pihak yang

membutuhkan, baik masyarakat umum maupun aparaturnya pemerintah selaku bagian dari unsur masyarakat dan selaku aparaturnya pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini disebabkan oleh beberapa persoalan yang belum dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJMD yang lalu, yaitu: belum efektifnya pelaksanaan SPM dan standar pelayanan, belum maksimalnya kinerja aparaturnya, masih rendahnya peran APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah), masih rendahnya peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam penciptaan transparansi informasi publik, masih rendahnya pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah, belum terpadunya penerapan e-government, serta belum terealisasinya kerjasama antar daerah dan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dapat berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang cukup penting sebagai penyebabnya adalah masih dominannya proporsi belanja tidak langsung dalam APBD, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD. Selama periode 2016-2021, kontribusi PAD dalam APBD berada pada kisaran 4 sampai 5 persen. Sementara itu, APBD yang bersumber dari dana perimbangan juga relatif kecil dan bahkan bisa dikatakan menurun jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada belum memadainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti: peningkatan kapasitas aparaturnya, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan sebagainya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini juga disebabkan oleh belum optimalnya peran pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terbawah di daerah, tetapi sekaligus menjadi ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisinya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparaturnya nagari belum memadai, sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di nagari masih rendah termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM, BUMNagari dan sebagainya. Inventarisasi pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan nagari serta luasnya rentang kendali pelaksanaan pemerintahan nagari masih menjadi persoalan. Semua kondisi tersebut menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pada periode RPJMD 2016-2021, pembenahan infrastruktur telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sampai akhir periode RPJMD tersebut kualitas infrastruktur belum berhasil ditingkatkan sesuai dengan harapan. Secara umum, kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi. Disamping itu, rencana induk, zonasi, dan rencana rinci penataan ruang belum sepenuhnya dapat disusun, pembangunan perumahan dan pemukiman belum tertata dengan baik, target cakupan pelayanan air bersih, air minum, dan persampahan belum tercapai, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang belum maksimal.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai juga dapat dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama sebagaimana mestinya. IKK Sarilamak misalnya, yang diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang representatif dan layak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan masih jauh dari kenyataan, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten. Demikian juga infrastruktur pada kawasan wisata, pusat perdagangan, dan daerah basis perjuangan seperti Koto Tinggi yang merupakan kawasan strategis bersejarah, kondisinya masih jauh dari harapan. Kondisi seperti ini bukan hanya berada pada kawasan utama. Kalau dilihat lebih jauh kepada kondisi nagari dan jorong, masih ada diantaranya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau. Apalagi jika dikaitkan dengan bencana yang pada umumnya sering terjadi pada daerah-daerah pinggiran dan perbatasan.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan

perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera Dan Dinamis “Yang Mantap”

Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapat dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Dinamis adalah gambaran suatu keadaan yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemashlahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampun dari tuhan .Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu harus dilandasi oleh iman dan taqwa sebagai ruh-nya. Iman dan taqwa dapat diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama / antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof “ Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi

daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berdasarkan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama beradat dan berbudaya	1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter dengan etos kerja tinggindalam semangat kegotongroyongan.	1.1 Meningkatnya SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotongroyongan.
		2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	2.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2.2 Meningkatnya peran dan kualitas lembaga keagamaan dalam tata kehidupan masyarakat
		3. Memperkuat peran lembaga adat dan pemangku adat dalam tata kehidupan masyarakat	3.1 Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai- nilai adat dalam kehidupan masyarakat
		4. Mengembangkan dan melestarikan budaya seni tradisional, dan situs cagar budaya	4.1 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional
II	Misi 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	1. Merevitalisasi pertanian menuju agro industri	1.1 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 1.2 Meningkatnya niai tambah dan daya saing produk/komoditi pertanian dan perikanan
		2. Meningkatkan ketahanan pangan	2.1 Terwujudnya NAGARI MANDIRI PANGAN dan meningkatnya keamanan pangan daerah.
		3. Pengelolaan Komoditas Unggulan	3.1 Meningkatnya pengelolaan komoditas bunggulan yang berdaya saing , berdaya jual dan masuk kepasar Global
		4. Mengembangkan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	4.1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
		5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	5.1 Meningkatnya daya tarik investasi 5.2 Meningkatnya keterampilan, kesempatan, dan perlindungan tenaga kerja
		6. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui reformasi kelembagaan dan digital ekonomi	6.1 Berkembangnya Koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil) yang berdaya saing 6.2 Meningkatnya kinerja BUMD
III	Misi 3 : Meningkatkan kulitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan upaya m Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan	1.1. Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD yang berkualitas 1.2. Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang berkualitas 1.3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

			1.4. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat
		2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau	2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. 2.2. Meningkatnya pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (Ibu, Anak dan lanjut usia) 2.3. Meningkatnya penyehatan lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan penyakit 2.4. Meningkatnya layanan BLUD RSUD AD
		3. Meningkatkan kesehatan Gender , Keluarga Berencana dan Perlindungan terhadap anak dan perempuan	3.1. Meningkatnya peran serta Gender dalam berbagai aspek pembangunan 3.2. Terwujudnya Keluarga Berencana dan berbagai aspek pembangunan 3.3. Menurunkan angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
IV	Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas	1.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan 1.2 Penguatan kapasitas monitoring dan pengawasan internal kinerja pelayanan Publik 1.3 Penyediaan mutu layanan yang berbasis standar pelayanan minimal 1.4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan public
		2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas KKN, demokratis dan terpercaya	2.1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 2.2 Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien 2.3 Mewujudkan open government pada seluruh instansi pemerintah 2.4 Mewujudkan masyarakat sadar hukum melalui produk hukum daerah
V	Misi 5: Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang efektif	1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari & Jorong 1.2 Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur nagari 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
		2. Meningkatkan Pelaksanaan	2.1 Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Nagari 3.1 Meningkatnya partisipasi

		Pembangunan Nagari	seluruh masyarakat dalam membangun Nagari
		3. Meningkatkan peran kelembagaan Nagari dan Masyarakat Nagari	
VI	Misi 6: Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan	1. Menyusun Dokumen rencana umum dan rencana rinci tata ruang	1.1. Terarahnya pembangunan infrastruktur kawasan di kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran sesuai dengan tata ruang
		2. Meningkatkan pembangunan dan penanganan Daerah Tertinggal, daerah Perbatasan dan daerah Rawan Bencana	2.1. Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kabupaten dan daerah tertinggal, perbatasan serta terisolir 2.2. Terwujudnya mitigasi dan penanganan bencana yang responsive
		3. Mengembangkan dan mengoptimalkan infrastruktur daerah	3.1. Tertanganinya kualitas infrastruktur daerah
		4. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana transportasi di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi	4.1. Tertanganinya kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana transportasi yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran
		5. Meningkatkan sarana prasarana perumahan di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi	5.1. Tertatanya perkembangan perumahan, permukiman dan kawasan perdagangan sesuai dengan tata ruang Kabupaten
		6. Meningkatkan penanganan degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan	6.1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, dan keanekaragaman hayati
		7. Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur di daerah Basis Perjuangan	7.1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di daerah basis perjuangan

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan di atas kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Kinerja yang ada dalam IKU Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Perumusan IKU Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan revisi terhadap RPJMD pada Bulan Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Adapun revisi RPJMD tersebut merupakan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/396/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Sasaran Strategis dan IKU dan Target 5 Tahun RPJM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.7
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM

N O	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Peningkatan Pengamalan Agama Dalam Masyarakat	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 th di Mesjid / Musholla/ Surau / MDA/ TPQ</i>	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 th di Mesjid / Musholla/ Surau / MDA/ TPQ</i>	N/A	59,64	66,15	62,66	64,59	66,47	67,10	67,10
		Meningkatkan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	Meningkatkan Umum Dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	50	50	55	60	65	70	75	75
2.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	<i>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</i>	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	30	35	35	100
				Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	<i>Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB</i>	30,97	30,14	29,61	28,8	27,32	28,5	29,05	29,05
					<i>Persentase kontribusi sektor perikanan Terhadap PDRB</i>	3,33	3,36	3,36	3,31	3,47	4,52	4,80	4,80
				Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	N/A	N/A	18,13	20,47	22,03	21,84	100	100
					Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	N/A	N/A	14,42	31,73	49,04	74,04	100	100

N O	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara	3,2	25,37	18,19	19,24	20,20	20,67	21,67	21,67
					Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	31,7	45,11	30,39	35,73	37,08	34,4	34,4
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	Meningkatnya kualitas pendidikan	Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	10	10	9	8	7	6	5	5
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	69,61	69,80	70	70,19	70,39	70,59	70,59
		Meningkatkan perlindungan sosial kemasyarakatan	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,50	95,50	95,50	95,77	95,77	95,77	95,77
				Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,59	7,15	7,12	7,08	7,05	7,01	7,01
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang kualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	67	69	73	79	79
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,5	70	74,12	75,23	76,22	77,41	78,5	78,5

N O	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
5.	Meningkatkan kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	<i>Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju</i>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	46	46	70	70	72	74	75	75
6.	Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	<i>Persentase peningkatan pembangunan infrastuktur</i>	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5 Ha	13.493 Ha	16.346 Ha	18.247,21 Ha	18.612,1 Ha	18.984,4 Ha	19.364,1 Ha	19.364,1 Ha
					Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	41,50	44,61	46,69	48,22	49,80	61,52	61,52
					Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	73	75	76,35	77,33	79,42	81,62	81,62
					Rasio rumah Layak Huni	N/A	N/A	0,6892	0,6947	0,6950	0,6954	0,6961	0,6961
			<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	N/A	65,0	66,5	68,0	70,0	70,0

1. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang ditetapkan di awal tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 1.8
Rencana Kinerja Tahunan 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya		
1.1. Meningkatnya Aktivitas Masjid/Mushalla/Surau/MDA/TPQ	1. Persentase Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,70
1.2. Meningkatnya Ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	2. Menurunnya kasus pelanggaran Perda	70%
1.3. Meningkatnya pengembangan Budaya Lokal	3. Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%
Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah		
2.1. Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi	4. Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	35%
2.2. Meningkatnya produksi dan produktifitas sector pertanian dan perikanan dan meningkatnya keamanan pangan daerah	5. Persentase koperasi sehat	30%
	6. Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	4,33%
	7. Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB	2,90%
2.3. Meningkatnya daya saing produk daerah	8. Persentase pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB	5,22%
	9. Persentase industri kecil menengah (IKM) Sehat	23,20%
	10. Persentase pertumbuhan industri kecil Menengah (IKM)	74,04%
2.4. Meningkatnya daya Saing pariwisata daerah mancanegara dan wisatawan nusantara	11. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	26,80%
	12. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15,50%
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	13. Jumlah lembaga pendidikan wajib	107

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	belajar yang terakreditasi A	
	14. Rangkang Rata-rata nilai ujian nasional	7
3.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan	15. Angka usia harapan hidup	70,19
3.3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77
	17. Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,16%
3.4. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan PMKS	18. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan	80%
3.5. Menurunnya angka kemiskinan	19. Angka kemiskinan	6,97
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik		
4.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	20. Indeks Reformasi Birokrasi	60
4.2. Meningkatnya kualitas layanan publik	21. Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	80
Misi 5 : Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong		
5.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	22. Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	74 nagari
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan		
6.1. Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	23. Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	18.984,4 Ha
	24. Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	52,27%
	25. Persentase cakupan layanan air bersih	79,42%
	26. Rasio rumah layak huni	0,7162
6.2. Terjaganya kualitas lingkungan	27. Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,00

2. Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang ditetapkan pada awal tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang ditetapkan di awal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 1.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya			
1.1 Meningkatnya Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ	1. Persentase Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,70	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
1.2 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	2. Menurunnya kasus pelanggaran Perda	70 %	Satpol PP
1.3 Meningkatnya pengembangan Budaya Lokal	3. Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah				
2.1	Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi	4. Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	15%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		5. Persentase koperasi sehat	30%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.2	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor Pertanian dan Perikanan	6. Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	4,33%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		7. Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB	2,90%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		8. Persentase pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB	5,22%	Dinas Perikanan
2.3	Meningkatnya daya saing produk daerah	9. Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	23,20%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		10. Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	74,04%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.4	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	11. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	26,80%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		12. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15,50%	Badan Keuangan/Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	13. Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		14. Rangkang rata-rata nilai ujian Nasional	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan	15. Angka usia harapan hidup	70,19	Dinas Kesehatan
3.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.	16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		17. Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,16%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.4	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan PMKS	18. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan	80%	Dinas Sosial
3.5	Menurunnya angka kemiskinan	19. Angka kemiskinan	6,97	OPD terkait
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik				
4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	20. Indeks Reformasi Birokrasi	60	Sekda
4.2	Meningkatnya kualitas layanan publik	21. Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	80	Bag. Organisasi

Misi 5 : Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong				
5.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari	22. Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	74 Nagari	DPMDN/Kecamatan
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan				
6.1	Infrastruktur dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah	23. Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	18.984,4 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		24. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	52,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25. Persentase cakupan layanan air bersih	79,42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		26. Rasio rumah layak huni	0,7162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
6.2	Terjaganya kualitas lingkungan	27. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	68	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. RKPD tahun 2020 merupakan bagian dari RPJMD 2016-2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “yang MANTAP” Berlandaskan Iman dan Taqwa”** serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD periode yang lalu yang dipandang masih relevan untuk pencapaian visi RPJMD tetap dipertahankan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020.

Tabel 1.10
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (2016-2021) *)	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020
1	Revolusi mental	Revolusi mental
2	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Investasi dan kemudahan berusaha	Investasi dan kemudahan berusaha
5	Penguatan ekonomi kerakyatan	Penguatan ekonomi kerakyatan
6	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
7	Reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi
8	Penguatan nagari	Penguatan nagari
9	Penataan ruang dan kawasan strategis	Penataan ruang dan kawasan strategis
10	Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
11	Pengembangan daerah basis perjuangan	Pengembangan daerah basis perjuangan

Keterangan: *) Prioritas pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021

Tabel. 1.11
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020	SASARAN	INDIKATOR
1	Revolusi mental	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid / Musholla/ Surau /MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda
		Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda
		Meningkatnya pengembangan Budaya Lokal	Persentase budaya lokal yang Dikembangkan
2	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB
3	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara
			Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
4	Investasi dan kemudahan berusaha		
5	Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Koperasi Sehat

			Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil
		Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
6	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A
			Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak
		Meningkatnya pelayanan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan
		Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
7	Reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kualitas layanan publik	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8	Penguatan nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju
9	Penataan ruang dan kawasan strategis		
10	Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik
			Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
			Persentase Cakupan Layanan Air Bersih
			Rasio rumah Layak Huni
		Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
11	Pengembangan daerah basis perjuangan		

Tabel 1.12
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

N O	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA <i>(tujuan/ impact/ outcome)</i>	KOND I SI AWAL 2015	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA									
	Tujuan 1. Peningkatan Pengamalan Agama Dalam Masyarakat	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	7,85		8			8	
	Sasaran 1.1. Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid / Musholla/Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	7,27	7,85		8			8	
	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat									Setda- Bagian Kesra Setda
	Tujuan 2. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	50	70		75			75	
	Sasaran 2.1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	50	70		75			75	Satpol PP
	Program Pemeliharaan Trantib Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal			88%	415,00	90%	450,00	90%	1.947,44	Satpol PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			72%	165,00	75%	170,00	75%	565,58	Satpol PP
	Tujuan 3. Meningkatkan Penerapan Nilai Adat Dan Budaya Dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat	Persentase budaya lokal yang Dikembangkan	45	85		95			95	

	Sasaran 3.1. Meningkatnya pengembangan Budaya Lokal	Persentase budaya lokal yang Dikembangkan	45	85		95			95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		45	85	1.511	95	1.511		1.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	MISI 2. MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH									
	Tujuan 1. Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Persentase Koperasi Sehat	5	33		34		100	30	
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		35		100	30	
		Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,42		2,27			2,27	
		Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,60		2,53			2,53	
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8,11	7,19		7,05			7,05	
		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	0	33		34		100	5	
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0	33		34		100	17,6	
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	20,67		20,67		21,67	13,33	
		Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	37,08		34,4		34,4		
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5	33		34		100	30	Disdagkop UKM
		Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	5	35		35		100	30	Disdagkop UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi									Disdagkop UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			30 Usaha Mikro	1,034,000,000	40 Usaha Mikro	1,137,000.000	100		Disdagkop UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			30 Usaha Mikro	417,137,000	40 Usaha Mikro	458,850,000	100		Disdagkop UKM
	Sasaran 1.2. Meningkatnya	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	2,24	2,42		2,27			2,27	Distanhorbun, Dinas Pangan

	Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	3,32	2,60		2,53			2,53	Disnak Keswan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	8.11	7.19		7,05			7,05	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi dan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perkebunan		21,57	4.744,50	23,24	5.109,50	2.560/12	22.912	Distanhorbun
	Program Peningkatan	persentase bantuan sarana prasarana	0	16,72	28.416,52	16,93	30.908,22	2	155.295	Distanhorbun
	Produksi Pertanian / Perkebunan	produksi pertanian/perkebunan yang diberikan								
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				225		270		883	Dinas Pangan
	Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan yang berkualitas	88,6%	8%	2.205	10%	2.500	10%	2.886,106	DisnakKeswan
	Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan	97,98%	7,5%	80	9%	100	9%	247,441	DisnakKeswan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan yang Unggul								Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawa	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	3.394,90 ton/th	4.250 ton/th	500	4.500 ton/th	500	4.500 ton/th	2.288	Dinas Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	30,5 kg/t/kapita	35 kg/t/kapita	1.000	36 kg/t/kapita	1.200	36 kg/th/kapita	4.676	Dinas Perikanan
	Sasaran 1.3. Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	0	33		34		100	5	Disperin Naker
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0	33		34		100	17,6	Disperin Naker
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan IKM	-	0,70	375	0,70	435	3,10	1.810,775	DisperinNaker
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya IKM sehat	-	3,60	925	3,60	985	17,10	3.217,635,5	Disperin Naker

	Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya dan berkembangnya IKM	-	0,70	550	0,70	650	3,10	2.045,911	Disperin Naker
	Sasaran 1.4. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mancanegara dan Wisata nusantara	3,2	21,67		21,67		21,67	13,33	Disparpora
		persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	14,35	37,08		34,4			34,4	Disparpora
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	3.500	5.000	8.888.750	5.200	10.666.500	5.200	3.500	Disparpora
		Jumlah Kunjungan Wisatawan domestic	270.000	500.000		520.000		520.000		Disparpora
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku industri pariwisata yang aktif	17	53	1.600.000	63	1.920.000	63	1.920.000	Disparpora
		Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif	11	54		67		67		Disparpora
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan jumlah event promosi wisata dalam dan luar daerah	3	10	4.200,000	12	5.040,000	12	5.040,000	Disparpora
MISI 3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA										
	Tujuan 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	94		111			111	
		Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	10	6		5			5	
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	34	94		111			111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	10	6		5			5	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		39	94	84.060	111	84.060	111	84.060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		9	6	935	5	935	5	935	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,39		70,59			70,59	
	Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	68,83	70,39		70,59			70,59	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			1,35	19,975	1,40	21,984	1,40		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			13	225	12	250	12		Dinas Kesehatan

	Program Pengawasan Obat dan Makanan			70	120	80	150	80		Dinas Kesehatan
	Tujuan 3. Meningkatkan perlindungan sosial kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,04	96,5		97			97	
		Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	0	0,033		0,017			0,017	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan	50	80		85			85	
		Angka Kemiskinan	7,48	7,05		7,01			7,01	
	Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77		95,77			95,77	
		Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	0,019	0,033		0,017			0,017	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		95,50	95,77	809,413	95,77	819,413	95,77	819,413	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		100	100%	259,6	100	300	100	300	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100	100	850	100	975	100	975	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , PP dan PA
	Sasaran 3.2. Meningkatnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang	50	80		85			85	Dinas Sosial
	pelayanan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Diberdayakan								
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpercil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	0	80%	1.450,00	85%	1.595,00	85,00%	5.873,34	Dinas Sosial

	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Persentase Pelayanan, Jaminan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		95%	4.600,00	95%	5.060,00	95,00%	29.402,03	Dinas Sosial
	Program Pembinaan A	Persentase Pembinaan dan Praktek belajar kerja bagi Anak terlantar		45%	250,00	50%	275,00	50%	840,26	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Pembinaan, Pelatihan dan pemberian bantuan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma		55%	750,00	60%	825,00	60%	2.181,52	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Panti asuhan / Panti Jompo		90%	150,00	90%	165,00	90%	935,92	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).	Persentase Pembinaan dan pemberian bantuan UEP untuk Eks penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)		75%	100,00	75%	110,00	75%	361,62	Dinas Sosial
	Sasaran 3.3. Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	7,05		7,01		7,01		
	Program di Masing – Masing OPD yang Terkait Langsung Dengan Menurunnya Angka Kemiskinan									Bapelitbang
MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
	Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang kualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	73		79			79	
		Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,5	77		78,5			78,5	
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	73		79			79	BKPSDM

	tata kelola pemerintahan									
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai		93%	3,915,50	95%	5,395,50	95%	18,515,45	BKPSDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur/ PNS	35%	60%	2,400,00	65%	2,400,00	65%	12,219,11	BKPSDM
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									Bapelitbang
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah									Bapelitbang
	Program Pengembangan Data/ Informasi									Bapelitbang
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	5.130,933	WTP	5.650,626	WTP	5.650,626	Badan Keuangan
	Program				2.864		3.132		3.132	Kominfo

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.									
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level kapabilitas APIP	Level 1	Level 3	267	Level 4	294	Level 4	294	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti	75%	85%	359	90%	395	90%	395	Inspektorat
	Program Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang menyusun standar pelayanan			126		95		95	Bagian organisasi
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,5	77		78,5			78,5	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi Mikro dan Kecil		60 M		70 M				DPMPSTP
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	jumlah media informasi tenaga kerja	0	3	120	3	118	18	118	Dinas Industri dan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan		71	3,651,243	84	4,016,367		4,016,367	Disdukcapil
	Program Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang menyusun standar pelayanan								Bagian organisasi
	MISI 5. MENINGKATKAN KELEMBAGAAN NAGARI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS JORONG									
	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	46	74		75			75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari (DPMD/N)

	Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	46	74		75			75	DPMD/N
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		20%	19	20%	59	100%	59	DPMD/N
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		20%	627	20%	571	100%	571	DPMD/N
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		20%	608	20%	834	100%	834	DPMD/N
	Program penataan desa									DPMD/N
MISI 6. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH BASIS PERJUANGAN										
	Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5	18.984,4		19.364,1			19.364,1	
			Ha	Ha		Ha			Ha	
		Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	49,80		61,52			61,52	
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	79,42		81,62			81,62	
		Rasio rumah Layak Huni	N/A	25,51		23,47			23,47	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	68,0		70,0			70,0	
	Sasaran 1.1. Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	15.202,5	18.984,4		19.364,1			19.364,1	
			Ha	Ha		Ha			Ha	
	Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	40,10	49,80		61,52			61,52	
		Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	66,8	79,42		81,62			81,62	
		Rasio rumah Layak Huni	N/A	0,6920		0,6921		0,6921	23,47	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				26.579		27.888		27.888	Dinas PU dan Penataan Ruang

	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				51.611		57.639		57.639	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				35.165		43.887		43.887	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				4.419		4.732		4.732	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	NA	29%	13,565,00	34%	23,355,00	100%	52,133,59	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Permukiman (DLHPP)
	Sasaran 1.2. Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	68,0		70,0			70,0	
	Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	NA	25%	700,00	39%	950,00	39%	2,557,24	DLHPP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	3%	45%	3,010,00	50%	3,210,00	50%	3,210,00	DLHPP
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	8%	40%	2,685,00	45%	2,960,00	45%	2,960,00	DLHPP
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA	1%	25 Ha	1,255,00	25 Ha	1,540,00	25 Ha	1,540,00	DLHPP

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 62).

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.1.13
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Revolusi Mental	Meningkatnya Aktifitas Mesjid/Mushala/Surau/MDA/TPQ	Persentase Masjid/Mushala/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda
		Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda
		Meningkatnya Pengembangan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan
2.	Revitalisasi Pertanian menuju agroindustri	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan terhadap PDRB
			Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB
3.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara
			Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
4.	Investasi dan Kemudahan berusaha		
5.	Penguatan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
			Persentase Usaha Mikro yang potensial menjadi Usaha Kecil
		Meningkatnya daya saing Produk Daerah	Persentase Industri Kecil menengah (IKM) Sehat
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
6.	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A
			Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pelayanan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan
7.	Reformasi Birokrasi	Penurunan angka kemiskinan	Angka kemiskinan
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
8.	Penguatan Nagari	Meningkatnya kualitas layanan publik	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju
9.	Penataan Ruang dan Kawasan Strategis		
10.	Fasilitas umum dan Fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
			Persentase cakupan layanan air bersih
			Rasio rumah layak huni
11.	Pengembangan daerah basis perjuangan	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,67%	69,47%	-0,29%
2	Angka Kemiskinan	6,97%	6,86%	-0,11%
3	Angka Pengangguran	2,28%	3,03%	0,72%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,10%	-1,16%	-6,26%
5	Pendapatan perKapita	Rp.40.791.120	Data Belum dirilis oleh BPS	-
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,24	Data Belum dirilis oleh BPS	-

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015 sampai tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2015	67,65
2016	68,37
2017	68,69
2018	69,17
2019	69,67
2020	69,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2015 tercatat sebesar 67,65 dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,37 serta tahun 2017 sebesar 68,69 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 69,17 dan pada tahun 2019 juga naik menjadi 69,67, namun pada tahun 2020 IPM Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan menjadi 69,47, hal ini dikarenakan menurunnya Pengeluaran perKapita Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebesar Rp.9.596.000,- dari Rp.9.842.000,- Pengeluaran perKapita pada Tahun 2019.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

**Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2015-2020
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Belum dirilis BPS	451.295	6,86
2019	26,64	403.030	6,97
2018	26,46	388.689	6,99
2017	26,93	370.506	7,15
2016	28,57	357.824	7,59
2015	28,76	314.949	7,65

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 26,64 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,97% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan (6,86% pada tahun 2020).

3. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang putus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ketahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah
1	2
2020	3,03
2019	2,28
2018	2,70
2017	2,60
2016*	-
2015	2,73

Sumber: BPS Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah 3,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 3 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh

semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2020 mengalami melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2020 sebesar -1,16 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 5,10 persen.

5. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pada tahun 2019 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar Rp.40.791.120,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp.38.266.040,- sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2020 belum dapat ditampilkan dikarenakan data belum dirilis BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 belum dapat ditampilkan karena data belum dirilis oleh BPS kab. Lima Puluh Kota, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 adalah sebesar 0,24 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang gini ratio sebesar 0,28 maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2019. Semakin kecil *Gini Ratio* maka semakin kecil ketimpangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Ada	Dinas Pendidikan
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	554 orang	Dinas Pendidikan
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	3.176 orang	Dinas Pendidikan
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	278 orang	Dinas Pendidikan
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	a. Akreditasi A: Tidak Ada b. Akreditasi B: Tidak ada c. Akreditasi c : Tidak ada	Dinas Pendidikan

		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.588 orang	Dinas Pendidikan
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.117 orang	Dinas Pendidikan
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.185 orang	Dinas Pendidikan
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.144 orang	Dinas Pendidikan
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	816 orang	Dinas Pendidikan
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	285 orang	Dinas Pendidikan
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.176 orang	Dinas Pendidikan
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.161 orang	Dinas Pendidikan
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ada	Dinas Pendidikan
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	Ada	Dinas Pendidikan

		dan pelatihan calon kepala sekolah		
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		27. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah))	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		28. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		29. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		30. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.588 orang	Dinas Pendidikan
		31. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.117 orang	Dinas Pendidikan
		32. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		33. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		34. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.185 orang	Dinas Pendidikan
		35. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.144 orang	Dinas Pendidikan
		36. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		37. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		38. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	816 orang	Dinas Pendidikan
		39. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	285 orang	Dinas Pendidikan
		40. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.176 orang	Dinas Pendidikan
		41. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.161 orang	Dinas Pendidikan
		42. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	Ada	Dinas Pendidikan

		pelatihan calon kepala sekolah		
		43. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ada	Dinas Pendidikan
		44. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		45. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tidak ada	Dinas Pendidikan
		46. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	5	Dinas Pendidikan
		47. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	182 orang	Dinas Pendidikan
		48. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.249 orang	Dinas Pendidikan
		49. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	558 orang	Dinas Pendidikan
		50. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan
		51. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	3 orang	Dinas Pendidikan
		52. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ada	Dinas Pendidikan
		53. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	20 orang	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Ada	Dinas Kesehatan
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Ada	Dinas Kesehatan
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Dinas Kesehatan
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	6.266 orang	Dinas Kesehatan
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.268 orang	Dinas Kesehatan
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	6.162 orang	Dinas Kesehatan
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7.892 orang	Dinas Kesehatan
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	5.965 orang	Dinas Kesehatan
		9. Jumlah dukungan logistik	7.516 orang	Dinas

		kesehatan yang tersedia		Kesehatan
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	18.523 orang	Dinas Kesehatan
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.944 orang	Dinas Kesehatan
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Ada	Dinas Kesehatan
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Dinas Kesehatan
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Ada	Dinas Kesehatan
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	225.446 orang	Dinas Kesehatan
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Ada	Dinas Kesehatan
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Dinas Kesehatan
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	8.791 orang	Dinas Kesehatan
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.791 orang	Dinas Kesehatan
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.889 orang	Dinas Kesehatan
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.889 orang	Dinas Kesehatan
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	741 orang	Dinas Kesehatan
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.019 orang	Dinas Kesehatan
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	310 orang	Dinas Kesehatan
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	310 orang	Dinas Kesehatan
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.386 orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air		Dinas Pekerjaan Umum & PR

		kewenangan kabupaten/kota		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota a. Bangunan perkuatan tebing (m) b. Tanggul sungai (m) c. Kanal bajir (m) d. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		8. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		9. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		10. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		11. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		12. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		13. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		14. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		15. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		16. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		17. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		18. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		19. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		20. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan		Dinas Pekerjaan

		SPAM		Umum & PR
		21. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		22. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		23. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		24. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		25. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		26. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		27. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		28. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		29. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		30. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		31. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		32. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		33. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		34. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		35. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		36. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		37. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		38. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		39. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		40. Penetapan Keputusan		Dinas

		Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Pekerjaan Umum & PR
		41. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		42. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		43. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		44. Jumlah bangunan gedung negaramilik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		45. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		46. Panjang jalan yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		47. Panjang jembatan yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		48. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		49. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		50. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		51. Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		52. Panjang jalan yang dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		53. Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		54. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		55. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		56. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		57. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dngan data termutakhir		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		58. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		59. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah		Dinas Pekerjaan Umum & PR

		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		
		60. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		61. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		62. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		63. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		64. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		65. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		66. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		67. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		68. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		69. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		70. Jumlah badan usaha yang		Dinas

		memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Pekerjaan Umum & PR
		71. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten / kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		72. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		73. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		74. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		75. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		76. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
		77. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum & PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	29 rumah	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	27 rumah	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan

		yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Hidup
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	15,84 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		19. Jumlah rumah di kab/kota	88.257 rumah	Dinas Lingkungan Hidup
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	8.391 unit	Dinas Lingkungan Hidup
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		23. Rasio rumah dan KK	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup

		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangan	4 pengaduan	Satpol PP
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.399 satlinmas	Satpol PP
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 perda	Satpol PP
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 orang	Satpol PP
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satpol PP
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tidak Ada	BPBD
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Tidak Ada	BPBD
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak Ada	BPBD
		10. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/lehal	Tidak Ada	BPBD
		11. Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan (Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	Tidak Ada	BPBD
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Tidak Ada	BPBD
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	70%	BPBD
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Tidak Ada	BPBD
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Dinas Damkar
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan	122 layanan	Dinas Damkar

		Penyelamatan di kabupaten/kota		
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada	Dinas Damkar
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada	Dinas Damkar
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	103 aparatur	Dinas Damkar
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada	Dinas Damkar
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	56 aparatur	Dinas Damkar
6	Sosial	1. Jumlah Layanan data yang dimiliki	2.197	Dinas Sosial
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.197	Dinas Sosial
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Ada	Dinas Sosial
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar dan gepeng yang dijangkau	Ada	Dinas Sosial
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Ada	Dinas Sosial
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Ada	Dinas Sosial
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Ada	Dinas Sosial
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Ada	Dinas Sosial
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial

		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak Ada	Dinas Sosial
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada	Dinas Sosial
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Ada	Dinas Sosial
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Ada	Dinas Sosial
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Ada	Dinas Sosial
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Ada	Dinas Sosial
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Ada	Dinas Sosial
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Ada	Dinas Sosial
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Ada	Dinas Sosial
		22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Ada	Dinas Sosial
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Ada	Dinas Sosial
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak Ada	Dinas Sosial
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada	Dinas Sosial
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada	Dinas Sosial
		27. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Ada	Dinas Sosial
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak Terlaksana	Dinas Perindustrian dan

				Tenaga Kerja
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Terlaksana	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Tidak Terlaksana	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	3 buah sertifikat Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	70 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	70 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		11. Persentase penyerapan lulusan	Tidak Terlaksana	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		16. Data tingkat produktivitas total	Tidak Terlaksana	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	14 Buah Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Ada (Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	66 Buah Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	5.343 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	12 Buah Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		23. Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	12 Perselisihan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		27. Jumlah perselisihan PHK	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.475 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3 Buah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 Buah (Sertifikat Diklat Pengantar Kerja An. Muhammad Syaiful, S.Sos)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Tidak Ada	Dinas Perindustrian

		antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		n dan Tenaga Kerja
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Tidak Ada	DP2KBP3A
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada	DP2KBP3A
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Ada 1 Buah	DP2KBP3A
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Tidak Ada	DP2KBP3A
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Tidak Ada	DP2KBP3A
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Tidak Ada	DP2KBP3A
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak Ada	DP2KBP3A
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak Ada	DP2KBP3A
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Tidak Ada	DP2KBP3A
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan	Tidak Ada	DP2KBP3A

		yang mendapat pelatihan		
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	DP2KBP3A
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Buah	DP2KBP3A
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Tidak Ada	DP2KBP3A
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Tidak Ada	DP2KBP3A
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Pangan
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Terlaksana	Dinas Pangan
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada	Dinas Pangan
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak Terlaksana	Dinas Pangan
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Terlaksana	Dinas Pangan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak Terlaksana	Dinas Pangan
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subye	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada	Dinas PU&PR
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PU&PR
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap :	Ada	DLH
		a. Indeks kualitas air (IKA)	50,00	DLH
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Tidak Ada	DLH
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Tidak Ada	DLH
		d. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Tidak Ada	DLH
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	DLH

		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	DLH
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	DLH
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tidak Ada	DLH
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak Ada	DLH
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak Ada	DLH
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Ada	DLH
12	Administrasi Pendudukan dan Pencacatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	Ada	DISDUKCAPIL
		2. Penerbitan akta perceraian	Ada	DISDUKCAPIL
		3. Penerbitan akta kematian	Ada	DISDUKCAPIL
		4. Penyajian data kependudukan	Ada	DISDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada	DPMDN
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	DPMDN
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN
		6. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada	DPMDN
		8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	DPMDN

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	DP2KBP3A
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tidak Ada	DP2KBP3A
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	Tidak Ada	DP2KBP3A
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Tidak Ada	DP2KBP3A
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Tidak Ada	DP2KBP3A
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Ada	DP2KBP3A
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	73,14%	DP2KBP3A
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Ada	DP2KBP3A
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	4,52%	DP2KBP3A
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Ada	DP2KBP3A
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Ada	DP2KBP3A
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	80%	DISHUB
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Ada	DISHUB
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Tidak Ada	DISHUB
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Ada	DISHUB
		5. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Ada	DISHUB
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	43 OPD	DISKOMINFO
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	43 OPD	DISKOMINFO
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada	DISKOMINFO

		jaringan intra pemerintah		
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	10%	DISKOMINFO
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	DISKOMINFO
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	DISKOMINFO
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	17,65%	DISKOMINFO
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	17,65%	DISKOMINFO
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5,88%	DISKOMINFO
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	29,41%	DISKOMINFO
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Ada	DISKOMINFO
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Ada	DISKOMINFO
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	37,04%	DISKOMINFO
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	6,98%	DISKOMINFO
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Ada	DISKOMINFO
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Ada	DISKOMINFO
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Masterplan E-Government Kab. Lima Puluh Kota; 2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2018	DISKOMINFO
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi	8,33%	DISKOMINFO

		dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	DISKOMINFO
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	16,53%	DISKOMINFO
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	DISKOPERINDAG
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		12. Persentase koperasi yang	Ada	DISKOPERINDAG

		diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota		
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Ada	DISKOPERINDAG
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Ada	DISKOPERINDAG
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Ada	DISKOPERINDAG
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Ada	DISKOPERINDAG
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Ada	DISKOPERINDAG
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Ada	DISKOPERINDAG
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Ada	DISKOPERINDAG
		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Ada	DISKOPERINDAG
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Terlaksana 2 kali	DPMPSTSP
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6.182	DPMPSTSP
		9. Laporan realisasi penanaman modal	139	DPMPSTSP
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	DPMPSTSP
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	16 Perusahaan	DPMPSTSP
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kota	24	DPMPSTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Kominfo
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian,	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Kominfo

		kesukarelawan dan kepeloporan pemuda		
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6.616 Orang	Dinas Kominfo
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Ada 1 Kali	Dinas Kominfo
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak bisa terlaksana	Dinas Kominfo
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak bisa terlaksana	Dinas Kominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Belum Terlaksana	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	376 Obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	35 Obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11 Obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,	464 Orang	Dinas Pendidikan dan

		standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Kebudayaan
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Belum Terlaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	105 Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1 Tim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	11 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	30 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0,09%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

		2. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tidak Terlaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	33,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	42,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	Tidak terlaksana (refocusing anggaran)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kota yang	30 Rumah Tangga	Dinas Perikanan

		sesuai NSPK		
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Belum Ada	Dinas Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang operasinal	3 Izin Usaha	Dinas Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	239 Kelompok	Dinas Perikanan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	467.361.800	Dinas Perikanan
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ada	Disparpora
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Ada	Disparpora
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Tidak Terlaksana	Disparpora
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kota	Tidak Ada	Disparpora
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Ada	Disparpora
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak Ada	Disparpora
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kota	Ada	Disparpora
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	Belum Terlaksana	Disparpora
		8. Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	Ada	Disparpora
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Belum Terlaksana	Disparpora
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	55 Unit	Distanhotbun
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	11 Unit	Distanhotbun
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	Tidak Terlaksana	Distanhotbun
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	20%	Distanhotbun
		4. Persentase prasarana yang digunakan	Tidak Ada	Distanhotbun
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota	464 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	Tidak ada	Distanhotbun
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak ada	
		2. Pemberdayaan masyarakat di	Tidak ada	

		daerah penyangga		
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak ada	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak ada	
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kota	Tidak Ada	DPMPSTP
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		a. Pusat perbelanjaan	-	
		b. Toko swalayan	-	
		2. Persentase penerbitan TDG	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	-	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	-	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	94,4%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	26,3%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan	Ada	Dinas Perindustria

		ditetapkannya menjadi PERDA		n, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	1.763	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota	Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan transmigrasi

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	42,75%	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	86,91%	Dinas Pendidikan
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	45,92%	Dinas Pendidikan
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,70%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung RS Rujukan	0,036%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	75,79%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	78,08%	Dinas Kesehatan

		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	79,36%	Dinas Kesehatan
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	50,14%	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,64%	Dinas Kesehatan
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	13,09 %	Dinas Kesehatan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,38%	Dinas Kesehatan
		10. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		11. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,7%	Dinas Kesehatan
		12. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	39,47%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten		Dinas PUPR
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten		Dinas PUPR
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		Dinas PUPR
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota		Dinas PUPR
		5. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Dinas PUPR
		6. Rasio kepatuhan IMB kota		Dinas PUPR
		7. Tingkat kemantapan jalan kota		Dinas PUPR
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Dinas PUPR
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban	5,71%	DLHPP

	Permukiman	bencana kota		
		2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota		DLHPP
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	55,8%	DLHPP
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,50%	DLHPP
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		DLHPP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		BPBD
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	146.097 orang	BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,56%	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	25,15%	Dinas Sosial
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5.746,3%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase Tenaga kerja yang	25,01%	Dinas

		ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota		Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	1. Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	8,45%	DP2KBP3A
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	5,94%	DP2KBP3A
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,30%	DP2KBP3A
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	18,37 %	Dinas Pangan
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Dinas PUPR
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Dinas PUPR
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		Dinas PUPR
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Dinas PUPR
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat		Dinas PUPR
		6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	69,13	DLHPP
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	11,65%	DLHPP
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	25%	DLHPP
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1. Perekaman KTP Elektronik		Disdukcapil
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA		Disdukcapil
		3. Kepemilikan akta kelahiran		Disdukcapil
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	33%	DPMDN
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	29%	DPMDN
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,48%	DP2KBP3A
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence	73,14%	DP2KBP3A

		Rate/mCPR)		
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,29%	DP2KBP3A
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kota	80%	Dinas Perhubungan
		2. V/C Ratio di jalan Kota	57%	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	0,710%	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	0,94%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	17,3%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kota	102,98%	DPMPSTP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,06%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,26%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		3. Peningkatan prestasi olahraga		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	78. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	43 OPD	Diskominfo
		79. Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	43 OPD	Diskominfo
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah		Diskominfo
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	60,95%	Dinas Pendidikan
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	7,31%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	34,05%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

		nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	11,67%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Data tangkap: 3.412 ton Data budidaya: 44.507,53 ton	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	87,78%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	1,17%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		80. Tingkat hunian akomodasi	449,68%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		81. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		82. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Distanholbun
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Distanholbun
28	Kehutanan	1. Kehutanan		
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten		DPMPSTP
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	26,3%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha		Dinas Perindustrian dan

		Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Tenaga Kerja
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
32	Transmigrasi	1. Transmigrasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	21,11%	Badan Keuangan
		2. Rasio PAD	4,96%	Badan Keuangan
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,72%	Badan Keuangan
		6. Opini Laporan Keuangan		Inspektorat/Badan Keuangan
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	BPBJ
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2,18%	BPBJ
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	58,60%	BPBJ
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40,11%	BKPSDM
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,78%	BKPSDM
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	BKPSDM
4	Manajemen	1. Deviasi realisasi belanja	-99,16 %	Badan Keuangan

	Keuangan	terhadap belanja total dalam APBD		
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-99,23 %	Badan Keuangan
		3. Assets management		Badan Keuangan
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,93 %	Badan Keuangan
5	Transparansi	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	75,79 %	DISKOMINFO
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	650 %	DISKOMINFO

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

2.3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel 2.3.1.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

2.3.1.2 Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yaitu dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagai berikut :

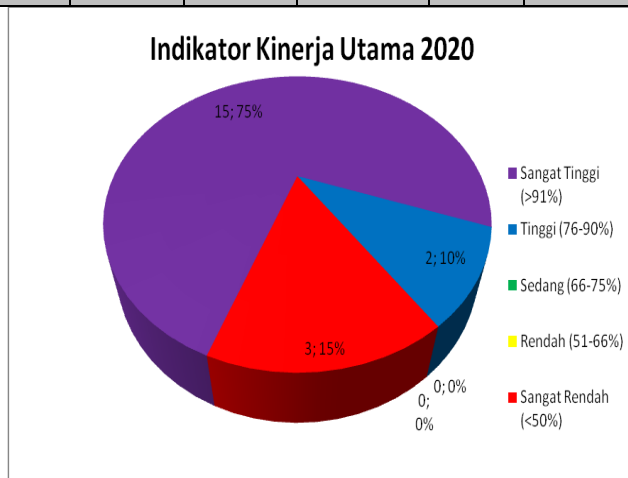
Tabel 2.3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET
1.1.	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Mesjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	%	66,47	65,67	98,80	Sangat Tinggi
1.2.	Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat	2.	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	%	70,00	137,14	195,91	Sangat Tinggi
1.3.	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	3.	Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	%	35,00	-	-	Sangat Rendah
2.1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	4.	Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB	%	28,50	27,32	95,86	Sangat Tinggi
		5.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	4,52	3,47	76,77	Tinggi
2.2.	Meningkatnya daya saing Produk Daerah	6.	Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	%	22,03	45,81	207,94	Sangat Tinggi

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET
2.4.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	7.	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	%	74,04	33,65	45,45	Sangat Rendah
		8.	Persentase peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara	%	20,67	26,71	129,22	Sangat Tinggi
3.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	37,08	(2,80)	(7,55)	Sangat Rendah
		10.	Rangking rata-rata nilai ujian Nasional	Nilai	6	-	-	
3.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	11.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,39	69,79	99,15	Sangat Tinggi
3.3.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	12.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,77	94,93	99,12	Sangat Tinggi
3.4.	Penurunan angka kemiskinan	13.	Angka kemiskinan	%	7,05	6,86	102,77	Sangat Tinggi
4.1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	14.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	73,00	69,87	95,71	Sangat Tinggi
4.2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	15.	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80,00	83,99	104,99	Sangat Tinggi
5.1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	16.	Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	Nagari	74	77	104,05	Sangat Tinggi
6.1.	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	17.	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Ha	18.984,40	17.002,80	89,56	Tinggi
		18.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	49,80	54,79	110,02	Sangat Tinggi
		19.	Persentase cakupan layanan air bersih	%	79,42	79,40	99,97	Sangat Tinggi
		20.	Rasio rumah layak huni	%	0,6954	0,6972	100,26	Sangat Tinggi
6.2.	Terjaganya Kualitas Lingkungan	21.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Skor	68,00	69,13	101,66	Sangat Tinggi
							97,48	

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator kinerja utama Bupati Tahun 2020, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator kinerja utama atau sebanyak 75,00% dalam kriteria “sangat tinggi”, 2 (dua) indikator atau sebanyak 10,00% masuk kriteria “tinggi”, dan 3 (tiga) indikator atau 15,00% masuk kriteria “**sangat rendah**”



Grafik. 2.3.1
Pencapaian IKU Bupati Tahun 2020

Indikator yang masuk kriteria sedang adalah indikator Ranging Rata-rata Nilai UN, sedangkan indikator yang masuk kriteria sangat rendah adalah Persentase Usaha Mikro Potensial menjadi Usaha Kecil, Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) dan Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Sedangkan hasil pengukuran terhadap sasaran strategis diperoleh data dari 14 (empatbelas) sasaran strategis, diperoleh 11 (sebelas) sasaran strategis atau sebanyak 78,57% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 1 (satu) sasaran strategis atau sebanyak 7,14% masuk kriteria “**tinggi**” dengan nilai rata-rata 76 s/d 90, 1 (satu) sasaran strategis atau sebanyak 7,14% masuk kriteria “**rendah**” dengan nilai rata-rata 51 s/d 65 serta 1 (satu) sasaran strategis atau sebanyak 7,14% masuk kriteria “**sangat rendah**” dengan nilai rata-rata < 50 . Sasaran yang masuk kriteria rendah adalah Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi.

2.3.2 Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :

MISI 1 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA

Sasaran Strategis 1.1
Meningkatnya Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ

Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya yang berdasarkan filsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan konsep nilai agama, adat dan budaya ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat tercermin dengan semakin berkurangnya pelanggaran norma agama, adat, budaya serta berkurangnya tindak kriminal.

Salah satu cara mengurangi pelanggaran norma agama, adat dan budaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Sasaran Strategis Meningkatkan Aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ. Diharapkan dengan adanya peningkatan terhadap aktifitas Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ, peningkatan kualitas perilaku dan akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik juga turut mengalami perubahan.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ” adalah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **98,80%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.2
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ	N/A	64,59	64,59	100,00	66,47	65,67	98,80
Rata-rata capaian					100,00			98,80

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ

Indikator Kinerja dari sasaran strategis pertama ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Masjid/mushalla/surau/MDA/TPQ, data ini di peroleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDTA dan Surau.

Untuk menghitung APK ini digunakan rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA \& Surau}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 APK anak yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau adalah 65,67. Berarti persentasenya mencapai 98,80% dari target yang telah ditetapkan. Data tahun 2020 ini jumlah anak



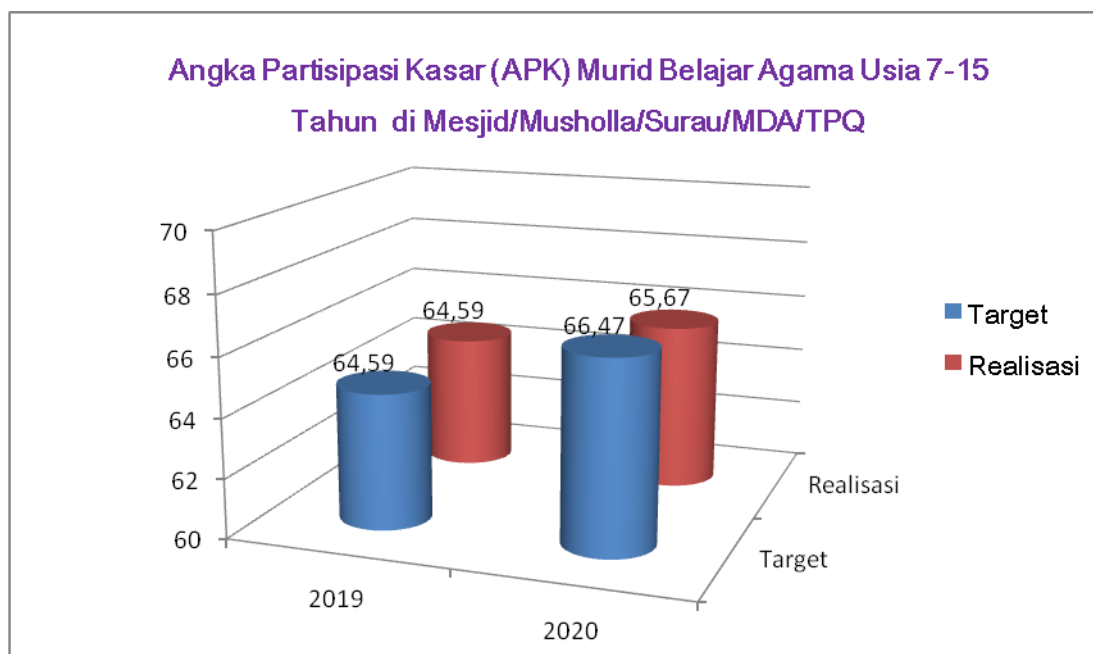
Gambar 2.3.1. Bupati Lima Puluh Kota memberikan jasa/honor imam, gharin dan guru mengaji Koto Tangah Simalanggang

yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 43.173 orang murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 34.181 orang, MDTA sebanyak 8.227 orang dan Surau 765 orang. Sementara itu dengan jumlah penduduk usai 7-15 tahun yaitu sebanyak 65.742 orang, maka dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun maka diperoleh APK sebesar 65,67%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Masjid/ mushalla/ surau/MDA/TPQ tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Masjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ



Secara rinci pada tahun 2020 jumlah lembaga dan murid yang belajar pada TPQ, MDTA dan Surau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2.1
Jumlah TPQ, MDTA dan Surau serta jumlah murid tahun 2020

No	Kecamatan	TPQ		MDTA		Surau	
		Lembaga	Murid	Lembaga	Murid	Lembaga	Murid
1.	Suliki	44	1.493	21	1.102	-	-
2.	Guguak	66	1.967	22	1.523	2	30
3.	Payakumbuh	81	3.403	9	707	2	23
4.	Luak	62	2.782	3	-	-	-
5.	Harau	124	5.560	6	343	16	621
6.	Pangkalan Koto Baru	66	3.044	1	152	-	-
7.	Kapur IX	56	3.108	2	255	-	-
8.	Gunuang Omeh	20	490	16	663	3	56
9.	Lareh Sago Halaban	106	3.691	6	546	-	-
10.	Situjuah Limo Nagari	45	2.417	1	32	1	35
11.	Mungka	51	2.391	8	687	-	-
12.	Bukik Barisan	55	1.726	28	1.384	-	-
13.	Akabiluru	42	2.109	12	833	-	-
	J U M L A H	818	34.181	135	8.227	24	765

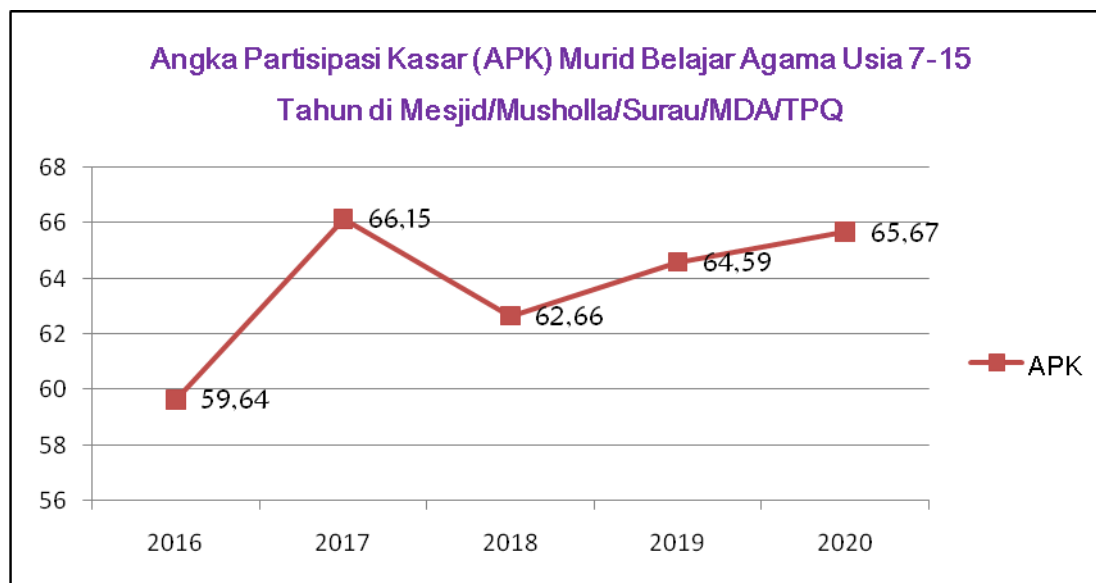
Sumber data : Bagian Kesra, 2020

Tabel di atas menggambarkan jumlah lembaga pendidikan agama dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak yaitu TPQ sebanyak 818 unit dengan jumlah murid 34.181 orang,

selanjutnya MDTA sebanyak 135 unit dengan jumlah murid 8.227 orang dan Surau sebanyak 24 unit dengan jumlah murid 765 orang. Sedangkan jumlah murid terbanyak yaitu di Kecamatan Harau mencapai 6.524 orang, karena jumlah penduduk terbesar juga di Kecamatan Harau.

Jika kita melihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau sebanyak 22.569 orang. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kab. Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut.

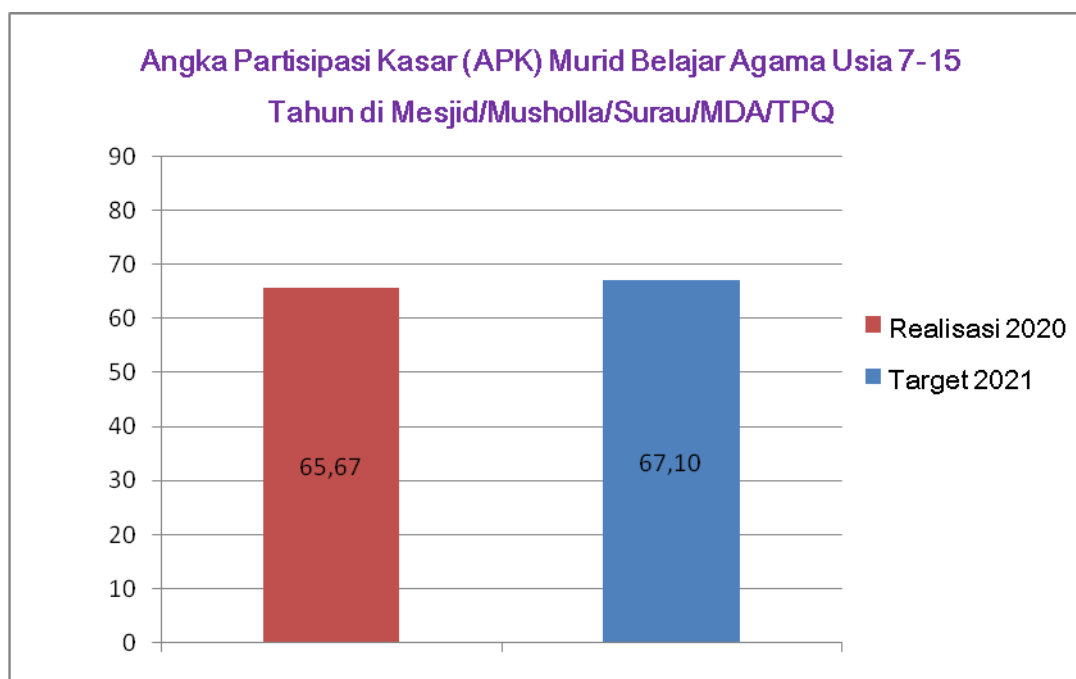
Data Perkembangan APK dalam lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Namun dari segi jumlah murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau selalu mengalami kenaikan. Berikut ini digambarkan grafik APK murid yang mengikuti pendidikan tahun 2016-2020 terlihat seperti berikut ini.



Grafik 2.3.2.1
APK Murid Belajar Agama 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ
Tahun 2016-2020

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kab. Lima Puluh Kota diantaranya melalui kegiatan Baliak Basurau yang melibatkan seluruh stakeholders mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten. Disamping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Dididikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten.

Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya Aktifitas Masjid / Musholla / Surau / MDA / TPQ” juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional. Perbandingan capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Mesjid / Mushalla / Surau / MDA / TPQ Tahun 2020 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.2.2
Perbandingan Realisasi APK Murid Belajar Agama 7-15 Tahun di Mesjid/Musholla/Surau/MDA/TPQ Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1. antara lain adalah :

1. Masih tingginya inisiatif dari guru/garin masjid untuk mendorong anak-anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti kegiatan Baliak Basurau yang ditunjang dengan honor garin/guru yang dianggarkan oleh Pemda melalui Bagian Kesra.
2. Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan

target maka perlu penambahan anggaran honor garin/guru untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

Sasaran Strategis 1.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	22.322.000	19.422.807	2.899.193	87,01
Peningkatan Pemahaman terhadap Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan	2.255.872.500	2.185.396.000	70.476.500	96,88
Peningkatan Pembinaan terhadap Kegiatan Keagamaan	32.443.000	31.843.523	599.477	98,15
JUMLAH	2.310.637.500	2.236.662.330	73.975.170	96,80

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.2.236.662.330,- dari anggaran sebesar Rp.2.310.637.500,- atau 96,80%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,80% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 1.2 **Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat**

Pengaruh globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris, semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang. Semuanya itu merupakan penyebab dari berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat.

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat” adalah Menurunnya kasus pelanggaran perda. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **195,91%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.2. disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.3
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	-	65%	105,88%	162,89	70%	137,14 %	195,91 %
Rata-rata capaian					116,67			162,89

Sumber data : SatpolPP, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda

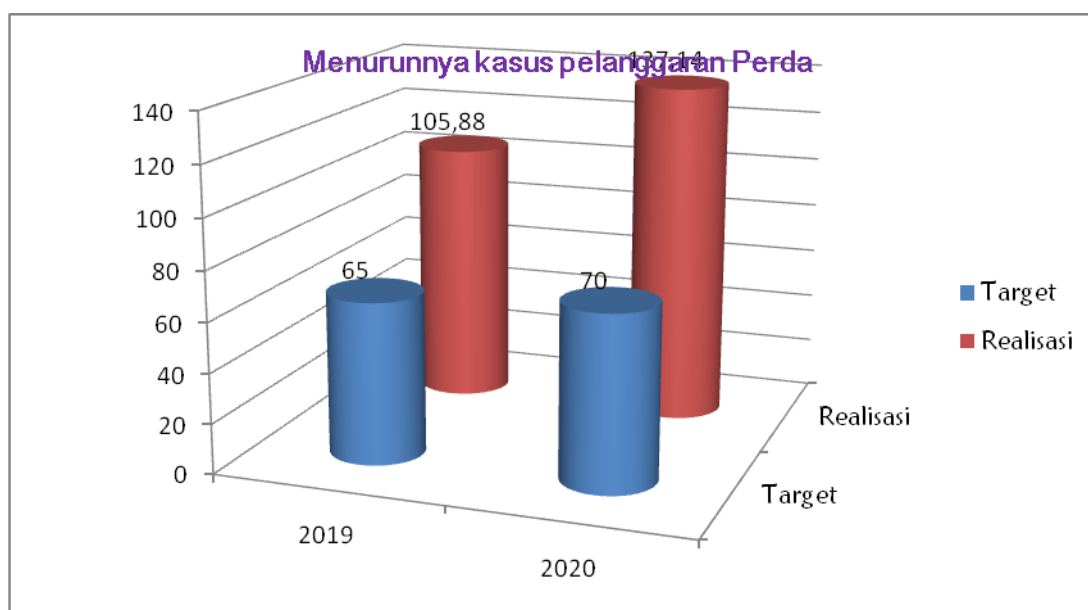
Menurunnya kasus pelanggaran perda dari target 70% terealisasi 137,14% atau mencapai 195,91%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian meningkat dimana pada tahun 2019 dari target 65% terealisasi 70%.

Untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{((2 \times \text{target}) - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100\%$$

Indikator Menurunnya kasus pelanggaran perda tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.3
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 150 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda / kasus sebanyak 134 yang terdiri dari :

Tabel 2.3.3.1
Kasus Pelanggaran Perda 2020

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat:	
	1. Penertiban baliho dan alat peraga kampanye di kecamatan	13
	2. Penertiban inhalen	21
	3. Penertiban Anak Sekolah	4
	4. Penertiban Cafe	7
	5. Penertiban Warung Kelambu	9
	6. Penertiban PSK	7
	7. Penertiban Minuman beralkohol/ Tuak	3
	8. Pengamanan Demo Omnibus Law	2
	Total Kasus Penegakan Perda	66

Sumber Data : Satpol PP, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah yang berpotensi melakukan pelanggaran perda pada tahun 2020 terdapat 66 kasus sedangkan kasus pelanggaran perda tahun 2019 sebanyak 210 kasus, maka untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda sebagai berikut :

Target untuk tahun 2020 adalah 150 objek kejadian. Untuk menghitung realisasi adalah $66 / 150 \times 100 = 44 \%$.

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{((2 \times 70) - 44)}{70} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{((140) - 44)}{70} \times 100\% \\ &= 137,14\% \end{aligned}$$



Gambar 2.3.2

Pengamanan Demo Mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law di Halaman Kantor Bupati Lima Puluh Kota

Didalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1 dimana berbunyi: Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan

tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Jika diperhatikan jumlah kasus pelanggaran perda yang ditemukan dilapangan oleh Tim Penegakan Perda pada tahun 2019 memang lebih banyak dari tahun 2018, ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah berhasil menangani kasus pelanggaran-pelanggaran terhadap perda dan merupakan kinerja yang memuaskan dari OPD terkait.

- 1) Penindakan terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :
 1. Penertiban PSK yang dilakukan sebanyak 9 x di kecamatan Pangkalan, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Payakumbuh dengan hasil tertangkapnya 7 PSK dan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi Andam dewi Solok.

2. penertiban inhalen sebanyak 7 x di kecamatan Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguk dan dilakukan Pembinaan terhadap pelajar pengisap lem (21 Kasus)
3. Penertiban miras/tuak sebanyak 150 liter dan Pemberian Teguran kepada Pengusaha Tuak (3 kasus) di Kecamatan Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.
4. Pemberian teguran terhadap usaha Warung Kelambu di bulan ramadhan, pembeli yang tidak pakai masker disuruh pulang di 10 kecamatan (9 kasus)
5. Penertiban baliho dan alat peraga kampanye di 13 kecamatan sebanyak 2000 baliho.
6. Penertiban anak sekolah yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah di 13 kecamatan 4 Kasus dengan jumlah siswa 20 orang.
7. Penertiban Cafe remang remang sebanyak (7 kasus) masalah : mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak memiliki izin usaha.



Gambar 2.3.3

Penyegelan warung yang berada di perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

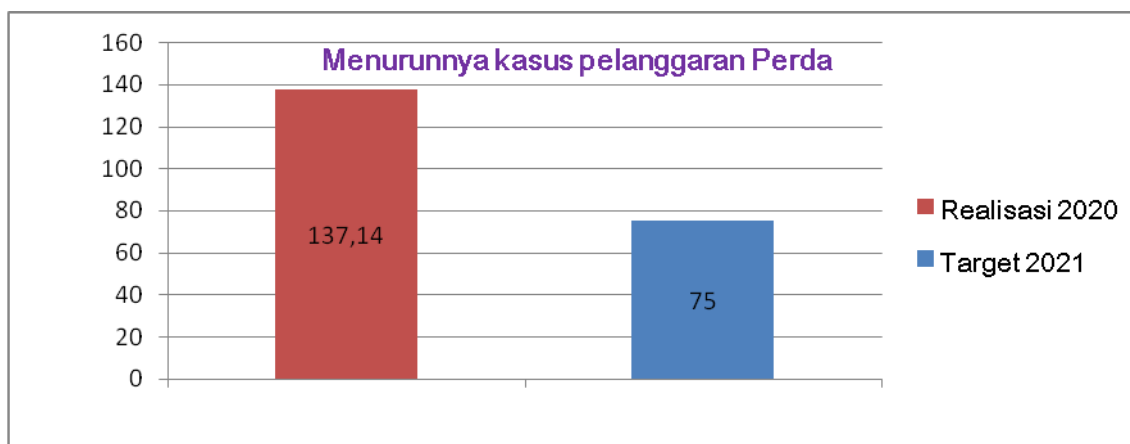
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.624.166.000,00 dari anggaran sebesar Rp.622.130.600,00 atau 99,67%. dari dana diatas Rp.350.000.000,- digunakan untuk Pengamanan pemilu Kepala Daerah 1. Pengamanan Pendaftaran Calon Kepala Daerah 4 x, Kampanye Calon Kepala Daerah 90 x, Pengamanan Debat 3 x, dan pengamanan

kotak suara Sebelum dan sesudah Pemilu di 13 Kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.3. antara lain adalah :

Karena terjadi perpindahan dana untuk Covid 19 di Satpol PP menyebabkan tidak bisa melaksanakan kegiatan, yang terlaksana di kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan digunakan untuk Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Capaian indikator Menurunnya kasus pelanggaran perda tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.3.1
Perbandingan indikator menurunnya kasus pelanggaran Perda
tahun 2020 dengan target akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Menurunnya kasus pelanggaran perda telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pengkajian yang lebih mendalam dalam penetapan indikator ini serta penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Menurunnya kasus pelanggaran perda selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.3.2
Menurunnya kasus pelanggaran Perda Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis 1.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pemeliharaan Trantib Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	99.185.900	6.740.000	92.445.900	6,80
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.701.850.277	2.437.517.100	264.333.177	90,22
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	57.117.000	57.009.000	108.000	99,81
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	28.378.000	28.368.000	10.000	99,96
JUMLAH	2.886.531.177	2.529.634.100	356.897.077	87,64

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.2.529.634.100,- dari anggaran sebesar Rp.2.886.531.177,- atau 87,64%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 195,91% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 2 : MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH

Sasaran Strategis 2.1
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dan Koperasi

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada diatas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 4,8%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan dan pasar, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk strategi penguatan UMKM.

Satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Mikro (UKM) adalah ketersediaan modal dan sulitnya akses permodalan terhadap lembaga keuangan bank sebagai pemberi kredit modal usaha. Selama ini masih banyak para pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kredit modal usaha dari bank keliling atau dari para pelepas uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan memberatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan koperasi masih sangat rendah terhadap pemberdayaan permodalan UKM, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya peran koperasi terhadap kemajuan UKM; 1) masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan jumlah UKM, 2) masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berkoperasi, 3) rendahnya kemampuan SDM koperasi baik dari sisi pemahaman tentang manfaat berkoperasi maupun dalam pengelolaan manajemennya; 4) adanya stigma negative dari masyarakat

yang menimbulkan kurangnya kepercayaan dari pelaku UKM terhadap koperasi. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan pelaku UKM sedikit sekali yang tergabung dalam wadah koperasi sehingga koperasi masih rendah peranannya dalam membantu pengembangan UKM melalui penyediaan modal Usaha. Berdasarkan kondisi dan korelasi antara usaha mikro dan koperasi tersebut di atas, perlu adanya penguatan sektor usaha mikro dan koperasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi” adalah “Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **0%** dan termasuk kriteria “**sangat rendah**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil	N/A	30%	10%	33,33	35%	0%	0
Rata-rata capaian					33.33			0

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Usaha Mikro Yang Potensial Menjadi Usaha Kecil

Indikator persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil yang di targetkan pada tahun 2020 adalah 35 Usaha Mikro dengan target capaian sebesar 35%. Namun target ini sangat susah untuk dicapai. Sebagai contoh pada tahun 2019 dari 30% target usaha mikro



Gambar 2.3.5

Pelatihan Aplikasi Pemasaran Berbasis IT
Bagi Pelaku Usaha Mikro

potensial yang naik kelas menjadi usaha kecil, hanya bisa mencapai 10% atau sekitar 10 unit usaha. Hal ini ditopang oleh dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan mencapai Rp.2.269.239.350,-. Namun pada tahun anggaran 2020 terjadi kejadian luar biasa yang melanda Indonesia dan dunia yaitu bencana Covid19 dimana terjadi refocusing anggaran program dan kegiatan untuk penanganan bencana ini. Hal ini juga terjadi pada anggaran yang digunakan untuk mencapai target indikator ini, dimana hampir seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dialihkan untuk penanganan covid ini. Konsekuensi dari pengalihan anggaran ini adalah pencapaian target kinerja untuk usaha mikro potensial menjadi usaha kecil tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi target kinerja ini pada tahun tersebut sebesar 0%. Pada perencanaan anggaran tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mencoba untuk mengejar target kinerja tahun anggaran 2020 dengan menaikkan ambang batas target kinerja dari 30% menjadi 60% agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dapat tercapai 100% pada akhir masa RPJMD tersebut. Namun dengan kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi, anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan target kinerja yang 60%. Sehingga daerah tidak mungkin bisa mencapai target kinerja 100% pada masa akhir jabatan kepala daerah (RPJMD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016-2021).



Grafik 2.3.4
Persentase Usaha Mikro Yang Potensial Menjadi Usaha Kecil

Pada indikator kinerja persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2020, antara lain sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut :

- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

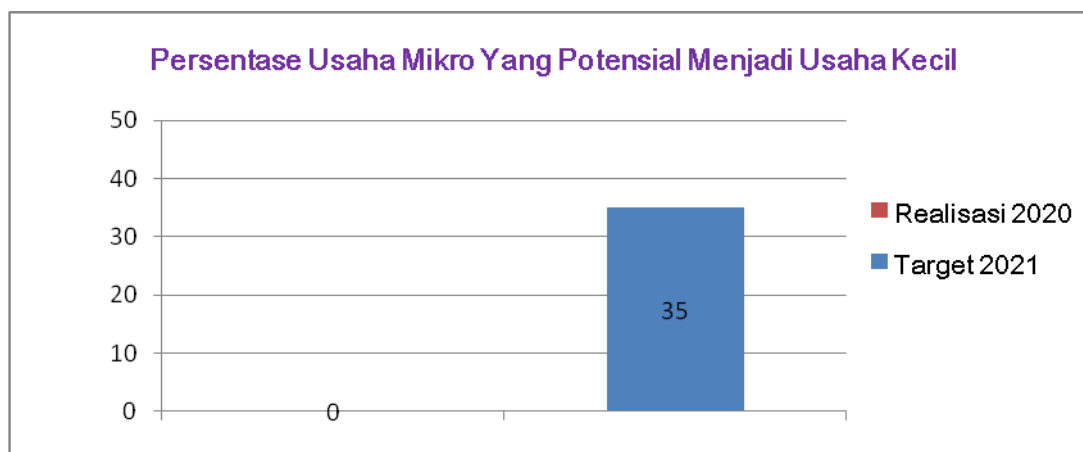
Dalam pencapaian target kinerja usaha mikro potensial menjadi usaha kecil ada indikator-indikator yang harus dipenuhi sehingga suatu UMKM bisa dikatakan naik kelas. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Total penjualan dan aset yang dimiliki haruslah meningkat.
2. Usaha harus menjadi formal.
3. Jumlah karyawan meningkat.
4. Pelanggan yang dilayani meningkat.
5. Meningkatnya pajak yang dibayarkan.
6. Kualitas sumber daya manusia harus bertambah.
7. Produksi batang harus meningkat.
8. Administrasi dan keuangan meningkat.

9. Dana yang di akses dari perbankan meningkat.

Dari kesembilan indikator tersebut yang paling susah untuk diukur adalah indikator yang pertama yaitu total penjualan dan aset yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah termasuk kategori mikro atau sudah kategori kecil, karena salah satu kriteria perbedaan antara usaha mikro dan usaha kecil adalah terletak pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Ditambah dengan dialihkannya seluruh anggaran program yang mendukung pelaksanaan pencapaian target kinerja dari sisi pengawasan dan fasilitasi UMKM sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap Usaha kecil potensial mana saja yang sudah naik kelas pada tahun 2020. Sementara kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus masih bisa dilaksanakan namun dengan target yang berbeda dimana tidak mendukung 100% terhadap upaya-upaya dalam mendorong naik kelasnya suatu usaha.

Capaian indikator persentase Usaha Mikro Yang Potensial tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.4.1
Perbandingan Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Usaha Mikro Yang Potensial menjadi Usaha Kecil belum memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan persentase Usaha Mikro Yang Potensial menjadi Usaha Kecil selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.4.2
Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.1. antara lain adalah :

1. belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah termasuk kategori mikro atau sudah kategori kecil, karena salah satu kriteria perbedaan antara usaha mikro dan usaha kecil adalah terletak pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha
2. Kurang akuratnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tentang data aset dan omsetnya.
3. Masih rendahnya skill dan SDM pelaku usaha.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha.
5. Pemasaran produk UMKM masih terbatas.
6. Peralatan usaha masih sederhana.
7. Masih kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi.
8. masih kurang dan terbatasnya SDM personil yang mampu menjadi manajer koperasi karena belum adanya standar penghasilan yang jelas oleh koperasi yang bersangkutan. Banyak BPR dan LKMA yang saat ini masih belum memenuhi persyaratan berbadan hukum. Sebagian LKMA berkeberatan untuk ditingkatkan badan hukum nya karena seiring peningkatan status maka kewajiban dan tanggung jawab juga meningkat terkait masalah keuangan (iuran-iuran).

Mengingat rendahnya capaian indikator sasaran ini, diperlukan upaya-upaya yang telah dilakukan agar dapat dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Menganalisis data dan mengklasifikasikan UMKM sesuai criteria yang ditentukan Undang undang.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui kegiatan Bimtek, sosialisasi dan pelatihan di bidang manajemen, pemasaran, kewirausahaan maupun pelatihan Vocational bagi pelaku usaha mikro, dengan narasumber terekomendasi nasional/Daerah maupun Narasumber aplikatif.
3. Ikut mempromosikan produk UMKM dengan mengikuti kegiatan promosi baik hanya mengirim contoh produk maupun mengikutsertakan pelaku UMKM dan giat promosi tersebut, seperti Pameran, UKM Day, Bazaar, Expo dan lainnya.
4. Melakukan giat temu usaha, pelaku UMKM dengan pemilik modal ataupun mitra bisnis lainnya dalam upaya meningkatkan jaringan pemasara maupun penyediaan bahan baku serta penambahan modal.
5. Melakukan Keiatan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan mutu produk dan legalitas usaha, dengan membantu pelaku Usaha memperbaiki Packaging, penglabelan dan peningkatan sanitasi bagi Usaha di bidang Kuliner.
6. Menfasilitasi permasalahan pelaku Usaha Mikro melalui penyediaan tenaga ahli dan pendampingan serta upaya penyediaan peningkatan teknologi informasi, sarana maupun prasarananya.
7. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha yang akan diadakan dasar dalam membuat kebijakan yang tepat bagi pengembangan UKM selanjutnya.

Sasaran Strategis 2.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	182.700.000,-	173.140.000,-	9.560.000	94,77
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	232.851.000,-	207.433.600,-	25.417.400	89,08
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	276.997.722,-	272.684.822,-	4.312.900	98,44
JUMLAH	692.548.722,-	653.258.422,-	39.290.300	94,33

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.653.258.422,- dari anggaran sebesar Rp.692.548.722,- atau

94,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 0% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 2.2

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian dan perikanan adalah Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB dan Persentase pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” adalah “Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB”, “Persentase pertumbuhan sektor peternakan terhadap PDRB” dan “Persentase pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai **131,64%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.5
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB	30,97	27,32	27,32	100,00	28,50	27,32	95,86
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,47	3,47	100,00	4,52	3,47	76,77
Rata-rata Capaian					100,00			86,31

Sumber data : BPS 2020 (*) = angka sementara

1. Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan

menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan



Gambar 2.3.7

Registrasi Kandang Petenak Tahun 2020

peternakan, selama tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.

Capaian Indikator Kinerja

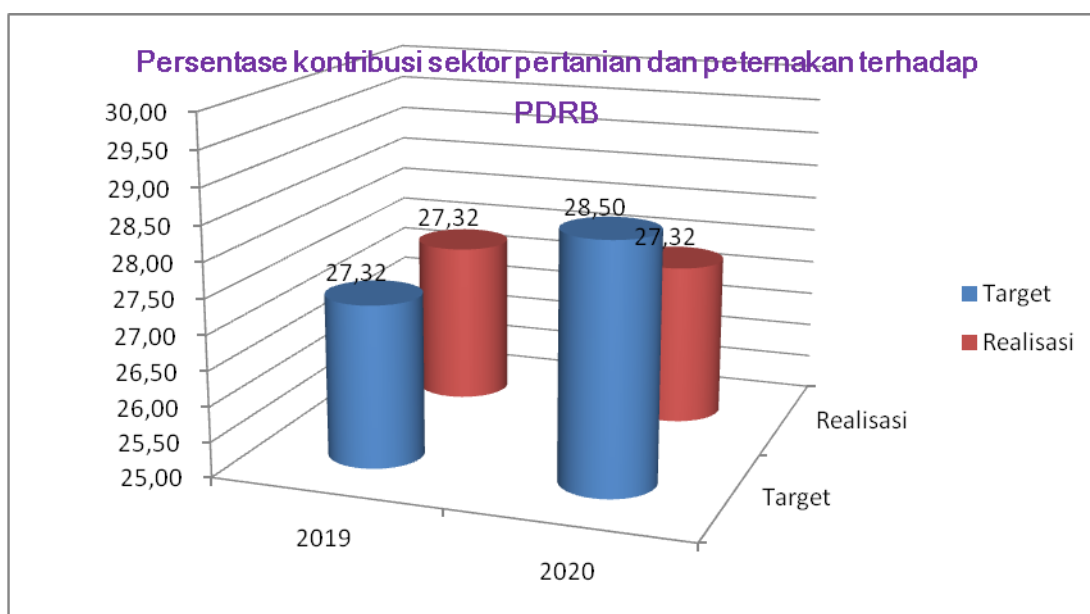
“Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB” sebesar 27,32% dari target 28,50% atau sebesar 95,86%.

Angka Capaian sebesar 27,32% di atas masih merupakan capaian tahun lalu, karena Capaian tahun 2020 yang telah dirilis oleh BPS sebesar 33,18 merupakan

angka gabungan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan angka per sub sektoral baru akan dirilis pada bulan April 2020.

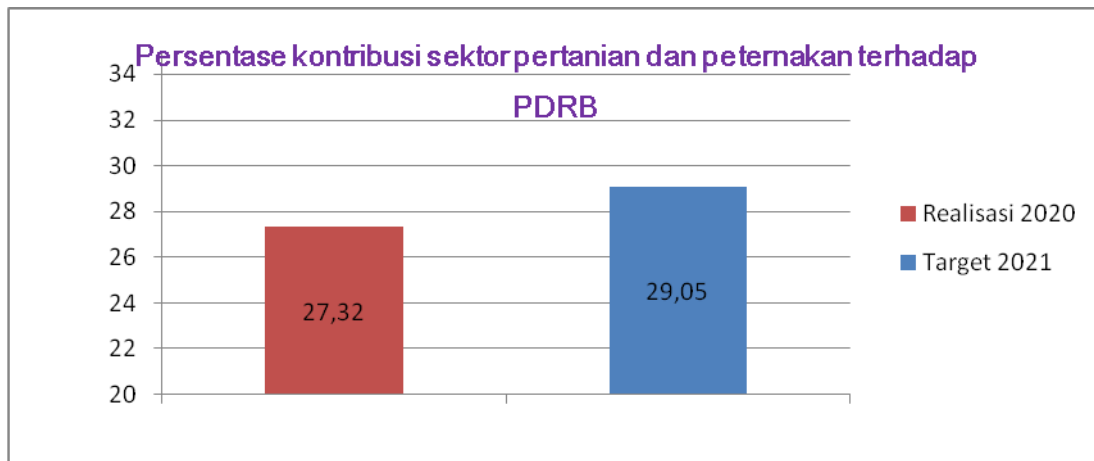
Jika dilakukan perbandingan selama 5 (lima) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase mengalami penurunan disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi.

Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB Tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



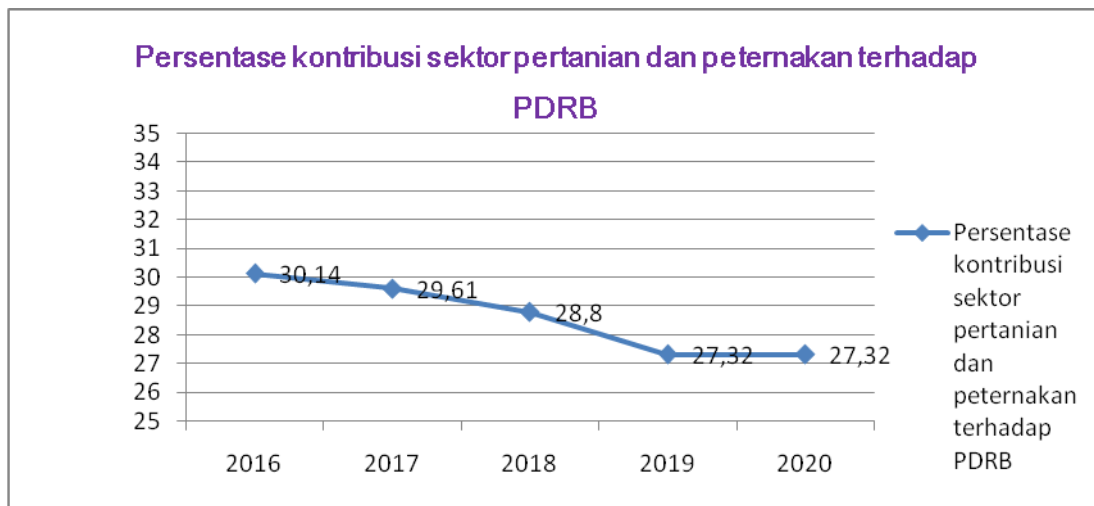
Grafik 2.3.5
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.5.1
Perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

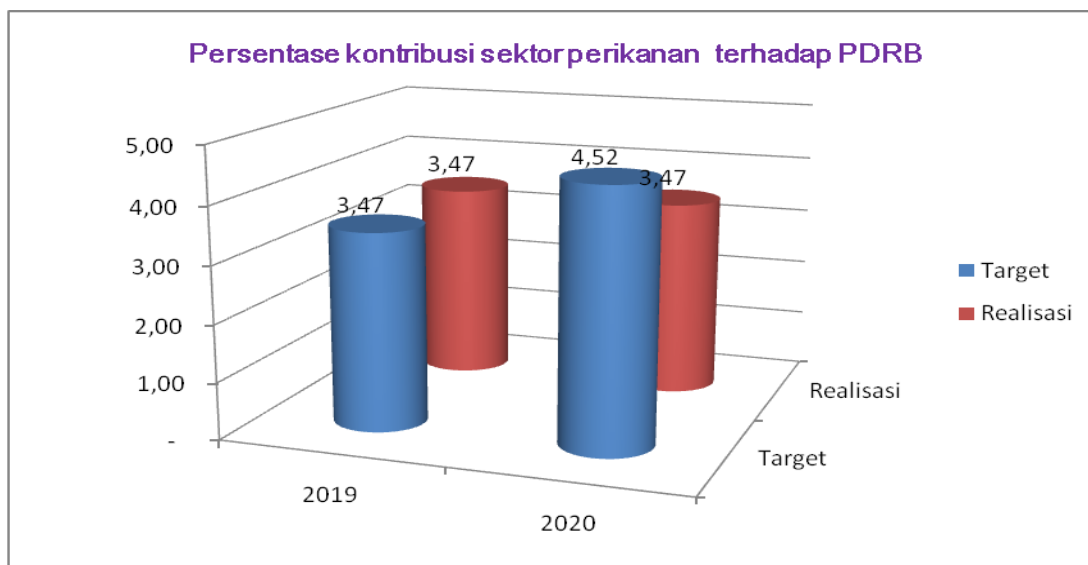


Grafik 2.3.5.2
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2016-2020

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB hanya mencapai 3,47% dari target sebesar 4,52% (76,77). angka capaian ini juga merupakan angka capaian tahun 2019 yang lalu, karena alasan yang sama dengan capaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan.

Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.6

Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.

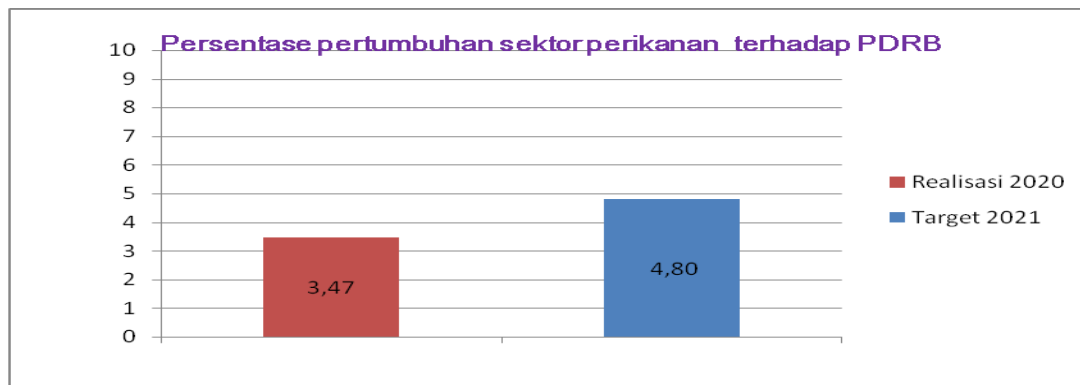


Gambar 2.3.8
Restocking Ikan di Perairan Umum

Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2020 target 4,52 % dengan realisasi 3,47 %. Realisasi ini masih di bawah target IKU Kepala daerah.

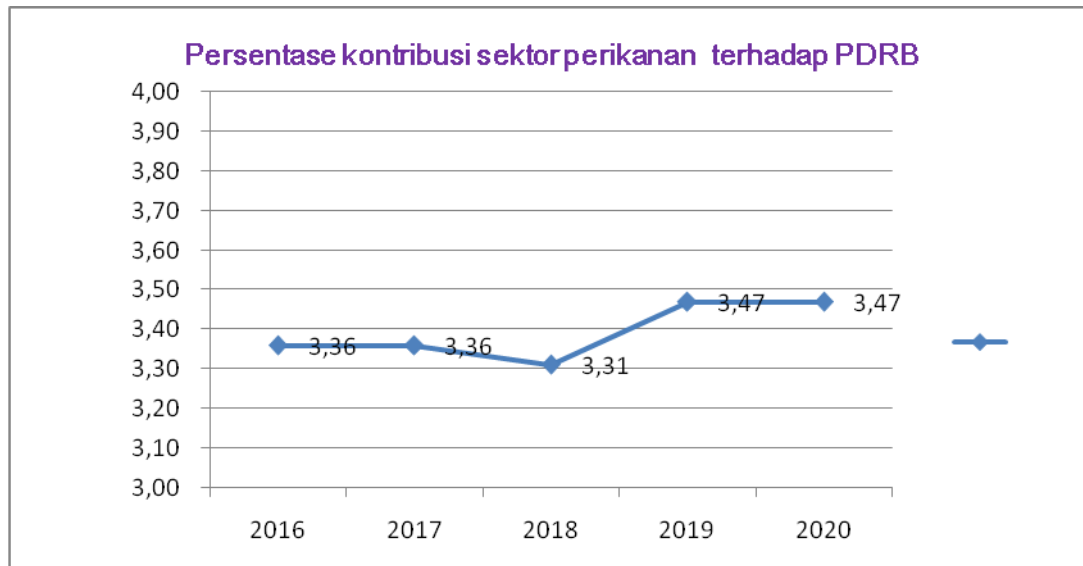
Capaian indikator Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2020 jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.6.1
Perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah-langkah yang lebih baik tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.6.2
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.2. antara lain adalah :

1. Peningkatan produksi beberapa komoditi pertanian, peternakan dan perikanan antara lain :

- a. Produksi tanaman padi naik sebesar 3,84% dari 237.028,00 menjadi 267.971,50 ton.
 - b. Produksi tanaman jagung naik sebesar 15,77% dari 41.353,90 menjadi 45.511,98 ton.
 - c. Peningkatan populasi sapi potong dari 42.704 ekor menjadi 45.071 ekor.
 - d. Peningkatan produksi daging sapi potong dari 1.091.904 Kg menjadi 1.180.290,58 Kg.
 - e. Peningkatan produksi daging ayam buras dari 422.327 Kg menjadi 475.293,28 Kg.
 - f. Peningkatan produksi budidaya ikan dari 44.218,91 ton menjadi 44.507,53 ton.
 - g. Peningkatan produksi benih ikan dari 440.990.000 ekor menjadi 445.695.800 ekor.
 - h. Peningkatan produksi ikan hias dari 6.490.000 ekor menjadi 7.054.400 ekor.
2. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani, kelompok ternak, maupun kelompok pembudidaya ikan sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
 3. Adanya pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
 4. Adanya serangkaian kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan antara lain :
 - Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, berupa pertemuan koordinasi Tim Pengawas Pupuk secara berkala, rapat evaluasi monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan pembagian kartu tani di 13 Kecamatan.
 - Sekolah Lapang padi Salibu
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk sebanyak 3 Kelompok tani yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Akabiluru Nagari Suayan di Kelompok tani Sikoci, Kecamatan Lareh Sago Halaban Nagari Halaban di Kelompok tani Murah Hati dan Kecamatan Gunuang Omeh Nagari Talang Maur di Kelompok tani Saiyo Pantang Mundur, dan Bimbingan teknis tanaman buah alpukat dan durian di Kecamatan Mungka.
 - Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu Tanaman Cabe sebanyak 2 kelompok yang dilaksanakan di kelompok tani Makmur Nagari Ampalu

Kecamatan Lareh Sago Halaban dan kelompok tani Mudiak Saiyo di Nagari Andiang Kecamatan Suliki.

- SL-GAP Tanaman Tembakau sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Ambacang Sakato Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari, SL PHT tanaman Tembakau sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Carano Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, dan Bantuan saprodi tanaman tembakau sebanyak 10 kelompok tani, dan Bantuan Alsintan cultivator sebanyak 1 unit pada Kelompok Tani Gema Tani Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- Bimbingan Teknis Penangkar Benih Tanaman Pangan
- Sosialisasi, Pelatihan dan Monitoring Pembinaan Gapoktan/LKMA seKabupaten Lima Puluh Kota
- Sekolah Lapang pengelolaan Irigasi (IPDMIP) di 8 Kelompok Tani
- Rehabilitasi tananaman Kakao sebanyak 2 Ha yang dilaksanakan pada kelompok tani pada kelompok tani Sapayuang Basamo Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Rehabilitasi tanaman kopi sebanyak 2 Ha yang dilaksanakan pada kelompok tani pada kelompok tani Puncak Saruai Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, dan Pengembangan tanaman kopi sebanyak 1 ha yang dilaksanakan pada kelompok tani Bunga Seruni Nagari Kototinggi Kecamatan Gunuang Omeh.
- Pengadaan Traktor Roda 2 8 unit untuk 8 Kelompok Tani
- Sekolah Lapang Pengendalian hama Terpadu (SL-PHT) di kelompok tani Hampan Munggu Ateh, Nagari Sariiek Laweh, Kecamatan Akabiluru, gerakan pemangkasan dan pengendalian hama penyakit pada tanaman kakao sebanyak 1 kelompok tani di kelompok tani Satampang Baniah, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau.
- SL iklim tanaman padi dan palawija pada Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak, SL PHT tanaman padi pada Kelompok Tani Bukik Palano Sakato Nagari Taram Kec. Harau, Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan sebanyak 3 lokasi di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban, Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan, dan Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX, Pembentukan dan pembinaan Posko PHT sebanyak 2 lokasi, di Nagari Batu Balang Kec. Harau dan Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh, Bantuan saprodi padi inbrida seluas 25 Ha untuk 5 kelompok

tani di Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX, Bantuan Saprodi jagung hibrida seluas 60 Ha. untuk 10 kelompok tani di Kec. Situjuah Limo Nagari, 10 kelompok tani di Kec. Mungka, dan 11 Kelompok tani di Kec. Lareh Sago Halaban

- Pelatihan pembuatan pupuk pada Kelompok Tani Pemuda Setia Jorong Balai Rupi Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Pengadaan Sarana Pengolahan Pupuk Organik untuk kelompok tani yang lokasinya terletak di Kecamatan Suliki (Kelompok Tani Dagang Saiyo), Kecamatan Akabiluru (Kelompok Tani Annisa) dan Kecamatan Harau (Gapoktan Saiyo)
 - Bantuan Bibit tanaman gambir 10.185 batang untuk 5 Kelompok Tani dan Bantuan Bibit kopi arabika 8.041 batang untuk 8 Kelompok Tani.
 - Pembangunan Jalan Usaha tani di 6 Kelompok Tani, Jalan Produksi di 13 Kelompok Tani, pembangunan JITU 6 unit, sumur bor 1 unit, Pembangunan Jaringan Irigasi Desa pada 5 Kelompok Tani, Pembangunan Dam parit pada 2 Kelompok Tani, Pembangunan embung pada 3 Kelompok Tani dan Rehab Embung pada 1 Kelompok Tani.
5. Adanya serangkaian kegiatan Untuk peningkatan nilai tambah komoditi pertanian antara lain :
- Kegiatan Pasar tani yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Diharapkan melalui kegiatan pasar tani ini dapat memotivasi kelompok tani dan hasil yang di dapat dari hasil penjualan ini dapat membantu perekonomian anggota petani sekitar dan terpenuhinya kebutuhan konsumen dengan harga yang terjangkau.
 - Bimbingan teknis Pengolahan Manggis dan cabai yang melibatkan kelompok pengolahan hasil pertanian dan Narasumber dari Politeknik Pertanian. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian.
 - Kegiatan Temu Usaha yang memfasilitasi pertemuan antara kelompok UP3HP di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pelaku usaha dari PT. Esfhar Buah Segar. Melalui kegiatan ini diharapkan terbuka peluang pasar penyaluran komoditi.
 - Bantuan Alat pengolahan dan alat pasca panen tanaman hortikultura terbagi di 7 Kelompok tani
 - Bimbingan Teknis Perkebunan, antara lain adalah Bimbingan teknis tanaman kakao pada kelompok tani Simpatic Nagari Sitanang Kecamatan

Lareh Sago Halaban, Bimbingan teknis tanaman gambir pada Kelompok Tani Baruah Congkong Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka, Bimbingan teknis tanaman kopi pada Kelompok Tani Suka Maju Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Bimbingan teknis pengolahan tanaman kakao sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Nagari Baiyo Batido Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Bimbingan teknis pengolahan tanaman gambir sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Suka Maju Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan petani pakar dan nara sumber pihak Politeknik Pertanian.

- Bimbingan Teknis Pengolahan Jagung sebanyak 1 kali, ,Pertemuan Monev UP3HP Tanaman Pangan sebanyak 1 kali dan Permasalahan yang teridentifikasi adalah berkurangnya pemasaran karena terdampak pandemic Covid-19. dan Temu Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 kali yang terdiri dari kelompok UP3HP dengan narasumber dari Budiman Swalayan dan Niagara Swalayan Payakumbuh.
 - Sekolah Lapang Good Handling Product (SL GHP) Gambir pada Kelompok Tani Sago Karya Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban.
6. Meningkatnya komoditi peternakan disebabkan adanya program SIKOMDAM yang merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas terkait secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, Program Upsus SIWAB yang ada.
 7. Adanya Sosialisasi pakan alternative ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah sumber dayanya dalam hal pakan ternak.
 8. Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.

Sasaran Strategis 2.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	572.678.200,-	563.042.375,-	9.635.825,-	98,32
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	3.418.133.850,-	3.065.086.819,-	353.047.031,-	89,67
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	110.442.000,-	106.081.200,-	4.360.800,-	96,05
Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	1.499.946.000,-	1.497.595.975,-	2.350.025,-	99,84
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	291.687.950,-	205.015.027,-	86.672.923,-	70,29

Peningkatan Kesejahteraan Petani	562.618.350,-	562.035.374,-	582.976,-	99,90
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	488.402.620,-	485.233.020,-	3.169.600,-	99,35
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	12.659.550,-	12.659.550,-	-	100
Pengembangan Budidaya Perikanan	2.145.840.600,-	2.035.518.028,-	110.322.572,-	94,86
Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	58.916.807,-	58.804.900,-	111.907,-	99,81
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	45.770.000,-	42.863.761,-	2.906.239,-	93,65
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	123.409.700,-	122.794.358,-	615.342,-	99,50
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	85.509.100,-	85.061.450,-	447.650,-	99,48
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	58.339.700,-	58.298.000,-	41.700,-	99,93
JUMLAH	9.474.354.427,-	8.900.089.837,-	574.264.590,-	93,94

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.8.900.089.837,- dari anggaran sebesar Rp.9.474.354.427,- atau 93,94%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,31% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 2.3 **Meningkatnya Daya Saing Produk Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi.

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar

produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya daya saing produk daerah” adalah “Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat” dan “Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya daya saing produk daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **126,70%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.6.
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase industri kecil menengah (IKM) sehat	N/A	22,03%	23,19%	105,27	22,03%	45,81%	207,94
2.	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	N/A	49,04%	62,5%	127,45	74,04%	33,65%	45,45
Rata-rata Capaian					116,36			126,70

Sumber data : Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

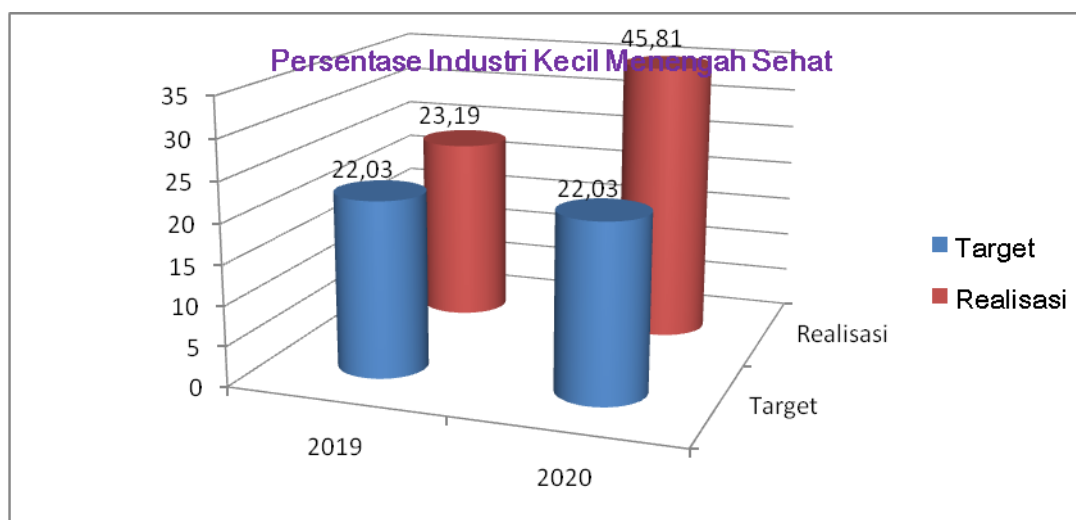
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat

IKM sehat adalah IKM yang memiliki : 1) aspek perizinan legalitas usaha lengkap; 2) memiliki tata kelola (manajemen) baik; dan 3) memiliki bisnis / kemampuan menghasilkan produk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang dimaksud aspek perizinan legalitas usaha yang minimal harus dimiliki IKM adalah Izin Usaha Industri (IUI), PIRT (untuk IKM pengolahan makanan), Halal (untuk IKM pengolahan makanan) dan Merk. IKM memiliki tata kelola (manajemen) baik adalah tata kelola IKM yang orientasi bisnis, serta kemampuan produksi meningkat sesuai dengan permintaan pasar. Pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 22,03 % yaitu sebanyak 113 IKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota akan disehatkan. Realisasi IKM sehat pada tahun 2020 adalah sebesar 45,81% atau 235 IKM dan realisasi telah tercapai melebihi target. Pada tahun 2020 tidak banyak usaha dilakukan pemerintah dalam rangka menyehatkan IKM melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan / monitoring terhadap IKM. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19, yang mengakibatkan refocussing anggaran yang diarahkan untuk penanganan dan pemulihan Covid 19. Kegiatan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan IKM dan bantuan/ fasilitasi peralatan usaha ditiadakan. Tidak banyak pembinaan terhadap IKM melalui program dan kegiatan pemerintah daerah, namun pembinaan IKM dilakukan melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi masyarakat yang terkena dampak covid, salah satunya adalah IKM dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga pembinaan dan pengawasan masih tetap dilaksanakan. Dan IKM masih tetap eksis berusaha / memproduksi.

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKM sehat pada tahun 2019, realisasi IKM sehat sebesar 23,19% atau 119 IKM. Kondisi ini lebih mencapai target dari 20,47% atau 113 IKM yang ditetapkan untuk tahun 2019. Target IKM sehat diakhir RPJMD adalah 100 % atau sebanyak 513 IKM. Sampai pada tahun 2020 ini telah tercapai 82,46% atau 423 IKM. Pada tahun 2021 masih sebanyak 90 IKM yang mesti disehatkan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan IKM yang ditopang oleh program dan kegiatan di OPD.

Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.7
Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain : Gambir, Kakao, Ikan Gurami Sago, Jesigo, Tenun, Telur ayam, dan Lembah Harau. Oleh karena itu pengembangan dan pembinaan industri diarahkan pada pengembangan Produk Unggulan Daerah. Data Jumlah IKM Sehat tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.6.1
Daftar Nama-nama IKM Sehat Tahun 2020

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
1	INTAN CITRA DEWI	DAPUR MUDIAR	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	MUNGKA	Mungka
2	ARIUS	DEPOT IKHLAS	Industri Makanan	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	Jorong Seberang Parit	Akabiluru
3	BEVILIA WANGI PUTRI	ISTANA RENDANG	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Jl. Raya Mungka Tengah Jambak, Belakang SDN 02 Mungka	Mungka

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
4	CAHAYA IMAM MAULANA	CIKAL	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Padang Jopang	Guguak
5	ATIKA PRESILIA	DAPOER BUNINA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Pulutan	Harau
6	SYAFNI YELVI SISKAWATI	Usaha Kue Kering "AYESHA"	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Jorong Kubu Gadang, Kenagarian T aeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kab.	Payakumbuh
7	MISFA	USAHA KIPANG BERSAS	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Jorong Padang Ambacang	Situjuah Limo Nagari
8	RATNA DEWI	UKM Gula Aren Ratna Dewi	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	Batang Linjuang, Kel. Tanjung Bungo, Kec . Suliki, Lima Puluh Kota	Suliki
9	EFRIAL	UKM Gula Aren Efril	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	Lancaran, Tanjung Bungo, Suliki, Lima Puluh Kota	Suliki
10	MAZNA HAYATI	Dapur Hayati	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Sikabu-kabu T j. Haro. PD. Panjang, kec . Luak, kabupaten Lima Puluh Kota	Luak
11	SUSILAWATI	BUMBU GULAI KAMBING	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	JORONG PADANG KUNIAN, KENAGARIAN SITUJUAH GADANG, KECAMATAN	Situjuah Limo Nagari
12	DONAL OKTARIO	MINANG JAYA INDONESIA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Koto Gaduh Jl. Khatib Sulaiman	Situjuah Limo Nagari
13	YUANE ANGELA	Roti tapai arqi	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	suayan tinggi kec . Akabiluru kab. 50kota	Akabiluru
14	AINUL MARDIAH	MUDASYIF CAKE	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Jorong Tiakar	Guguak
15	ERNI LIZA	AMAI KRIPIK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	PADANG KANDI	Guguak
16	TOMY MANBAYOE	TOM BURGER GROUP	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWET AN LAINNYA UNTUK IKAN	Jorong T igo Balai	Harau
17	RITA KAMARLIS	USAHA KUE DUA PUTRI	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	DEPAN GOR SINGA HARAU	Harau
18	ULFA MAYASARI	Sanjai Alvino	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Simpang Kanti	Akabiluru
19	EFRIZAL	MUTIARA ONAU	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong Bukit T apung, Nagari T aeh Bukik	Payakumbuh
20	MARASUKO	AMANAH	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong gantiang Kelurahan taram	Harau
21	FITRIA HAYATI	KUE DORAYAKI	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	Jr. Pulutan, Nag,Koto T uo, Kec . Harau	Harau
22	ERIKA EXSTRADA	ISTANA KERIPIK PUTRI JAMINEKA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Balai Panjang	Lareh Sago Halaban
23	MARTHALELI	Keripik Cincang Ghina	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Koto, Nagari Simalanggang	Payakumbuh
24	YURNIATI	MAKANAN BASAH	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	JORONG BARUAH GUNUANG I	Bukik Barisan
25	YONI HERMON	Pembuatan Gula Merah Yoni	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong Korek Hilia, Nagari T ajung Bungo, Suliko,	Suliki

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
26	EMRIZAL	Ghifari	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Jr balai rupih	Payakumbuh
27	TRI DERIFA YANSI	KERIPIK BALADO CUCU MAK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Tanjung Kaling	Luak
28	YETTI OKTAVIA	ANEKA RAKIK CLARISA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Harau	Harau
29	ANDRI FEBRIAN SAPUTRA	USAHA BUNDA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Piladang	Akabiluru
30	DEVI EFENDI	PEYEK PAPA RICKY RIDHO	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SIAMANG BUNYI	Guguak
31	RATNA SUSILAWATI	usaha keripik ubi	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	pulutan	Harau
32	PURHARYANI	TAHU AZZAM	Industri Makanan	INDUSTRI TAHU KEDELAI	Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Harau
33	AGUS SUPRIANTO	USAHA KERIPIK BALADO	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Payakumbuh
34	DESRI NOVA	Kerupuk sakura	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
35	ENIFRIZA	Kerupuk sakura	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong piladang, kenagarian koto tengah baru ampa	Akabiluru
36	ERNAWATI	Kerupuk ubi eni	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong piladang, kenagarian koto tengah batu ampa	Akabiluru
37	FARIDA	KERUPUK MERAH	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	PILADANG	Akabiluru
38	FINTA TRI KOMALA	Kerupuk rubik	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong piladang, koto tengah batu ampa, kec . Akabiluru, kab. Lima puluh kota	Akabiluru
39	FITMAWATI	kerupuk sakura atau kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	jalan raya payakumbuh-bukitinggi, pasar	Akabiluru
40	GUSTI ROZA	ANEKA KERUPUK UBI ROZA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tengah Batu Ampa	Akabiluru
41	INDRAWATI	KERUPUK UBI BUK IN	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Koto Tengah, Batu Ampa	Akabiluru
42	M. ROMADONA	Keripik Sanjai	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Sungai Cubadak Nagari Kototengah Batuampa Kecamatan Akabiluru	Akabiluru
43	MARTA LIZA	Kerupuk ubi	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong piladang, kenagarian koto tengah batu ampa	Akabiluru
44	NURJASMI	Kerupuk merah	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	jalan raya payakumbuh-bukitinggi, pasar	Akabiluru
45	OLVIA ERNAS	Usaha kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	jalan raya payakumbuh-bukitinggi, pasar	Akabiluru
46	SRIHATIN	Kerupuk bulan	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
47	SUSI DIYAN SARI	KERUPUK LILI	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	PILADANG	Akabiluru

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
48	ERA WATI	Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	Jorong sungai c ubadak	Akabiluru
49	ERTAWATI	membuat kerupuk ubi	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	joromg sungai c ubadak nagari koto tengah batu ampa kec amatan akabiluru	Akabiluru
50	FERNANDO	KERUPUK MERAH	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jr. Piladang	Akabiluru
51	FITRIA SUSANTI	Kerupuk jengkol	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
52	HUSNI TAMRIN	MEMBUAT KERUPUK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SEBERANG PARIT	Akabiluru
53	ILWAN APRIZON	mengolah ubi/membuat kerupuk ubi	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	jorong sungai c ubadak nagari koto tengah batu ampa kec amatan akabiluru	Akabiluru
54	INDRA DEVI	MEMBUAT KERUPUK RUBIK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SEBERANG PARIT	Akabiluru
55	KIKI INDRA PUTRI	Kerupuk jengkol	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Sungai c ubadak	Akabiluru
56	NELFIA MAIZA	Kerupuk kuning	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Sungai c ubadak	Akabiluru
57	NIA PERMATA SARI	RUBIK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SEBERANG PARIT	Akabiluru
58	NURFITRIANI	Kerupuk jengkol	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Sungai c ubadak	Akabiluru
59	NURLAILI	kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	tambun ijuk	Akabiluru
60	NURLEN	kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
61	RESNITA	Kerupuk jengkol	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Sungai cubadak	Akabiluru
62	SURYATI	membuat kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	jorong sungai cubadak nagari koto tengah batu ampa kce.akabiluru kab.lima puluh kota	Akabiluru
63	WIKE NOFRILINA	dagang kerupuk sanjai	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	sungai cubadak	Akabiluru
64	ZULFA HENDRI	kerupuk sakura	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	sungai cubadak	Akabiluru
65	ANDRI SAPUTRA	kerupuk ubi	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	sungai cubadak	Akabiluru
66	SISKA FITRIYANI	MEMBUAT KERUPUK	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	PILADANG	Akabiluru
67	PEBRI ENDANG	PEBRI ENDANG	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	KOTO BARU	Akabiluru
68	PILA GUSWANTI	Kedai Kawa Daun Mak Zian	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
69	YAZIL ANDIRA	Warung Minuman	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	pangkalan	Pangkalan Koto Baru
70	NELFIRA	Jajanan Kaocha	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROT I DAN KUE	orong T anjung Munti, Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh	Payakumbuh
71	RINI CITRA	Produksi Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	Piladang	Akabiluru
72	ENDRAWATI	kerupuk rubik	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	seberang parit	Akabiluru
73	GUSWENDI	KERUPUK SANJAI	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SUNGAI CUBADAK	Akabiluru
74	JURIAH	MEMBUAT KERUPUK UBI	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SEBERANG PARIT	Akabiluru
75	LINDA HUDRA	kerupuk kuning	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	sungai cubadak	Akabiluru
76	LISA DONA	Produksi Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
77	MIRA NOFRIANTI	kerupuk rubik	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Seberang Parit	Akabiluru
78	MUS MULYADI	kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	seberang parit	Akabiluru
79	RENI SAFRIYANTI	MEMBUAT RUBIK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	SEBERANG PARIT	Akabiluru
80	SESRAWATI	kerupuk kamang	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	seberang parit	Akabiluru
81	YOLANDA MIRANDA	USAHA KERUPUK RUBIK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Seberang Parit	Akabiluru
82	YUHASNI	Produksi Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
83	YUSNIDA	Produksi Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru
84	WINA SUSANTI	DEPOT AIR REBUSAN HATIF	Industri Makanan	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	JR. SOPAN, NAGARI SIMPANG KAPUAK, KECAMATAN MUNGKA	Mungka
85	IRZAL	UNCARIA BAROKAH	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Sarilamak Kecamatan Harau	Harau
86	SRI WELAS YOFIANA	KULEK	Industri Makanan	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	SUBARANG T ABEK	Situjuah Limo Nagari
87	DASWAR	DASWAR	Industri Makanan	INDUSTRI PENGGLINGAN PADI DAN PENYOSOHAN	PULUT AN	Harau
88	AMRINA RASYADA	RIRIN KIT CHEN	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	PADANG AMBACANG	Situjuah Limo
89	ROZI IRADALLAH	UMMU FAWWAZ	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Padang Rantang	Harau

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
90	ALVIA. H	Dapur Bunda Naya	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Jorong T eratak Nagari Koto Tuo, Kec Harau	Harau
91	SUSI NOVRIYANTI	DEPOT AIR ISI ULANG	Industri Makanan	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR	Jorong Simpang Tiga	Pangkalan Koto
92	AFRIANTO	KOPI HUT AMA	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	BUKIK GOLUANG	Lareh Sago Halaban
93	DESWITA	KAPANARAN G	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	PADANG KUNIANG	Situjuah Limo
94	RAIDA	SANJAI DUNSANAK KITO	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	JALAN LINT AS SUMBAR- RIAU KM. 13 JORONG	Harau
95	DODY	SOEBRAT ACOFFEE	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	JORONG SUBARANG T ABEK	Situjuah Limo
96	MIRA GUSTIA NOVA	MUFTI CAKE	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	JORONG JOPANG	Mungka
97	MARIA	MOZA CAKE	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Jorong Koto Baru	Payakumbuh
98	VHIO RHEVERONIKO	Sambilan Herbal Tea	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	Nagari Durian Tinggi	Kapur Ix
99	VHIO RHEVERONIKO	UD. ALAM BINT ANG SEJAHT ERA	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	Perumahan Depan SD N 04 Durian T inggi, Jorong	Kapur Ix
100	FATHIZA RAHMI	Olahan Jahe Cubono	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN	Alamat sesuai dengan KT P	Situjuah Limo
101	SURYA BAKTI YUDHA	Usaha Peyek Aqila	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak	Harau
102	YULIANTI PRATIFA	Coba Food	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	T igo Balai Kenagarian Lubuak Bantingkok Kec Harau Kab. Lima Puluh Kota	Harau
103	ADEK SETIAWAN	BUBUK KOPI JM	Industri Makanan	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	JORONG BAT U NAN LIMO	Payakumbuh
104	ADE PARDIAN	NESYA KUCHE	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	tanjung pati, koto kuo	Harau
105	ANTON ARIFANDI	Pengolahan Kerupuk Kulit	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Padang Tengah Halaban	Lareh Sago Halaban
106	IRGA VIRGO AMANDA	IRGA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	JORONG SUNGAI PANJANG INDAH NAGARI MUARO PAITI KECAMAT AN	Kapur Ix
107	ASMIARTI	Jualan makanan kering (rubik)	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Suliki	Suliki
108	MERINA HERMOLI	jualan makanan	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	orong Dusun Nan Duo	Mungka
109	YENDRA SEPRITA	isep cake	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	jr.cinta maju nagari durian tinggi kecamatan kapur	Kapur Ix
110	HILMA MAHARANI	Keripik jengkol	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Jr. T ambun Ijuk	Payakumbuh
111	ADINDA SRI WAHYUNI	RUMAH GADANG	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK	Jorong Ampang Gadang	Guguak
112	RIDARTI	Produksi Kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK	Piladang	Akabiluru
113	ZAMRA SEPTI WARNI	Pembuatan kerupuk	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Piladang	Akabiluru

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
114	ERNI ISMITA	Gula Merah Erni	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Batang Linjuang	Suliki
115	SUPERSEMAR	Gula Merah Supersemar	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong Kubu T angah	Suliki
116	MAILIA FITRIANI	Depot Air Minum	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Piladang	Akabilur u
117	RIKA LESTARI RAMADONA	Berdagang makanan dan	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	Jorong Simpang Abu	Mungka
118	MAIHENDRI	KERIPIK ASAHI	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK	Jorong Koto Baru	Akabilur u
119	YUSMADI	PRODUKSI KERUPUK	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK	Piladang	Akabilur u
120	MURSILA	DUA SAUDARA	Industri Makanan	INDUSTRI PENGKILANGAN ANEKA UMBI DAN	Jorong Purwajaya	Harau
121	DERA ANUGRAH	usaha kue	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	durian tinngi	Kapur Ix
122	DESWATI. Y	KUE BASAH WATI	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	T ANJUNG PAT I, KOT O T UO, KEC. HARAU. KAB. 50	Harau
123	YERINA ANJAR SARI	JUALAN GORENGAN	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	JORONG SUNGAI PANJANG INDAH	Kapur Ix
124	LORA ANGGRAINI	USAHA KUE	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	JORONG KOT O T INGGI NAGARI MUARO PAIT I	Kapur Ix
125	LUSIANA. MZ	FAZEYA CAKE	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	PASAR BARU MUARO PAITI	Kapur Ix
126	TUBABUS JAYATNO	VICKY	Industri Makanan	KEGIAT AN RUMAH POT ONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	Pasar Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec amatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Harau
127	BARIANIS	MAKANAN SIAP SAJI	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	JORONG KOTO TINGGI	Kapur Ix
128	GUSTI NEKA	Kerupuk Merah Doa Ibu	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Simpang BR.Jorong Piladang.Nagari Koto T angah Batu Hampa.Kec .Akabiluru.Kab.Li ma Puluh Kota	Akabilur u
129	NOVA SURYANI	Olahan Kerupuk Ubi	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Nagari Tanjung Haro Siakbu- Kabu Pd Panjang	Luak
130	RIKO HERNANDO	Berdagang	Industri Makanan	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Sarilamak, kec amatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota	Harau
131	VERA NOVELITA	SANJAI MEGA	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Koto T angah Batu Ampar, Kec amatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Akabilur u
132	CETRI YEMPI	Lamang Tapai "Mak Ida"	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	Kapalo Koto Nagari Koto T angah Simalanggang	Payaku mbuh
133	YUSNIWART I	Malta	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Jl. T an Malaka KM 23 Jorong Kampuang Dalam	Suliki
134	DARNENI	KARUNIA ILAH	Industri Makanan	INDUSTRI PENGKILANGAN PADI	Jorong Koto Ramai	Akabilur u

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
135	ARIES APRI NANDA	T UNAS MUDA	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROT I DAN KUE	Pinc uran Botuang	Guguak
136	ROSDIANA	HARAPAN MULIA	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROT I DAN KUE	Ampang Gadang, VII Koto Talago	Guguak
137	BAMBANG HERMANTO	BAMBANG GUMER	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Belubus, Sungai Talang, Guguak	Guguak
138	NURDIANSYAH DEBRIAPUT RA	DUO BARADIAK	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	T alaweh	Lareh Sago Halaban
139	MUT YARA	Dyaty	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Perumnas. Padang Rajo, Jl. Duku, Kelurahan Koto T uo, Kecamatan Harau, T anjung Pati, Kabupaten 50 Kota	Harau
140	MUTYARA	Dyaty Chili	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Perumnas. Padang Rajo, Jl. Duku, T anjung Pati	Harau
141	FATMAWATI	Randang Kalamai Do'a Mande	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Pagar Canc ang Bawah	Akabiluru
142	HENDRA. M	Ms. Yza Food	Industri Makanan	INDUSTRI KUE BASAH	Jorong Tambun Ijuk	Payakumbuh
143	CUT NURHUDA	Cut's Snac k	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN	Jorong Tambun Ijuk	Payakumbuh
144	SEPTI KHAIRIAH	USAHA KUE KERING MASNA	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK ROT I DAN KUE	Jorong Koto Baru	Guguak
145	SYUKRI ALIZAR	UKM Gula Merah Syukri Alizar	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong Batang Linjuang Nagari T anjuang Bungo	Suliki
146	JOLI HENDRA	Usaha Gula Aren Joli	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong Talang	Mungka
147	MUHAMMAD ZULFADLI	NAKANA	Industri Makanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Kapur IX	Kapur Ix
148	AHMAD HUZIL	GUMER HUZIL	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	LUAK BEGAK RT 000 RW 000	Gunuang Omeh
149	BAMBANG ADI SUPTO	GUMER BAMSU	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	BELUBUS RT 000 RW 000	Guguak
150	BAYU SAPUT RA	GUMER BAYU	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	BELUBUS RT 000 RW 000	Guguak
151	GENDRA	GUMER GENDRA	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	SIKABU-KABU RT 000 RW	Luak
152	MISBAH	Usaha Gula Merah Misbah	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	Jorong belubus nagari sungai talang Kec .Guguk	Guguak
153	NANAR BARIYANTO	GUMER BARIYANTO	Industri Makanan	INDUSTRI GULA MERAH	BELUBUS RT 000 RW 000	Guguak
154	DESFADLIANTO	RACE MILING RAT OLA	Industri Makanan	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	JL. TAN MALAKA KM7 KOTO BARU SIMALANGGANG	Payakumbuh
155	YESSY MUHARNIS	Usaha Rakik Kacang CiCI	Industri Makanan	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	Jorong Pinc uran Tinggi Nagari Mungo Kecamatan Luak	Luak
156	NABILA HANUM	mie num	Industri Makanan	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	orong kapalo koto, nagari andaleh, kecamatan luak,	Luak

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
157	WARNI	SONGKET SYAKIRA	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	Jorong Air Babar Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	Lareh Sago Halaban
158	DEVIE LEYSIA	Borneo Craft	Industri Tekstil	INDUSTRI BATIK	Jorong Koto Baru	Akabiluru
159	DEVIE LEYSIA	Barneo Craft	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	Jorong Koto Baru	Akabiluru
160	DIAN KARTIKA	RUMAH KEBAYA KARTIKA	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Jorong Koto Tengah	Akabiluru
161	DIAN KARTIKA	RUMAH KEBAYA KARTIKA	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	Jorong Koto Baru	Akabiluru
162	MARDALITA	DUO PUTRI	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Indobaleh Barat Nagari Mungo	Luak
163	NURHAYANIS	KONVEKSI	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	Jorong Suayan Sabar	Akabiluru
164	YENI ASTUTI	KONVEKSI	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	Jorong Suayan Sabar	Akabiluru
165	ZON EFENDI	MENJAHIT MAHLIGAI TAYLOR	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	JORONG LUBUAK LIMPATO	Harau
166	MUHAMAD IRSYAD	De_njo	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	MANGANTI	Mungka
167	MAULINDA HUSNI	LINDA FASHION	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	BATU NAN LIMO	Payakumbuh
168	WIRDAYATI	FAMEZA SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	JORONG MANGUNAI TINGGI	Lareh Sago Halaban
169	YENI MARLINA	BORDIRAN	Industri Tekstil	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR	Lubuak Batingkok	Harau
170	DITA APRIANI	Rumah jahit dita	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	pulutan,koto tuo, kec, harau	Harau
171	VERNIADES	JAHT PAKAIAN	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	JORONG TIGO BALAI	Harau
172	WIDYAWATI	JAHT	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	LUBUAK BATINGKOK	Harau
173	SUKRANATI	Rira Bordir	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	Koto, Nagari Simalanggang	Payakumbuh
174	NENI ERAWATI	ABI BORDIR	Industri Tekstil	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR	Jorong Tigo Balai	Harau
175	SUSI ALFIANTI	FELLYCIA BUSANA	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Jorong Lubuak Batingkok	Harau
176	ELIZA	Usaha jahit lisa	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Jorong balai	Harau
177	ELVI NOVITA	vivi songket	Industri Tekstil	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	desa atas laban nagari halaban kecamatan lareh sago halaban	Lareh Sago Halaban

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
178	HARIF RAHMAN, SE	NADINE Songket	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	Jl. Payakumbuh-Lintau KM.18, Jorong Atas Laban - Lareh Sago Halaban, Sumatera Barat 26262	Lareh Sago Halaban
179	EVA NURKAS	Penjahit Nurkas	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Balai Gadang Bawah Nagari Mungo	Luak
180	NOVIA ELZA FITRIANTI	ELZA SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	JORONG LAMBUK	Lareh Sago Halaban
181	RITA	RITA SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	JORONG PADANG TANGAH	Lareh Sago Halaban
182	SURYANI	SALSABILLA H SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN)	JORONG ATAS LABAN	Lareh Sago Halaban
183	SUSILA WATI	SUSILAWATI SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	JORONG ATAS LABAN	Lareh Sago Halaban
184	YULNIATI	Azzahra Store	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	Kampung Baru,	Kapur Ix
185	LISA YUSMARNI	LISA SONGKET	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	JORONG LAMBUK	Lareh Sago Halaban
186	RICE WIDIA	gorden	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Mungka	Mungka
187	DELVINA	Songket Delvina	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	Lompek, Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Pulh Kota	Lareh Sago Halaban
188	SILVA NUR AISYAH	Silva tailor	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Bunga tanjung	Bukik Barisan
189	ASTUTI FEBRINA	Fauzura fashion	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Balai rupih	Payaku mbuh
190	NAJMATUL HILAL	HILAL SULAM	Industri Tekstil	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR	Jr. Guguak, Nagari Guguak VIII Koto	Guguak
191	REDIANTO	penjahit pakaian	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	hubuak alai	Kapur Ix
192	RESDAWATI	usaha jahit baju	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	muaro paiti,jorong kampung baru	Kapur Ix
193	ANGGI WICAKSONO	BATIK SRIKANDI	Industri Tekstil	INDUSTRI BATIK	Purwajaya, Sarilamak	Harau
194	VEBRI RAMANDES	BATIK BUNDO KANDUANG	Industri Tekstil	INDUSTRI BATIK	SARILAMAK,	Harau

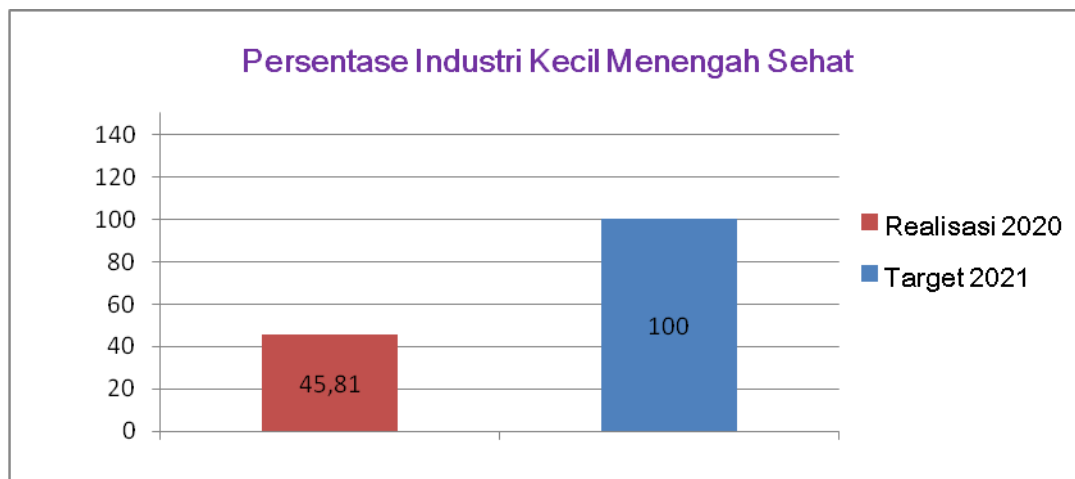
NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
195	RISNA	TENUN H. RIDWAN	Industri Tekstil	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	Jorong Koto Baru	Guguak
196	KINTAN PUTI ALAMI	Kintan Nut	Industri Tekstil	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	Jorong Padang Rantang	Harau
197	DELVI MAI SELVI	MENJAHIT COSTUM	Industri Tekstil	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Taratak	Guguak
198	ADAM HENDRI	ADAM CRAFT	Industri Kayu	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	Jorong Harau	Harau
199	YENI WELNITA	Anyaman Mansiang AR	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	Jorong Taratak Nagari Kubang	Guguak
200	ADE IRMA SURYANI	Bubut Kayu Arum	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	Tarantang	Harau
201	YUDI FUTRA	Pengrajin Batok Kelapa	Industri Kayu	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	Aia Randah Gadut	Lareh Sago Halaban
202	AZHARI	PERABOT PUTRA KEMBAR	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau	Harau
203	ALINUR AKHIAR	PERABOT	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	RAGEH	Luak
204	ANDRIZAL	ANYAMAN ROTAN JJ JOS	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	TANAH UNGGUK	Lareh Sago Halaban
205	RAIHAN DWI PUTRA	Memproduksi Sangkar Burung	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	Piladang	Akabiluru
206	UPIK HANI	Lapiak Pandan Amak	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	JORONG KAMPUNG DALAM	Kapur IX
207	FUJI MASYENDRA	larik (buat tangkai stempel)	Industri Kayu	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	Jorong Koto Tinggi Kubang Balambak	Mungka
208	FERIATI	Anyaman Niru	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	Lubuak jantan	Harau
209	EDI HENDRA SAPUTRA	SURIAN KARYA	Industri Kayu	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	KUbang Rasau,	Lareh Sago Halaban
210	DIAN KARTIKA	KHANZA SOAP	Industri Kimia Dan Farmasi	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	Jorong Koto Baru	Akabiluru
211	RESKI FAJRI ANANDA	INAKI GROUP	Industri Kimia Dan Farmasi	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	Sariak Laweh, Kec.Akabiluru, KAB.Lima Puluh Kota	Akabiluru
212	AFDAL SUPARDI	BATU BARA	Industri Kimia Dan Farmasi	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	Piladang	Akabiluru
213	AFDHAL LUTFI	AL-BARKAH ATSIRI	Industri Kimia Dan Farmasi	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	jl.guntuang-maek Guntuang	Bukik Barisan

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
214	RENDRI YASWAN	gambir coop	Industri Kimia Dan Farmasi	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	Jorong SPI nagari muaro paiti, kecamatan kapur IX kabupaten limapuluh kota, sumatera barat	Kapur IX
215	WILSON FITRIADI	DUTAL PLASINDO	Industri Karet dan Plastik	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	Jorong Manganti	Mungka
216	RAHMAT FERNANDA	kerajinan tali	Industri Karet dan Plastik	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	Jorong Koto Tinggi Kubang Balambak	Mungka
217	DIDI NOVEL	Usaha Batu Batako	Industri Mineral Non Logam	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	Jorong kapalo buki Nagari batu payuang Kecamatan lareh sago halaban Kabupaten lima puluh kota	Lareh Sago Halaban
218	SUMITRA	USAHA BUAT BATU BATA SUMITRA	Industri Mineral Non Logam	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	Jorong Lareh Nan Panjang	Lareh Sago Halaban
219	SUDIRMAN	CETAK BATU SUDIRMAN	Industri Mineral	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH	Jorong Koto Kociak	Harau
220	MAIDI JUHARTO	BINTANG BATAKO	Industri Mineral Non Logam	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN,	Jorong Sungai Panjang Indah	Kapur IX
221	YESSI YUFIKA	BENGKEL LAS HAFIZ	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Harau
222	SABARUDDIN	BENGKEL LAS SYAFIQ	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Jorong balai	Harau
223	ZULTONI	Bengkel	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	Tambun Ijuk	Payakumbuh
224	DEHANDRIS	EMPAT PUTRI	Industri Lainnya	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Jorong Tanjung Pati	Harau
225	SISKA MELLVIA	Galery Siska	Industri Lainnya	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	Jalan Tan Malaka KM 9	Payakumbuh
226	AMRINA ROSYADA	iROSE craft	Industri Lainnya	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	Padang Jariang	Situjuah Limo
227	NURMIATI	Usaha Pondok Batu	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	Jorong Boncah Nagari	Harau
228	WETI EKAPUTRI	Pondok Batu Bata	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	Jorong Boncah	Harau
229	ADE PUTRA	USAHA BATU BATA	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	JORONG KETINGGIAN	Harau
230	HARI MARFIKA	ARSYA FURNITURE	Industri Lainnya	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Jorong Boncah Nagari	Harau
231	GUSTAPIA	Pondok Batu Bata	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN	Jorong ketinggian	Harau
232	M. ZEN	Pondok Batu Bata	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	Jorong Boncah	Harau

NO	NAMA	NAMA USAHA	SEKTOR	KEGIATAN USAHA	ALAMAT USAHA	KEC. USAHA
233	SOSILAWATI	PONDOK BATU BATA	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	Jorong Ketinggian,	Harau
234	SUARDI	PONDOK BATU BATA	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	jorong ketinggian	Harau
235	WINA YULIA	PONDOK BATU BATA	Industri Lainnya	INDUSTRI PENGOLAHAN	Jorong Ketinggian,	Harau

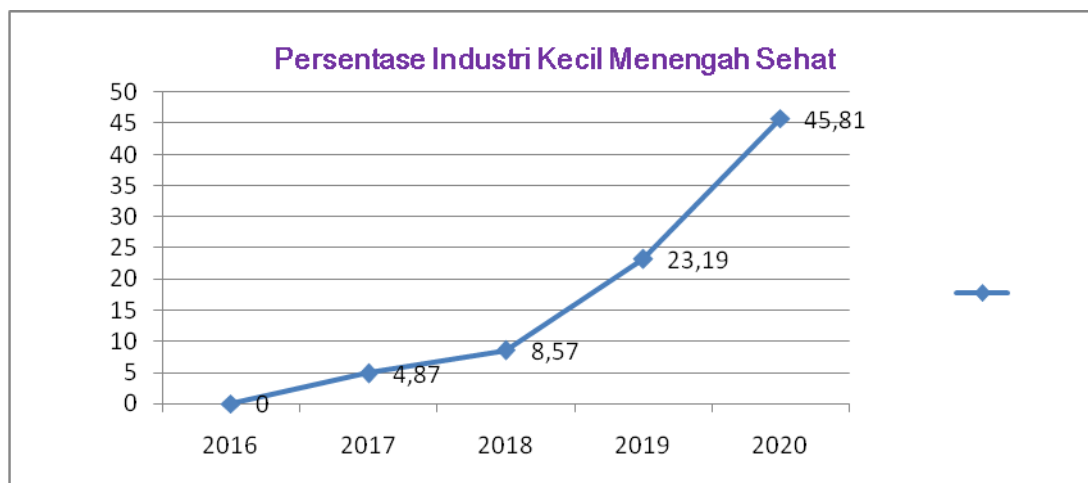
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020

Capaian indikator persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.7.1
Perbandingan Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah-langkah perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



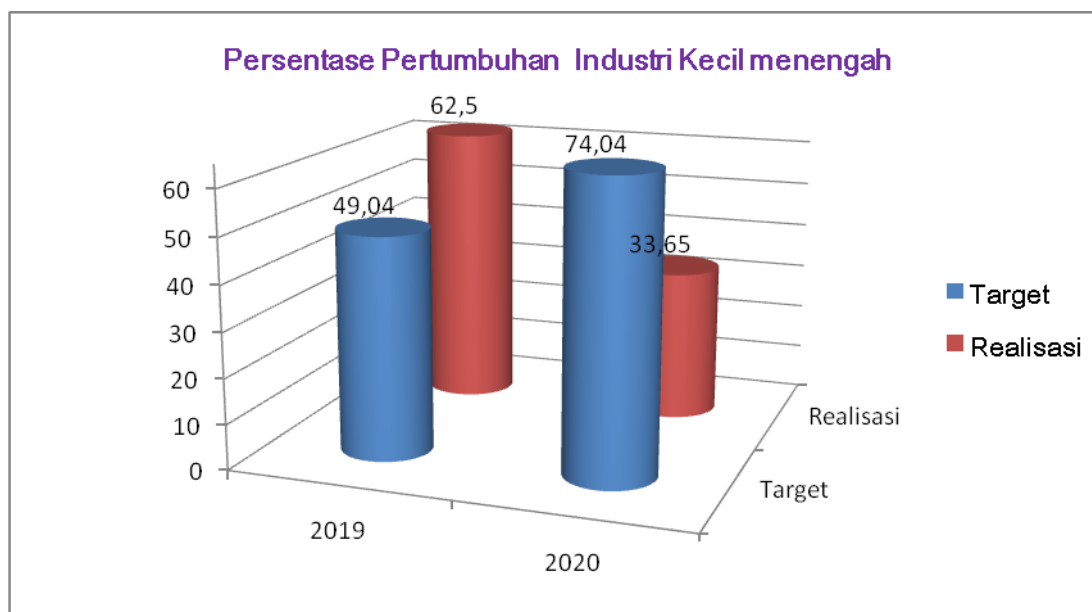
Grafik 2.3.7.2
Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat Tahun 2016-2020

2. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Pertumbuhan IKM adalah pertumbuhan jumlah IKM (tumbuh IKM baru). Pada tahun 2020 target pertumbuhan IKM adalah 74,04% atau 77 IKM. Realisasi pertumbuhan IKM pada tahun 2020 adalah sebesar 33,65% atau 35 IKM. Realisasi ini kurang dari target yang ditetapkan. Dari 35 IKM yang tumbuh tersebut sebagian besar adalah IKM pengolahan makanan ringan, seperti : keripik ubi, kue kering, rending, dan sebagian kecil lainnya adalah IKM perbengkelan. Hal ini menunjukkan bahwa IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Berdasarkan data pengurusan perizinan IUI, pada tahun 2020 telah banyak IKM yang mengurus perizinan. Perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan, dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut. Salah satunya pada tahun 2020, IKM-IKM yang terdampak covid 19 diberikan bantuan melalui program pemulihan ekonomi nasional yang mempersyaratkan IKM memiliki perizinan.

Jika dibandingkan realisasi pertumbuhan IKM pada tahun 2019 sebesar 62,5% atau tumbuh sebanyak 65 IKM dari target yang ditetapkan sebesar 49,04% atau sebanyak 51 IKM, maka sebenarnya pertumbuhan IKM pada tahun 2019 yang lalu telah melebihi target akhir RPJMD . Pertumbuhan IKM pada kondisi akhir RPJMD adalah 100% atau 104 IKM. Sampai tahun 2020 ini telah tumbuh

IKM sebanyak 201 IKM atau sebesar 193,27%. Sampai tahun 2020 ini pertumbuhan IKM telah melebihi target yang ditetapkan pada kondisi RPJMD. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.8
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Data Pertumbuhan IKM tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.6.2 di bawah ini :

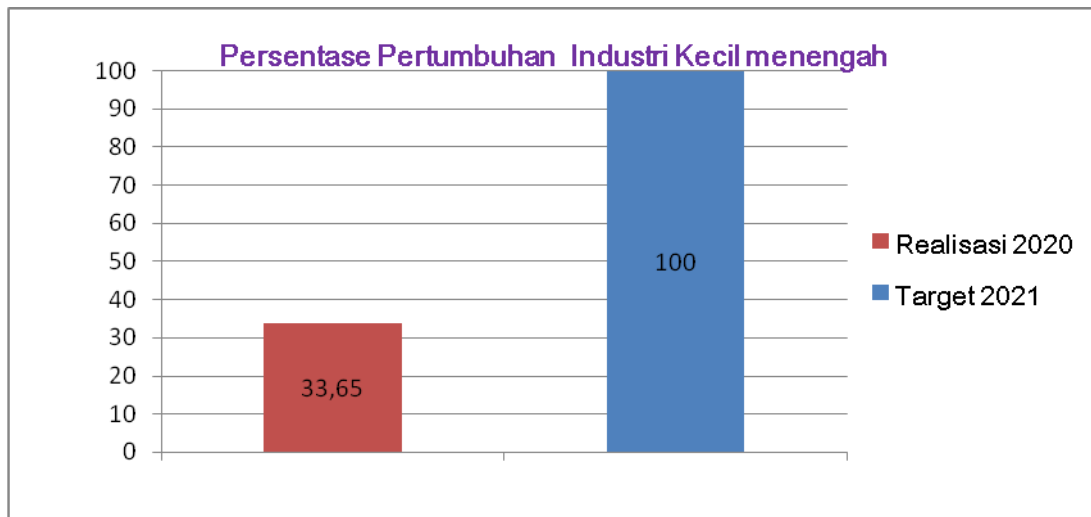
Tabel 2.3.6.2
Data Pertumbuhan IKM Tahun 2020

NO	NAMA	NAMA USAHA	KOMODITI	ALAMAT
1	Hendra M	Ms. Yza Food	Makanan/ Pizza	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
2	Cut Nurhuda	Stick cut	Stick Keju	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
3	Liza Marlina	Kipang Mie H. Don	Kipang Mie	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
4	Reni Anggraini		Jamut crispy	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
5	Jeni Putri	Stick Talas	Stick Talas	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
6	Intan	Afdol Light	Sabun Cair	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
7	Yori Yuliana		Keripik Tempe	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
8	Defrianto		serundeng dan Stick Talas	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
9	Sinta Melina		Keripik robuang dan jengkol	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
10	Ariyatman		Kerupuk Ubi (kerupuk bulan)	Tangah Padang, Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
11	Ambrizal		Kerupuk Ubi (kerupuk bulan)	Tangah Padang, Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA	NAMA USAHA	KOMODITI	ALAMAT
12	Arnado Sofia	Sofia Fashion	Busana Wanita dan anak-anak	Tengah Padang, Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
13	M. Hadid Qosim	Kawa Naiak Daun	Kopi Kawa Daun	Jr. Padang Bacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari
14	Dia	Rendang Telur Uni Dia	Rendang Telur	Nagari Suayan, Kec. Akabiluru
15	Yuane Angela	Roti Arqi	Roti Tapai	Nagari Suayan, Kec. Akabiluru
16	Firda	Difra Momie	Mie Sehat	Simalanggang Kec. Payakumbuh
17	Reski Fajri Ananda	Inaki Group	Sabun	Sariak Laweh Kec. Akabiluru
18	Randi Kurnia	Prince Pomade	Gel Rambut	Sungai Talang Kec. Guguk
19	Elvi		Keripik Ubi	Koto Tangah Batu Hampa Kec. Akabiluru
20	Ilyas Deka Putra	Bengkel Las 2RF	Bengkel	Kec. Harau
21	Wendra Donal	Bengkel Las Caniago	Bengkel	Kec. Harau
22	Ulfa Sunanti	Puti Uwa	Pisang Salai dan Keripik Buah	Sarilamak Kec. Harau
23	Ratnawilis	Ni Rat	Rendang Telur	Sarilamak Kec. Harau
24	Yohana Fitri	Kue Bolu Ami	Kue Kering	Koto Tuo, Kec. Harau
25	Ade Zulman Hidayat	Bolu Ade	Kue Bolu	Lubuak Batingkok Kec. Harau
26	Wilna Hayati	Safa Snack	Kerupuk Ubi Balado dan Peyek	Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh
27	Delfitriana	Tanjung Sikumbang	Kerupuk Balado	Jr. Lubuak Batingkok, Nagari Lubuk Batingkok, Kec. Harau
28	Desi Anggraini	Kerupuk Bulan desi	Kerupuk Ubi	Jr. Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kec. Harau
29	Nana	Kerupuk Bulan	Kerupuk Ubi	Jr. Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kec. Harau
30	Iswandi	Ala Yola Handmade	Kerajinan Tangan Tas, Taplak Meja, dan sandal	Jr. Koto Baru, Mungka, Kec. Mungka
31	Desfi Firmansyah		Kerupuk Ubi	Jr. Sungai Cubadak, Nagari Batu Hampa, Kec. Akabiluru
32	Cinci Claudi	Rubik Cindi	Keripik Ubi	Jr. Sungai Cubadak, Nagari Batu Hampa, Kec. Akabiluru
33	Nofelia Ayunds	Rubik Nofelia	Keripik Ubi	Jr. Sungai Cubadak, Nagari Batu Hampa, Kec. Akabiluru
34	Yunifa Rahmad	Kerupuk Sanjai	Keripik Sanjai	Jr. Sungai Cubadak, Nagari Batu Hampa, Kec. Akabiluru
35	Hendri Donal	Kerupuk Bulan Rasa Jengkol	Kerupuk Singkong Jengkol	Jr. Sungai Cubadak, Nagari Batu Hampa, Kec. Akabiluru

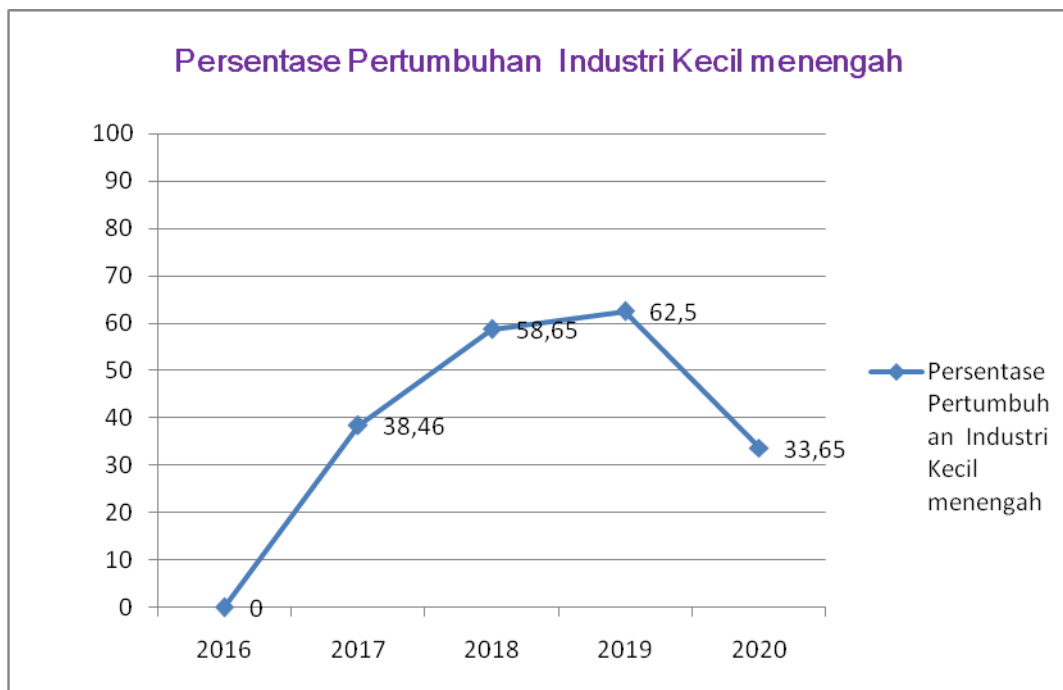
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, 2020.

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.8.1
Perbandingan Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah-langkah perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.8.2
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.3. antara lain adalah : terjadinya pandemi covid 19 mengakibatkan

refocussing anggaran sehingga program dan kegiatan dalam rangka pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keterbatasan anggaran mengakibatkan pelaksanaan pembinaan IKM berupa fasilitasi, pelatihan-pelatihan dan bantuan peralatan produksi bagi IKM tidak bisa dilaksanakan. Namun walau demikian, pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah menganggarkan kegiatan untuk pemulihan IKM-IKM yang terdampak covid 19. Program PEN ini telah banyak membantu IKM untuk tetap bertahan berproduksi.

Sasaran Strategis 2.3. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22.385.000,-	22.385.000,-	-	100,00
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	52.800.000,-	52.225.000,-	575.000,-	98,91
Penataan Struktur Industri	41.347.000,-	40.542.000,-	805.000,-	98,05
Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	5.283.074,-	5.225.000,-	58.074,-	98,90
JUMLAH	121.815.074,-	120.377.000,-	1.438.074,-	98,82

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.3. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 120.377.000,- dari anggaran sebesar Rp.121.815.074,- atau 98,82%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 126,70% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 2.4 **Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah**

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor

pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” adalah “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara” dan Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 60.83% dan termasuk kriteria “**rendah**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.7.
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	3,2%	20,20	26,80	132,67	20,67	26,71	129,22
2.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,35%	35,73	15,50	43,38	37,08	(2,80)	-7,55
Rata-rata Capaian					88,03			60,83

Sumber: Badan Keuangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara

Peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara yang ditarget tahun 2020 adalah 20,67% terealisasi sebesar 26,70% atau sebesar 129,17%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari target 20,20% terealisasi 26,80% atau sebesar 132,67%.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun (n)}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun (n-1)}} - 1 \right) \times 100\%}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun (n-1)}}$$

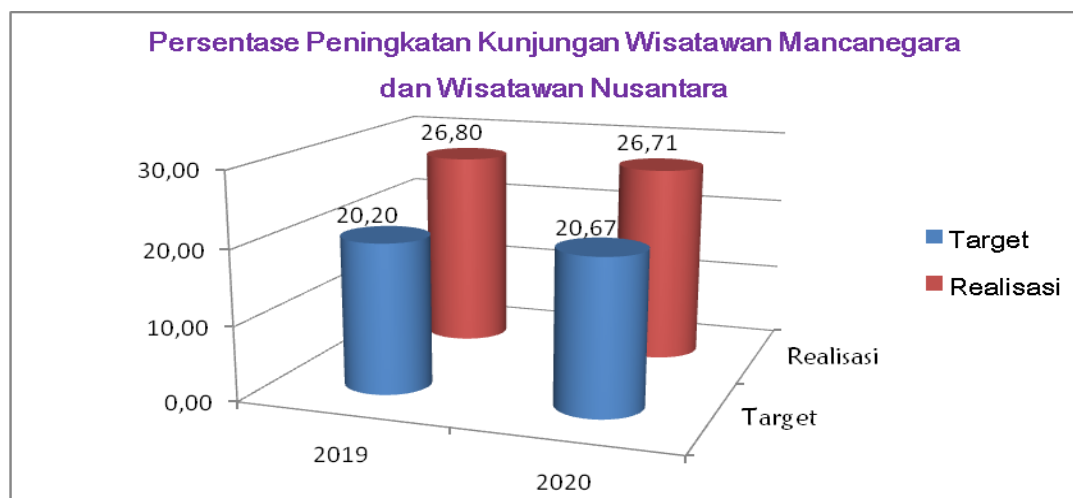
Hasil perhitungan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{988.621 - 780.226}{780.226} \times 100\% \\ &= \frac{208.395}{780.226} \times 100\% \\ &= 0,2671 \times 100\% = 26,71\% \end{aligned}$$

Ket:

- *Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara thn = jumlah wisatawan mancanegara th 2020 + jumlah wisatawan nusantara th 2020 = 968+987.653=988.621*
- *Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara thn = jumlah wisatawan mancanegara th 2019 + jumlah wisatawan nusantara th 2019 = 7.921+772.305=780.226*

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Mancanegara dan Wisata Nusantara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.9
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Wisatawan Nusantara

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik dan Rumah Gadang Sungai Baringin. Destinasi wisata kabupaten Lima puluh Kota ditutup lebih kurang 3 bulan dan, setelah pembukaan kembali pada bulan Juni 2020 kunjungan wisata sangat besar jumlahnya terutama wisatawan local dan wisatawan dari propinsi yang berdekatan. Sementara tingkat kunjungan wisatawan mancanegara sangat jauh menurun dalam masa pandemi Covid 19

Jumlah kunjungan ini dikumpulkan dari beberapa Objek Wisata utama antara lain Lembah Harau, Pemandian Batang Tabik, Pusako Rumah Gadang Sei Beringin dan Objek Wisata Kapalo Banda.

Jumlah kunjungan pada tahun 2020 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.7.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan
Wisatawan Nusantara Tahun 2020

NO.	Objek Wisata	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Free (Tamu Daerah/ Kunjungan Pelatihan)	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1.	Lembah Harau	328.676	60.621	650	389.947
2.	Pemandian Batang Tabik	192.611	-	43	192.654
3.	Pusako Rumah Gadang	9.443	-	106	9,549
4.	Kapalo Banda Taram	396,302		169	396.471
	Jumlah	927.032	60.621	968	988.621

Wisatawan Mancanegara ini tersebar di beberapa Objek Wisata utama antara lain Lembah Harau, Pemandian Batang Tabik, Pusako Rumah Gadang Sei Beringin, Echo Resort dan Objek Wisata Kapalo Banda. Objek wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.7.2
Daftar Daya Tarik Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Aka Barayun	Alam	Harau	Harau
2	Sarasah Bunta	Alam	Tarantang	Harau
3	Ngalau Seribu	Alam	Harau	Harau
4	Air Terjun Murai	Alam	Harau	Harau
5	Air Terjun Ulusungan	Alam	Solok Bio-Bio	Harau
6	Air Terjun Sarasah Barasok	Alam	Tarantang	Harau
7	Air Terjun Sarasah Tanggo	Alam	Sarilamak	Harau

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
8	Air Terjun Sarasah Donat	Alam	Tarantang	Harau
9	Air Panas Batu Balang	Alam	Batu Balang	Harau
10	Jenjang Rendah	Alam	Pilubang	Harau
11	Sarasah Solok	Alam	Pilubang	Harau
12	Panorama Bukik Bulek	Alam	Taram	Harau
13	Talago Parak Baru	Alam	Taram	Harau
14	Kapalo Banda	Alam	Taram	Harau
15	Sarasah Talang	Alam	Solok Bio-Bio	Harau
16	Kandang Batu	Alam	Tarantang	Harau
17	Bukik Bulek Taram	Alam	Taram	Harau
18	Saluang	Budaya	Harau	Harau
19	Randai	Budaya	Batu Balang	Harau
20	Pacu Jawi	Budaya	Harau	Harau
21	Silek Tuo	Budaya	Harau	Harau
22	Talempong Pacik	Budaya	Pilubang	Harau
23	Dikia	Budaya	Pilubang	Harau
24	Kuda Lumping	Budaya	Sarilamak	Harau
25	Reog	Budaya	Sarilamak	Harau
26	Kelok Sembilan	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau
27	Pemandian Anduro	Hasil Buatan Manusia	Pilubang	Harau
28	Pilubang Resort	Hasil Buatan	Pilubang	Harau
29	Rest Area	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau
30	Medan Nan Bapaneh	Hasil Buatan Manusia	Tarantang	Harau
31	Panjat tebing	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau
32	Goa Paloyangan	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
33	Air Terjun Singkuang	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
34	Lakuak Tawar	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
35	Ngalau Kaco Kapalo Gunuang	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
36	Air Terjun Gunuang Sago	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
37	Goa Air Luluih	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
38	Air Terjun Lubuak Lompek	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
39	Panorama Berdikari	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
40	Panorama Minang Sutra	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
41	Ngalau Tabua	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
42	Bukik Batu Payuang	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
43	Ngalau Batu Sandaran Rajo	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
44	Goa Danau Gadut	Alam	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
45	Tareh Tarunjuang	Alam	Ampalu	Lareh Sago Halaban
46	Panorama Puncak Alang Laut	Alam	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
47	Ngalau Hantu	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
48	Kebun Teh	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
49	Menhir	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
50	Perpustakaan/Museum A. Damhoeri	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
51	Kuburan Keramat Angku Legan	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
52	Batu Sandaran Niniakn Nan Sambilan	Budaya	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
53	Benteng Belanda	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
54	Tugu AURI Tanjung Gadang	Budaya	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
55	Lubang Jepang	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
56	Kolam Renang Aia Baba	Hasil Buatan Manusia	Halaban	Lareh Sago Halaban
57	Panorama Bukik Lawik	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
58	Panorama Bukik Nganang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
59	Agrowisata Kayu Kalek	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
60	Air Terjun Sarasah	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
61	Air Terjun Sarasah Banduang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
62	Air Terjun Sarasah Nan Tigo	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
63	Panorama Puncak Talang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
64	Goa Sago	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
65	Panorama Tanah Taban	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
66	Ngalau Malanteh	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
67	Ngalau Galamadin	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
68	Surau Tabiang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
69	Pincuran Putih	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
70	Batu Catur/Bukik Gantiang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
71	Pati Bunian	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
72	Ngalau Seribu	Alam	Andaleh	Luak
73	Ngalau Putiah	Alam	Andaleh	Luak
74	Bukik Cinto Mungo	Alam	Mungo	Luak
75	Puncak Baliak Bukik	Alam	Andaleh	Luak
76	Batu Basurek	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
77	Batu Kudo	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
78	Jejak Nabi Baliak Bukik	Budaya	Andaleh	Luak
79	Pacu Itiak	Budaya	Andaleh	Luak
80	Landasan Meja Mar Mar	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
81	Peninggalan Surau Tanjuang	Budaya	Andaleh	Luak
82	Pemandian Batang Tabik	Hasil Buatan Manusia	Sungai Kamuyang	Luak
83	Pemandian Aia Angek	Alam	Muaro Paiti	Kapua IX
84	Sialang Bato	Alam	Sialang	Kapua IX

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
85	Air Terjun Langkuik	Alam	Lubuak Alai	Kapua IX
86	Sungai Gemuru	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
87	Patamuan (Air Terjun + Goa)	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
88	Pantai Logna	Alam	Sialang	Kapua IX
89	Langkuik	Alam	Sialang Ate	Kapua IX
90	Batu Hidung	Alam	Muaro Paiti	Kapua IX
91	Labu Ompong	Alam	Durian Tinggi	Kapua IX
92	Sarasah Sungai Batang	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
93	Talapak Candi Muaro Paiti	Budaya	Muaro Paiti	Kapua IX
94	Batu Basurek Koto Lamo	Budaya	Koto Lamo	Kapua IX
95	Peternakan Ikan Sosa	Hasil Buatan Manusia	Durian Tinggi	Kapua IX
96	Panorama Selat Malaka	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
97	Sosa Kumbang Balaia	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
98	Goa Tanjung Balik	Alam	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru
99	Pemandian Sungai Pangkalan	Alam	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru
100	Gelanggang Kuau	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
101	Bukik Paninjauan	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
102	Menhir	Budaya	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru
103	Sakidomura	Budaya	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
104	Dikia	Budaya	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
105	Talempong Pacik	Budaya	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru
106	Bakajang	Budaya	Gunuang Malintang	Pangkalan Koto Baru
107	Potang Balimau	Budaya	Pangkalan	
108	Genangan Waduk PLTA	Hasil Buatan	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru
109	Air Terjun Burai	Alam	Mungka	Mungka
110	Sarasah Tun Jaro	Alam	Lubuak Simato	Mungka
111	Air Terjun Lubuak Bulan	Alam	Kubang Balambak	Mungka
112	Losuang Perak	Budaya	Jopang Manganti	Mungka
113	Saluang Oyak	Budaya	Jopang Manganti	Mungka
114	Randai	Budaya	Koto Tuo	Mungka
115	Panorama Bukik Topuang	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
116	Tungka View	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
117	Danau Aia Sonsang	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
118	Puncak Gunung Bungsu	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
119	Bukik Lontiak	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
120	Pusako Rumah Gadang	Budaya	Sungai Beringin	Payakumbuh
121	Batu Manggigia	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
122	Makam Syeh Piobang	Budaya	Piobang	Payakumbuh
123	Benteng Tuanku Nan Garang	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
124	Rumah Gadang Ukiran Cino	Budaya	Koto Tengah Simalanggang	Payakumbuh
125	Makam Keramat Tanjung Lilin	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
126	Prasasti Batu Nan Limo	Budaya	Koto Tengah Simalanggang	Payakumbuh
127	Losuang Batu Kuciang	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
128	Makam Angku Sikucuik	Budaya	Sungai Beringin	Payakumbuh
129	Makam Tabek Panjang	Budaya	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh
130	Batu Balosuang	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
131	Batu Nobat	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
132	Batu Kabau	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
133	Batu Barabono	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh
134	Randai	Budaya	Simalanggang	Payakumbuh
135	Debus	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh
136	Sijobang	Budaya	Sungai Talang	Payakumbuh
137	Saluang Siropak	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
138	Bendungan Sungai Beringin	Hasil Buatan Manusia	Sungai Beringin	Payakumbuh
139	Pemandian Bakacimpuang	Hasil Buatan Manusia	Piobang	Payakumbuh
140	Paralayang	Hasil Buatan Manusia	Taeh Bukik	Payakumbuh
141	Panorama Talang Anau	Alam	Talang Anau	Gunuang Omeh
142	Goa Aia Singkek	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
143	Bukik Banta	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
144	Bukik Kubu	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
145	Ikan Larangan/ Ikan Banyak	Alam	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
146	Panorama Kampuang Patai	Alam	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
147	Goa Imam Bonjol	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
148	Perkebunan Jesigo	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
149	Puncak Seribu Gonjong	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
150	Talempong Batu	Budaya	Talang Anau	Gunuang Omeh
151	Menhir	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
152	Silek Langkah Tigo	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
153	Silek Koto Marapak	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
154	Randai	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
155	Museum Bela Negara	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
156	Tugu PDRI Koto Tinggi	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
157	Zender/Pemancar Mudiak Dadok	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
158	Manggani	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
159	Rumah Tua Tan Malaka	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
160	Panorama Kurai	Alam	Kurai	Suliki
161	Bukik Konduang	Alam	Suliki	Suliki

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
162	Air Terjun Singkapau	Alam	Suliki	Suliki
163	Bukik Aua Balirik	Alam	Suliki	Suliki
164	Bukik Posuak Maek	Alam	Maek	Bukik Barisan
165	Talago Padang Langang	Alam	Banja Loweh	Bukik Barisan
166	Air Terjun Sarasah Barasok	Alam	Banja Loweh	Bukik Barisan
167	Palo Ngalau	Alam	Sungai Naniang	Bukik Barisan
168	Puncak Lobuak	Alam	Sungai Naniang	Bukik Barisan
169	Mesjid Tujuh Menara	Budaya	Sungai Naniang	Bukik Barisan
170	Mesjid Godang	Budaya	Sungai Naniang	Bukik Barisan
171	Menhir Maek	Budaya	Maek	Bukik Barisan
172	Makam Saleh Abdul Rahman	Budaya	Batu Hampa	Akabiluru
173	Pesantren Almanar	Budaya	Batu Hampa	Akabiluru
174	Ngalau Lidah Aia	Alam	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
175	Air Terjun Sialang Indah	Alam	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
176	Goa Ngalau Kabau	Alam	Ladang Laweh	Situjuah Limo Nagari
177	Danau Lereng Gunung Sago	Alam	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
178	Bukik Cawan	Alam	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
179	Goa Pintu Air	Alam	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
180	Kawasan Simona	Alam	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
181	Puncak Gunung Sago	Alam	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
182	Rumah Godang Koto Rajo	Budaya	Ladang Laweh	Situjuah Limo Nagari
183	Batu Agung	Budaya	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
184	Batu Lipek Kain	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
185	Batu Bulan	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
186	Makam Pahlawan Situjuah Batua	Budaya	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
187	Dikia	Budaya	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
188	Randai	Budaya	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
189	Debus	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
190	Bendungan Baboi	Hasil Buatan	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
191	Air Terjun Tadah	Alam	VII Koto Talago	Guguak
192	Lubuak Panawa	Alam	VII Koto Talago	Guguak
193	Batu Banta	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
194	Perkampungan Tradisional Belubus	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
195	Makam Syech Ali Tupah	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
196	Prasasti Guguak	Budaya	Guguak VIII Koto VII Koto Talago	Guguak
197	Makam Syech Padang Jopang	Budaya		Guguak
198	Batu Menhir	Budaya	Sungai Talang	Guguak
199	Menhir	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
200	Rumah Tempat Berunding	Budaya	VII Koto Talago	Guguak

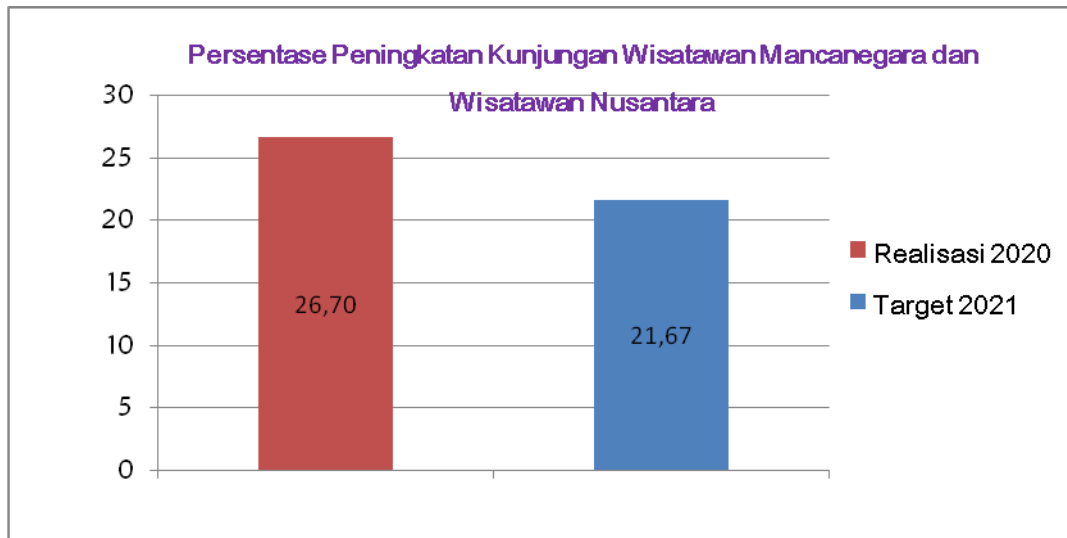
NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
	Delegasi Bangka dengan PDRI			
201	Museum Arkeologi	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
202	Tugu PDRI VII Koto Talago	Budaya	VII Koto Talago	Guguak

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Rendahnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara disebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara, dimana tahun 2020 hanya ada 968 orang wisman yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota karena pada awal tahun 2020 masih ada kunjungan wisata mancanegara, akan tetapi semenjak bulan Maret 2020 dengan terjadinya pandemic covid 19 di seluruh dunia maka tidak ada lagi kunjungan wisata mancanegara. Jumlah kunjungan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu dimana terdapat 7.992 wisman yang datang.

Disisi lain, jumlah kunjungan nusantara tahun 2020 masih lebih tinggi dari tahun 2019 karena terjadinya lonjakan jumlah pengunjung dari Bulan Juni s/d Desember 2020. Sesuai Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota nomor 55/295/Parpora/LK/III-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penutupan Objek Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 21 Maret s.d 8 Juni 2020 menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota menurun, tetapi setelah pembukaan kembali tanggal 8 Juni 2020, arus wisatawan nusantara yang merupakan wisatawan local dan wisatawan dari provinsi tetangga mulai mendatangi objek wisata Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Lembah Harau, Batang Tabik, Kapalo Banda dan lain-lain. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama kunjungan wisatawan karena banyaknya inovasi, view dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung. Disamping itu juga meningkatnya partisipasi masyarakat sekitar destinasi Lembah Harau untuk berusaha di sektor pariwisata dengan mulai mengembangkan potensi wisata daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti tanaman bunga, spot-spot unik untuk foto/selfi serta munculnya wahana-wahana bermain untuk anak-anak dan keluarga.

Capaian indikator persentase peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.9.1
Perbandingan Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2020 dan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

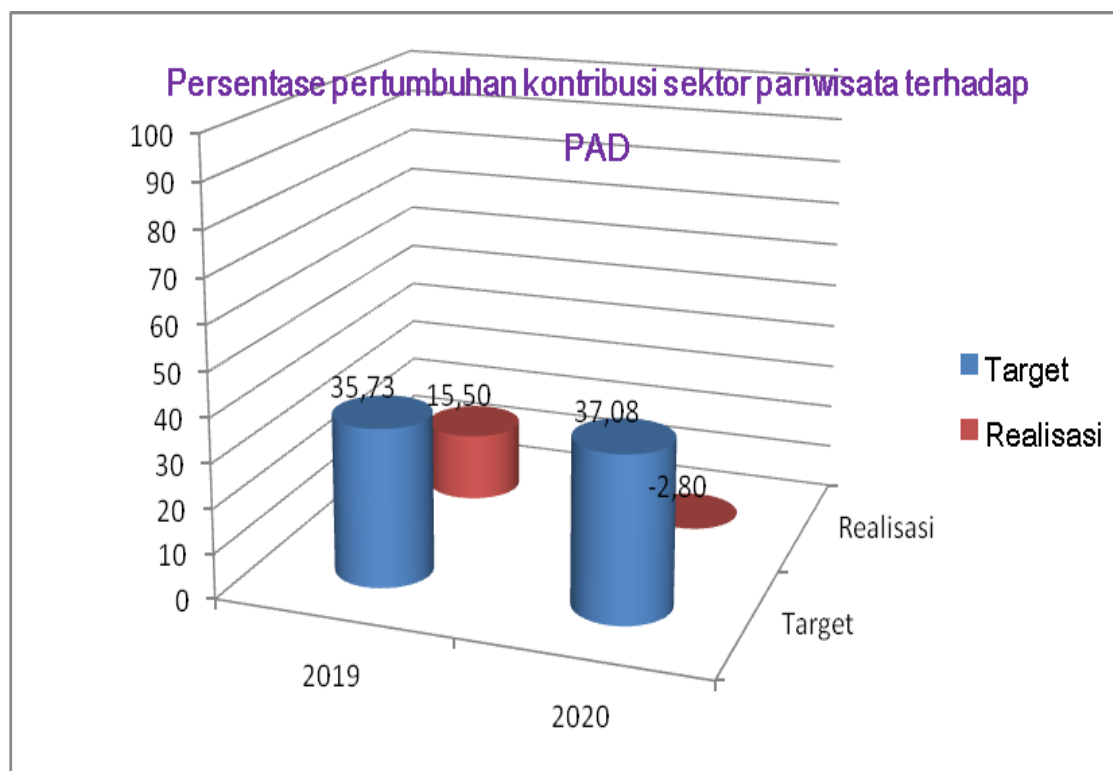


Grafik 2.3.9.2
Realisasi Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2020

2. Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

Persentase pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2020 dari target 35,73% hanya terealisasi sebesar -2,80% atau sebesar -7,55%. Capaian ini sangat rendah dari tahun sebelumnya dimana tahun 2019 dari target 35,73 dapat terealisasi sebesar 15,50% atau sebesar 43,08%. Realisasi tahun 2020 ini sangat rendah disebabkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menutup seluruh destinasi wisata di Indonesia dan Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya. PSBB berakhir pada bulan Juli 2020, sedangkan pembukaan objek wisata secara resmi belum dibuka oleh Pemerintah sehingga berdampak tingkat hunian hotel, penyelenggaraan event-event wisata yang menunjang PAD sektor wisata.

Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.10
Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD



Gambar 2.3.11
Home Stay Solok Bio-Bio

Penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan dari pajak hotel, restoran dan pajak hiburan dan retribusi tempat wisata. Dari sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, belum ada satupun yang dikelola secara profesional oleh

pemerintah setempat, agar dapat menjadi penghasil dan penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Masih ada potensi besar yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, seperti halnya pemerintah menerbitkan perda untuk retribusi masuk objek wisata dan mengelola semua objek wisata secara profesional. Berikut ini adalah tabel penerimaan pajak hotel dan restoran dari sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan 2019 serta Data Hunian Home Stay 2020.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.7.3
Kontribusi Pariwisata terhadap PAD

No.	Sumber PAD	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp.)	(Rp.)
1	Pajak Hotel	31.936.000,-	13.504.000,-
2	Pajak Restoran	1.190.118.502,-	940.778.989,-
3	Pajak Hiburan	21.400.000,-	93.500.000,-
4	Retribusi	1.719.850.000,-	1.832.694.500,-
	Total Kontribusi	2.963.304.502,-	2.880.477.489,-
	Total PAD	85.168.103.332,-	73.085.301.392,-
	Kenaikan kontribusi	15,50%	-2,8

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Badan Keuangan, 2020

Sedangkan Daftar Hunian Home Stay selama Tahun 2020 yang mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.7.4
Data Hunian Home Stay 2020

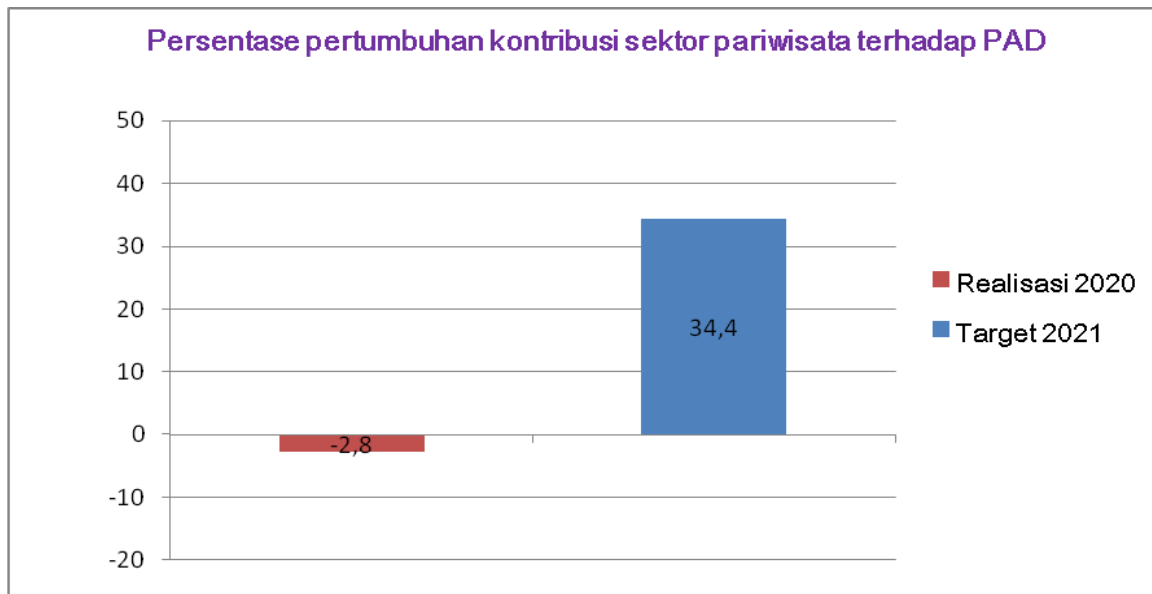
No.	Nama Homestay	Alamat	Jumlah Kamar	Kamar Terjual
1	Haulaso Homestay	Jrg. Padang Torok, Nagari Harau	12	45
2	Zico Homestay	Jrg. Padang Torok, Nagari Harau	8	12
3	Penginapan Mama	Jrg. Padang Torok, Nagari Harau	2	
4	Fikri Homestay	Jrg. Padang Torok, Nagari Harau	3	
5	Oraw in	Jrg. Padang Torok, Nagari Harau	2	
6	Cifa Garden House	Jrg. Harau, Nagari Harau	8	
7	Boncah View	Jrg. Harau, Nagari Harau	2	
8	Puti Sari Banilai	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	4	18
9	Homestay Efnati	Jrg. Kandang Lamo, Nagari Sarilamak	10	63
10	Roemah Abdoe	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	8	75
11	Syafiq Homestay	Jl. Sarasah Bunta Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	5	8
12	Bio Homestay	Jorong Bio - bio, Nagari Solok Bio-bio	6	70
13	Sarasah Mutiara Homestay Syariah	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	4	
14	Tampuo Cottage	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	8	42
15	Kampung Sarosah	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	21	74
16	Cinabi Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
17	Novi Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	8	32
18	Melia Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	8	55
19	Oston Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	10	40
20	Tombak Resort	Jl. Pogang Talago, Nagari Taeh Bukik, Kec Payakumbuh	7	14
21	Bilza Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
22	Tampuniak Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	19
23	Kaniak Homestay Syariah	Jorong Tarantang, Nagari Tarantang	4	26
24	Entra Homestay	Jl. Taratak Sarasah Tanggo Nagari Sarilamak	1	
25	Cifa Guest House	Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak	3	
26	Harau Resort	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	10	17
27	RKA Homestay	Jorong Tarantang, Nagari Tarantang	6	16
28	Sawah Liek Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	4	6
29	Haraoma Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	8	
30	Sarasah Cottage	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	7
31	Harau View	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
32	T Mai Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	

No.	Nama Homestay	Alamat	Jumlah Kamar	Kamar Terjual
33.	Mangkuto Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
34.	Harau Syariah Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
35.	Aura Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	9	80
36.	Khaira Homestay	Jorong Tarantang, Nagari Tarantang	6	72
37.	Boenta Homestay	Jl. Sarasah Bunta Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	8
38.	Putri Lembah Harau		2	
39.	Dayu Homestay		3	
40.	Dangau Abah	Jl. Sarasah Bunta Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	3	
41.	Dangau Pitossa		6	20
42.	Prof. Pitopang		2	
43.	Sarilamak Homestay	Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak	3	
44.	D'Guo Homestay			
45.	Anggun Homestay		5	25
46.	Gilang Homestay		1	
47.	Pondok Singgah Upik		1	
48.	Mimi Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	
49.	Abdi Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	10	197
50.	Penginapan Syariah Tj. Pati		5	16
51.	Shago Bungsu	Tanjung Pati	11	89
52.	Tia Homestay		3	3
53.	Faizah Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	9	54
54.	Haraoma Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	4	
55.	Arsyila Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	7	48
56.	Titan Homestay	Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	12
57.	Reisha Homestay	Jl. Sarasah Bunta Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang	2	3
58.	Aisyah Homestay	Jorong Tarantang, Nagari Tarantang	2	
59.	Sigai Homestay	Jorong Tarantang Nagari Tarantang	1	3
60.	Kincuang Homestay	Jorong Padang Torok, Nagari Harau	2	
61.	Mega Homestay	Tarantang	6	36
62.	Bundo Kanduang	Tanjung Pati	10	41
63.	Valey Homestay	Lubuak Limpato	3	10
64.	Naomi	Harau	3	10
65.	Herota	Tarantang	5	64
JUMLAH			318	1430

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Badan Keuangan, 2020

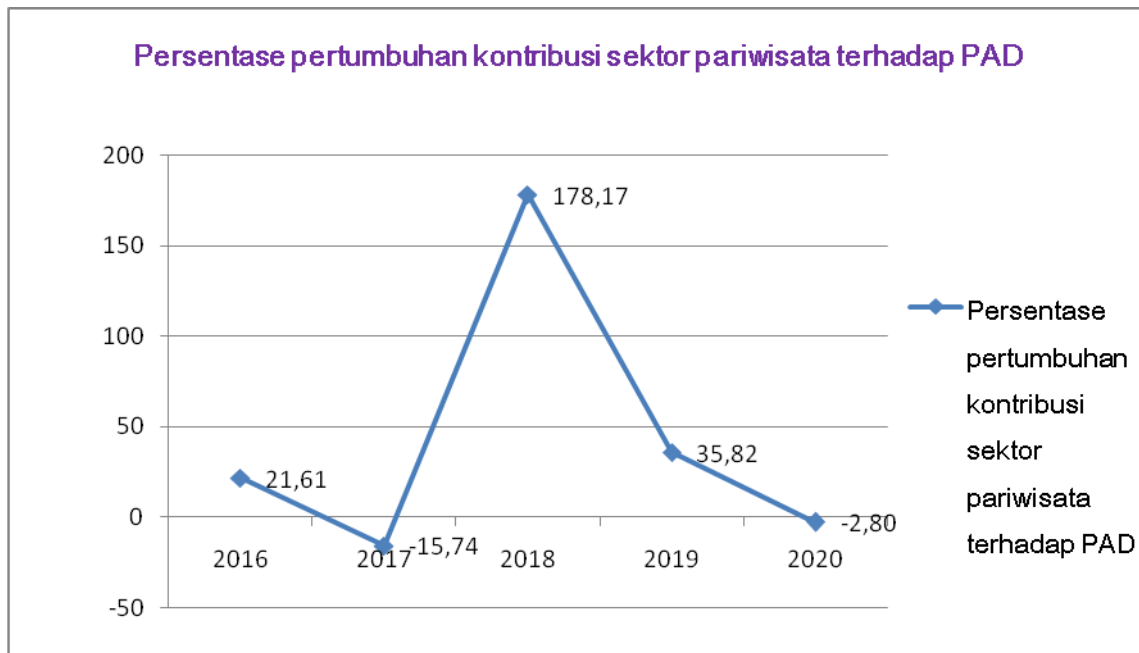
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi pariwisata terhadap PAD sebesar Rp.82.827.013 dari tahun 2019, sehingga belum bisa memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJM.

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.10.1
Perbandingan Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan langkah perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.10.2
Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.4. antara lain adalah :

1. Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara disebabkan karena adanya pandemik covid 19 yang melanda seluruh dunia, sehingga mulai bulan Maret 2020 dilakukan pembatasan/pelarangan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara-negara yang tingkat penularan pandemic corona masih tinggi termasuk Indonesia.
2. Sebagian besar destinasi unggulan pariwisata berada di kawasan KSDA dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.
3. Masih sedikitnya kelompok sadar wisata yang aktif pada objek wisata yang berdekatan dalam satu wilayah.
4. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan di Sumatera Barat khususnya Lembah Harau.
5. Terdapatnya inovasi-inovasi baru di destinasi wisata unggulan seperti Lembah Harau, Batang Tabik dan Kapalo Banda sehingga wisatawan nusantara khususnya daerah tetangga yang berkunjung ketika objek-objek wisata dibuka kembali setelah beberapa bulan ditutup akibat pandemi.

6. Masih banyaknya jumlah pelaku industry pariwisata yang produktif, karena masyarakat di sekitar objek wisata masih bisa bertahan situasi pandemic dengan usahanya dibidang industry pariwisata seperti home stay,café dan rumah makan di kawasan wisata yang sudah memiliki izin tempat usaha.
7. Gencarnya promosi-promosi yang dilakukan di media sosial membuat destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh semakin dikenal oleh wisatawan
8. Tingginya cakupan pelaksanaan event-event pariwisata selama tahun 2020 khususnya yang terlaksana di tempat objek-objek wisata, meskipun sebagian besar event dilaksanakan di dalam daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil meraih prestasi sebagai Best Of Performance dalam Peduli Wisata Award 2020 Propinsi Sumatera Barat dan sebagai Juara pertama Kelompok Sadar Wisata se Propinsi Sumatera Barat dalam ajang GIPI Award 2020. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat pelaku wisata untuk melakukan studi tiru peserta pelatihan kepariwisataan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran Strategis 2.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.222.802.800,-	963.278.000,-	1.259.524.800,-	43,34
Pengembangan Kemitraan	519.028.500,-	510.051.900,-	8.976.600,-	98,27
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	788.381.600,-	786.541.000,-	1.840.600,-	99,77
JUMLAH	3.530.212.900,-	2.259.870.900,-	1.270.342.000,-	64,02

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.4. tersebut di atas adalah sebesar Rp.2.259.870.900,- dari anggaran sebesar Rp.3.530.212.900,- atau 64,02%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 60,83% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat

penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) masih belum tercapainya wajib belajar 9 tahun, (2) belum optimalnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pencapaian mutu pendidikan terutama pada daerah pinggiran, (3) masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang ada serta (4) masih terjadinya kesenjangan dalam pemerataan penempatan guru-guru.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah “rangking rata-rata nilai ujian nasional”. Untuk sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja indikator “rangking rata-rata nilai ujian nasional” dengan tidak dapat dilakukan perhitungan karena Ujian Nasional Tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi Covid 19. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.8
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Rangking rata-rata nilai ujian Nasional	10	7	10	70,00	6	-	N/A
Rata-rata capaian					93,94			N/A

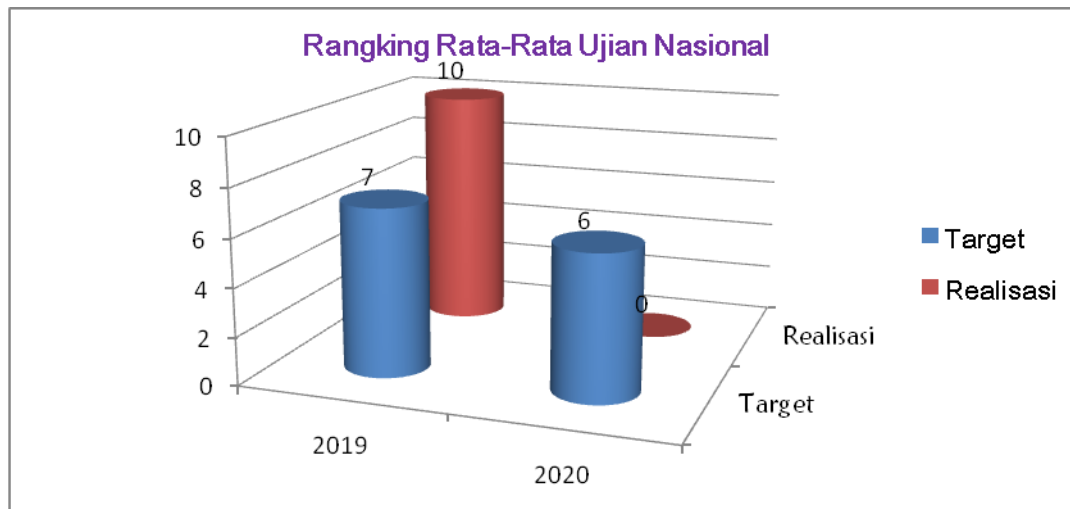
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rangking Rata – rata UN

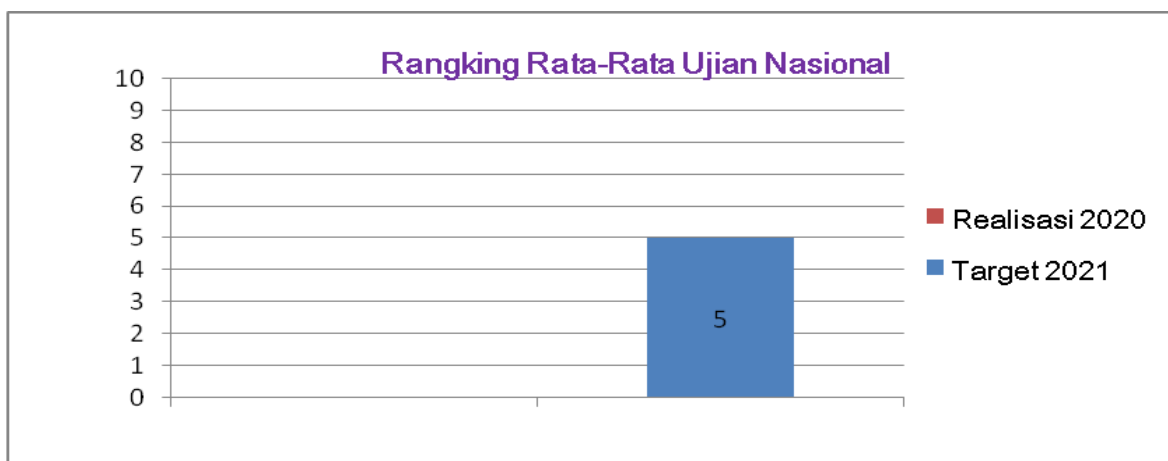
Ujian Nasional pada Tahun Ajaran 2019/2020 karena kondisi pandemic tidak dilaksanakan. Kelulusan peserta didik ini dilihat dari nilai ujian satuan pendidikan pada masing-masing sekolah. Dimana nilai peserta didik dilihat dari nilai semester I sd semester V.

Rangking Rata-Rata Ujian Nasional tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.11
Rangking Rata – rata UN

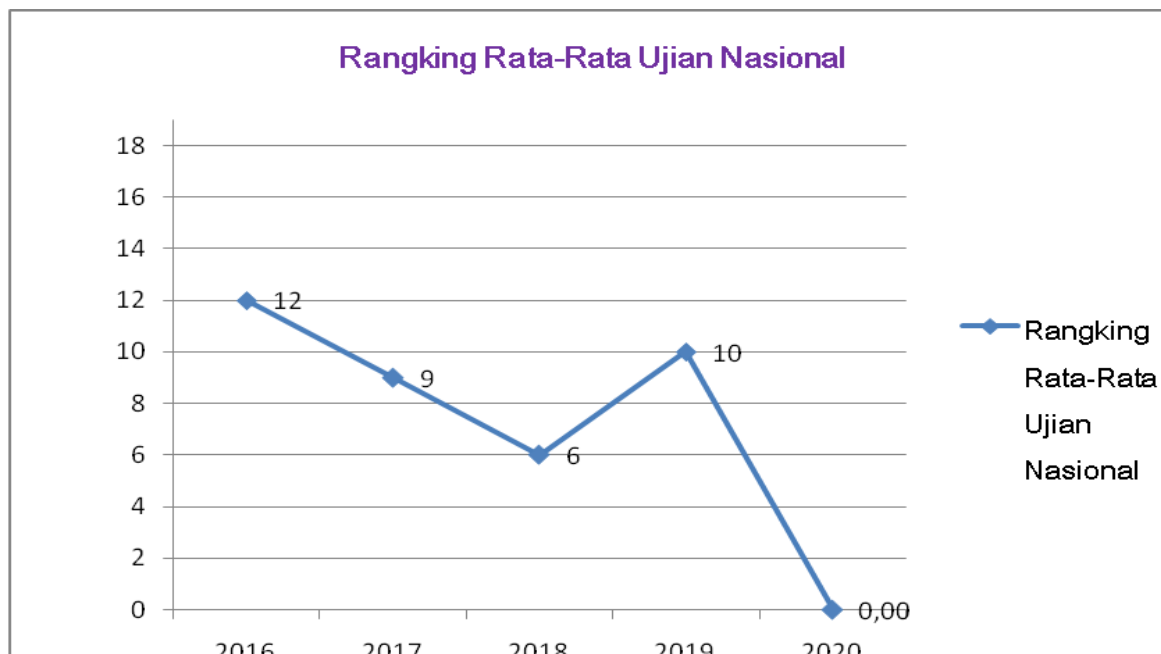
Capaian indikator Rangking Rata-Rata Ujian Nasional tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.11.1
Perbandingan Rangking Rata – rata UN Tahun 2020
dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rangking Rata-Rata Ujian Nasional belum mencapai akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu

dilakukan penyesuaian terhadap target dan upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rangkings Rata-Rata Ujian Nasional selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.11.2
Rangking Rata – rata UN Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 3.1. antara lain adalah :

1. Kondisi pandemic covid 19 dimana ujian nasional tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dimana terdapat beberapa hal-hal yaitu:

a. Ujian Nasional (UN):

- UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan.
- Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan dikemudian.

b. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
 - Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic Covid-19.
 - Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
 - Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
- c. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini.
 - Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
 - Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 - Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan Sekolah Dasar (SD) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - b. Kelulusan Sekolah Menengah pertama (SMP) / sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
- d. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini.
- Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
- Ujian akhir semester untuk Kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 3.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	20.227.570.600,-	19.716.077.270,-	511.493.330,-	97,47
Manajemen Pelayanan Pendidikan	85.000.000,-	82.247.000,-	2.753.000,-	96,76
JUMLAH	20.312.570.600,-	19.798.324.270,-	514.246.330,-	97,47

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.19.798.324.270,- dari anggaran sebesar Rp.20.312.570.600,- atau 97,47%. Sasaran ini tidak bisa dikategorikan efisiensi atau tidak disebabkan karena capaian indikator ini tidak ada karena pelaksanaan Ujian nasional tahun 2020 ditiadakan.

Sasaran Strategis 3.2 **Meningkatnya Pelayanan Kesehatan**

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Berhasilnya pembangunan kesehatan ditandai dengan perilaku masyarakat yang pro aktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya pelayanan kesehatan” adalah Angka usia harapan hidup. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **99,15%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.9
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Angka usia harapan hidup	69,23	70,19	69,70	99,30	70,39	69,79	99,15
Rata-rata capaian					99,30			99,15

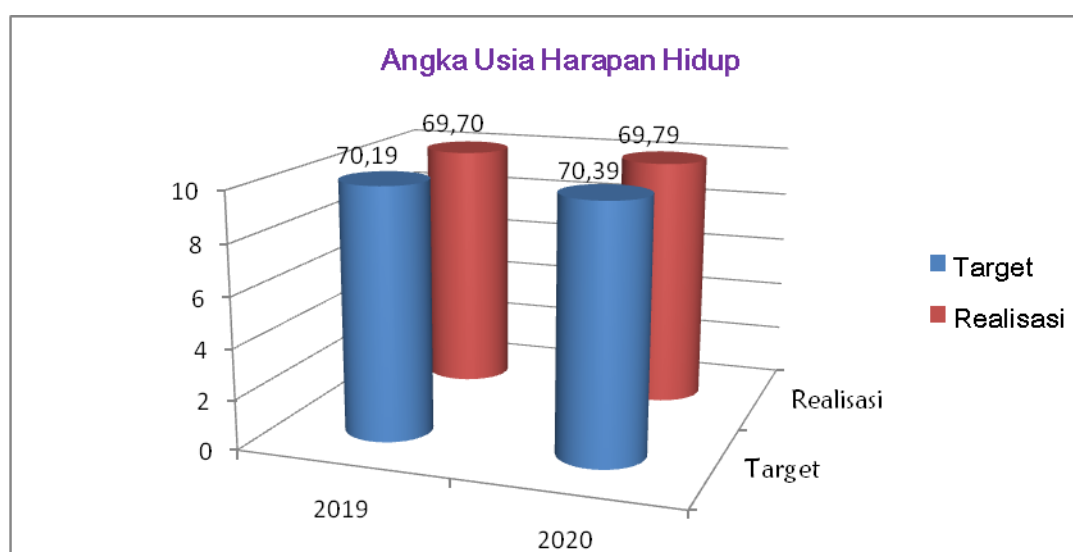
Sumber data : Dinas Kesehatan, BPS, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2016 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 73,5 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 69,79 atau sebesar 99,15%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 0,09. Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sebesar 69,79 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 69,47 namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 71,47.

Angka Harapan Hidup tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.12
Angka Usia Harapan Hidup

Peningkatan usia harapan hidup ditandai dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, status ekonomi masyarakat yang mulai meningkat yang secara tidak langsung status gizi masyarakat dapat terpenuhi. Dilaksanakan lokakarya lansia dengan mengundang ketua lansia jorong untuk memaparkan program lansia.

Meningkatnya usia harapan hidup penduduk membawa implikasi bertambahnya jumlah lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meningkatnya jumlah tersebut sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup ini diiringi membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

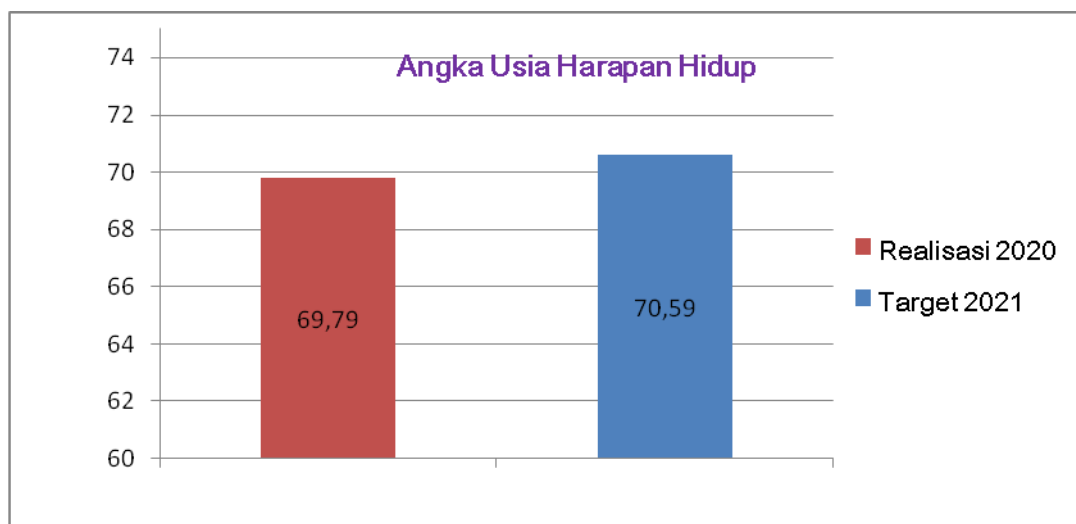
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0. Saat ini Angka Kematian bayi di Kab Lima Puluh Kota masih berada di angka 15,7/1000 kelahiran hidup. Walaupun angka ini masih jauh dibawah angka nasional berdasarkan SKDI 2017 sebesar 25/1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian balita di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2020 10,6/1000 kelahiran hidup, walaupun angka ini juga masih jauh dibawah angka Nasional berdasarkan SKDI 2017 sebesar 32/1000 kelahiran hidup.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup. Angka kematian ibu di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar 97/100.000 kelahiran hidup dan angka ini, angka ini masih jauh lebih rendah dari angka Nasional berdasarkan SUPAS Tahun 2015 sebesar 305/100.000 kelahiran hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi. Prevalensi penyakit metabolik di Kab. Lima Puluh Kota saat ini adalah

1,6% untuk Diabetes dan 24,5% untuk hipertensi. Angka ini jauh lebih rendah dari Angka Nasional berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 untuk prevalensi DM adalah 8,5% dan Hipertensi 34,1%.

- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi. Tahun 2020 kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota 80/100.000 penduduk, sedangkan persentase kasus diare sebesar 44,9%, angka kesakitan DBD sebesar 10,9/100.000 penduduk. Angka ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan angka Nasional.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki 5 Pusk Rawatan dan 17 Pusk Non Rawatan, 88 Pustu dan 131 Poskesri yang tersebar di 13 Kecamatan.

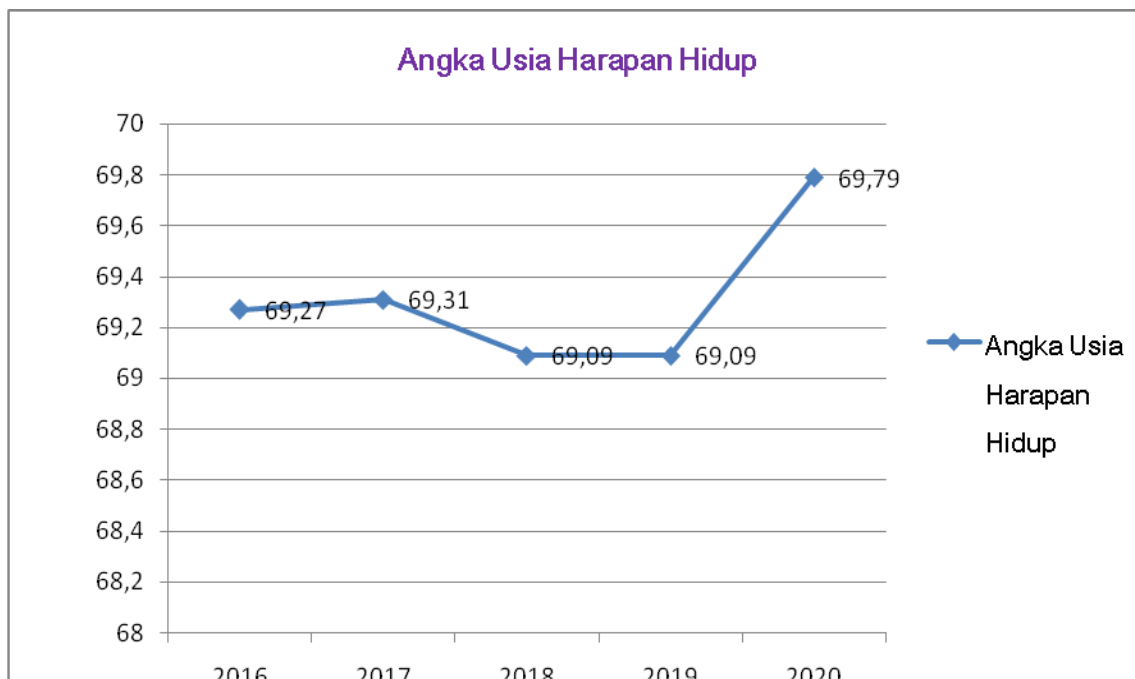
Capaian indikator Angka Harapan Hidup tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.12.1
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2020
dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk

perkembangan Angka Harapan Hidup selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.12.1
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 3.2. antara lain adalah :

1. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain :
 - Angka kematian ibu melahirkan 0,029%
 - Persentase kemaatian balita 0,18%
 - Visite Rate diangka 2
 - Prevalensi kejadian penyakit 13,9%
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
3. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
4. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
6. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, dari faktor yang mendasar seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras.

Ditengah mewabahnya infeksi virus corona saat ini sangat mempengaruhi tatanan hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat dunia. Baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi Covid-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental (psikis). Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental.

Sasaran Strategis 3.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Upaya Kesehatan Masyarakat	23.299.018.100,-	15.155.935.483,-	8.143.082.617,-	65,05
Perbaikan Gizi Masyarakat	762.295.000,-	345.788.335,-	416.506.665,-	45,36
Program Pengawasan Obat dan Makanan	73.614.000,-	61.468.000,-	12.146.000,-	83,50
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	3.145.317.610,-	2.917.148.812,-	228.168.798,-	92,75
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.510.000,-	27.110.000,-	1.400.000,-	95,09
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	29.104.300,-	24.234.300,-	4.870.000,-	83,27
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	125.951.400	38.952.500,-	86.998.900,-	30,93
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	24.780.567.037,-	18.144.893.763,-	6.635.673.274,-	73,22
Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita	5.080.000,-	3.880.000,-	1.200.000,-	76,38
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3.264.233.309,-	1.928.419.371,-	1.335.813.938,-	59,08
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	21.242.538.704,-	16.523.073.529,-	4.719.465.175,-	77,78
JUMLAH	76.756.229.460,-	55.170.904.093,-	21.585.325.367,-	71,88

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.55.170.904.093,- dari anggaran sebesar Rp.76.756.229.460,-

atau 71,88%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,15% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 3.3 **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak**

Ketimpangan gender sudah lama menjadi persoalan, namun sampai saat ini masih menjadi isu yang menjadi perhatian semua pihak. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki mencakup berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, wewenang dalam pengambilan keputusan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan dan komunitas masyarakat dan bidang-bidang lainnya yang kemudian memunculkan isu *gender gap*.

Dari kacamata sosial, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan *egalitarianism* (meyakini bahwa setiap individu bersamaan hak-haknya dalam kehidupan social, politik dan ekonomi). Hal inilah yang diyakini dan mendorong pada negara-negara maju sudah terdapat keseimbangan peran antara kaum perempuan dan laki-laki, dimana kesadaran akan kesetaraan gender menjadi sesuatu yang jamak dijumpai.

Kesetaraan gender (*gender equality*) bukan berarti pengambilalihan tanggungjawab dari laki-laki kepada perempuan, melainkan menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang serta berhak menentukan pilihan yang terbaik baginya.

Hal inilah mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peran serta Gender khususnya dalam aspek pembangunan sebagai salah satu sasaran strategis dalam pembangunan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” adalah “Indeks Pembangunan Gender” dan “Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” dengan 1 (dua) indikator kinerja mencapai **99.12%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.10
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.3

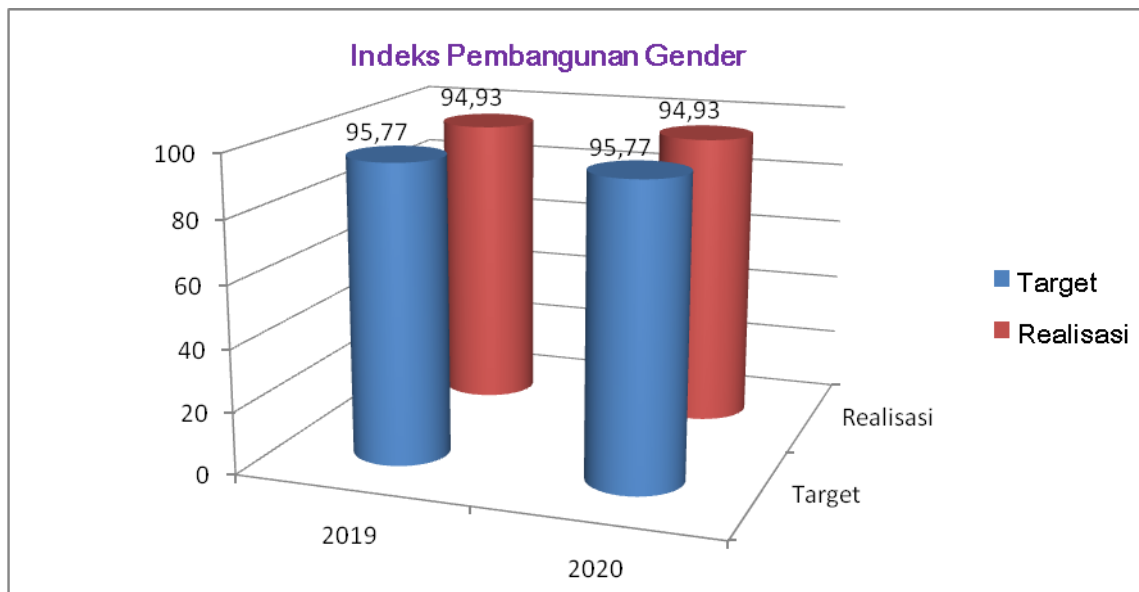
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,77	94,93	99,12	95,77	94.93(*)	99,12
Rata-rata capaian					99,12			99,12

Sumber data : Dinas PPKBPPPA,2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 95,77% terealisasi sebesar 94,93% atau sebesar 99,12%. Realisasi ini merupakan angka tahun lalu karena IPG tahun 2020 belum keluar karena penilaian baru akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, pencapaian IPG Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sama dengan pencapaian tahun sebelumnya dimana tahun 2019 dari target 95,77 terealisasi 94,93 atau sebesar 99,12%.

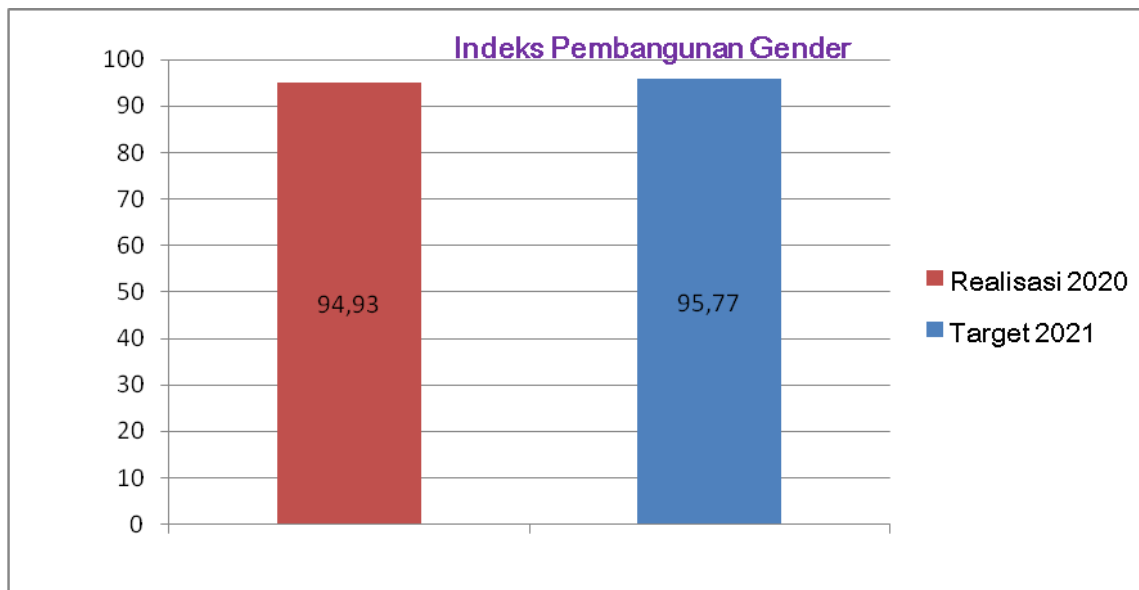


Grafik 2.3.13
Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Komponen pembentukan tersebut yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), pendidikan / angka harapan lama serta sumbangan pendapatan (ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain dinamika IPG dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut. Sehingga IPG menunjukkan capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender.

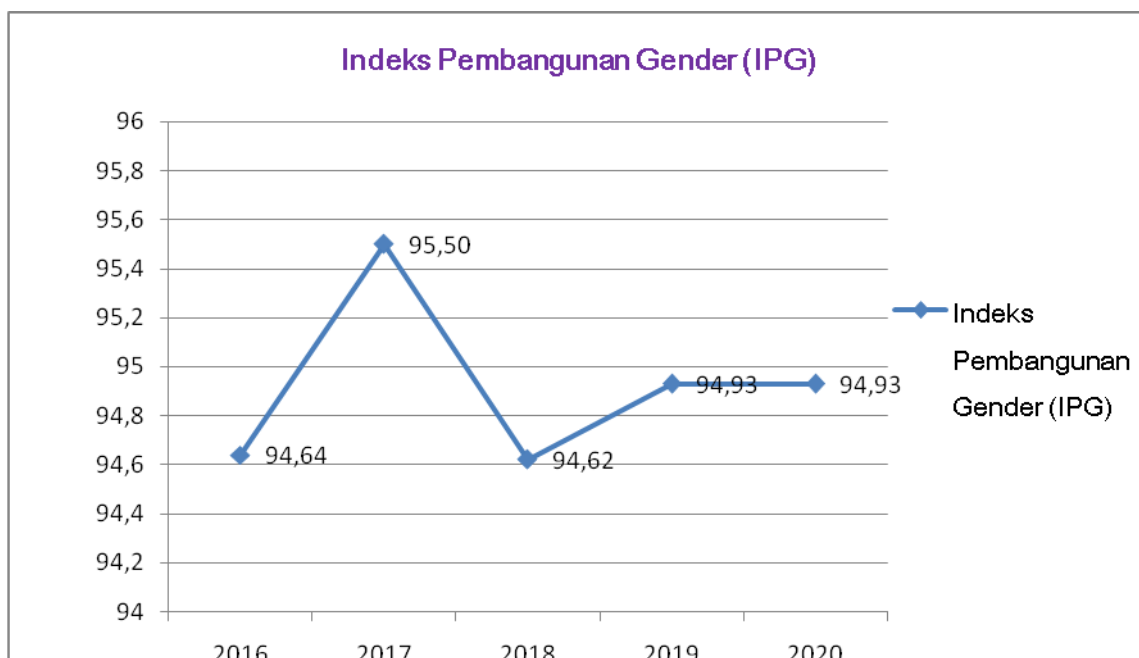
Target IPG Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 97,55% Realisasi IPG Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 belum diperoleh dan dipublikasikan provinsi pada bulan Juli 2021. Realisasi IPG Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengacu pada realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 94,93%.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.13.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020
dengan Target Akhir RPJM 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Gender belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Gender selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.13.1
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IPG ini adalah dalam bentuk seminar Peningkatan Kapasitas Perempuan bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilakukan juga Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Focal Point PUG (Kasi / Kasubag Program Perangkat Daerah se- Kabupaten Lima Puluh Kota) serta memberikan motivasi melalui lomba-lomba pemberdayaan perempuan, peringatan-peringatan hari besar perempuan, pembinaan kelompok-kelompok perempuan, dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus mematuhi protokol kesehatan, seperti kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dibatasi. Untuk kegiatan Bimtek PPRG bagi Focal Point tidak dilaksanakan karena adanya refocussing anggaran yang diarahkan untuk penanganan Covid-19. Peringatan Hari Besar Perempuan seperti peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu tidak dilaksanakan karena melibatkan banyak orang.

Salah satu faktor pendukung untuk memenuhi target IPG adalah pencapaian Rencana Aksi Daerah (RANDA) 2020 dengan predikat sangat memuaskan, sedangkan faktor penghambat adalah kegiatan banyak yang tidak berjalan maksimal karena adanya pandemi *Covid-19*.

Beberapa faktor pendukung pemenuhan target antara lain : dengan adanya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan workshop sehingga timbul keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami. Selanjutnya dengan telah terbentuknya Kelompok-kelompok Perlindungan Anak seperti Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN) sehingga tercipta nilai-nilai anti kekerasan di masyarakat. Dengan terbentuknya Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan pembentukan Woman Crisis Center (WCC) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan pencegahan kekerasan kepada perempuan. Dengan terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan Nagari Layak Anak maka hak-hak anak terpenuhi baik dibidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan sehingga berpengaruh besar terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

Secara lembaga, dengan adanya KLA, KELANA dan Nagari Layak Anak, maka masyarakat mulai tahu dan terpapar tentang pemenuhan hak anak.

Disamping itu dengan adanya Forum Anak, baik tingkat daerah, kecamatan dan nagari maka anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyuarakan suaranya untuk berperan dalam pembangunan sehingga terciptanya anak yang kreatif, inovatif yang terinformasikan melalui Ajang Kreatifitas Anak Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sedangkan faktor pengambat pencapaian target, sehubungan dengan terjadinya pandemi *Covid-19* kreasi dan inovasi anak tidak dapat ditampilkan secara maksimal karena dilakukan secara daring, kemudian ada kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan karena adanya keengganan masyarakat untuk mengakses pelayanan dimasa pandemi.

Prestasi yang diraih antara lain terpilih sebagai Duta Anak Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai pengurus Forum Anak Provinsi sebanyak 2 orang, pengurus Forum Anak Nasional sebanyak 1 orang.

Sasaran Strategis 3.3. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	135.454.800,-	132.951.940,-	2.502.860,-	98,15
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	256.395.787,-	255.194.560,-	1.201.227,-	99,53
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	71.500.400,-	71.402.000,-	98.400,-	99,86
JUMLAH	463.350.987,-	459.548.500,-	3.802.487,-	99,18

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.3. tersebut di atas adalah sebesar Rp.459.548.500,- dari anggaran sebesar Rp.463.350.987,- atau 99,18%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,12% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 3.4 **Menurunnya Angka Kemiskinan**

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2010 merupakan data terbesar dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,48%. Walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota turun selama 5 (lima) tahun terakhir, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di atas persentase kemiskinan Propinsi Sumatera Barat.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Menurunnya angka kemiskinan” adalah Angka Kemiskinan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka kemiskinan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **102,77%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 3.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.11
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Angka Kemiskinan	8,26	7,08	6,97	101,58	7,05	6,86	102,77
Rata-rata capaian					101,58			102,77

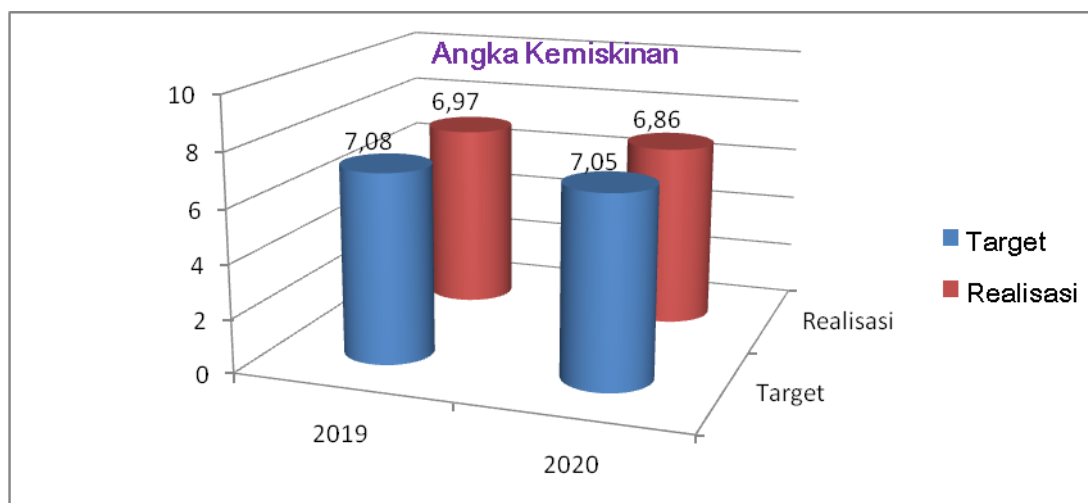
Sumber data : Bapelitbang, BPS, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2020 angka kemiskinan 6,86%, ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,11%. Penurunan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



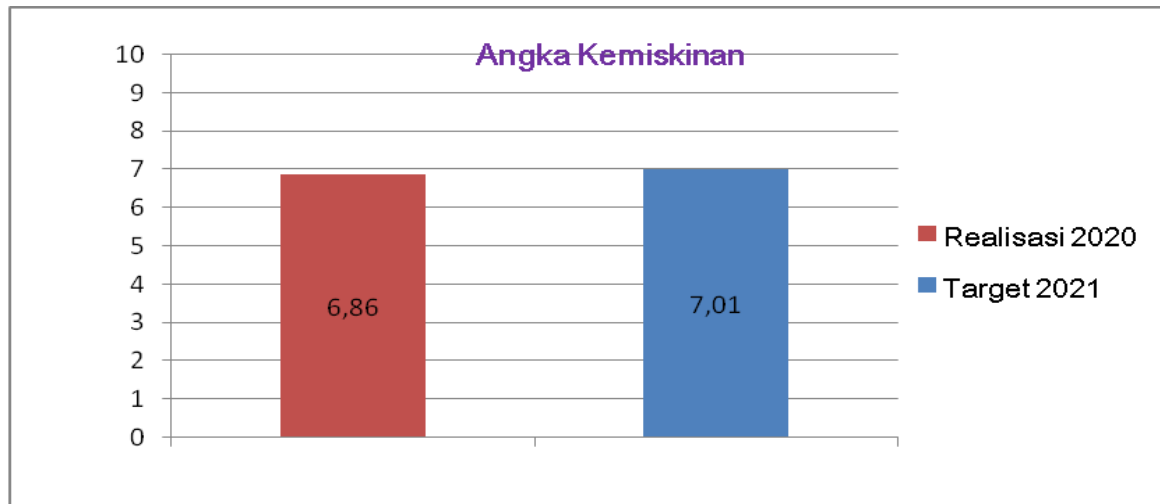
Grafik 2.3.14
Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan individu untuk hidup layak.

Dalam hal untuk percepatan penurunan Angka Kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 96), disamping itu pemerintah daerah juga menjadikan Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan pada RPJMD sebelumnya (Periode 2011-2015).

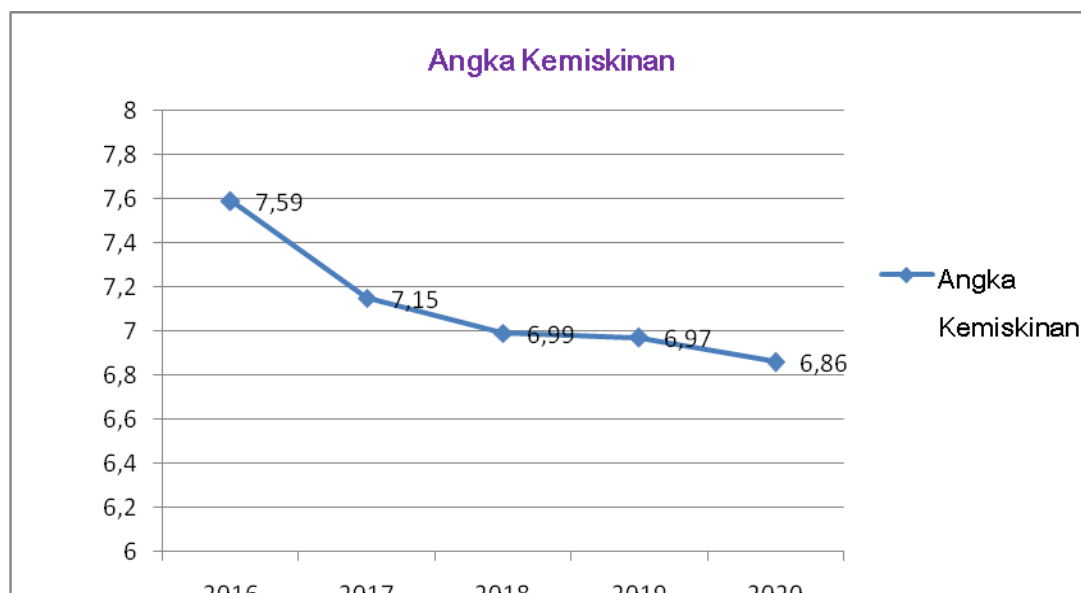
Percepatan penurunan angka kemiskinan di secara nasional menjadi program strategis dan prioritas oleh pemerintah pusat maupun daerah selama ini, sehingga lahirnya kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Inpres Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia yang juga dibarengi dengan berbagai program kegiatan mulai dari pembangunan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, peningkatan sarana transportasi, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan kualitas pendidikan, pengadaaan sarana air bersih dan lain sebagainya.

Capaian indikator Angka Kesmiskinan tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.14.1
Perbandingan Angka Kemiskinan Tahun 2020 dengan Target RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator angka kemiskinan belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan angka kemiskinan nusantara selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.14.2
Angka Kemiskinan Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 3.5. antara lain adalah :

1. Untuk memudahkan koordinasi dan memfasilitasi serta memberikan advokasi agar program/kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga membentuk Tim Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setiap tahunnya melalui Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya TKPKD melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah terhadap program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang ada dan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan dan advokasi terhadap semua program TKPKD telah menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan untuk 5 Tahun (2015-2020). Khusus tahun 2020 TKPKD menfokuskan kegiatan pada konvergensi penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penurunan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota (SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020).

Pelaksanaan koordinasi penurunan stunting tersebut dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya rapat-rapat koordinasi tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sosialisasi dan atau bimbingan teknis, kunjungan langsung ke lokasi kegiatan dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta melakukan konsultasi ke Kementrian dan Lembaga terkait, termasuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bapelitbang merupakan Sekretariat dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020 di Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1. Pelaksanaan rapat-rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kabupaten; 2. Pelaksanaan Aksi Konvergensi I Penanganan Stunting (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting); 3. Pelaksanaan Aksi Konvergensi II Penanganan Stunting (Penyusunan Rencana Kegiatan); 4. Pelaksanaan Aksi Konvergensi III Penanganan Stunting (Rembuk Stunting Kabupaten).

2. Terlaksananya pemberian bantuan PKH pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditargetkan sebanyak 16.717 KPM dapat terealisasi sebanyak 16.018 KPM. Realisasi kurang dari target dikarenakan adanya graduasi terhadap KPM PKH.

3. Terlaksananya pemberian Bantuan Sosial Pangan (BSP), Penerima manfaat program sembako ini mendapatkan Rp.200.000,- per bulan berupa Sumber Karbohidrat, Sumber Protein Hewani dan Sumber Protein Nabati. Pada Tahun 2020 penerima Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 22.451 KPM dan realisasinya 25.616 KPM.
4. Adanya Program Beasiswa Miskin
Program Beasiswa miskin ini diperoleh melalui dana APBN dengan mekanisme penyaluran dilakukan dengan transfer langsung ke rekening tabungan kepada siswa penerima beasiswa oleh pengelola beasiswa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pemerintah telah memprogramkan JKN yang dikelola oleh BPJS dimana Pemerintah Pusat membayarkan premi BPJS melalui program JAMKESMAS dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melakukan sharing anggaran untuk membayar premi masyarakat miskin yang belum menerima JAMKESMAS melalui program Jamkesda.
6. Adanya Program Inisiatif Daerah
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah juga membuat program percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan inisiatif daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan/transportasi melalui swadaya masyarakat salah satunya adalah Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas). Selain itu juga ada penyaluran bantuan bagi masyarakat melalui penyaluran zakat bagi siswa miskin yang berprestasi yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Dalam hal pengurangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga sudah melakukan program PAMSIMAS untuk meningkatkan akses untuk air aman dan sanitasi adalah prioritas utama, dikarenakan dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh infrastruktur sanitasi yang buruk terhadap kesehatan umum, perekonomian dan lingkungan. Di tempat penyebab utama kematian balita di Indonesia dua diantaranya diare dan tipus, ditularkan melalui kotoran manusia (feses) dan terkait langsung dengan kurangnya air bersih, sanitasi dan isu-isu kebersihan. Sulitnya akses untuk air bersih juga menyebabkan rumah tangga miskin, terutama perempuan dan anak-anak, menghabiskan banyak waktu untuk mengambil air.

PAMSIMAS berjuang untuk memperbaiki fasilitas yang ada dan memperluas akses sanitasi melalui pendekatan berbasis masyarakat. Di kabupaten Lima Puluh Kota Program Pamsimas sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Faktor- faktor yang mempengaruhi tercapainya target penurunan angka kemiskinan adalah :

- a. adanya komitmen yang kuat antara stakeholder terkait, OPD dan nagari dalam penurunan angka kemiskinan.
- b. Adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bersumber dari OPD dan nagari.

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota 6,86% masih lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat, dimana angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 2020 sekitar 6,56%, tapi masih lebih rendah dari angka kemiskinan tingkat nasional yang berada di angka 10,19% pada tahun 2020.

Sasaran Strategis 3.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	39.376.000,-	39.276.000,-	100.000,-	99,75
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	38.158.320,-	38.150.520,-	7.800,-	99,98
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpercil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	107.188.054,-	106.181.054,-	1.007.000,-	99,06
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.589.745,-	85.518.205,-	3.071.540,-	96,53
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	18.700.000,-	16.655.000,-	2.045.000,-	89,06
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	15.037.000,-	14.995.000,-	42.000,-	99,72
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	485.910.500,-	343.999.900,-	141.910.600,-	70,79
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	36.081.000,-	36.045.000,-	36.000,-	99,90
Pembangunan infrastruktur Pedesaan	66.916.800,-	42.465.000,-	24.451.800,-	63,46
Peningkatan Ketahanan Pangan	1.013.781.278,-	974.300.528,-	39.480.750,-	96,11
Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	2.400.000,-	2.400.000,-	-	100,00
JUMLAH	1.912.138.697,-	1.699.986.207,-	212.152.490,-	88,90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.5. tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.699.986.207,- dari anggaran sebesar Rp.1.912.138.697,- atau

88,90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,77% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas tata pemerintahan” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas tata pemerintahan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **95,71%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.12
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	69	58,78	85,19	73	69,87	95,71
Rata-rata capaian					85,19			95,71

Sumber data : OPD terkait

1. Indeks Reformasi Birokrasi

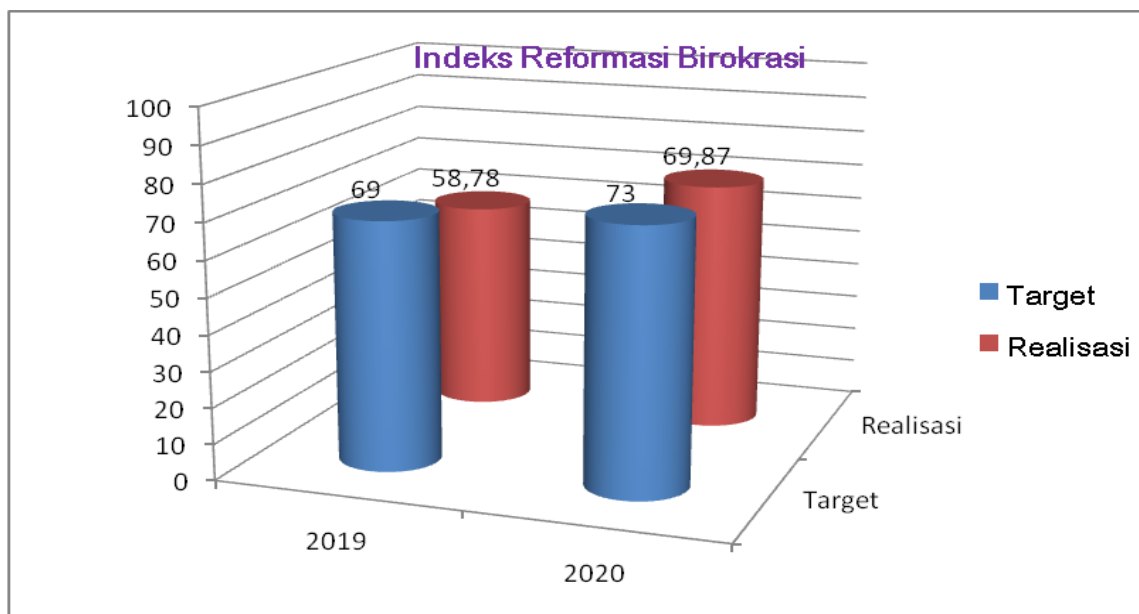
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota diperoleh dari hasil penghitungan 5 komponen Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Maturitas SPIP, Nilai E-Government, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, dengan WTP dijadikan nilai konstan.

Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.12.1
Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Nilai
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	56,39 (CC) (*)
2.	Indeks Profesionalitas ASN	53.72
3.	Nilai Maturitas SPIP	QA 3,0602 (Level 3)
4.	Nilai E-Government	3,17
5.	Opini BPK	WTP
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	69,87

(*) Nilai akuntabilitas tahun 2019 karena nilai akuntabilitas tahun 2020 belum dirilis hingga awal Maret 2021
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.15
Indeks Reformasi Birokrasi

➤ **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 terhadap Dokumen Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini dilihat dari perolehan nilai evaluasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 56,39 atau berpredikat CC. Selain dari itu, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berikut tabel penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.3.12.2
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,50	20,61
2.	Pengukuran Kinerja	25	11,89	11,98
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,42	9,48
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,50	5,66
5.	Capaian Kinerja	20	8,48	8,66
Nilai Hasil Evaluasi		100	54,79	56,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

➤ **Indeks Profesionalitas ASN**

Sebagai bagian terpenting dari reformasi birokrasi, terutama dalam upaya pengelolaan ASN, maka pengukuran kualitas ASN adalah prasyarat utama. Tanpa memiliki indikator yang spesifik, sulit bagi pemerintah untuk menjelaskan dan mengukur kualitas ASN kepada masyarakat.

Dengan penghitungan Indeks profesionalitas ASN, akan dapat diketahui dan mengontrol jabatan yang belum terisi, menyesuaikan kompetensi ASN dengan jabatan yang ada serta menyusun rencana pengembangan aparatur yang lebih jelas.

Dari Indeks Profesionalitas ASN diharapkan akan meminimalisir perbedaan ataupun jarak dalam suatu organisasi misalnya terkait dengan remunerasi dan lain sebagainya, selain itu juga dapat diketahui tingkat pelanggaran disiplin yang selanjutnya bisa dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Untuk nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 baru akan dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada pertengahan tahun 2020, oleh karena itu maka nilai Indeks Profesionalitas ASN yang digunakan adalah nilai indeks tahun 2020 yaitu sebesar 53,72.

➤ **Maturitas SPIP**

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan **Self Assessment (SA)** terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil penilaian sebelumnya **QA 3.5341 (terdefenisi)**. Untuk tahun 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Quality Assurance Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil **QA 3.0602 Level 3**. Dari 13 OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilihat pelaksanaan unsur SPIP yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kegiatan evaluasi penerapan SPIP di 13 dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6. Dinas Kependudukan dan Capil
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Badan Keuangan

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SPIP telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melihat pelaksanaan unsur SPIP di OPD yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

➤ Nilai E-Government

Nilai E-Government diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh nilai SPBE sebesar 3,17.

Secara keseluruhan penerapan pada aspek kebijakan tata kelola yang telah dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah cukup baik karena seluruh pengaturan tata kelola sudah memenuhi level 3 secara keseluruhan yaitu adanya kebijakan Tim Internal Pengarah SPBE, Kebijakan Inovasi Proses

Indeks	Negeral	Sumatera	SPBE	Rata-rata nilai	Provinsi	Kabupaten	Nilai
SPBE	2,26	3,19	3,14	2,37	2,56	2,04	2,43
Domain Kebijakan	2,07	2,94	2,92	2,14	2,94	1,86	2,18
Kebijakan Tata Kelola	2,01	2,75	2,99	2,15	2,42	1,79	2,18
Kebijakan Layanan	2,11	3,07	2,87	2,13	2,50	1,91	2,18
Domain Tata Kelola	1,95	2,87	2,97	2,32	2,87	1,70	2,08
Kelembagaan	1,88	2,90	2,93	2,28	2,04	1,64	2,02
Strategi & Perencanaan	1,97	2,66	2,98	2,25	2,44	1,74	2,10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,98	2,99	3,00	2,40	2,29	1,72	2,12
Domain Layanan SPBE	2,48	3,43	3,29	2,47	3,43	2,26	2,69
Administrasi Pemerintahan	2,52	3,52	3,40	2,62	2,82	2,42	2,80
Layanan Publik	2,23	3,28	3,09	2,20	2,58	1,98	2,49



Gambar 2.3.12

Nilai Indeks, SPBE, Domain dan Aspek

Bisnis, Kebijakan Internal Rencana Induk, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi dan Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang memenuhi level standarisasi dan pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

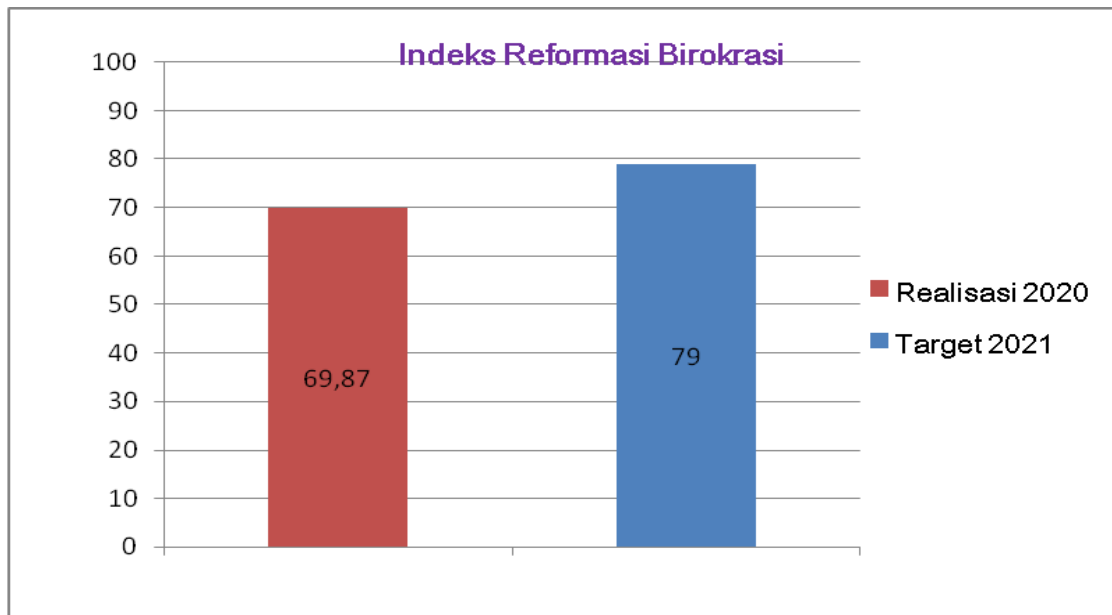
➤ **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam kurun waktu lima tahun berturut turut, tahun 2015, 2016 dan 2017, 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memperoleh opini WTP dari BPK. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai telah memenuhi persyaratan antara lain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, informasi yang ada dalam nota laporan keuangan sudah memadai, Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah memadai sehingga penyimpangan dapat dicegah serta kepatuhan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan pengelolaan aset daerah sudah baik. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

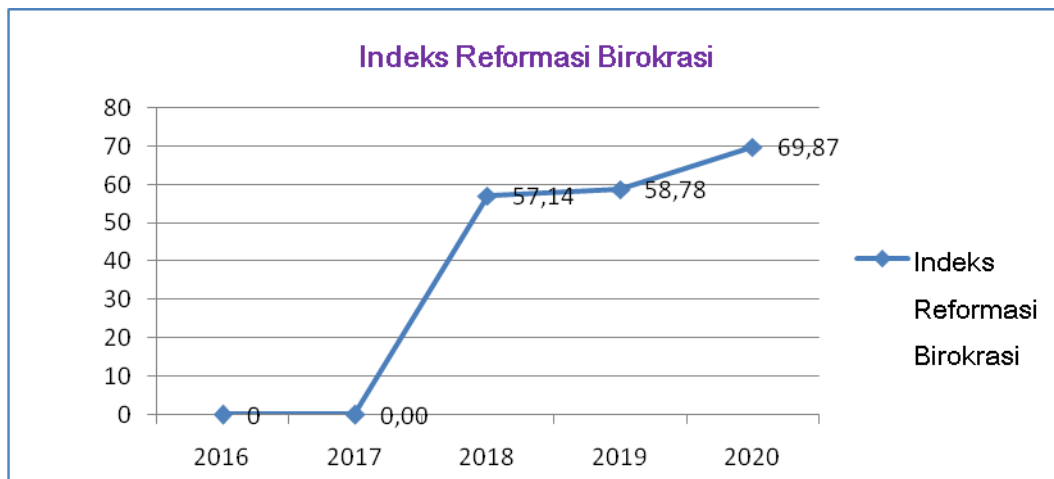
Opini BPK WTP dapat dipertahankan berkat usaha dan kerja keras seluruh SKPD dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.15.1
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2021. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.15.2
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 - 2020

Sasaran Strategis 4.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1.502.394.000,-	1.384.423.687,-	117.970.313,-	92,15
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.000.000,-	6.950.000,-	50.000,-	99,29
Perencanaan Pembangunan Daerah	170.870.572,-	170.624.823,-	245.749,-	99,86
Pengembangan Data/ Informasi	18.440.944,-	18.440.944,-	-	100,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.583.564.658,-	2.305.429.996,-	278.134.662,-	89,23
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.138.704.400,-	3.086.541.145,-	52.163.255,-	98,34
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.767.622.000,-	1.723.119.773,-	44.502.227,-	97,48
Reformasi Birokrasi	69.682.517,-	68.549.200,-	1.133.317,-	98,37
JUMLAH	9.258.279.091,-	8.764.079.568,-	494.199.523,-	94,66

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.8.764.079.568,- dari anggaran sebesar Rp.9.258.279.091,- atau 94,66%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,71% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 4.2 **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **109,07%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.2. disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.13
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	69,5	76,22	82,76	108,58	77	83,99	109,07
Rata-rata capaian					108,58			109,07

Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.2. di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 77 terealisasi 83,99 atau sebesar 109,07%.

Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2019 dimana dengan target 76,22 terealisasi sebesar 82,76 atau sebesar 108,58%.

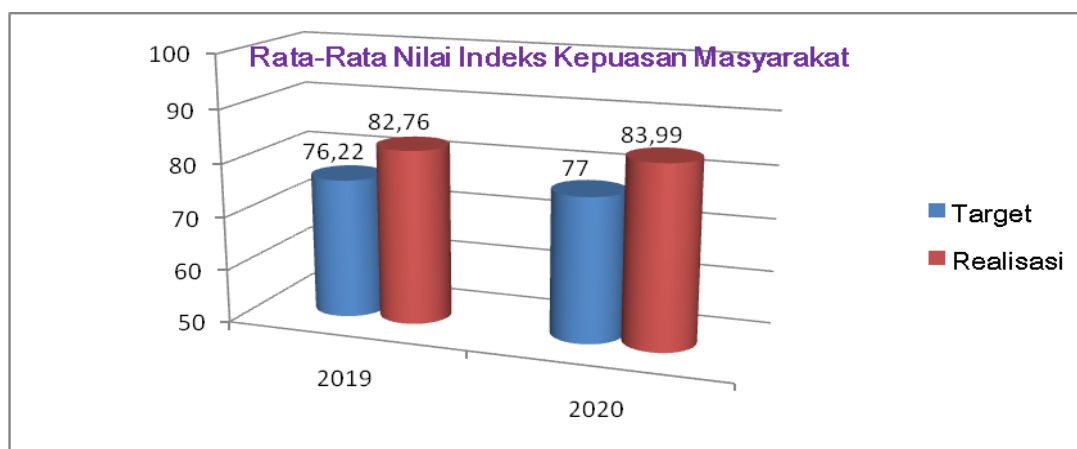


Gambar 2.3.14
Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

58 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.16
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Rekapitulasi IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.13.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.13.1
Rekapitulasi IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	84,54	B	Baik
2	INSPEKTORAT	81,74	B	Baik
3	BAPELITBANG	81,30	B	Baik
4	DINAS TENAGA KERJA & PERINDUSTRIAN	77,69	B	Baik

5	RSUD ACHMAD DARWIS	80,36	B	Baik
6	DINAS CAPIL	94,11	A	Sangat Baik
7	DINAS SOSIAL	86,14	B	Baik
8	DINAS LHPP	82,33	B	Baik
9	BADAN KEUANGAN	82,63	B	Baik
10	BKPSDM	80,30	B	Baik
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	79,29	B	Baik
12	KEC. HARAU	88,47	B	Baik
13	KEC. SITUJUAH	82,72	B	Baik
14	KEC. KAPUR IX	86,64	B	Baik
15	KEC. BUKIK BARISAN	89	A	Sangat Baik
16	KEC. MUNGKA	84,28	B	Baik
17	KEC. GUGUAK	91,25	A	Sangat Baik
18	KEC. PANGKALAN	96,04	A	Sangat Baik
19	KEC. GUNUANG OMEH	87,26	B	Baik
20	KEC. LAREH SAGO HALABAN	85,41	B	Baik
21	KEC. PAYAKUMBUH	85,43	B	Baik
22	KEC. LUAK	86,89	B	Baik
23	PUSKESMAS SIALANG	76,85	B	Baik
24	PUSKESMAS RIMBO DATA	82,11	B	Baik
25	PUSKESMAS PANGKALAN	85,02	B	Baik
26	PUSKESMAS MUNGO	85,98	B	Baik
27	PUSKESMAS MAEK	79,53	B	Baik
28	PUSKESMAS KOTO TINGGI	84,18	B	Baik
29	PUSKESMAS KOTO BARU	82,02	B	Baik
30	PUSKESMAS HALABAN	80,04	B	Baik
31	PUSKESMAS BATU HAMPAR	80,85	B	Baik
32	PUSKESMAS BARUAH GUNUANG	96,42	A	Sangat Baik
33	PUSKESMAS BANJA LOWEH	84,21	B	Baik
34	PUSKESMAS SULIKI	87,25	B	Baik
35	PUSKESMAS PAKAN RABAA	77,30	B	Baik
36	PUSKESMAS PILADANG	77,15	B	Baik
37	PUSKESMAS SITUJUAH	84,46	B	BAIK
38	PUSKESMAS MUNGU	85,98	B	BAIK
39	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG	77,45	B	BAIK
40	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG	79,32	B	BAIK
41	PUSKESMAS TANJUNG PATI	94,66	A	Sangat Baik
42	PUSKESMAS PADANG KANDIS	77,00	B	BAIK
IKM KABUPATEN TAHUN 2020		83,998	B	Baik

Sumber data: IKM masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata IKM masing-masing Perangkat Daerah berada pada kinerja unit pelayanan BAIK dengan nilai IKM 83.99 Dari 42 (Empat Puluh Dua) Perangkat Daerah 6 (enam) Perangkat Daerah dengan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik yaitu :

1. Dinas Capil
2. Kecamatan Bukik Barisan
3. Kecamatan Guguak
4. Kecamatan Pangkalan

5. Puskesmas Baruah Gunuang

6. Puskesmas Tanjung Pati

36 (Tiga Puluh enam) Perangkat Daerah dan PUSKESMAS berada pada Kinerja Unit Pelayanan Baik yaitu :

1	Sekretariat Daerah	21	Kec. Luak
2	Inspektorat	22	Puskesmas Dangung-Dangung
3	Bapelitbang	23	Puskesmas Sialang
4	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	24	Puskesmas Rimbo Data
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25	Puskesmas Mungo
6	Puskesmas Piladang	26	Puskesmas Padang Kandis
7	Dinas Sosial	27	Puskesmas Muaro Paiti
8	Dinas LHPP	28	Puskesmas Gunung Malintang
9	BKPSDM	29	Puskesmas Muara Paiti
10	RSUD Ahmad Darwis	30	Puskesmas Maek
11	Badan Keuangan	31	Puskesmas Koto Tinggi
12	Kec. Harau	32	Puskesmas Koto Baru
13	Kec. Kapur IX	33	Puskesmas Halaban
14	Kec. Mungka	34	Puskesmas Batu Hampar
15	Kec. Situjuah Limo Nagari	35	Puskesmas Suliki
16	Kec Lareh Sago Halaban	36	Puskesmas Banja Loweh
17	Puskesmas Pakan Rabaa		
18	Kec Pangkalan		
19	Kec. Gunuang Omeh		
20	Kec. Payakumbuh		

Tabel 2.3.13.2
Rata-Rata Nilai Interval Unsur SKM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Unsur SKM	NRR Kabupaten
1	Persyaratan	3,43
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20
3	Waktu Penyelesaian	3,24
4	Biaya/ Tarif	3,64
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,34
6	Kompetensi Pelaksana	3,33
7	Perilaku Pelaksana	3,35
8	Sarana dan Prasarana	3,23
9	Penanganan pengaduan , saran dan masukan	3,54
	Nilai Rata-Rata Interval Kabupaten	3,39

Sumber data : Rata-rata Nilai Interval Perangkat Daerah Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara publik masyarakat yang datang berurusan ke masing-masing Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merasa puas terhadap pelayanan jasa publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indek rata-rata 3,39. Terdapat 3 (tiga) jenis unsur SKM yang memiliki indeks kepuasan diatas rata-rata yaitu biaya/ tarif dengan nilai interval **3,64**, Persyaratan dengan nilai interval **3,43**, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval **3,54**. Ketiga unsur SKM tersebut menurut responden memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 6 (enam) unsur SKM lainnya. Sedangkan jenis pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan oleh responden adalah unsur biaya/ tarif. Penjelasan dari masing-masing unsur pelayanan SKM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 :

1. Unsur Persyaratan

Nilai rata-rata unsur persyaratan pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,43**. Meskipun unsur persyaratan dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang meyakini bahwa persyaratan pelayanan di masing-masing unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat daerah dirasa tidak sesuai dan kurang sesuai, sehingga responden

harus bolak-balik untuk melakukan pengurusan dokumen karena ada persyaratan yang belum terpenuhi.

2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nilai rata-rata unsur sistem, mekanisme dan prosedur pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,20**. Meskipun unsur sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan di masing-masing unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah masih kurang mudah dan berbelit-belit. Tidak jelasnya sistem, mekanisme dan prosedur menyebabkan penerima layanan menjadi kebingungan saat berurusan.

3. Unsur Waktu Penyelesaian

Nilai rata-rata unsur waktu penyelesaian pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,24**. Meskipun unsur waktu penyelesaian dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian pelayanan di masing-masing unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat daerah dirasa tidak sesuai dengan SOP yang telah ada.

4. Unsur Biaya/ tarif

Nilai rata-rata unsur biaya/ tarif pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,34**. Meskipun unsur biaya/ tarif penyelesaian dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa biaya/tarif penyelesaian pelayanan di masing-masing unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat daerah dirasa tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Diharapkan kedepannya biaya/ tarif yang dikenakan kepada penerima layanan disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat dan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Nilai rata-rata unsur produk spesifikasi jenis pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,64**. Meskipun unsur produk spesifikasi jenis pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan di masing-masing unit pelayanan yang ada

pada masing-masing Perangkat daerah dirasa tidak sesuai dengan produk yang dihasilkan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana

Pada tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata untuk unsur kompetensi Pelaksana sebesar **3,33** dalam kategori baik. Tetapi menurut beberapa responden menyatakan bahwa petugas dirasa kurang mampu memberikan pelayanan di beberapa unit pelayanan Perangkat Daerah. Terlihat beberapa alasan dari responden yang mengatakan bahwa kompetensi pelaksana yang terdiri dari kemampuan petugas dan tanggung jawab petugas di beberapa masing-masing unit pelayanan yang ada pada Perangkat Daerah masih di rasa kurang dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlunya peningkatan kemampuan kompetensi pelaksana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Unsur Perilaku Pelaksana

Unsur perilaku pelaksana menunjukan nilai rata-rata sebesar **3,35** dalam kategori baik. Responden menyatakan bahwa ada beberapa orang petugas dirasa kurang sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan. Berikut merupakan alasan responden mengatakan bahwa petugas kurang ramah dan kurang sopan.

8. Unsur Sarana dan Prasarana

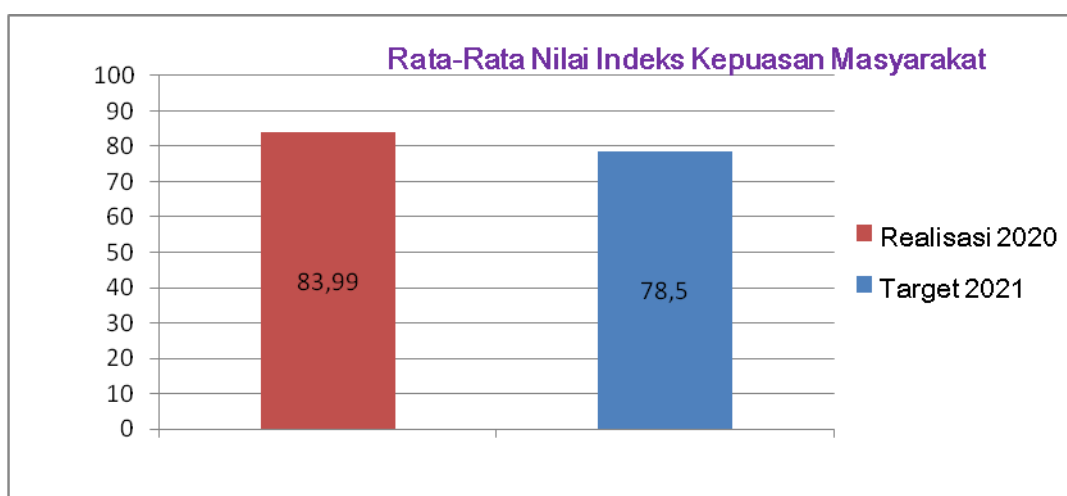
Nilai rata-rata unsur sarana dan prasarana pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,23**. Meskipun unsur sarana dan prasarana dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang meyatakan bahwa sarana dan prasarana di beberapa unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum memadai, hal ini dibuktikan dengan masih belum tersedianya ruang tunggu khusus ataupun masih kurangnya sarana dalam proses mendukung pelaksanaan pekerjaan.

9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Nilai rata-rata unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Baik dengan nilai interval **3,54**. Meskipun unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam pelayanan menurut masyarakat adalah baik, akan tetapi masih ada beberapa responden yang meyatakan bahwa penanganan pengaduan, saran dan masukan di beberapa unit pelayanan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum ditindak lanjuti,

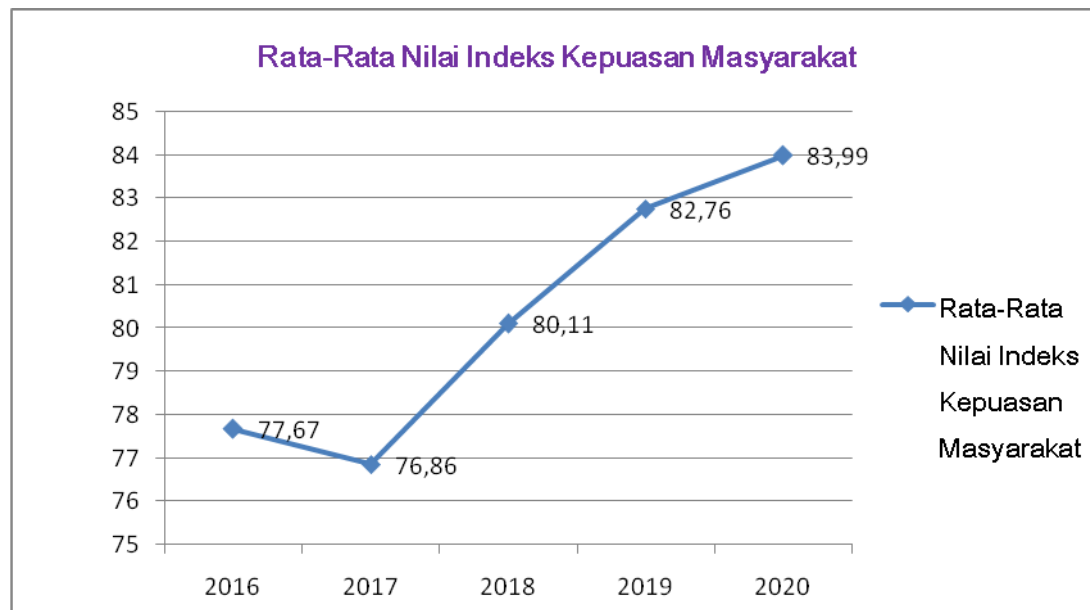
hal ini dibuktikan dengan belum adanya alur penanganan pengaduan di beberapa Perangkat Daerah dan adanya beberapa pengaduan dari masyarakat yang belum ditindaklanjuti atau penanganan pengaduan belum berjalan dengan optimal. Salah satu perbaikan pelayanan yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pelayanan petugas agar lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat dan mensosialisasikan tata cara pengaduan dengan cara menempel di mading, poster atau banner.

Capaian indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.16.1
Perbandingan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.16.1
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016- 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.2. antara lain adalah :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh 42 Perangkat Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nilai Rata-rata Interval **3,39** dengan IKM **83,998** dengan dengan mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 42 Perangkat Daerah dan Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang Baik. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hampir keseluruhan unit pelayanan masuk dalam kategori BAIK dan terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan mutu pelayanan A (sangat Baik) atau 9%, 37 (Tiga puluh enam) Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan B (baik) atau 91 % .
3. Terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu dipertahankan antara lain biaya/ tarif dengan nilai interval **3,64**, penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval dengan nilai interval **3,54**, serta Persyaratan dengan nilai interval **3,42**. Ketiga unsur SKM tersebut menurut responden memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 6 (enam) unsur SKM lainnya.
4. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana dan sarana prasarana.

Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Rekomendasi dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD / unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMS center, Email, dan / atau penempatan Kotak Saran.
6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin

survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

7. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (43 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
8. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 4.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.732.650,-	75.732.650,-	-	100,00
Peningkatan Kesempatan Kerja	11.049.000,-	11.049.000,-	-	100,00
Penataan Administrasi Kependudukan	1.723.855.500,-	1.711.040.974,-	12.814.526,-	99,26
JUMLAH	1.810.637.150,-	1.797.822.624,-	12.814.526,-	99,29

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.797.822.624,- dari anggaran sebesar Rp.1.810.637.150,- atau 99,29%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,99% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 5 : MEMPERKUAT KELEMBAGAAN NAGARI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS JORONG

Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” adalah Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **98,65%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.14
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Jumlah nagari berstatus berkembang dan maju	N/A	72 nagari	72 nagari	100,00	74 nagari	73 nagari	98,65
Rata-rata capaian					104,00			98,65

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju

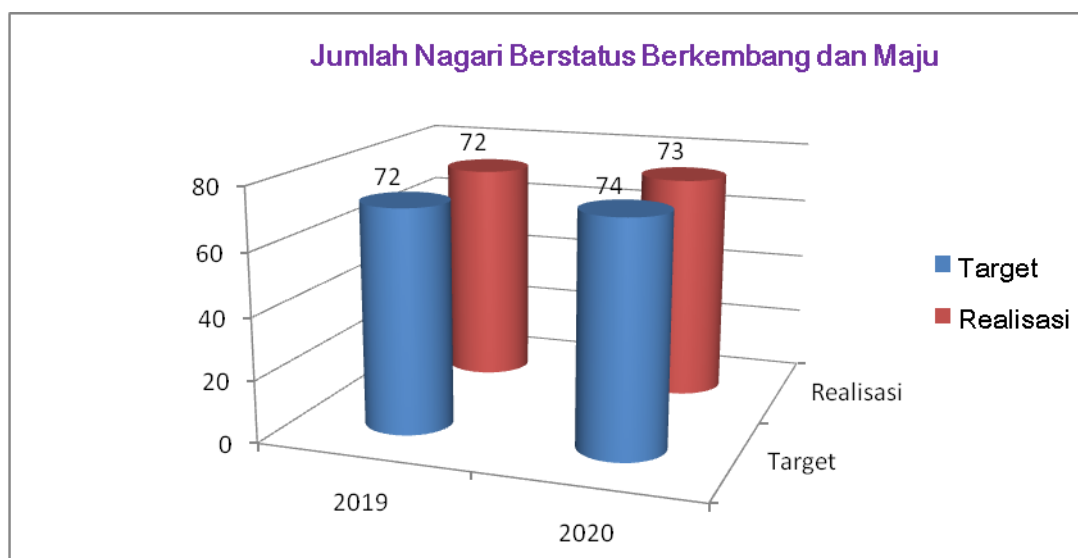
Dari Target 74 Nagari terealisasi 73 Nagari atau dengan kata lain pencapaian 98,65%. Walaupun target pencapaian Nagari yang berkembang dan Maju sebanyak 73 Nagari dari Target Awal RPJMD, namun di Tahun 2020 ini, 4 Nagari telah melampaui target pencapaian IKU Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 -2021), sehingga jumlah nagari yang mengalami peningkatan berjumlah 77 Nagari, 73 Nagari berstatus Maju dan Berkebang (45 Nagari Maju dan 28 Nagari Berkembang) sedangkan 4 Nagari berstatus Mandiri. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Yang biasa juga disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan Perhitungan IDM tersebut Desa/Nagari dikategorikan menjadi Lima yaitu Mandiri, Maju Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Perhitungan Tahun 2019 diperoleh hasil yaitu :

- a. Mandiri : 4 Nagari (Guguak VIII Koto, Sarilamak, Taram dan Situjuah Batua).
- b. Maju : 45 Nagari (Tanjuang Bungo, Suliki, Limbanang, VII Koto Talago, Kubang, Koto Baru Simalagang , Piobang, Koto Tengah Simalanggang, Sikabu-Kabu Tj Aro Pd. Pjg, Mungo, Sungai Kamuyang, Andaleh, Batu Balang, Gurun, Lubuak Batingkok, Koto Tuo, Tanjuang Balik, Gunuang Malintang, Pangkalan, Koto Alam , Tanjuang Pauh ,Muaro Paiti, Durian Tinggi, Labuah Gunuang, Batu Payuang, Ampalu, Halaban, Balai Panjang, Situjuah Banda Dalam, Situjuah Gadang, Situjuah Ladang Laweh, Tungka, Jopang Mangganti, Simpang Kapuak, Mungka, Talang Maua, Sungai Antuan, Baruah Gunuang,

Koto Tangah, Sariak Laweh, Koto Tangah Batu Hampa, Batu Hampa, Suayan, Pauah Sangik dan Durian Tinggi).

- c. Berkembang : 28 Nagari (Kurai, Sungai Rimbang, Anding, Simpang Sugiran, Sungai Talang, Taeh Bukit, Simalanggang, Sungai Baringin, Taeh Baruah, Solok Bio-Bio, Bukik Limbuku, Tarantang, Harau, Pilubang, Manggilang, Koto Bangun, Lubuak alai, Sialang, Pandam Gadang, Koto Tinggi, Talang Anau, Bukit Sikumpa. Tanjuang Gadang, Sitanang, Maek, Banja Laweh, Sungai Naniang, dan Sungai Balantiak).
- d. Tertinggal : 2 Nagari (Koto Lamo & Galugua).
- e. Sangat Tertinggal : -

Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.17
Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju

Evaluasi Perkembangan Status Indek Desa Mandiri Tahun 2020 adalah kondisi desa tahun 2019, adapun hasil evaluasi seperti data berikut :

Tabel 2.3.14.1
Evaluasi Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) 2018/2019
Desa (Nagari) di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2018	2019	KET.	2018	2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	SULIKI						
1	KURAI	0,5948	0,6527	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
2	SUNGAI RIMBANG	0,7054	0,7054	TETAP	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
3	TANJUANG BUNGO	0,7700	0,7941	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
4	SULIKI	0,7757	0,8002	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
5	LIMBANANG	0,7652	0,7481	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP

NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2018	2019	KET.	2018	2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ANDIANG	0,6181	0,6629	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	GUGUAK						
7	GUGUAK VIII KOTO	0,8359	0,8359	TETAP	MANDIRI	MANDIRI	TETAP
8	VII KOTO TALAGO	0,7890	0,8010	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
9	SUNGAI TALANG	0,6746	0,6987	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
10	KUBANG	0,6683	0,7086	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
11	SIMPANG SUGIRAN	0,6025	0,6011	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	PAYAKUMBUH						
12	KOTO BARU SIMALANGGANG	0,7924	0,8035	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
13	TAEH BUKIK	0,6771	0,6829	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
14	SIMALANGGANG	0,6065	0,6308	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
15	SUNGAI BARINGIN	0,6984	0,6484	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
16	PIOBANG	0,7125	0,7673	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
17	TAEH BARUAH	0,6943	0,6889	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
18	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	0,7905	0,7337	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
	LUAK						
19	SIKABU-KABU TJ ARO PD. PJG	0,7594	0,7371	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
20	MUNGO	0,7137	0,7476	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
21	SUNGAI KAMUYANG	0,7743	0,7841	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
22	ANDALEH	0,6787	0,7521	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
	HARAU						
23	TARAM	0,8357	0,8433	NAIK	MANDIRI	MANDIRI	TETAP
24	SOLOK BIO-BIO	0,6981	0,6924	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
25	TARANTANG	0,7043	0,7024	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
26	BUKIK LIMBUKU	0,6592	0,6500	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
27	HARAU	0,7051	0,7025	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
28	BATU BALANG	0,7113	0,7452	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
29	SARILAMAK	0,8183	0,8289	NAIK	MANDIRI	MANDIRI	TETAP
30	GURUN	0,7610	0,7368	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP

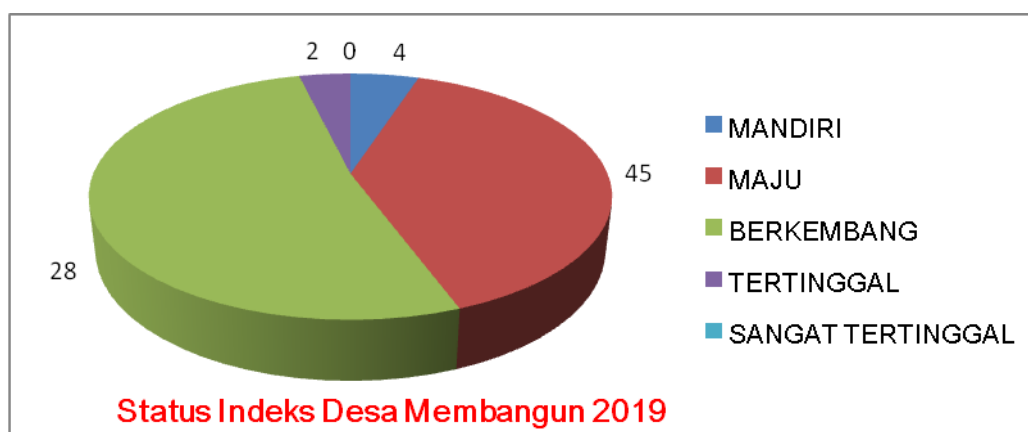
NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2018	2019	KET.	2018	2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
31	LUBUAK BATINGKOK	0,6776	0,7186	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
32	KOTO TUO	0,7413	0,7210	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
33	PILUBANG	0,6005	0,6614	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	PANGKALAN KOTO BARU						
34	MANGGILANG	0,6363	0,6165	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
35	TANJUANG BALIK	0,7290	0,7678	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
36	GUNUANG MALINTANG	0,7559	0,8060	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
37	PANGKALAN	0,7513	0,7779	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
38	KOTO ALAM	0,6551	0,7444	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
39	TANJUANG PAUAH	0,6967	0,7305	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
	KAPUR IX						
40	MUARO PAITI	0,8144	0,7886	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
41	KOTO BANGUN	0,6170	0,6290	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
42	LUBUAK ALAI	0,6594	0,6851	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
43	KOTO LAMO	0,5110	0,5806	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
44	DURIAN TINGGI	0,6097	0,7490	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
45	SIALANG	0,6329	0,6911	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
46	GALUGUA	0,5441	0,5651	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
	GUNUANG OMEH						
47	PANDAM GADANG	0,6697	0,6868	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
48	KOTO TINGGI	0,6887	0,6906	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
49	TALANG ANAU	0,7068	0,7052	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	LAREH SAGO HALABAN						
50	LABUAH GUNUANG	0,7538	0,7911	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
51	BATU PAYUANG	0,7967	0,7684	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
52	AMPALU	0,7029	0,7308	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
53	BUKIK SIKUMPA	0,7179	0,6703	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
54	BALAI PANJANG	0,7551	0,7297	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
55	HALABAN	0,6856	0,7951	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT

NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2018	2019	KET.	2018	2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
56	TANJUANG GADANG	0,6443	0,6613	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
57	SITANANG	0,6463	0,6575	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	SITUJUAH LIMO NAGARI						
58	SITUJUAH BATUA	0,8484	0,8971	NAIK	MANDIRI	MANDIRI	TETAP
59	SITUJUAH LADANG LAWEH	0,6483	0,7335	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
60	TUNGKA	0,6967	0,7379	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
61	SITUJUAH BANDA DALAM	0,7668	0,7989	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
62	SITUJUAH GADANG	0,7294	0,7389	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
	MUNGKA						
63	JOPANG MANGANTI	0,6027	0,7221	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
64	SIMPANG KAPUAK	0,6473	0,7159	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
65	MUNGKA	0,7111	0,7997	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
66	TALANG MAUA	0,7146	0,7354	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
67	SUNGAI ANTUAN	0,7224	0,7500	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
	BUKIK BARISAN						
68	MAEK	0,6335	0,6557	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
69	BANJA LOWEH	0,6195	0,6198	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
70	BARUAH GUNUANG	0,7330	0,7316	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
71	SUNGAI NANIANG	0,6025	0,6305	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
72	KOTO TANGAH	0,7214	0,7089	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
	AKABILURU						
73	SARIAK LAWEH	0,7259	0,7668	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
74	KOTO TANGAH BATU HAMPA	0,7079	0,7471	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
75	BATU HAMPA	0,7127	0,7465	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
76	SUAYAN	0,7160	0,7275	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
77	SUNGAI BALANTIAK	0,6356	0,6997	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
78	PAUAH SANGIK	0,6273	0,7587	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
79	DURIAN GADANG	0,6794	0,8117	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT

NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2018	2019	KET.	2018	2019	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		551,727					

	2018	2019
MANDIRI :	4	4
MAJU :	31	45
BERKEMBANG :	41	28
TERTINGGAL :	3	2
SANGAT TERTINGGAL :	0	0
TOTAL NAGARI	79	79

Dari Tabel diatas dapat juga digambarkan bawasannya 14 Nagari mengalami peningkatan Status dari nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 1 Nagari *Tertinggal* Meningkatkan menjadi Nagari *Berkembang* yaitu nagari Kurai. Komposisi Jumlah Nagai berdasarkan statusnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.17.1
Status Indeks Desa Membangun 2019

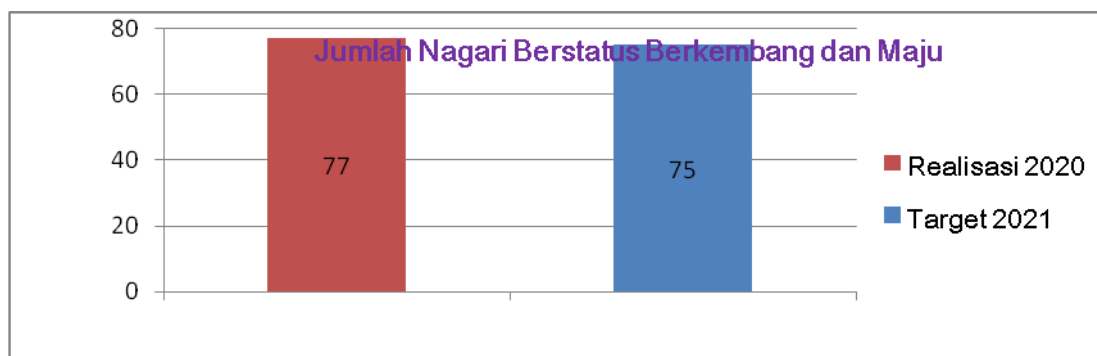
Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2 (dua) Nagari yang masih tertinggal berdasarkan data IDM adalah :

1. Nagari Galugua Kec. Kapur IX

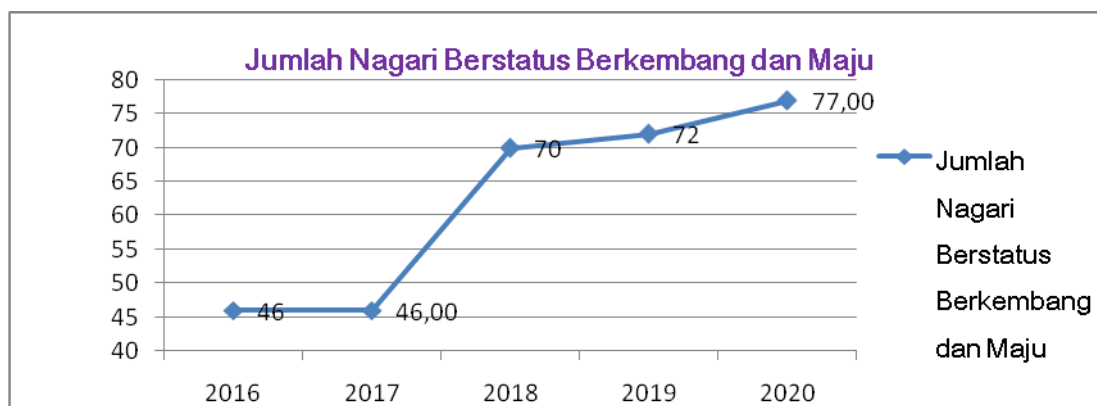
2. Nagari Koto Lamo Kec. Kapua IX

Capaian indikator Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.17.2
Perbandingan Nagari Berstatus Berkembang dan Maju Tahun 2020 dan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.17.3
Jumlah Nagari Berstatus Berkembang dan Maju Tahun 2016-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 5.1. antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga social masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES). Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari BUMNAG/BUMDES

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif pada tahun 2020 sebagai tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.14.2
Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNAG/BUMDES)
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
							Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I	Suliki								
		1	Kurai	Lereng Gunung	2015	Depot Air Minum	1		Perna No. 5 Tahun 2015
		2	Sungai Rimbang	Batang Sinama	2018	Peternakan	1		Perna 42 Tahun 2018
		3	Tanjung Bungo	Saiyo Sakato	2016	Sewa Molen	1		Perna No. 4 Tahun 2016
		4	Suliki	Suliki Jaya	2017	Ikan Segar & Kuliner Bed Cover	1		Perna No. 6 Tahun 2016
		5	Andiang	Mekar Jaya	2019	Jasa Keuangan Perdagangan		1	Perna No. 7 Tahun 2018
II	Lareh Sago Halaban								
		6	Ampalu	Mandiri Sejahtera	2014	Simpan Pinjam Jasa Keuangan	1		Perna No 83 Tahun 2014
		7	Labuah Gunung	Guseta	2017	Gula Semut	1		Perna No. 04 Tahun 2017
		8	Halaban	Halaban Terpadu	2017	Pengerajin Songket	1		Perna No. 3 Tahn 2017
		9	Tanjuang Gadang	Tanjung Gadang Bersatu	2017	Kasium / Dolomit	1		Perna No. 9 Tahun 2017
		10	Batu Payuang	Batu Payuang	2018	Kuliner		1	Perna No. 4 Tahun 2018
		11	Sitanang	Sitanang	2018			1	Perna No. 4

No	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
							Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
									Tahun 2018
		12	Bukik Sikumpa	Bukik Sikumpa	2019			1	Perna No. 4 Tahun 2018
		13	Balai Panjang	Jalur Gemilang	2018	Kebun Sereh Wangi	1		Perna No. 1 Tahun 2018
III	Luak								
		14	Mungo	Mungo Mekar Madani	2016	Pertanian & Jasa	1		Perna No. 40 Tahun 2016
		15	Sungai Kamuyang	Bumrag Sungai Kamuyang	2016	Keluangan Syariah	1		Perna No. 05 Tahun 2016
						Pariwisata Pemandian Alam			
						Barang & Jasa			
						Inkubasi Bisnis			
		16	Tanjung Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang	Sago Sejahtera	2017	Konveksi	1		Perna No. 3 Tahun 2017
						Bank Mini & Toko			
IV	Gunung Omeh								
		18	Pandam Gadang	Saraso	2016	Bank Mini	1		Perna No. 4 Tahun 2016
						Stone			
		19	Koto Tinggi	Bumrag Koto Tinggi	2017	Bank Mni	1		Perna No. 4 Tahun 2017
						Penyewaan			
V	Bukik Barisan								
		21	Sungai Naniang	Limo Saiyo	2016	Distributor Gas	1		Perna No. 5 th 2017
						Bank Mini			
		22	Koto Tangah	Palo Darek	2017	ATK dan Photocopy	1		Perna No. 4 th 2017
		23	Banja Loweh	Banjar	2018	Peternakan	1		Perna

No	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
							Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Sakato		Sapi			No. 5 th 2018
		24	Maek	Saribu Menhir	2017	Pemasaran Pupuk	1		Perna No. 4 th 2017
VI	Payakumbuh								
		25	Sungai Beringin	BUMNag Sungai Beringin	2017	Budi Daya Ikan	1		Perna No.3 Tahun 2017
		26	Koto Tangah Simalanggan g	Koto Tangah Simalanggan g	2017	Bank Mini dan Penyewaan Tenda	1		Perna No.5 Tahun 2017
		27	Piobang	BumNag Piobang Jaya	2017	Pegang Gadai Wisata Alam	1		Perna No. 4 Th 2017
		28	Koto Baru Simalanggan g	BumNag Koto Baru Simalanggan g	2017	Perdagangan	1		Perna No. 3 Tahun 2018
		29	Simalanggan g	Simalanggan g	2017	Bank Mini	1		Perna No. 6 Tahun 2017
		30	Taeh Baruah	Taeh Baruah	2017	Perdagangan dan Pertanian	1		Perna No. 4 Thn 2018
		31	Taeh Bukik	Taeh Bukik	2017	Wisata Gunung Bungsu		1	Perna No. 6 Thn 2017
VII	Mungka								
		32	Simpang Kapuak	Lubuak Bulan Perdana	2017			1	Perna No. 6 Tahun 2017
		33	Mungka	BumNag Mungka	2017	Perdagangan	1		Perna No. 9 Tahun 2017
		34	Sungai Antuan	Nasya Mandiri	2017	Pariwisata		1	Perna No. 9 tahun 2017
VII I	Guguak								
		35	Guguak VIII Koto	Delko Mandiri	2016	Bank Mini	1		PERNA No. 6 TAHUN 2016
		36	Simpang	Zigiran	2017	Bank Mini	1		PERNA

No	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
							Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			Sugiran	Mandiri		Pemipil Jagung Buah Naga			NO.3 TAHUN 2017
		37	VII Koto Talago	BUMNag Tujuh Koto Talago	2017	Budidaya Jagung	1		Perna No. 5 Tahun 2017
		38	Kubang	7 Nan Tungga	2016	Perdagangan	1		Perna No. 4 Tahun 2017
		39	Sungai Talang	BUMNag Sungai Talang	2016	Coklat		1	Perna No. 4 Tahun 2016
IX	Harau								
		40	Taram	Sato Sakaki	2017	LPN	1		Perna No. 4 Tahun 2017
		41	Solok bio-bio	Sobio Jaya Mandiri	2017	Pupuk Organik Jasa Layanan Internet	1		Perna No , 5 Tahun 2017
		42	Harau	Harau Mandiri	2017	Jasa Penyewaan Pariwisata	1		Perna No. 3 Tahun 2017
		43	Pilubang	Salingka Bukik	2018	Jual Saprodi	1		Perna NO.2 Tahun 2018
		44	Sarilamak	Sarilamak Mandiri	2018	Perdagangan		1	-
		45	Bukik Limbuku	Amanah	2018	Bank Mini Pertanian	1		Perna NO. 3 Tahun 2018
		46	Tarantang	Maju Bersama	2018	Gas Subsidi		1	Perna No. 4 tahun 2017
X	Situjuah Limo Nagari								
		47	Situjuah Banda Dalam	Beringin Sakti	2017	Perdagangan	1		Perna No. 3 tahun 2017
		48	Situjuah Batua	Situjuah Batua	2018	Perdagangan	1		Perna No. 3

No	Kecamatan	Nama Desa		Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
							Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
									Tahun 2017
XI	Akabiluru								
		49	Pauh Sangik	Pauh Sangik Sejahtera	2017	Unit Usaha Bibit Ikan	1		Perna No. 3 Tahun 2017
						Jasa Perdagangan			
		50	Sariak Laweh	Palito Nagari	2017	Foto Copy& ATK	1		Perna No. 4 Tahun 2017
						Jasa Keuangan			
		51	Sungai Balantiak	Raudhatul Hasanah	2017	Barang Harian	1		Perna No. 4/2017
						Jasa Keuangan			
		52	Batu Hampar	Putera Menara	2017	Peternakan Kambing	1		Perna No. ../2017
						Pembibitan			
		53	Suayan	Nagari Suayan Sasuai	2017	Foto Copy& ATK	1		Perna No. 5/2017
XII	Kapur IX	54	Durian Gadang	Durga Jaya	2017	Percetakan	1		Perna No. 5/2017
						Jasa Keuangan			
		55	Koto Tangah Batu Hampa	Onam Sidang	2017	Jasa Keuangan	1		Perna No. 5 tahun 2018
XII	Kapur IX	56	Galugua	Ikhlas Berkarya Makmur Bersama	2017	Pamsimas		1	Perna No. 05 Tahun 2017
						Gambir			
						Pertanian Perkebunan			
		57	Muaro Paiti	Muaro sejahtera	2018	Gas Subsidi	1		Perna No. 01 Tahun 2018
		58	Sialang	Bumnag Sialang	2018			1	-
XII	Pangkalan Koto Baru	59	Koto Lamo	Koto Gambir Sejahtera	2017	Pengelolaan Pamsimas		1	Perna No. 06 Tahun 2017
		60	Gunung Malintang	Harapan Basamo	2018	Dagang Bahan Bangunan	1		Perna No. 04 Tahun 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama BUMDES	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	STATUS		Nomor SK/No. Badan Hukum / No. Perdes
						Aktif	Tidak Aktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH						47	13	60

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2020

Kegiatan BUMNAG telah berkembang, menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan(bank mini), dan usaha jasa lainnya.

Terdapat 7 BUMNAG yang tidak aktif yaitu di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Guguak dan Kapur IX. Di Kec. Lareh Sago Halaban terdapat 3 Bumrag yang tidak aktif, 1 Bumrag di Kec Guguak dan 3 Bumrag di Kec. Kapur IX.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumrag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap Bumrag yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana. Kegiatan pembinaan yang telah terlaksana adalah pelatihan satu hari terhadap Bumrag. Sedangkan idealnya, kegiatan pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa bimbingan teknis (pelatihan yang bersifat teknis) dengan waktu 3 (tiga) hari.
- Masih terdapat 18 Nagari yang belum membentuk Bumrag, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman lembaga yang ada di Nagari tentang pentingnya keberadaan Bumrag.
- Belum terealisasinya kegiatan penyertaan modal oleh Wali Nagari (komisaris) kepada pengelola Bumrag.
- Masih terdapat SDM pengelola Bumrag yang lemah secara kualitas, mulai dari tahap perencanaan sampai operasionalnya (output).

Disamping itu, nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Dari data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari lembaga social yang aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.14.3
Rekapitulasi Nagari Dengan Status
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif Tahun 2020

No	Nagari	No	Nagari	No	Nagari
1	Koto Tinggi	17	Sariak Laweh	33	Situjuah Ladang Laweh
2	Talang Anau	18	Sungai Balantiak	34	Situjuah Batua
3	Pandam Gadang	19	Pauh Sangik	35	Tungka
4	Koto Tengah	20	Kt Tengah Simalanggang	36	Sarilamak
5	Kurai	21	Koto Baru Simalanggang	37	Koto Tuo
6	Sungai Rimbang	22	Piobang	38	Bukik Limbuku
7	Andiang	23	Sungai Beringin	39	Taram
8	Tanjuang Bungo	24	Andaleh	40	Lubuak Batingkok
9	VII Koto Talago	25	Tj. Haro Sikabu-Kabu	41	Pangkalan
10	Simpang Sugiran	26	Ampalu	42	Tanjuang Balit
11	Mungka	27	Tanjuang Gadang	43	Koto Lamo
12	Jopang Manganti	28	Labuah Gunuang	44	Muaro Paiti
13	Talang Maua	29	Bukik Sikumpa	45	Sialang
14	Simpang Kapuak	30	Batu Payuang	46	Galugua
15	Batu Hampa	31	Situjuah Gadang		
16	Durian Gadang	32	Situjuah Banda Dalam		

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2020

Pada Tabel 3.17.3 dapat dilihat data terdapat 46 LPM Nagari yang berstatus aktif dari 79 nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahan yang dihadapi oleh Nagari yang LPMnya belum aktif diantaranya, masih belum dilibatkannya LPM dalam berbagai musyawarah di tingkat nagari. Selain itu kegiatan LPM masih belum dianggarkan dalam APBNagari, sehingga LPM tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan dari sisi DPMD/N, kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan untuk LPM beserta kader-kadernya karena keterbatasan pada anggaran. Kegiatan yang telah dilakukan hanya berupa sosialisasi (pelatihan satu hari), yang belum dapat diaplikasikan secara maksimal oleh LPM dan kader-kadernya. Sementara untuk pembinaan terhadap LPM ini, dibutuhkan kegiatan berupa pelatihan yang bersifat teknis dengan durasi waktu yang lebih lama.

Sasaran Strategis 5.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	27.445.000,-	27.445.000,-		100,00
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.785.000,-	4.785.000,-	-	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	32.450.000,-	32.235.000,-	215.000	99,34
JUMLAH	64.680.000,-	64.465.000,-	215.000,-	99,67

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.64.465.000,- dari anggaran sebesar Rp.64.680.000,- atau 99,67%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,05% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH BERBASIS PERJUANGAN

Sasaran Strategis 6.1

Infrastruktur Dasar yang Berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah” terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah” dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **98,88%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 6.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.15
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	15.202,5 Ha	18.612,1 Ha	11.350,65 Ha	60,98	18.984,4 Ha	17.002,8 Ha	89,56
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	43,5%	49,19%	54,27%	110,33	49,80%	52,66%	105,74
3.	Persentase cakupan layanan air bersih	66,8%	77,33%	79,17%	102,38	79,42%	79,40%	99,97
4.	Rasio Rumah Layak Huni	N/A	0,6950	0,6929	99,70	0,6954	0,6972	100,26
Rata-rata capaian					101,88			98,88

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas LHPP, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 6.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosente kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang.

Realisasi capaian luas daerah irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2020 adalah 89,56%. Target yang ditetapkan 18.984,4 Ha dan realisasinya 17.002,8 Ha. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2019 dimana dari target 18.612,1 Ha dapat terealisasi sebesar 11.350,65 Ha atau sebesar 60,98%.

Terdapat peningkatan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020 yang cukup signifikan. Keberhasilan ini sangat didukung oleh kegiatan irigasi DAK dan IPDMIP.

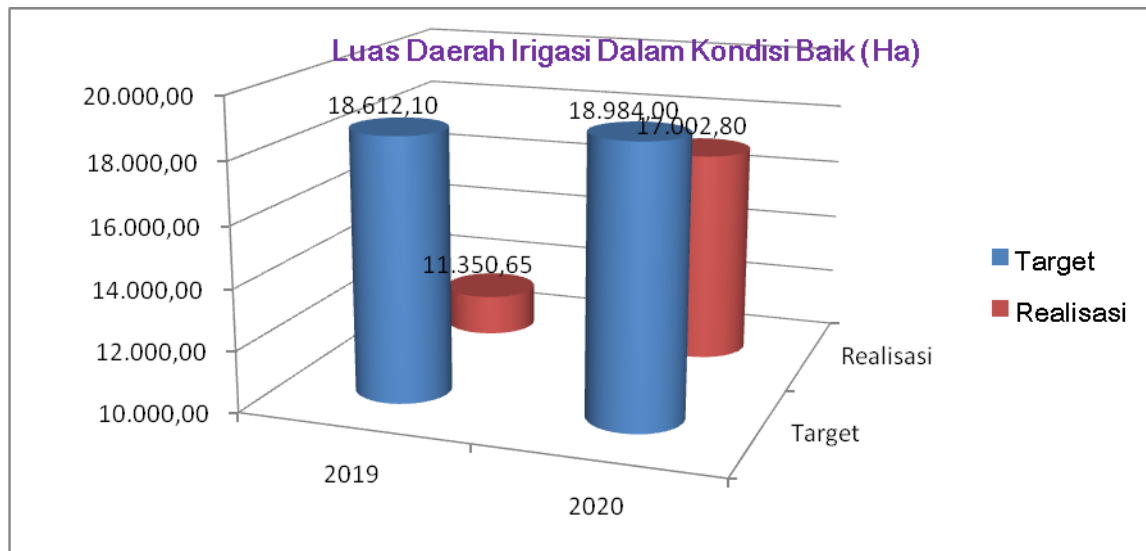


Gambar 2.3.16
D.I Banda Lubuk Batu

Namun Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang bersumber dari Dana DAU, banyak yang dibatalkan karena terjadi Refocusing Anggaran dan dialihkan anggarannya untuk Penanggulangan Covid-19, sehingga target Luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada

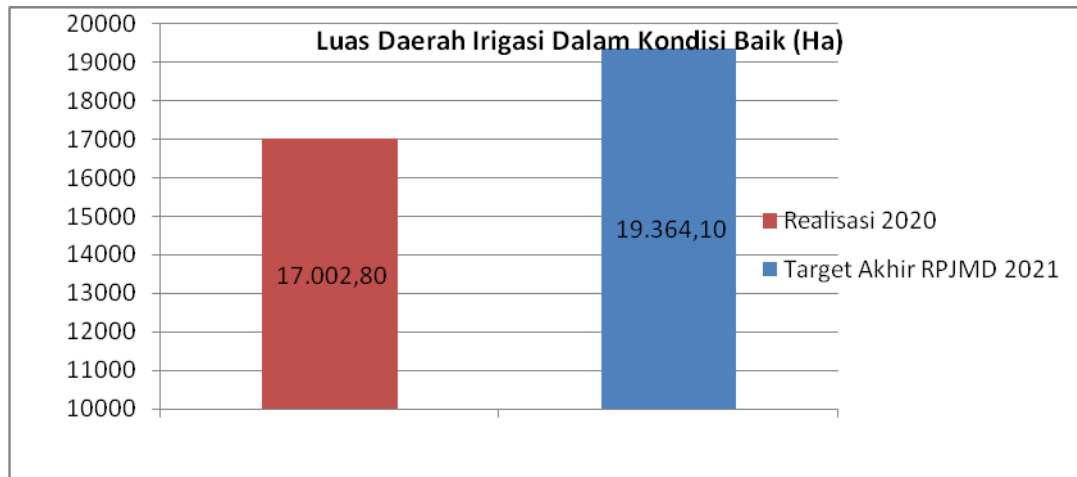
tahun 2020 tidak tercapai.

Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



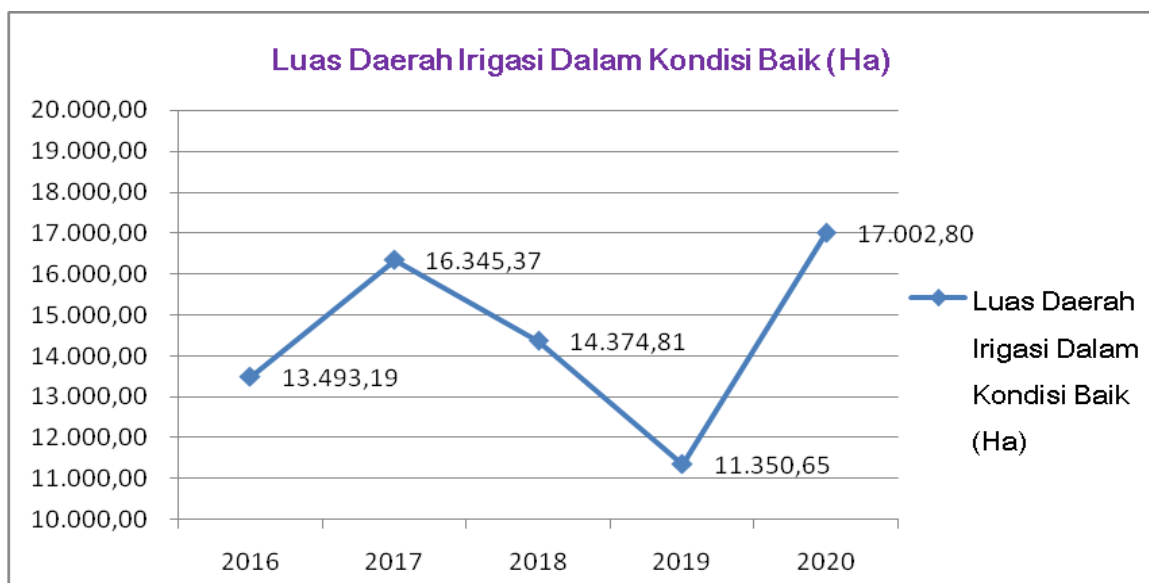
Grafik 2.3.18
Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2019 dan tahun 2020

Capaian indikator Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.18.1
Perbandingan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Luas daerah irigasi dalam kondisi baik belum mencapai target target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.18.2
Luas daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2016-2020

2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.



Gambar 2.3.17
Jalan Kurai - Mudiak Likik (R-140)

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan

lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jangankan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam



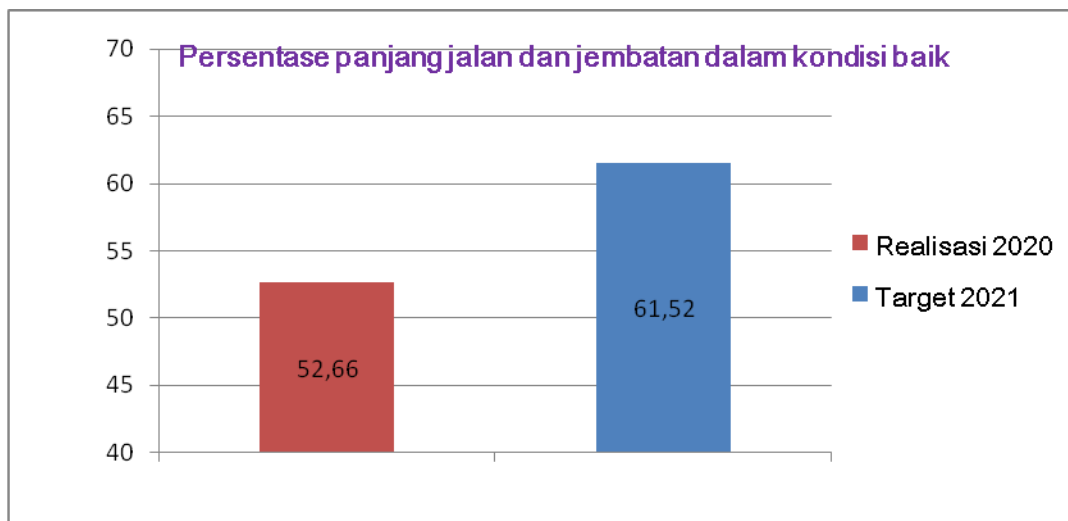
Gambar 2.3.18
Jalan Batu Nan Pasuak -Indo Baleh

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik. Pada akhir tahun 2019 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 597,64 km, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2020 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 549,84 km dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik 73 unit dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,2 km, sehingga diperoleh persentase panjang jalan dalam kondisi baik adalah 52,66%. Berarti panjang jalan dalam kondisi baik bertambah sepanjang 5,71 km. Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



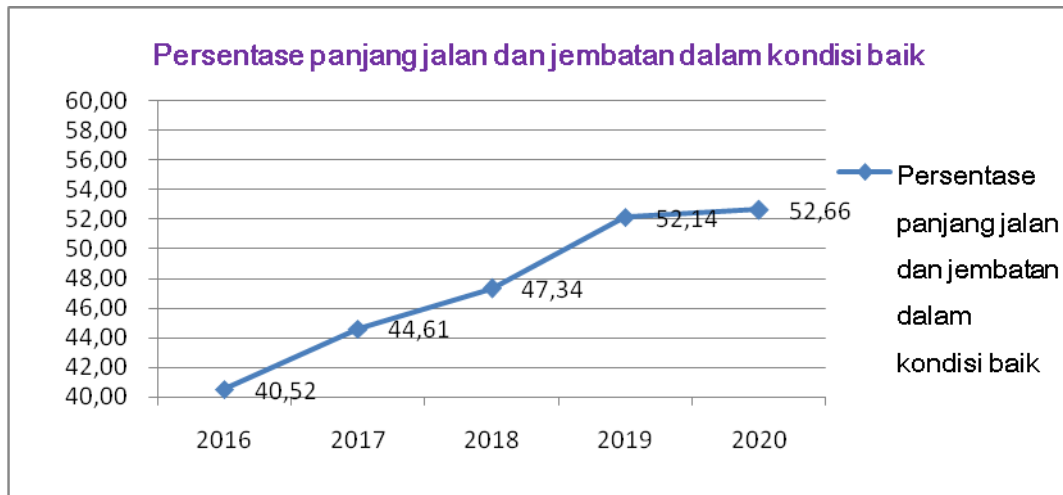
Grafik 2.3.19
Persentase panjang jalan & jembatan dalam kondisi baik tahun 2019 dan tahun 2020

Capaian indikator Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.19.1
Perbandingan Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.19.2
Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik tahun 2016-2020

3. Persentase Cakupan Layanan Air Bersih

Dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum tahun 2020, setelah didata maka diperoleh persentase cakupan layanan air bersih mencapai 79,40% dari target sebesar 79,42% yang ditetapkan di awal tahun 2020, dengan tingkat capaian sebesar 99,97%. Realisasi yang kurang dari target ini disebabkan oleh:

1. Tidak selesainya Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan (yang bersumber dari dana DAK) sesuai rencana awal, karena terjadi perubahan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) yang perlu mendapat persetujuan dulu dari pusat, sementara kesempatan tidak ada lagi untuk mengurusnya.

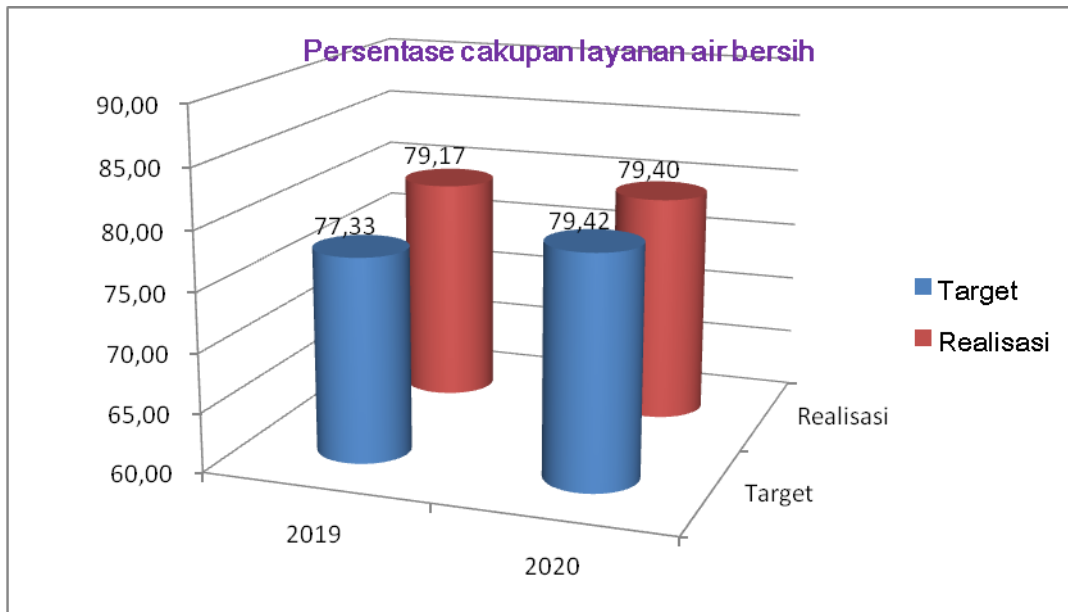


Gambar 2.3.19

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM
 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau

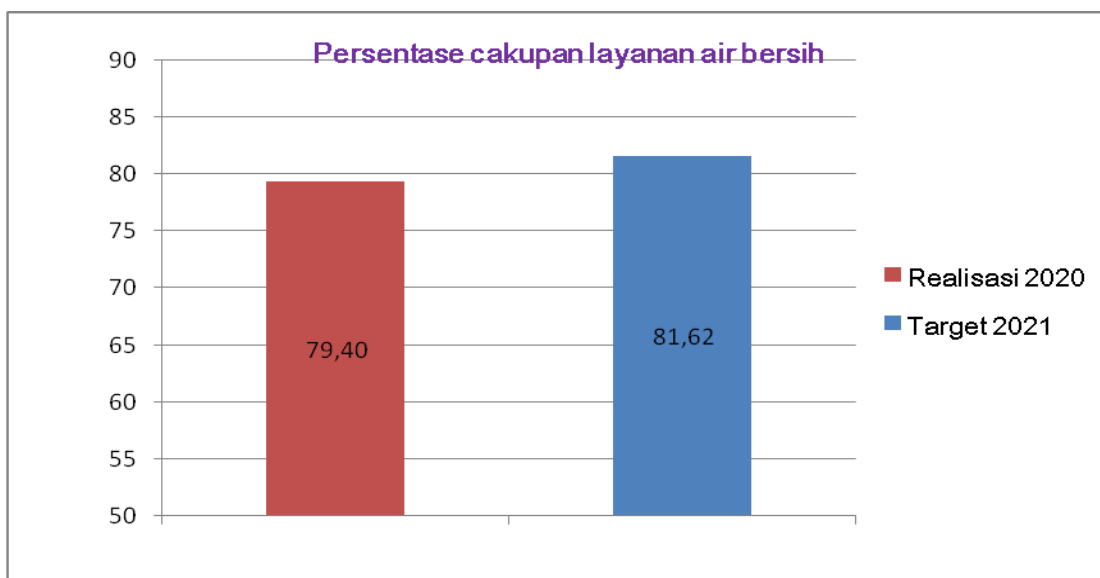
2. Batalkan kegiatan PAMSIMAS karena terjadi Refocusing Anggaran dan dialihkan anggarannya untuk Penanggulangan Covid-19.

Persentase Cakupan Layanan Air Bersih tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.20
Persentase cakupan layanan air bersih tahun 2019 dan tahun 2020

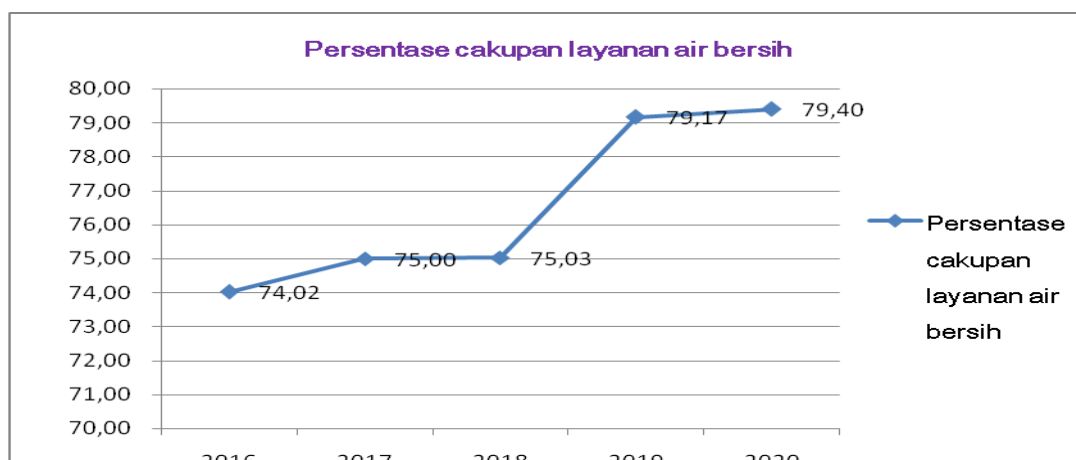
Capaian indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.20.1
Perbandingan Persentase cakupan layanan air bersih tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Sementara untuk perkembangan Persentase Cakupan Layanan Air Bersih selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 2.3.20.2
Perbandingan Persentase cakupan layanan air bersih tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD 2021

4. Rasio Rumah layak huni

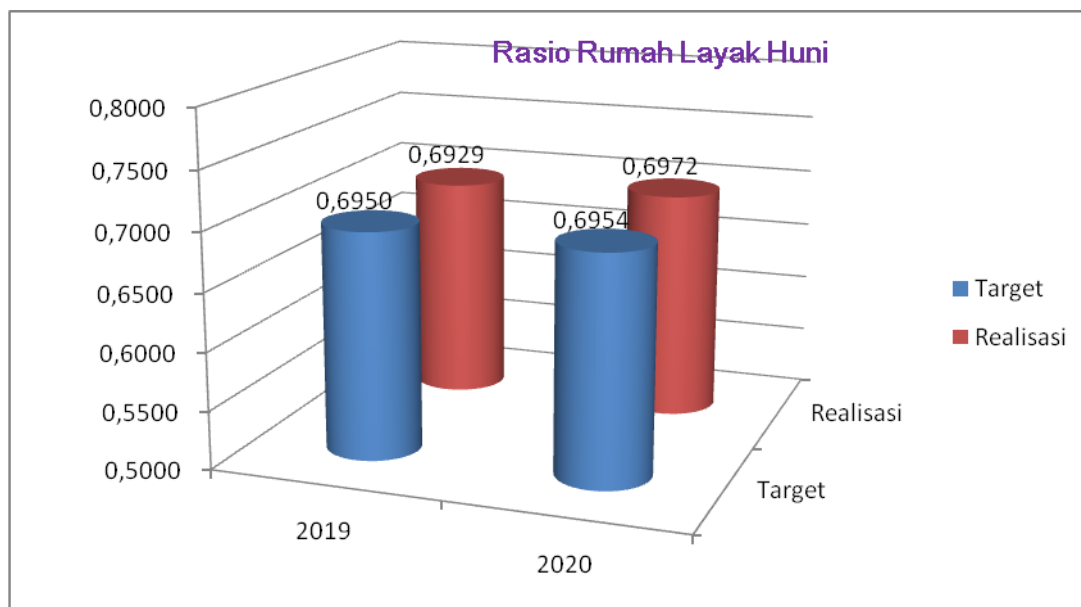
Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Rasio rumah layak huni tahun 2020 dari target 0,6954 terealisasi sebesar 0,6972 atau sebesar 100,26%. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2019 dengan target 0.6950 dengan realisasi 0.6929 atau sebesar 99,70%.

Rasio rumah layak huni tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



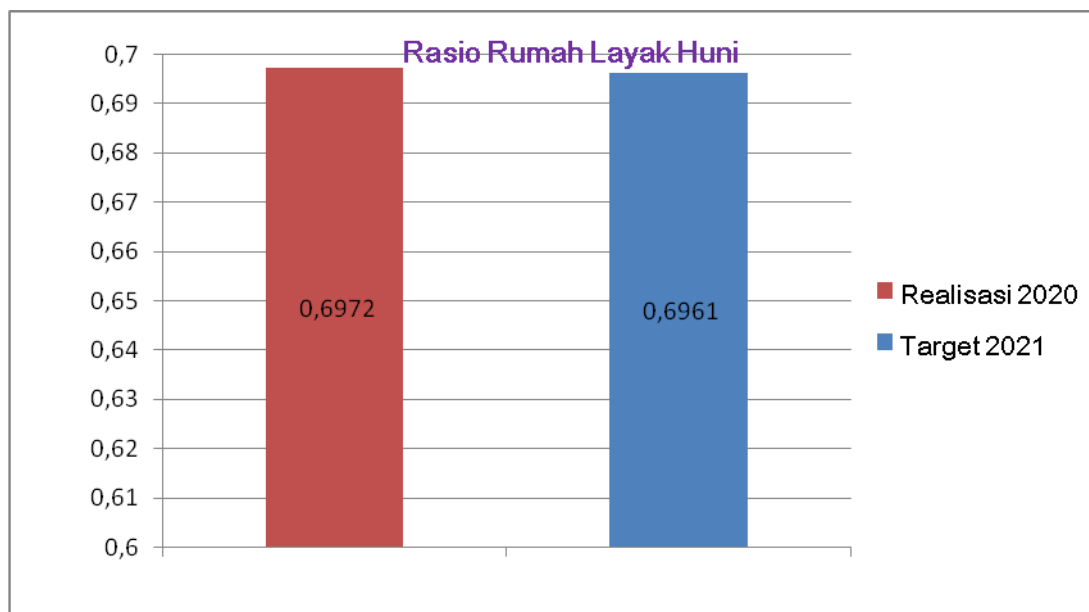
Grafik 2.3.21
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 dan Tahun 2020

Adapun Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.15.1
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab Tahun 2020

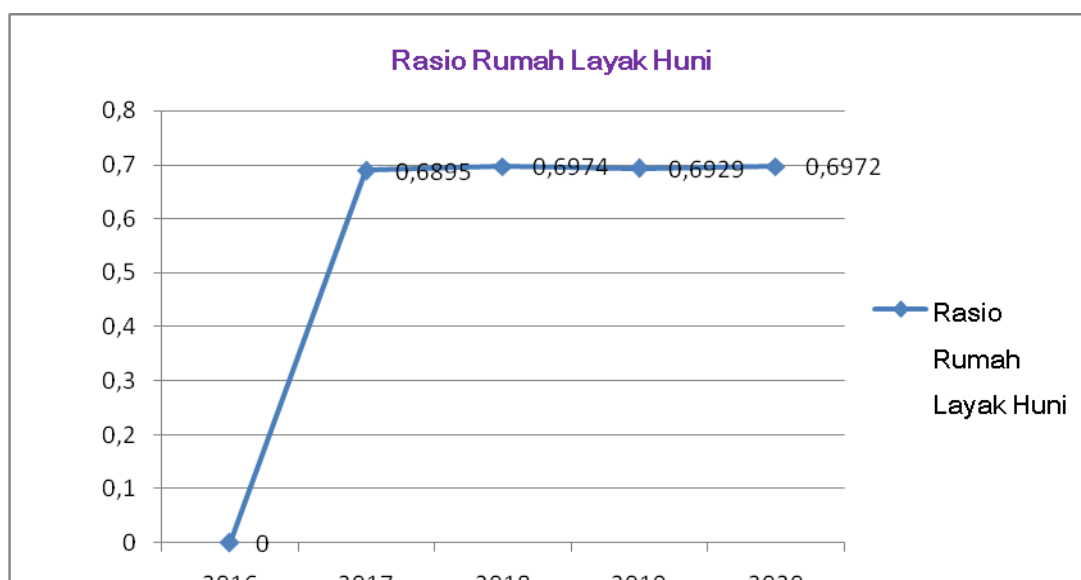
No.	Kecamatan	Unit
1	Harau	62
2	Bukik Barisan	24
3	Suliki	7
4	Guguak	44
5	Akabiluru	41
6	Payakumbuh	217
7	Lareh Sago Halaban	30
8	Luak	12
9	Situjuah Limo Nagari	8
10	Pangkalan Koto Baru	3
11	Kapur IX	12
	Jumlah	460

Capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.21.1
Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2020 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni tahun 2020 selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.21.2
Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 6.1. antara lain adalah :

1. Terjadinya Refocusing Anggaran dan dialihkan anggarannya untuk Penanggulangan Covid-19 sehingga sebagian target kinerja tidak bisa dicapai.
2. Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi diantaranya :
 - D.I Kayu Gadang
 - D.I Bdr Bawah
 - D.I Bandar Panjang
 - D.I Banda Lubuk Batu
 - D.I Bdr Godang
 - D.I Sei. Talang
 - D.I Batuang Badarah
 - D.I Batang Mungo
 - D.I Batang Sanipan
 - D.I Bdr Baliak Sariak
 - D.I Tanjuang Bataut
 - D.I Batang Coran
 - D.I Titi Ampera
 - Irigasi Lughah Botuang, Nag. Koto Tongah Batu Ampa Kec. Akabiluru
 - Irigasi Bonda kapalo Koto, Jrg. Simpang Ganti Nag. Batu Hampa Kec. Akabiluru
3. Terlaksananya pemeliharaan embung sebagai sumber dan cadangan air untuk ketersediaan air baku lahan pertanian diantaranya :
 - Embung Lurah Jirak Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru
 - Embung Saroge Jr. Sungai Talang Nag. Sungai Talang Kec. Guguak
 - Embung soriak Jorong Kaludan Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
 - Embung sarah kodok Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
 - Embung Kapalo Banda Jr. Buluak Kasok Nag. Sarilamak Kec. Harau
 - Embung Solok Sipatai
 - Embung Lurah Api-api Nagari Mungo Kec. Luak
 - Embung Lurah Sikumbang I Nagari Andaleh Kec. Luak
 - Embung Lurah Napa Nagari Sei. Kamuyang Kec. Luak
 - Embung Lurah Boram Buang Nagari Sikabu Tj Haro Kec. Luak
4. Terlaksananya pemeliharaan bantaran sungai untuk mempertahankan jaringan irigasi agar tetap terjaga agar tidak terjadi banjir dan meluapnya air sungai, diantaranya :
 - Pengaman Tebing Sungai Bt Kapur Nag. Muaro Paiti Kec. Kapur IX

- Pengaman Tebing Sungai Bt. Lampasi Nag. Pauh Sangik Kec. Akabiluru
- Pengaman Tebing Sungai Batang Harau Kec. Harau
- Pengaman Tebing Lampasi Nag. Durian Gadang
- Pengaman Tebing Sungai Bt. Kapoan Nag. Kubang Kec. Guguak
- Normalisasi Batang Harau Nagari Harau
- Normalisasi Batang Sinamar Nagari Dadok
- Pengaman Tebing Sungai Bt. Maek Godang Nag. Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan
- Normalisasi Sungai Silaok Labuah Lintang Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka
- Normalisasi Sungai Bt. Tolang Nagari Talang Maur Kec. Mungka
- Pengaman Tebing Sungai Bt. Sinamar Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
- Perbaikan dan Peningkatan Bronjong Pasca Bencana Jor. Buluh Kasok Nag. Sarilamak
- Rehabilitasi Tanggul Sungai Batang Sianipan Jor. Air Putih Jor. Ketinggian Sarilamak
- Rehabilitasi Tanggul Sungai Batang Sianipan III Jor. Ketinggian Nagari Sarilamak
- Rehabilitasi Tanggul Sungai Batang Sianipan Jor. Ketinggian Sarilamak
- Pengaman Tebing Sungai Bt. Maek Godang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
- Bronjong Sungai Jrg. Sei Dua Anau Nagari. Lubuak Alai Kec. Kapur IX
- Bronjong Sungai Jrg. Sei Dua Anau Nagari. Lubuak Alai Kec. Kapur IX
- Normalisasi Batang Sinamar (Pulau Bungkua) Jrg. Kubu Gadang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
- Perbaikan dan Perkuatan Tebing Batang Namang Pasca Bencana Nag. Simalanggang Kec. Payakumbuh

5. Terlaksananya pemeliharaan jalan diantaranya adalah ruas jalan :

- Taeh Bukik - Lubuak Batingkok (R-78)
- Jalan Bukit Sikumpar - Padang Belimbing Kec. Lareh Sago
- Jalan Pakan Rabaa - Batu payuang Nag. Batu payuang
- Jalan Lubuak Alai - Koto Lamo
- Jalan Kurai - Mudiak Likik (R-140)
- Jalan Batu Nan Pasuak - Indo Baleh

6. Terlaksananya pemeliharaan jembatan diantaranya :

- Jembatan Sei. Mangkirai

7. Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih diantaranya sebagai berikut :

- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Batu Balang Kecamatan Harau
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
- Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru

8. Belum Mantapnya Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, sehingga perlu menyempurnakan kelembagaan yang mengatur perumahan dan kawasan
9. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak sehingga perlu dilakukan Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
10. Masih Lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan.
11. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
12. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.

Sasaran Strategis 6.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	32.945.677.000,-	29.686.555.170,-	3.259.121.830,-	90,11
Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.462.459.996,-	3.052.611.485,-	409.848.511,-	88,16
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13.052.514.200,-	11.707.964.404,-	1.344.549.796,-	89,70
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.834.186.800,-	6.499.132.500,-	335.054.300,-	95,10

Pengembangan Perumahan	4.098.584.000,-	4.077.508.714,-	21.075.286,-	99,49
Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum	7.421.462.000,-	6.904.155.000,-	517.307.000,-	93,03
JUMLAH	67.814.883.996	61.927.927.273	5.886.956.723	91,32

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 6.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.61.927.927.273.00 dari anggaran sebesar Rp.67.814.883.996.00 atau 91,32%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,88% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 6.2 **Terjaganya Kualitas Lingkungan**

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsgungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (carrying capacity). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi

berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (*man ecological dominant*). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akalinya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Terjaganya kualitas lingkungan” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terjaganya kualitas lingkungan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **101,66%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran strategis 6.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.16
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	66,50	67,88	102,08	68,00	69,13	101,66
Rata-rata capaian					102,08			101,66

Sumber data : Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman 2020

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, IKLH menjadi ukuran utama untuk sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan hidup pada RPJMN 2015-2019, dan diharapkan dapat mempertajam Prioritas Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada angka **67,88** menunjukkan Lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2019 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) + (IKD 40,5%) + (ITH 21,9%).

IKLH Kab/Kota = (50,00 x 0,376) + (90,87 x 0,405) + (61,75 x 0,219).

IKLH Kab/Kota = (18,8) + (36,80) + (13,52).

IKLH Kab/Kota = **69,13**

IKA = Indeks Kualitas Air` (50,00)

IKD = Indeks Kualitas Udara (90,87)

ITH = Indeks Tutupan Hutan (61,75)

Keterangan 1. IKU = Indek Kualitas Udara

2. IKTL = Indek Kualitas tutupan Lahan

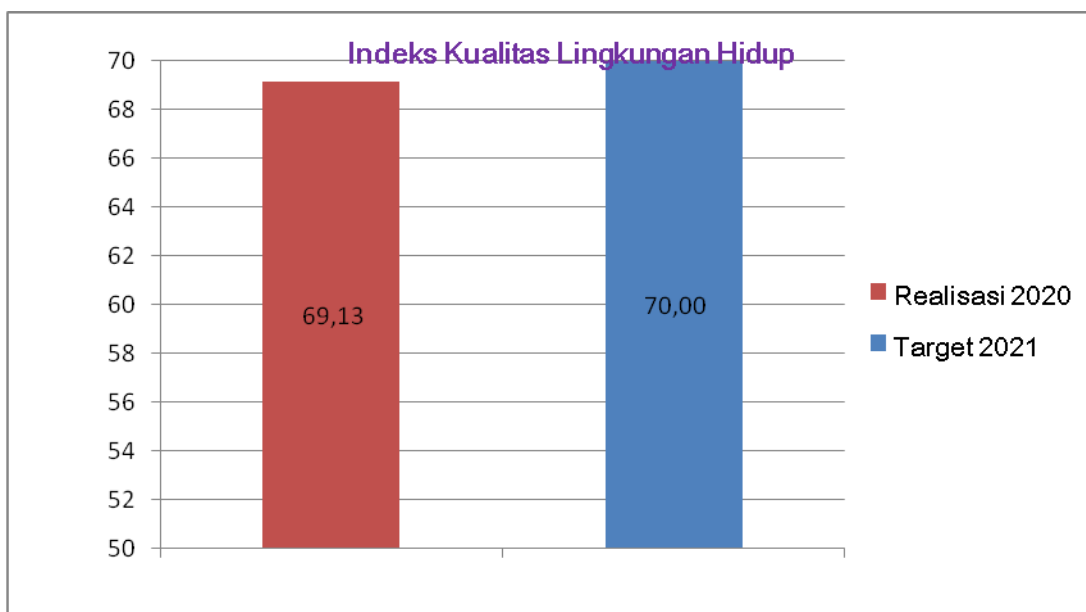
3. IKA = Indek Kualitas Air

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



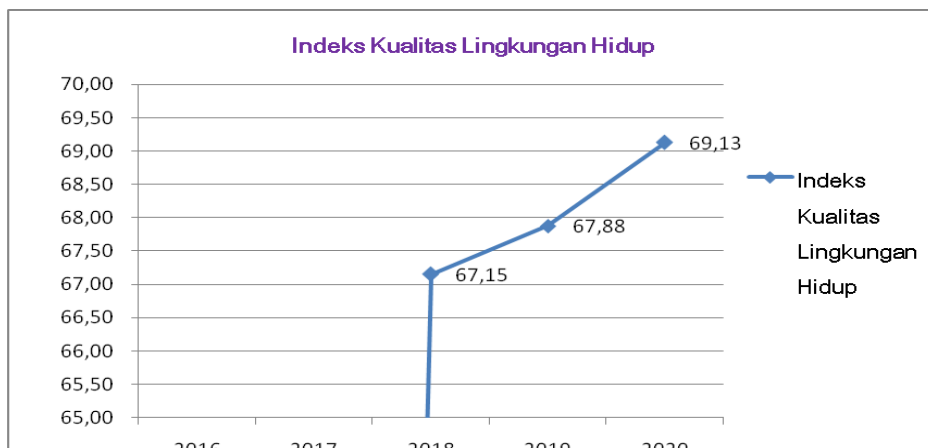
Grafik 2.3.22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.22.1
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.3.22.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020



Gambar 2.3.20
Kegiatan Sedekah Sampah
pada Bank Sampah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 6.2. antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik di masyarakat dilakukan inovasi **sedekah sampah**, dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari ,Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya , hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.
2. Disamping itu DLHPP pada tahun 2020 telah mendirikan 1 (satu) unit **Bank Sampah UNESA** di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman,dan sampai tahun 2020 Bank sampah Unesa DLHPP masih terus melakukan transaksi dan semakin bertambah luas dan bertambah Nasabahnya, dimana pada awal berdiri Nasabah Bank Unesa hanya terbatas bagi Pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

permukiman saja, pada Tahun 2020 telah ada Nasabah yang berasal dari Warga diperumahan di sekitaran IKK Sarilamak juga Perkantoran Pemerintah yang ada di IKK sarilamak.

3. merencanakan sosialisasi dan Bimtek tentang penanganan Sampah kepada Nagari, Puskesmas, sekolah dan Masjid (BKMT) serta melakukan pembinaan kepada Bank Sampah yang telah ada di Nagari dan Sekolah sehingga diharapkan dari sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah ini sekitar 80% sampah bisa tertangani dan bernilai ekonomis, sehingga 20% sampah yang di buang ke TPA Regional Payakumbuh hanya Residu saja yang tidak bisa di tangani, namun karena adanya **Refocusing** yang disebabkan Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan disebabkan terjadinya pemotongan anggaran, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2020 hanya fokus pada penanganan sampah di IKK Sarilamak.
4. Pengambilan 12 sampel titik pantau pengujian kualitas air yang tersebar pada sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota, Titik Pantau sampel Kualitas Air tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019.

Tabel 2.3.16.1
Titik Pantau Pengambilan Sampel
Pemantauan Kualitas Air Tahun 2020

No	Sungai /Limbah	Lokasi
1	Batang kapur	Kec. Kapur IX
2	Batang Malagiri	Kec. Pangkalan
3	Batang Tamaran	Kec. Pangkalan
4	Batang Kasok	Kec. Pangkalan
5	Batang Maek	Kec. Pangkalan
6	Batang Sinamar Gunuang Omeh	Kec. G.Omeh
7	Batang Sinamar sebelum RSUD	Kec. Suliki
8	Batang Sinamar sesudah RSUD	Kec. Suliki
9	Batang Lampasi sungai beringin	Kec. Payakumbuh
10	Batang lampasi Sariak laweh	Kec. Akabiluru
11	Batang Harau	Kec. Harau
12	Batang sanipan	Kec. Harau

Sumber data : Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman 2020

Tabel 2.3.16.2
Titik Pantau Pengambilan Sampel
Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2020

No	Kategori	Lokasi
1	Perkantoran	Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota
2	Arus Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
3	Industri	Usaha Pengolahan Tahu di Purwa Jaya
4	Permukiman	Perumahan Kandang Lamo

Sumber data : Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman 2020

5. Sebagai monitoring dan evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasn ini Dinas

Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bisa melakukan pembinaan, sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CSR.

6. Pengawasan pada tahun 2020 telah di usulkan perusahaan untuk Peningkatan Peringkat Perusahaan (Proper) yaitu PTPN VI. Pengaduan Masyarakat yang masuk tahun 2020 ini terkait masalah lingkungan sebanyak 8 (Delapan) pengaduan dan telah di proses sesuai peraturan yang berlaku.
7. Adanya berbagai inovasi dan pembinaan dalam Bidang Lingkungan Hidup terutama pada kegiatan Kampung Iklim (Proklam) pada Nagari Binaan yaitu Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak melalui Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian Tujuh Koto Talago Lestari dalam hal Pemanfaatan Limbah Ubi Kayu sebagai Biogas.
8. Dan pada tahun 2020 kelompok Proklam Binaan DLHPP memperoleh Anugerah peringkat 1 sebagai Pelaksana Proklam tingkat Provinsi, sebagai Pengembangan dari yang dicapai oleh Jorong Sebelumnya melalui kelompok Tani Baruah Anduriang Sepakat yang meraih Anugerah Pelaksana Proklam terbaik ditingkat Nasional tahun 2018.
9. Terlaksananya penanaman pohon di sepanjang jalan IKK Sarilamak dan komplek perkantoran Pemda Kab. Lima Puluh Kota pada hari Lingkungan Hidup.
10. Terlaksananya program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan keluaran yang mempengaruhi pada indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Terlaksananya Pembinaan Sekolah Adiwiyata yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan dengan sasaran
 - a. Sekolah Adiwiyata di Kab. Lima Puluh Kota
 - b. Adanya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
11. Terlaksananya pengendalian polusi emisi kendaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya pengujian emisi kendaraan dinas roda 4 (empat) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan melakukan pengujian kadar Limbah Padat dan Limbah Cair di RSUD Ahmad Darwis Kecamatan Suliki dan Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Pengolahan Limbah Cair.

Sasaran Strategis 6.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Lingkungan sehat Perumahan	215.066.365,-	214.955.365,-	111.000,-	99,95
Pemberdayaan Komunitas Perumahan	21.097.000,-	21.082.633,-	14.367,-	99,93
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.899.921.000,-	1.881.208.320,-	18.712.680,-	99,02
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	231.848.402,-	223.349.402,-	8.499.000,-	96,33
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	119.425.220,-	113.783.220,-	5.642.000,-	95,28
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.815.000,-	1.815.000,-	-	100,00
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.078.600,-	28.605.000,-	1.473.600,-	95,10
Peningkatan Pengendalian Polusi	7.645.000,-	7.615.000,-	30.000,-	99,61
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	152.845.891,-	151.450.067,-	1.395.824,-	99,09
JUMLAH	2.679.742.478,-	2.643.864.007,-	35.878.471,-	98,66

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 6.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.2.643.864.007,- dari anggaran sebesar Rp.2.679.742.478,- atau 98,66%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2.3.3 Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran

APBPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.257.822.410.678,- dan belanja sebesar Rp.1.295.357.302.775,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.37.534.892.097,- yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 untuk pendapatan sebesar Rp.1.336.485.510.303,25 realiasi belanja sebesar Rp.1.362.116.350.432,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp.25.630.840.128,75.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.297.704.549,875,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.17
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	(Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	860.797.067.856,-	66,33
2.	Belanja Langsung	436.907.482.019,-	33,67
	Total Rencana Belanja	1.297.704.549,875,-	100,00

Sumber : DPPKAD

Tabel 2.3.18
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	(Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	714.359.345.633,-	64,89
2.	Belanja Langsung	386.597.571.038,-	35,11
	Total Realisasi Belanja	1.100.956.916.671,-	100,00

Sumber : DPPKAD

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.19 di bawah ini :

Tabel. 2.3.19.
Sasaran Strategis Per Program, Rencana dan Realisasi Anggaran 2020

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	1.1.	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	98,80	Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	22.322.000,-		19.422.807,-		2.899.193,-	87,01
					Peningkatan Pemahaman terhadap Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan	2.255.872.500,-		2.185.396.000,-		70.476.500,-	96,88
					Peningkatan Pembinaan terhadap Kegiatan Keagamaan	32.443.000,-		31.843.523,-		599.477,-	98,15
					JUMLAH	2.310.637.500,-	1,15	2.236.662.330,-	1,32	73.975.170,-	96,80
		1.2.	Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat	195,91	Pemeliharaan Trantib Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	99.185.900,-		6.740.000,-		92.445.900,-	6,80
					Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.701.850.277,-		2.437.517.100,-		264.333.177,-	90,22
					Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	57.117.000,-		57.009.000,-		108.000,-	99,81
					Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	28.378.000,-		28.368.000,-		10.000	99,96
					JUMLAH	2.886.531.177,-	1,44	2.529.634.100,-	1,50	356.897.077,-	87,64

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
2	Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah	2.1.	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	0,00	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	182.700.000,-		173.140.000,-		9.560.000,-	94,77
					Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	232.851.000,-		207.433.600,-		25.417.400,-	89,08
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	276.997.722,-		272.684.822,-		4.312.900,-	98,44
					JUMLAH	692.548.722,-	0,35	653.258.422,-	0,39	39.290.300,-	94,33
		2.2.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	86,31	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	572.678.200,-		563.042.375,-		9.635.825,-	98,32
					Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	3.418.133.850,-		3.065.086.819,-		353.047.031,-	89,67
					Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	110.442.000,-		106.081.200,-		4.360.800,-	96,05
					Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	1.499.946.000,-		1.497.595.975,-		2.350.025,-	99,84
					Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	291.687.950,-		205.015.027,-		86.672.923,-	70,29
					Peningkatan Kesejahteraan Petani	562.618.350,-		562.035.374,-		582.976,-	99,90
					Peningkatan	488.402.620,-		485.233.020,-		3.169.600,-	99,35

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Produksi Hasil Pternakan						
					Peningkatan Penerapan Teknologi Pternakan	12.659.550,-		12.659.550,-		-	100
					Pengembangan Budidaya Perikanan	2.145.840.600,-		2.035.518.028,-		110.322.572,-	94,86
					Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	58.916.807,-		58.804.900,-		111.907,-	99,81
					Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	45.770.000,-		42.863.761,-		2.906.239,-	93,65
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	123.409.700,-		122.794.358,-		615.342,-	99,50
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	85.509.100,-		85.061.450,-		447.650,-	99,48
					Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pternakan	58.339.700,-		58.298.000,-		41.700,-	99,93
					JUMLAH	9.474.354.427,-	4,74	8.900.089.837,-	5,27	574.264.590,-	93,94
		2.3.	Meningkatnya daya saing Produk Daerah	126,70	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22.385.000,-		22.385.000,-		-	100
					Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	52.800.000,-		52.225.000,-		575.000,-	98,91
					Penataan Struktur Industri	41.347.000,-		40.542.000,-		805.000,-	98,05
					Pengembangan	5.283.074,-		5.225.000,-		58.074,-	98,90

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Sentra-sentra Industri potensial						
					JUMLAH	121.815.074,-	0,06	120.377.000,-	0,07	1.438.074,-	98,82
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.222.802.800,-		963.278.000,-		1.259.524.800,-	43,34
					Pengembangan Kemitraan	519.028.500,-		510.051.900,-		8.976.600,-	98,27
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	788.381.600,-		786.541.000,-		1.840.600,-	99,77
3	Meningkatk an kualitas sumber daya manusia	2.4.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	60,83	JUMLAH	3.530.212.900,-	1,76	2.259.870.900,-	1,34	1.270.342.000,-	64,02
					Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	20.227.570.600,-		19.716.077.270,-		511.493.330,-	97,47
					Manajemen Pelayanan Pendidikan	85.000.000,-		82.247.000,-		2.753.000,-	96,76
					JUMLAH	20.312.570.600,-	10,15	19.798.324.270,-	11,7 1	514.246.330,-	97,47
					Upaya Kesehatan Masyarakat	23.299.018.100,-		15.155.935.483,-		8.143.082.617,-	65,05
		3.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	99,15	Perbaikan Gizi Masyarakat	762.295.000,-		345.788.335,-		416.506.665,-	45,36
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	73.614.000,-		61.468.000,-		12.146.000,-	83,50
					Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	3.145.317.610,-		2.917.148.812,-		228.168.798,-	92,75
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.510.000,-		27.110.000,-		1.400.000,-	95,09
					Program Pengembangan Lingkungan	29.104.300,-		24.234.300,-		4.870.000,-	83,27

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Sehat						
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	125.951.400,-		38.952.500,-		86.998.900,-	30,93
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan Jaringannya	24.780.567.037,-		18.144.893.763,-		6.635.673.274,-	73,22
					Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita	5.080.000,-		3.880.000,-		1.200.000,-	76,38
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3.264.233.309,-		1.928.419.371,-		1.335.813.938,-	59,08
					Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	21.242.538.704,-		16.523.073.529,-		4.719.465.175,-	77,78
					JUMLAH	76.756.229.460,-	38,36	55.170.904.093,-	32,64	21.585.325.367,-	71,88
		3.3.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	99,12	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	135.454.800,-		132.951.940,-		2.502.860,-	98,15
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan	256.395.787,-		255.194.560,-		1.201.227,-	99,53

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Gender dalam Pembangunan						
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	71.500.400,-		71.402.000,-		98.400	99,86
					JUMLAH	463.350.987,-	0,23	459.548.500,-	0,27	3.802.487,-	99,18
		3.5.	Penurunan angka kemiskinan	102,77	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	39.376.000,-		39.276.000,-		100.000,-	99,75
					Perencanaan Pembangunan Ekonomi	38.158.320,-		38.150.520,-		7.800,-	99,98
					Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpercil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	107.188.054,-		106.181.054,-		1.007.000,-	99,06
					Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.589.745,-		85.518.205,-		3.071.540,-	96,53
					Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	18.700.000,-		16.655.000,-		2.045.000,-	89,06
					Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	15.037.000,-		14.995.000,-		42.000,-	99,72

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Sosial						
					Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	485.910.500,-		343.999.900,-		141.910.600,-	70,79
					Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	36.081.000,-		36.045.000,-		36.000,-	99,90
					Pembangunan infrastruktur Pedesaan	66.916.800,-		42.465.000,-		24.451.800,-	63,46
					Peningkatan Ketahanan Pangan	1.013.781.278,-		974.300.528,-		39.480.750,-	96,11
					Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	2.400.000,-		2.400.000,-		-	100
					JUMLAH	1.912.138.697,-	0,96	1.699.986.207,-	1,01	212.152.490,-	88,90
4	Meningkatk an tata kelola pemerintah an dan kualitas pelayanan publik	4.1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	95,71	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1.502.394.000,-		1.384.423.687,-		117.970.313,-	92,15
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.000.000,-		6.950.000,-		50.000,-	99,29
					Perencanaan Pembangunan Daerah	170.870.572,-		170.624.823,-		245.749,-	99,86
					Pengembangan Data/ Informasi	18.440.944,-		18.440.944,-		-	100
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.583.564.658,-		2.305.429.996,-		278.134.662,-	89,23

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.138.704.400,-		3.086.541.145,-		52.163.255	98,34
					Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.767.622.000,-		1.723.119.773,-		44.502.227,-	97,48
					Reformasi Birokrasi	69.682.517,-		68.549.200,-		1.133.317,-	98,37
					JUMLAH	9.258.279.091,-	4,63	8.764.079.568,-	5,19	494.199.523,-	94,66
		4.2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	104,99	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.732.650,-		75.732.650,-		-	100
					Peningkatan Kesempatan Kerja	11.049.000,-		11.049.000,-		-	100
					Penataan Administrasi Kependudukan	1.723.855.500,-		1.711.040.974,-		12.814.526,-	99,26
					JUMLAH	1.810.637.150,-	0,90	1.797.822.624,-	1,06	12.814.526,-	99,29
	5	5.1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	104,05	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	27.445.000,-		27.445.000,-		-	100
					Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.785.000,-		4.785.000,-		-	100
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	32.450.000,-		32.235.000,-		215.000,-	99,34

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Desa						
					JUMLAH	64.680.000,-	0,03	64.465.000,-	0,04	215.000,-	99,67
6	Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan	6.1.	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	98,88	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	32.945.677.000,-		29.686.555.170,-		3.259.121.830,-	90,11
					Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.462.459.996,-		3.052.611.485,-		409.848.511	88,16
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13.052.514.200,-		11.707.964.404,-		1.344.549.796,-	89,70
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.834.186.800,-		6.499.132.500,-		335.054.300,-	95,10
					Pengembangan Perumahan	4.098.584.000,-		4.077.508.714,-		21.075.286,-	99,49
					Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum	7.421.462.000,-		6.904.155.000,-		517.307.000,-	93,03
					JUMLAH	67.814.883.996,-	33,89	61.927.927.273,-	36,64	5.886.956.723,-	91,32
		6.2.	Terjaganya Kualitas Lingkungan	101,66	Lingkungan sehat Perumahan	215.066.365,-		214.955.365,-		111.000,-	99,95
					Pemberdayaan Komunitas Perumahan	21.097.000,-		21.082.633,-		14.367,-	99,93
					Pengembangan Kinerja	1.899.921.000,-		1.881.208.320,-		18.712.680,-	99,02

NO.	MISI	NO.	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	BOB OT (%)	REALISASI (Rp)	BOB OT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
					Pengelolaan Persampahan						
					Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	231.848.402,-		223.349.402,-		8.499.000,-	96,33
					Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	119.425.220,-		113.783.220,-		5.642.000,-	95,28
					Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.815.000,-		1.815.000,-		-	100
					Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.078.600,-		28.605.000,-		1.473.600,-	95,10
					Peningkatan Pengendalian Polusi	7.645.000,-		7.615.000,-		30.000,-	99,61
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	152.845.891,-		151.450.067,-		1.395.824,-	99,09
					JUMLAH	2.679.742.478,-	1,34	2.643.864.007,-	1,56	35.878.471,-	98,66
					JUMLAH	4.674.867.435,-	1,39	4.438.369.348,-	1,51	236.498.087,-	94,94
JUMLAH PROGRAM UTAMA PENCAPAIAN SASARAN (SESUAI RPJM)						200.088.612.259,-	100	169.026.814.131,-	100	31.061.798.128,-	
JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN						236.818.869.760,-		217.570.756.907,-		19.248.112.853,-	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						436.907.482.019,-		386.597.571.038,-		50.309.910.981,-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.76.756.229.460,- atau sebesar 38,36% dari total seluruh alokasi anggaran program utama.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Produk Daerah sebesar Rp.121.815.074,- atau sebesar 0,06% dari total alokasi anggaran program utama.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Strategis Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah sebesar Rp.61.927.927.273,- atau sebesar 36,64% dari total realisasi seluruh anggaran program utama.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari sebesar Rp.64.465.500,- atau sebesar 0,04% dari total realisasasi seluruh anggaran program utama.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.21.585.325.367,- atau sebesar 28,12% dari total alokasi anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari sebesar Rp.215.000,- atau sebesar 0,33% dari total total alokasi anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 2.3.20
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

NO.	SASARAN	% RATA RATA CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
1.1	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	98,80	2.310.637.500,-	2.236.662.330,-	96,80	Efisien
1.2	Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat	195,91	2.886.531.177,-	2.529.634.100,-	87,64	Efisien
2.1	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro dan koperasi	0,00	692.548.722,-	653.258.422,-	94,33	Tidak Efisien
2.2	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	86,31	9.474.354.427,-	8.900.089.837,-	93,94	Tidak Efisien
2.3	Meningkatnya daya saing Produk Daerah	126,70	121.815.074,-	120.377.000,-	98,82	Efisien
2.4	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	60,83	3.530.212.900,-	2.259.870.900,-	64,02	Tidak Efisien
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	-	20.312.570.600,-	19.798.324.270,-	97,47	-
3.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	99,15	76.756.229.460,-	55.170.904.093,-	71,88	Efisien
3.3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	99,12	463.350.987,-	459.548.500,-	99,18	Tidak Efisien
3.4	Penurunan angka kemiskinan	102,77	1.912.138.697,-	1.699.986.207,-	88,90	Efisien
4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	95,71	9.258.279.091,-	8.764.079.568,-	94,66	Efisien

4.2	Meningkatnya kualitas layanan publik	104,99	1.810.637.150,-	1.797.822.624,-	99,29	Efisien
5.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	104,05	64.680.000,-	64.465.000,-	99,67	Efisien
6.1	Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	98,88	67.814.883.996,-	61.927.927.273,-	91,32	Efisien
6.2	Terjaganya Kualitas Lingkungan	101,66	2.679.742.478,-	2.643.864.007,-	98,66	Efisien

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebanyak 43 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp.62.950.000.795,- dan total setelah ditetapkan HPD turun menjadi sebesar Rp.49.544.322.284,- dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran turun menjadi sebesar Rp.49.537.347.039,- sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.8.252.653.756,- atau sebesar 13,11% dari total HPS

3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi dari Inspektorat Tahun 2020 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

a. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melengkapi narasi pada setiap indikator dengan jelas dan tepat serta menjelaskan upaya perbaikan/solusi kedepan terhadap target yang tidak tercapai pada setiap indikator.
 - Setiap Indikator Kinerja Utama telah disempurnakan dengan narasi atau penjelasan yang menggambarkan upaya perbaikan/solusi kedepan terhadap target yang tidak tercapai pada setiap indikator.
2. Terkait dengan pengumpulan data dan informasi dari setiap unit kerja agar diterbitkan Keputusan Kepala OPD tentang Penanggungjawab Pengumpul Data / Informasi di setiap unit kerja.
 - Telah ditindaklanjuti dengan menyurati seluruh OPD untuk menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala OPD masing-masing yang mengatur tentang Penanggungjawab Pengumpul Data/Informasi di setiap unit kerjanya.

3. Pada setiap indikator kinerja ditampilkan data pembandingan berupa data target kinerja tahun sebelumnya.
 - Dilaporan LKjIP tahun 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan pembandingan antara target, realisasi tahun ini (n) dengan tahun sebelumnya (n-1) dan dengan tahun selanjutnya (n+1)
4. Melakukan kaji ulang terhadap indikator kinerja yang belum SMART sehingga dapat dilakukan perubahan atau perbaikan untuk mendapatkan indikator kinerja yang betul-betul SMART. Untuk kegiatan ini diharapkan kepada Bagian Organisasi untuk mengkoordinasikan dengan Bapelitbang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.
 - Indikator Kinerja telah dikaji ulang dengan keluarnya Perbup Nomor 44 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 45 Tahun 2020 sehingga Sasaran Strategis yang semula berjumlah 17 menjadi 15 dan IKU semula yang berjumlah 27 menjadi 21.
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Juga Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap LKjIP Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Rekomendasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan poin 1 sampai 4.
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/396/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

PERENCANAAN KINERJA

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

- a. Melakukan Revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua RPJMD periode 2016-2021 dengan Penambahan Indikator Tujuan sesuai dengan

Bimbingan dan arahan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- b. Melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Indikator Utama (IKU) Kepala Daerah sehingga sasaran strategis dari 17 menjadi 15 dan 27 Indikator menjadi 21 Indikator
 - c. Melakukan revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPJMD dengan menambahkan indikator tujuan yang sesuai dengan arahan dan bimbingan Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Memperbaiki Penjabaran Perencanaan Kinerja (*cascade down*) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra pada perangkat daerah, program / kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

- a. Menyusun Pohon Kinerja (Cascade) Pemerintah Kabupaten dan dijabarkan oleh Perangkat Daerah sehingga sasaran strategis Pemerintah Kabupaten tercapai selama periode 2016 - 2021
- b. Sudah menyelaraskan program dan kegiatan pada renstra perangkat daerah sesuai dengan turunan kinerja masing-masing.
- c. Penganggaran pada perangkat daerah akan disesuaikan untuk mendukung pencapaian target-target pada RPJMD.

PENGUKURAN KINERJA

Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi criteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

Indikator Kinerja Utama Daerah telah dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 sehingga sasaran IKU dari 17 sasaran strategis menjadi 15 sasaran strategis, 27 IKU menjadi 21 IKU dan Perangkat daerah sudah dilakukan revisi agar keberhasilan / tolak ukur kinerja dapat terukur dan lebih jelas

PELAPORAN KINERJA

Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

1. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini telah disajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja
2. Penyajian Informasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh agar dapat menjadi umpan balik untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.
3. Dalam Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2020 telah disajikan Analisis Penggunaan Sumber Daya dalam rangka peningkatan pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2020

EVALUASI INTERNAL

Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen perangkat daerah serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing perangkat daerah

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

1. Akan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk perbaikan baik dokumen maupun implementasi di perangkat daerah.

CAPAIAN KINERJA

Menyusun rencana aksi setiap Perangkat Daerah sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi :

1. Tahun ini dan selanjutnya Perjanjian Kinerja yang akan disusun harus menyajikan dan melampirkan rencana aksi program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja yang optimal.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulan) dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Kepala Daerah.
3. Melaporkan Capaian Kinerja atas rencana aksi secara berkala Kepada Kepala Daerah melalui Bapelitbang dengan Laporan Kinerja Triwulan.

3.2 Prestasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota cukup banyak mengukir prestasi dan penghargaan yang tercatat pada berbagai OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota baik itu ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi Sumatera Barat. Rincian prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.21
Prestasi dan Penghargaan Yang Diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

NO	OPD	PRESTASI
1	2	3
1.	Badan Keuangan	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat. predikat itu merupakan pencapaian yang ke-lima kalinya secara berturut-turut diterima Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi.
2.	Badan Keuangan	Penghargaan Terbaik 2 Penyaluran Dana Desa Dari Rkud Ke Rkud Dari Kppn Bukittinggi
3.	Badan Keuangan	Peringkat I Atas Penyelenggaraan Database Dan Premi Iwp, Jkk & Jkm Pada Kebersetaan Pegawai Negeri Sipil
4.	Badan Keuangan	Penghargaan dari Kawil DJP Sumbar, Jambi di Kabupaten Tanah Datar
5.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten Harapan III
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Penghargaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Rangkang I Untuk Lokus tahun 2020
7.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Kategori Kabupaten paling Inovatif
8.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Capaian Response Rate yang melebihi target dalam pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) Online
9.	Dinas PMD/N	Juara 1 Posyantek Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
10.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Prestasi di Bidang Koperasi untuk Kategori Daerah Dengan Kinerja Koperasi Terbaik Tahun 2020

NO	OPD	PRESTASI
1	2	3
11.	Nagari Taram	Pokdarwis (kelompok sadar wisata)terbaik tingkat sumbar
12.	Nagari Taram	Penghargaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu, 26 Agustus 2020 Kategori Praktik Baik Penggunaan Dana Desa Dengan Baik
13.	Dinas Parpora	Juara I the best pevormment peduli wisata a ward dan GIPI a ward
14.	Inspektorat	Penghargaan dalam pencapaian kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Level 3
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	"Achievement Motivation award" Keterbukaan Informasi Publik
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Predikat SPBE yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB dengan kategori baik dengan nilai 3,17
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terbaik II Penghargaan Berbahasa Indonesia bagi Media Massa Instansi Pemerintah se Sumatera Barat

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah di atur bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yaitu dengan menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. **Asas Desentralisasi** yaitu merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi daerah, **Asas Dekonsentrasi** yaitu terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Sedangkan **asas Tugas Pembantuan** terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantuan merupakan urusan pemerintah diluar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak. Pada tahun anggaran 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan Standar Pelayanan Minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dibidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM dan Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	55.800	54.495	97,66 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	2.287	2.250	98,38 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	13.101	12.802	97,71 %

Pada pelayanan Pendidikan Dasar, jumlah warga negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) adalah sebanyak 54.495 orang dari jumlah warga negara yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seluruhnya yakni sebesar 55.800 orang sehingga pencapaian partisipasi Pendidikan Dasar adalah sebesar 97,66%.

Pada pelayanan Pendidikan Kesetaraan, jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan adalah sebanyak 2.250 orang dari jumlah warga negara 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seluruhnya yakni sebesar 2.287 orang sehingga pencapaian partisipasi Pendidikan kesetaraan adalah sebesar 98,38%.

Pada pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD sebanyak 12.802 orang dari jumlah warga negara 5-6 tahun yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seluruhnya yakni sebesar 13.101 orang sehingga pencapaian partisipasi PAUD adalah sebesar 97,71%.

4.1.3 Realisasi

Urusan Pendidikan selama tahun 2020 (sampai dengan bulan Desember) dengan realisasi sebesar Rp.40.380.364.872,-.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2020 (sampai dengan bulan Desember) telah dialokasikan dana sebesar Rp.101.214.535.436,-.

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	3653	S3 : - S2 : 64 Orang S1 : 3188 Orang D3 : 36 Orang D2 : 161 Orang D1 : 16 Orang SMA : 145 Orang SMP : 25 Orang SD : 17 Orang	Gol IV : 80 Orang Gol III : 1793 Orang Gol II : 1663 Orang Gol I : -	Eselon II : 1 Orang Eselon III : 5 Orang Eselon IV : 12 Orang	3636 Orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Belum tercapainya target SPM ini disebabkan:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan;
- Sebaran lembaga TK yang tidak merata di setiap jorong;
- Tidak semua peserta didik memiliki perangkat pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi;
- Tidak semua nagari terjangkau oleh jaringan internet.

Solusi

- Diharapkan Pemerintah Daerah memperluas jangkauan jaringan internet untuk semua nagari;
- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program 1 jorong 1 PAUD;
- Membuat program retrival bagi anak putus sekolah bagi masyarakat yang ekonomi lemah;
- Memberikan beasiswa transisi bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
- Pelayanan Kesehatan Balita;

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

4.2.2 Target Pencapaian SPM dan Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	8.268	6.266	75,8 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	7.892	6.162	78,1 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	7.516	5.965	79,4 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	36.944	23.950	64,8 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	11.365	7.574	66,6 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	276.185	15.298	5,5 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	50.739	28.420	56 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	67.665	8.791	13 %
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	4.419	1.889	42,7 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (Psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	811	741	91,4 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.630	2.296	18,2 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	9.531	3.149	33 %

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Adalah jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan *antenatal care* (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan ibu hamil K4 sampai dengan Desember 2020 baru sebesar 75,8 % (6.266 ibu hamil K4 dari 8.268 ibu hamil) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100%, sehingga sampai dengan Desember tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah masing- masing 80%, 79,6% dan 82,9% maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia belum memadai, namun dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan.

Jumlah tenaga kesehatan terutama bidan sudah mencukupi, tetapi penyebarannya di setiap puskesmas tidak merata. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM ini melibatkan :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Puskesmas dan jaringannya;
- c. Kontribusi swasta/masyarakat melalui: peran Bidan praktek swasta (BPS) dan pelaksanaan Posyandu.

Alokasi Anggaran

No	SPM	Alokasi Dana Awal (Rp)	Alokasi Dana Setelah Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.342.000	28.667.000	APBD

Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing- masing puskesmas.

Dukungan Personil

No	SPM	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri	2 Bidan Nusantara Sehat

Rata-rata rasio tenaga bidan di Indonesia menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 75,646 per 100 ribu penduduk. Angka rata-rata ini dinilai masih dibawah standar rasio tenaga bidan per 100 ribu penduduk yang diinginkan oleh pemerintah sebesar 104 per 100 ribu penduduk (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Permasalahan Dan Solusi

No	SPM	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Kunjungan ibu hamil trimester I banyak yang tidak terjangkau (K1 akses: 2,8%) b. Pelayanan ANC belum sesuai standar (10 T)	a. Pemanfaatan dana BOK dan BLUD untuk peningkatan kualitas pelayanan ANC (penjaringan dan sapsas kesehatan di puskesmas). b. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pertemuan.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Adalah jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan, dihitung dari persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sampai dengan Desember 2020 sebesar 78,1% (6.162 ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 7.892 sasaran ibu bersalin) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100%, kurang dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah masing- masing 78%, 78,9% dan 81,1% maka terjadi penurunan. Hal ini sejalan dengan menurunnya capaian K4 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia belum memadai, namun dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, sehingga persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan bisa tercapai 100%. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM ini melibatkan:

- Dinas Kesehatan;
- Puskesmas dan jaringannya;
- Kontribusi swasta/masyarakat melalui : peran Bidan praktek swasta (BPS).

Alokasi Anggaran

No	SPM	Alokasi Dana Awal (Rp)	Alokasi Dana Setelah Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.408.577.000	3.235.566.309	DAK Non Fisik dan APBD

Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing puskesmas.

Dukungan Personil

No	SPM	DUKUNGAN PERSONIL	
		PNS	NON PNS
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri	2 Bidan Nusantara Sehat

Permasalahan Dan Solusi

No	SPM	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sarana dan prasarana pustu dan poskesri belum sesuai standar	a. Mengusulkan semua puskesmas menjadi puskesmas PONED. b. Pelatihan PONED bagi petugas puskesmas.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Adalah jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir (minimal 3 kali yaitu 1 kali umur 6-48 jam, 1 kali umur 3-7 hari, 1 kali umur 8-28 hari) sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sampai dengan Desember 2020 sebesar 79,4% (5.965 bayi baru lahir yang telah dilayani dari 7.516 bayi baru lahir) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100%, kurang dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah masing-masing 79,3%, 80% dan 84% maka terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanding dengan menurunnya jumlah persalinan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia belum memadai, namun dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi sehingga pelayanan kesehatan bayi baru lahir bisa tercapai 100%. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM ini melibatkan :

- Dinas Kesehatan;
- Puskesmas dan jaringannya;
- Kontribusi swasta/masyarakat melalui: peran Bidan praktek swasta (BPS).

Alokasi Anggaran

No	SPM	Alokasi Dana Awal (Rp)	Alokasi Dana Sesudah Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,-	0,-	

Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing puskesmas.

Dukungan Personil

No	SPM	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri	2 Bidan Nusantara Sehat

Permasalahan Dan Solusi

No	SPM	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a. Petugas tidak memberikan pelayanan esensial BBL sesuai standar (Vit.K, Salp Mata, Hb0 dll) b. Sarana di RS tidak mencukupi untuk pelayanan kegawatdaruratan BBL c. Sarana dan prasarana pustu dan poskesri belum sesuai standar, SDM	a. Pelatihan Pelayanan Kesehatan BBL bagi petugas b. Mengusulkan penambahan alat (sarana) pelayanan BBL di RS

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Adalah jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan balita sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan balita sampai dengan Desember 2020 sebesar 64,8% (23.950 balita yang telah dilayani dari 36.944 sasaran balita) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100%, kurang dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah masing-masing 77,55%, 77,1% dan 77,5% maka terjadi penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan balita baik fasilitas kesehatan maupun di posyandu.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia belum memadai, sehingga pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi sehingga pelayanan kesehatan balita bisa tercapai 100%. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM ini melibatkan :

- Dinas Kesehatan;
- Puskesmas dan jaringannya;
- Kontribusi swasta/masyarakat melalui: peran Bidan praktek swasta (BPS) dan posyandu.

Alokasi Anggaran

No	SPM	Alokasi Dana Awal (Rp)	Alokasi Dana Sesudah Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Balita	12.000.000	3.880.000	APBD

Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing- masing puskesmas.

Dukungan Personil

No	SPM	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Kesehatan Balita	1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/poskesri	2 Bidan Nusantara Sehat

Permasalahan Dan Solusi

No	SPM	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Balita	a. Stimulasi Deteksi Intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) balita belum maksimal dilaksanakan karena jumlah tenaga terlatih masih kurang b. Tidak semua anak balita mendapat Pemantauan SDIDTK c. Pelayanan Balita sakit tidak menggunakan MTBS	Pelatihan SDIDTK bagi petugas, kader, guru TPA dan PAUD

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Adalah jumlah semua anak usia Pendidikan Dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat *skrining* kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Untuk tahun 2020 dari target 11.365 orang, baru yang mendapat pelayanan sesuai standar 66,6 % (7.574 orang).

Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota yang pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing puskesmas melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dukungan Personil

Personil dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebanyak 861 orang yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Nutrisisionis, Sanitarian, Petugas Labor dan petugas kesehatan lainnya yang tersebar di 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2020 pencapaian masih dibawah 100%, yaitu 66,6%. Angka ini masih kurang, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah ditiadakan berganti menjadi kegiatan pembelajaran daring/online sehingga penjangkauan kesehatan pada siswa/siswi tidak bisa dilakukan secara optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa solusi antara lain :

- a. Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait;
- b. Pengembangan program inovasi puskesmas dalam meningkatkan cakupan program.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Adalah Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana;
- b. Skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.

Pelayanan Skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
- b. Pengukuran tekanan darah;
- c. Pemeriksaan gula darah;
- d. Anamnesa perilaku beresiko.

Untuk tahun 2020 dari target 276.185 orang baru yang mendapat pelayanan sesuai standar 5,5% (15.298 orang). Angka ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Seksi P2PTM, Keswa dan Napza dimana alokasi anggarannya sebesar Rp.87.315.880,-. Namun saat timbul wabah global *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) anggaran mengalami *refocusing* menjadi Rp.16.410.000,-. Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing puskesmas.

Dukungan Personil

Personil dalam pelaksanaan kegiatan masih terbatas, pengelola program PTM di masing-masing puskesmas dipegang oleh 1 orang tenaga kesehatan. Setiap melakukan kegiatan posbindu PTM dibutuhkan petugas kesehatan sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari perawat, petugas labor dan petugas gizi. Pelaksanaan Posbindu PTM di masyarakat menggunakan sistem 5 meja dimana diperlukan 5 orang kader Posbindu PTM untuk tiap pelaksanaan Posbindu. Tahun 2020 terdapat 278 posbindu di masyarakat, dengan jumlah kader yang ada sebanyak 384 kader. Jika kita mengaju pada petunjuk teknis pelaksanaan Posbindu PTM dengan jumlah posbindu sebanyak 278 posbindu, diperlukan kader pelaksana sebanyak 1390 orang kader. Berdasarkan hal itu maka jumlah kader yang aktif masih kurang, hanya ada kader aktif sebesar 27,63%. Keadaan ini akan sangat mempengaruhi pada pencapaian kegiatan. Pada masa yang akan datang dibutuhkan penambahan jumlah kader aktif.

Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2020 terdapat 278 posbindu yang tersebar di 22 puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari jumlah jorong yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, baru 66,9% jorong yang memiliki posbindu. Data ini meningkat dibandingkan data tahun 2019. Dari 278 posbindu yang ada jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang ada, maka masing-masing posbindu melayani 811 orang, sehingga dapat disimpulkan untuk perlunya penambahan posbindu PTM di masyarakat. Dari 278 posbindu yang ada hanya tersedia 66 set Posbindu KIT, berarti hanya 23,7% dari posbindu yang ada yang mempunyai posbindu KIT.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 15 tahun sampai 59 tahun sebanyak 276.185 jiwa, yang melakukan *skrining* kesehatan pada tahun 2020 sebanyak 15.298 jiwa atau baru sekitar 5,5%. Dibandingkan target, angka ini masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya pendanaan dalam mendukung kegiatan melalui APBD kabupaten
Karena pada tahun 2020 semua dana dialihkan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19;
- b. Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang;
- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi di faktor resiko penyakit, baik pada penyakit menular maupun penyakit tidak menular;
- e. Alokasi anggaran yang masih terbatas;
- f. Jumlah sarana posbindu yang masih terbatas di masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa solusi antara lain :

- a. Melakukan penambahan dan pelatihan kader posbindu dimasyarakat;
- b. Beberapa puskesmas mulai mengusulkan pengadaan posbindu KIT melalui dana desa kepada Wali Nagari;
- c. Melakukan posbindu di tempat kerja, sehingga dapat menjangkau karyawan/karyawati kantor-kantor di lingkungan Pemda untuk ikut melakukan deteksi dini FR PTM;
- d. Melakukan kegiatan Cerdik PTM di sekolah.

7. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Adalah jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat *skrining* kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia sampai dengan Desember 2020 sebesar 56% (28.420 lanjut usia yang telah dilayani dari 50.739 sasaran lanjut usia) sedangkan target pada tahun 2019 adalah 100%, kurang dari target yang ditentukan. Dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 67,5% (33.015 lanjut usia yang telah dilayani dari 48.946 sasaran lanjut usia), terjadi penurunan pelayanan kesehatan lanjut usia. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan lanjut usia baik fasilitas kesehatan maupun di posyandu Lansia.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia tidak ada, karena dialihkan ke penanganan Pandemi Covid-19. Hal ini juga ikut mempengaruhi pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi sehingga pelayanan kesehatan lanjut usia bisa tercapai 100%. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM ini melibatkan :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Puskesmas dan jaringannya;
- c. Kontribusi swasta/masyarakat melalui: peran Bidan praktek swasta (BPS) dan posyandu lansia.

Alokasi Anggaran

No	SPM	Alokasi Dana Awal (Rp)	Alokasi Dana Sesudah Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	63.680.000	0,-	APBD

Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing- masing puskesmas.

Dukungan Personil

No	SPM	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program lansia di puskesmas	

Permasalahan Dan Solusi

No	SPM	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	Belum semua petugas mendapatkan pelatihan pelayanan puskesmas santun lansia, keterbatasan jumlah petugas.	Pelatihan pelayanan puskesmas santun lansia bagi dokter dan petugas puskesmas

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Adalah jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Penderita Hipertensi di Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan prevalensinya sebesar 24,5% dari total penduduk usia 15 tahun keatas (RISKESDAS 2018). Dari data prevalensi tersebut diperoleh estimasi penduduk yang menderita hipetensi sebanyak 67,665 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan baru sebanyak 8.791 orang, berarti baru sebanyak 13% penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari total estimasi penderita yang ada.

Pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus diberikan pada penderita Hipertensi meliputi :

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Seksi P2PTM, Keswa dan Napza dimana alokasi anggarannya sebesar Rp.87.315.880,-. Namun saat timbul wabah global Covid-19 anggaran mengalami *refocusing* menjadi Rp.16.410.000,-. Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing- masing puskesmas.

Dukungan Personil

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di puskesmas ditangani oleh dokter, perawat atau juga bisa Bidan. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 52 orang dimana rasionya 2-3 orang dokter per puskesmas. Sedangkan jumlah perawat sebanyak 172 orang dengan rasionya 7-8 orang perawat per puskesmas. Adapun jumlah Bidan termasuk bidan yang berada di nagari sebanyak 424 orang dengan rasio 19-20 bidan dalam 1 puskesmas. Estimasi penderita hipertensi yang harus ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 67.665 orang, dimana setiap perawat dan bidan harus menemukan 113 orang penderita/tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu peningkatan kegiatan penemuan kasus di lapangan.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2020 Estimasi penderita hipertensi yang harus ditemukan sebanyak 67.665 orang, yang ditemukan sebanyak 8.791 jiwa atau baru sekitar 13%.

Dibandingkan target, angka ini masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya pendanaan dalam mendukung kegiatan melalui APBD kabupaten karena pada tahun 2020 semua dana dialihkan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19;
- b. Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang;

- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi di faktor resiko penyakit tidak menular, khususnya Hipertensi;
- e. Alokasi anggaran yang masih terbatas;
- f. Jumlah sarana posbindu yang masih terbatas di masyarakat;
- g. Kurangnya kegiatan deteksi dini masyarakat, sehingga penemuannya masih rendah;
- h. Belum semua puskesmas memiliki petugas yang telah dilatih Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM;

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa solusi antara lain :

- a. Melakukan pelatihan PANDU PTM bagi petugas puskesmas melalui pembinaan langsung dilapangan;
- b. Melakukan penambahan pembentukan posbindu baru dan pelatihan kader posbindu di masyarakat;
- c. Beberapa puskesmas mulai mengusulkan pengadaan posbindu KIT melalui dana desa kepada wali nagari;
- d. Melakukan posbindu di tempat kerja, sehingga dapat menjangkau karyawan/karyawati kantor-kantor di lingkungan Pemda untuk ikut melakukan deteksi dini FR PTM;
- e. Melakukan kegiatan cerdik PTM di sekolah.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Adalah Jumlah Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Penderita Diabetes Mellitus di Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan prevalensinya sebesar 1,6% dari total penduduk usia 15 tahun keatas (RISKESDAS 2018). Dari data prevalensi tersebut diperoleh estimasi penduduk yang menderita DM sebanyak 4.419 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan DM yang mendapat pelayanan kesehatan baru sebanyak 1.889 orang, berarti baru sebanyak 42,7% penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari total estimasi penderita yang ada.

Pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus diberikan pada penderita Diabetes Mellitus meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Seksi P2PTM, Keswa dan Napza dimana alokasi anggarannya sebesar Rp.87.315.880,-. Namun saat timbul wabah global Covid-19 anggaran mengalami *refocusing* menjadi Rp.16.410.000,-. Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing puskesmas.

Dukungan Personil

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus di puskesmas ditangani oleh dokter, perawat atau juga bisa Bidan. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 52 orang dimana rasionya 2 orang dokter per puskesmas. Sedangkan jumlah perawat sebanyak 172 orang dengan rasionya 7-8 orang perawat per puskesmas. Adapun jumlah Bidan termasuk bidan yang berada di nagari sebanyak 424 orang dengan rasio 19-20 bidan dalam 1 puskesmas. Estimasi penderita DM yang harus ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 4.419 orang, dimana setiap perawat dan bidan harus menemukan 7-8 orang penderita/tahun.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2020 Estimasi penderita DM yang harus ditemukan sebanyak 4.419 orang, yang ditemukan sebanyak 1.889 jiwa atau baru sekitar 42,7%.

Dibandingkan target, angka ini masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya pendanaan dalam mendukung kegiatan melalui APBD kabupaten karena pada tahun 2020 semua dana dialihkan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19;
- b. Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang;
- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi di faktor resiko penyakit tidak menular, khususnya Hipertensi;
- e. Alokasi anggaran yang masih terbatas;
- f. Jumlah sarana posbindu yang masih terbatas di masyarakat;
- g. Kurangnya kegiatan deteksi dini di masyarakat, sehingga penemuannya masih rendah;

- h. Belum semua puskesmas memiliki petugas yang telah dilatih Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa solusi antara lain :

- a. Melakukan pelatihan PANDU PTM bagi petugas puskesmas melalui pembinaan langsung di lapangan;
- b. Melakukan penambahan pembentukan posbindu baru dan pelatihan kader posbindu di masyarakat;
- c. Beberapa puskesmas mulai mengusulkan pengadaan posbindu KIT melalui dana desa kepada wali nagari;
- d. Pengusulan pembelian posbindu KIT melalui dana DAK Tugas Perbantuan pada tahun 2020;
- e. Melaku posbindu di tempat kerja, sehingga dapat menjangkau karyawan/karyawati kantor-kantor di lingkungan Pemda untuk ikut melakukan deteksi dini FR PTM;
- f. Melakukan kegiatan Cerdik PTM di sekolah.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Adalah jumlah ODGJ Berat (Psikotik) di wilayah Kerja Kabupaten yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotive preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan bagi ODGJ Berat meliputi :

- a. Pemeriksaan status mental;
- b. Wawancara;
- c. Edukasi kepatuhan makan obat;
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Hal yang juga penting dilakukan oleh petugas, khususnya perawat terlatih jiwa adalah mengedukasi keluarga tentang perawatan di rumah terhadap pasien ODGJ Berat. Pada tahun 2020 pasien ODGJ Berat yang ditemukan sebanyak 811 orang, dan yang teratur mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 714 orang (91,4%).

Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan jiwa melalui APBD Kabupaten hanya sebesar Rp.31.438.150,-. Alokasi dana ini juga di *refocusing* untuk penanggulangan Covid-19 menjadi Rp.3.352.000,-. Demikian juga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak peserta tidak bisa dilakukan. Disamping alokasi anggaran tersebut kegiatan ini juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing puskesmas.

Dukungan Personil

Personil untuk program kesehatan jiwa berada di puskesmas yang terdiri dari Dokter Umum dan Perawat, dimana syaratnya adalah telah dilatih tentang Kesehatan Jiwa. Sampai tahun 2020 baru 14 Puskesmas yang dilatih tentang Kesehatan Jiwa bagi dokter dan perawat (63,6%), masih ada 8 puskesmas lagi yang belum dilatih.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2020 baru 91,4% dari ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Masih adanya ODGJ berat yang tidak mau datang ke puskesmas dan tidak mau makan obat dengan teratur;
- b. Masih kurangnya kesadaran dari anggota keluarga untuk membawa keluarga mereka dengan ODGJ berat ke puskesmas;
- c. Kurangnya dilakukan kegiatan Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat) di tingkat puskesmas, sehingga kegiatan *home care* pasien ODGJ berat tidak terlaksana dengan baik;
- d. Minimnya dana dari APBD Kabupaten untuk mendukung kegiatan.

Solusi yang dilakukan :

- a. Melakukan kerjasama dengan Panti Sosial Bina Laras Bengkulu dalam pelaksanaan *home care* pada pasien ODGJ Berat;
- b. Membentuk kegiatan Nagari Peduli Kesehatan Jiwa untuk meningkatkan wawasan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa;
- c. Melakukan kegiatan *family gathering* bagi pasien dan keluarga ODGJ berat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengobatan bagi pasien.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan *Tuberkulosis* (TBC)

Adalah jumlah orang yang terduga TB yang ditemukan dan mendapat pelayanan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah perkiraan orang terduga dalam kurun waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal untuk pemeriksaan orang yang terduga TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2020 sebanyak 12.630 orang dengan target sebesar 100%. Capaian persentase orang yang terduga TB yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2020 adalah sebanyak 2.296 orang (18,2%) masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 12.630 (100%).

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan P2 TB tergabung dalam kegiatan 1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular dengan pagu dana sebesar Rp.34.740.000,- dari total anggaran tersebut untuk program TB sebesar Rp.14.030.000,- yang digunakan untuk kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi, pertemuan KPP-PRM TB, konsultasi dan koordinasi program. Selain dana APBD kegiatan penyuluhan sosialisasi dan penjangkaran suspek TBC juga di anggarkan oleh dana BOK Puskesmas yang dilaksanakan oleh masing-masing Puskesmas sesuai kebutuhan Puskesmas.

Dukungan Personel

Dukungan Personel dalam pelaksanaan program kegiatan untuk program TB di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di seksi P2M, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Rujukan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan merupakan tupoksi di seksi P2M, dengan melibatkan seksi terkait antara lain seksi kesga-gizi, seksi Promkes, seksi Kesehatan Lingkungan dan seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Untuk Puskesmas termasuk dalam program UKM dengan melibatkan pengelola program TB dan P2M Puskesmas, tenaga laboratorium, Dokter, KIA, Bidan Desa, Perkesmas Gizi dan Promosi kesehatan;
- c. Rumah Sakit meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis, dan jejaring kerja lainnya seperti Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh, Yarsi Payakumbuh, RSIA Annisa Payakumbuh, RSAM Bukit Tinggi, RS Khusus Paru Lubuk Alung dan RSUP M.Djamil Padang;
- d. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Lima Puluh Kota;

- e. Kader Posyandu/Kader P2M;
- f. Lintas Sektor terkait, seperti Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas, dan lain-lain;
- g. Lembaga Sosial Masyarakat/LSM.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Masih kurangnya alat dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan, seperti Rapid Test dan lain-lain;
- Masih kurangnya kader dan petugas terlatih dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terbatasnya dan adanya petugas di Puskesmas dan tugas rangkap petugas di Puskesmas;
- Masih kurangnya integrasi program dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- Pelacakan kasus/deteksi dini belum optimal dilakukan, sebagian besar hanya bersifat pasif dan dihadapi oleh kondisi pandemi Covid-19;
- Terbatasnya anggaran;
- Komitmen Petugas yang masih kurang dalam pelaksanaan program;
- Stigma masyarakat yang masih tinggi dan masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan kesehatan.

b. Solusi/Tindak Lanjut

- Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi dan KIE dimasyarakat;
- Mengusulkan untuk meningkatkan sarana prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan Program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk kader atau kelompok khusus dan petugas kesehatan;
- Membentuk Kelompok Peduli AIDS di Nagari atau Kecamatan;
- Membentuk Jorong/Nagari Peduli TB;
- Mengusulkan pelatihan bagi petugas dan kader;
- Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan deteksi dini/screening;
- Meningkatkan kegiatan pelacakan kasus dan deteksi dini secara aktif melalui kegiatan-kegiatan diluar gedung dan dalam gedung serta melakukan penyisiran kasus ke rumah sakit baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun luar Kabupaten;

- Menggalang Komitmen bersama dalam pelaksanaan program dengan melibatkan organisasi profesi dan lintas sektor;
- Pengembangan Program Inovasi Puskesmas dalam meningkatkan cakupan program.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Adalah jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan edukasi dan pemeriksaan HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun. Pelayanan Kesehatan orang dengan beresiko terinfeksi HIV adalah sebesar 9.531 orang dimana capaian pada tahun 2020 adalah 3.149 orang (33%).

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan P2 HIV berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan 1.02.1.02.01.22.12 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebesar Rp.60.737.000,-. Selain dana APBD kegiatan Penyuluhan sosialisasi dan penjarangan suspek HIV juga di anggarkan oleh dana BOK Puskesmas yang dilaksanakan oleh masing-masing Puskesmas sesuai kebutuhan Puskesmas.

Dukungan Personel

Dukungan Personel dalam pelaksanaan program kegiatan untuk program HIV di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di seksi P2M, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Rujukan.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan merupakan tupoksi di seksi P2M, dengan melibatkan seksi terkait antara lain seksi kesga-gizi, seksi Promkes, seksi kesehatan lingkungan dan seksi pelayanan kesehatan;
- b. Untuk Puskesmas termasuk dalam program UKM dengan melibatkan pengelola program HIV dan P2M Puskesmas, tenaga laboratorium, Dokter, KIA, Bidan Desa, Perkesmas Gizi dan Promosi kesehatan;
- c. Rumah Sakit meliputi Rumah Sakit Ahmad Darwis, dan jejaring kerja lainnya seperti Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh, Yarsi Payakumbuh, RSIA Annisa Payakumbuh, RSAM Bukit Tinggi, RS Khusus Paru Lubuk Alung dan RSUP M.Djamil Padang;
- d. Komisi penanggulangan AIDS Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Kader Posyandu/Kader P2M;

- f. Lintas Sektor terkait, seperti Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas, dan lain-lain;
- g. Lembaga Sosial Masyarakat/LSM.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Masih kurangnya alat dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan, seperti Rapid Test dan lain-lain;
- Masih kurangnya kader dan petugas terlatih dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terbatasnya dan adanya petugas di Puskesmas dan tugas rangkap petugas di puskesmas;
- Masih kurangnya integrasi program dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- Pelacakan kasus/deteksi dini belum optimal dilakukan, sebagian besar hanya bersifat pasif dan dihadapi oleh Kondisi Pandemi Covid-19;
- Terbatasnya anggaran;
- Komitmen Petugas yang masih kurang dalam pelaksanaan program;
- Stigma masyarakat yang masih tinggi dan masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan kesehatan.

b. Solusi/Tindak Lanjut

- Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi dan KIE di masyarakat;
- Mengusulkan untuk meningkatkan sarana prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk kader atau kelompok khusus dan petugas kesehatan;
- Membentuk kelompok peduli AIDS di nagari atau kecamatan;
- Mengusulkan pelatihan bagi petugas dan kader;
- Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan deteksi dini/screening;
- Meningkatkan kegiatan pelacakan kasus dan deteksi dini secara aktif melalui kegiatan-kegiatan diluar gedung dan dalam gedung serta melakukan penyisiran kasus ke rumah sakit baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun luar Kabupaten;
- Menggalang Komitmen bersama dalam pelaksanaan program dengan melibatkan organisasi profesi dan lintas sektor;

- Pengembangan program inovasi puskesmas dalam meningkatkan cakupan program.

4.2.3 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan :

1. Dari semua indikator SPM belum ada satupun yang mencapai target 100%;
2. Masih terdapatnya kekurangan dalam jumlah tenaga/personil, sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran yang terbatas;
3. Ketersediaan anggaran saat ini masih belum mengacu kepada pencapaian SPM sehingga terdapat kegiatan yang sama untuk mencapai beberapa indikator SPM yang berbeda.

Saran :

- a. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien agar dapat menjadi daya ungkit terhadap capaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor dapat di tingkatkan lagi dalam pelaksanaan program kesehatan di Dinas Kesehatan;
- c. Adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- d. Pemenuhan sumber daya kesehatan khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang puskesmas agar pelayanan kesehatan bisa maksimal.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9.304 jiwa	9.001 jiwa	96,74 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.250 jiwa	5.000 jiwa	95,24 %

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Pada tahun 2020 ditargetkan tambahan jumlah warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 9.304 Jiwa. Untuk mencapai target ini, dilaksanakan kegiatan pembangunan jaringan air bersih baik di perkotaan maupun perdesaan. Jaringan air bersih yang akan dibangun pada tahun 2020 sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Biaya (Rp)
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Batu Balang Kecamatan Harau	1648	1.230.850.000
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	2164	1.616.237.500
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh	2464	1.840.300.000
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban (Swakelola)	468	349.537.500
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Sarilamak Kecamatan Harau (Swakelola)	1004	749.862.500
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka (Swakelola)	204	152.362.500
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan (Swakelola)	404	301.737.500
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Swakelola)	948	708.037.500

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic

Pada tahun 2020 ditargetkan tambahan jumlah warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 5.250 jiwa. Untuk mencapai target ini, dilaksanakan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air

limbah. Prasarana dan sarana air limbah yang akan dibangun pada tahun 2020 sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Biaya (Rp)
1	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Batu Hampa Kecamatan Akabiluru	250	297.500.000
2	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru	250	297.500.000
3	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh	250	297.500.000
4	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sarik Laweh Kecamatan Akabiluru	250	297.500.000
5	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru	250	297.500.000
6	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru	250	297.500.000
7	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	297.500.000
8	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	297.500.000
9	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	297.500.000
10	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	297.500.000
11	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Taram Kecamatan Harau	250	297.500.000
12	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Mungka Kecamatan Mungka	250	297.500.000
13	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka	250	297.500.000
14	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	250	297.500.000,-
15	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Suliki Kecamatan Suliki	250	297.500.000
16	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Limbanang Kecamatan Suliki	250	297.500.000
17	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki	250	297.500.000
18	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Andiang Kecamatan Suliki	250	297.500.000
19	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan	250	297.500.000
20	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan	250	297.500.000
21	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan	250	297.500.000

4.3.3 Realisasi

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Pada tahun 2020 ditargetkan tambahan jumlah warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 9.304 Jiwa dan terealisasi 9.001 jiwa. Adapun rincian realisasi ini sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Realisasi Layanan (Jiwa)
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Batu Balang Kecamatan Harau	1648	1648
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	2164	2164
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	2464	2464
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban (Swakelola)	468	468
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Sarilamak	1004	1004

	Kecamatan Harau (Swakelola)		
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka (Swakelola)	204	204
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan (Swakelola)	404	101
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Swakelola)	948	948

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Pada tahun 2020 ditargetkan tambahan jumlah warga Kabupaten Lima Puluh Kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 5.250 jiwa dan terealisasi 5.000 jiwa. Adapun rincian realisasi ini sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Target Layanan (Jiwa)	Realisasi Layanan (Jiwa)
1	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Batu Hampa Kecamatan Akabiluru	250	250
2	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru	250	250
3	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh	250	250
4	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sarik Laweh Kecamatan Akabiluru	250	250
5	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru	250	250
6	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru	250	250
7	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	250
8	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	250
9	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	250
10	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	250	250
11	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Taram Kecamatan Harau	250	250
12	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Mungka Kecamatan Mungka	250	250
13	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka	250	250
14	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	250	250
15	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Suliki Kecamatan Suliki	250	-
16	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Limbanang Kecamatan Suliki	250	250
17	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki	250	250
18	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Andiang Kecamatan Suliki	250	250
19	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan	250	250
20	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan	250	250
21	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan	250	250

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	7.421.462.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	6.834.186.800

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Fasilitator Pamsimas 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17 5
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Fasilitator Sanitasi 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13 5

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan yang dihadapi	Langkah-Langkah Penyelesaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah. 2. Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran. 3. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. 4. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.	a. Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota. b. Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan alokasi APBN/APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan). c. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan. d. Perluasan layanan PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) agar dapat memenuhi kebutuhan layanan perkotaan 100%. e. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan. f. Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri/industri kecil lainnya. 2. Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut.	1. Meningkatkan kerjasama gotong royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut. 2. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya. 3. Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar SKPD terkait.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai (%)	Ket
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani. 2. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani.	100	Tahun 2020
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	1. Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan. 2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah/ Bangunan. 3. Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa. 4. Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni.	100	Tahun 2020

4.4.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah 2020	Realisasi Daerah 2020
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	a. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani. b. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani.	N.A N.A	2 Unit
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	a. Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan. b. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah/ Bangunan. c. Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa. d. Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni.	N.A N.A N.A N.A	

Uraian antara penetapan target dan realisasi yang didapatkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten:

a. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani.

Indikator ini dilakukan dengan pelayanan ketersediaan jumlah unit rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali dan atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapat akses rumah layak huni sesuai dengan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi.

b. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani.

Jumlah total unit rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali dan atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapat akses rumah layak huni sesuai dengan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah:

a. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

SPM ini merupakan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

b. Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah/bangunan.

SPM ini merupakan jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah/bangunan.

c. Rumah tangga penerima subsidi uang sewa.

SPM ini merupakan jumlah rumah tangga penerima subsidi uang sewa.

d. Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni.

SPM ini merupakan jumlah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni yang di waktu tertentu.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk target 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Target (Unit)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	60.000.000	2 Unit
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.	0	0
JUMLAH		60.000.000	2 Unit

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi :

- Alokasi anggaran yang masih terbatas;
- Kurangnya pendanaan dalam mendukung kegiatan melalui APBD Kabupaten;
- Ketenagaan dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang;
- Sarana dan prasarana yang masih kurang.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa solusi antara lain :

- Perlu adanya dukungan anggaran dalam pencapaian target SPM;
- Sarana dan prasara pendukung yang diperlukan untuk lebih ditingkatkan.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

4.5.1.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dimana jenis pelayanan dasar sub-urusan Trantibum di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) bahwa penerima jenis pelayanan dasar sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.

4.5.1.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - c. Komunikasi Informasi dan edukasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
 - b. Respon cepat darurat bencana;
 - c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.1.3. Dinas Pemadam Kebakaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)	OPD
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	3273 orang	3273 orang	100 %	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7.305	2.045	28,00 %	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	7.305	2.045	28,00 %	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	1.403	1.403	100 %	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	312 Jiwa	311 Jiwa	99,99 %	Dinas Damkar

4.5.3 Realisasi

4.5.3.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada awal triwulan I Tahun Anggaran 2020 Satpol PP Lima Puluh Kota telah melaksanakan Program Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Realisasi kegiatan tersebut berupa penertiban PSK sebanyak 8 kali, penertiban anak sekolah 4 kali, Inhalen 4 kali, warung kelambu 6 kali. Namun dikarenakan pada awal tahun 2020 di Indonesia ditetapkan status siaga bencana *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan dilanjutkan dengan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi maka kegiatan tersebut belum dapat dilanjutkan dan pada mulai pertengahan tahun 2020 kegiatan tersebut dialihkan untuk pengamanan demo *Omnibus Law* sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Mahasiswa Politani Unand, pengamanan Pemilu Kada 2020 berupa pengamanan pendaftaran calon 4 kali, pengamanan kampanye Paslon 90 kali, pengamanan debat 3 kali, selama terjadi kegiatan baik pendaftaran calon Kepala Daerah, kampanye dan debat, Satpol PP memastikan dan mengawasi apakah calon Kepala Daerah sudah melakukan sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi standar Covid-19. Untuk kampanye dilakukan di rumah rumah pendukung calon yang telah ditunjuk oleh calon Kepala Daerah tersebut, tersedianya air dan sabun untuk cuci tangan, memakai masker dan jumlah peserta hanya dibolehkan 30 orang. Kampanye berlangsung aman dan tertib sudah memenuhi Protokol Kesehatan.

Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melibatkan Pengadilan

Negeri, Kejaksaan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, BPBD dan Dinas Kesehatan. Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penegakan hukum bagi pelanggar perorangan yang tidak memakai masker saat diluar rumah, diawali dengan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan, selanjutnya petugas akan memberikan arahan terkait pentingnya penggunaan masker bagi pencegahan penyebaran virus Covid-19. Selama 3 bulan kegiatan, sanksi yang dikenakan hanya berupa kerja sosial kepada pelanggar pelanggaran ke 1 dan ke 2, beberapa pelanggaran memilih memilih sanksi alternatif berupa denda administratif sebesar Rp.100.000,- karena tidak bersedia melakukan sanksi kerja sosial. Sanksi kerja sosial yang dijatuhkan dalam Perda adalah 90 menit bagi pelanggar pertama dan 120 menit bagi pelanggaran kedua sekaligus pemasangan atribut berupa rompi oranye bertuliskan “Pelanggar Perda” ataupun kalung bertuliskan “Pelanggar Protokol Kesehatan” sehingga diharapkan sudah memberikan efek jera bagi pelanggar.

Selama Triwulan akhir 2020 pelaksanaan kegiatan mulai dari 12 Oktober 2020 hingga 30 Desember 2020, telah terjaring sebanyak 3.251 orang pelanggar yang tidak memakai masker saat keluar rumah, 22 Penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan dan diberikan surat teguran. Denda administratif atas pelanggaran Adaptasi Kebiasaan Baru sebanyak Rp.5.100.000,- dan disetorkan ke kas daerah rekening Bank Nagari 0100.0101.0020.29. Untuk kegiatan ini teranggarkan dalam Kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan anggaran Rp.1.209.445.000,- dan realisasi Rp.1.147.204.000,-.

4.5.3.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7.305	2.045	28,00 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.305	2.045	28,00 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.403	1.403	100 %

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian realisasi cukup rendah pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh terjadinya *refocusing* anggaran untuk pendanaan kegiatan Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga kegiatan-kegiatan yang awalnya direncanakan untuk mendukung pencapaian target SPM

Bencana juga dilakukan *refocusing* sehingga untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian SPM seperti sosialisasi, pelatihan, peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan serta berbagai dokumen kebencanaan yang belum tersedia sehingga realisasi capaian SPM 2020 kita proyeksikan dengan mempedomani kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta melalui informasi yang telah ada sebelumnya seperti papan informasi dan himbauan yang telah ada.

4.5.3.3. Dinas Pemadam Kebakaran

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini di tegaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada 5 tugas utama yaitu :

1. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran;
2. Pemadaman kebakaran;
3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Penanganan kebakaran bahan bahaya beracun.

4.5.4 Alokasi Anggaran

4.5.4.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dengan alokasi anggaran Rp.573.680.277,- dan realisasi sebesar Rp.571.751.600,-.

4.5.4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran pendukung penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.493.470.359,- dengan realisasi sebesar Rp.452.585.359,- yang terdiri dari 4 program dan 15 kegiatan.

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target Sasaran/Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Target	Anggaran
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Presentase Jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca Bencana				
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi jalan jembatan pasca bencana	1	17.477.000	1	17.415.000
PROGRAM PEMULIHAN DAERAH	Presentase realisasi pemulihan daerah pasca Bencana				

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target Sasaran/Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Target	Anggaran
PASCA BENCANA					
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca Bencana	60	32.568.000	tidak terlaksana karena refocusing	32.403.450
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Jumlah perbaikan peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah pasca Bencana yang dilakukan	8	12.590.259	tidak terlaksana karena refocusing	12.555.960
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Persentase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial				
Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen monitoring,evaluasi dan pelaporan Perumahan pasca bencana	1	11.085.000	1	11.030.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Presentase upaya pengurangan resiko bencana				
Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam	Jumlah Dokumen Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1	17.913.000	1	15.047.000
Pengandaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam yang diadakan	6	33.400.000	3 item (senter kepala, 26 mantel hujan, dan 2 buah loker peralatan)	33.400.000
pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara	jumlah paket logistic dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500	2.652.500	tidak terlaksana karena refocusing	2.650.000
Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah kendaraan operasional yang di service dan diganti suku cadangnya	8	156.711.000	8	132.238.967
Pengadaan perlengkapan peralatan SAR	Jumlah perlengkapan peralatan SAR diadakan (item)	46	6.636.400	1 item (20 kantong mayat)	6.631.285
Piket pos penanggulangan Bencana dan pengungsi	Jumlah OH (orang) anggota TRC yang melaksanakan piket pos penanggulangan bencana alam dan pengungsi	1441	100.020.000	1.102 OH piket TRC dan pusdalops PB 399,00 OH	94.800.00
sosialisasi tentang bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi tentang tentang bencan alam	300	13.571.800	tidak terlaksana	13.410.026

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target Sasaran/Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Target	Anggaran
				karena refocusing	
Peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan bencana	Jumlah peserta (OK) yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana	100	15.732.700	tidak terlaksana karena refocusing	15.335.756
Kesiapsiagaan/pembentukan lembaga	Jumlah Anggota masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok siaga bencana	200	31.380.000	tidak terlaksana karena refocusing	31.350.00
Pengembangan dan peningkatan operasional PUSDALOPS PB	Jumlah sosialisasi dan Diklat yang dilaksanakan serta jumlah (OH) piket pos Pusdalops	700	27.060.000	451,00 OH Piket Pusdalops	19.740.000
Peningkatan simulasi pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana	180	14.672.400	tidak terlaksana karena refocusing	14.578.200

4.5.4.3. Dinas Pemadam Kebakaran

Alokasi anggaran pendukung penerapan SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp.4.264.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.248.784.020,- yang terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan.

4.5.5 Dukungan Personil

4.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah pegawai Satpol PP 119 orang yang terdiri 44 PNS, 5 PTT, 73 THL dalam menjalankan penertiban didukung oleh Tim SK 4 dimana anggotanya terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP.

4.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Personil atau Pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Nama-nama Pejabat	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	H.Joni Amir,S.Sos	196506191990031003	Pembina TK.I/IV.b	Kepala Pelaksana
2	Ronny Muhamad Nur,S.Sos.ME	197603162003121003	Pembina/IV.a	Sekretaris
3	Dra.Susy Hardini	196711011989032006	Pembina/IV.a	Kabid. PK
4	Rahmadinol,S.Pd	197404141996031001	Pembina/IV.a	Kabid. KL
5	Ariffadillah,SE	196902261999031003	Pembina/IV.a	Kabid. RR
6	Ernita,SH, S.Sos	196212241993032003	Pembina/IV.a	Kasubag. UP
7	Villia,SS	197801072007012005	Penata Tk.I/III.d	Kasubag. Keuangan
8	Arie Kurniawan,SE, M.Eng	197908102005011009	Penata III/c	Kasubag. Program
9	Yuhengki.S.Sos	197901252002121002	Penata III/c	Kasi. Pencegahan
10	Elfi Rita,SH	197205132002122001	Penata Tk I/III.d	Kasi. Kesiapsiagaan
11	Tajul Arifin,S.Pi, M.Si	198211052010011014	Penata III/c	Kasi. Kedaruratan

No.	Nama-nama Pejabat	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
12	Gusniah,S.Sos	196308011986012002	Penata Tk.I/III.d	Kasi. Logistik
13	Risman	196912132007011006	Penata Muda Tk.I/III.b	Kasi. Rehabilitasi
14	Hendri Jon,S.Sos	196501111986111002	Pembina/IV.a	Kasi. Rekontruksi

No.	Golongan	Eselon			Non eselon		Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Golongan IV	1	4	2	2	-	9
2.	Golongan III	-	-	7	7	-	14
3.	Golongan II	-	-	-	8	-	8
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	PTT/ THL	-	-	-	-	30	30
	J u m l a h	1	4	9	17	30	61

4.5.5.3. Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah personil pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 152 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural : 16 orang
2. Staf Fungsional umum PNS : 21 orang
3. Staf THL/PTT/ Non PNS : 115 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

4.5.6.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan : masih banyaknya anggota terutama THL yang tidak paham dengan SOP dalam menjalankan kegiatan di lapangan sehingga kadang terjadi kesalahan komunikasi dalam penindakan dan menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana target. Hal ini terjadi karena pelatihan pelatihan yang diadakan di satpol PP tidak memadai karena hanya diadakan sekali setahun.

Solusi : diadakan pelatihan dan pemaparan SOP kepada aparaturnya secara rutin dan terus menerus, dan atau pemberian arahan terkait SOP Lapangan kepada aparaturnya setiap pelaksanaan apel pagi.

4.5.6.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara umum permasalahan dalam penerapan dan pencapaian indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2020 adalah:

1. Terjadinya *refocusing* anggaran untuk pendanaan kegiatan Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga kegiatan-kegiatan yang awalnya direncanakan untuk mendukung pencapaian target SPM Bencana juga dilakukan *refocusing*

sehingga untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian SPM;

2. Target dan indikator yang telah ditetapkan dalam SPM dengan tingkat capaian 100% per tahunnya cukup memberatkan bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan personil;
3. Terdapat beberapa target SPM yang belum bisa dianggarkan berkaitan dengan tidak termasuk dalam dokumen Renstra OPD dan RPJMD Daerah;
4. Realisasi capaian SPM 2020 didapat berdasarkan hasil proyeksi dengan mempedomani kegiatan tahun-tahun sebelumnya melalui informasi yang telah ada sebelumnya seperti papan informasi dan himbauan yang telah ada.

Solusi:

1. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Bencana sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara/masyarakat;
2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana diperlukan suatu upaya dan strategi mitigasi melalui perencanaan dan penganggaran dalam upaya pengurangan resiko bencana;
3. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbanding lurus dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.5.6.3. Dinas Pemadam Kebakaran

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini di tegaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada 5 tugas utama yaitu :

1. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran;
2. Pemadaman kebakaran;
3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Penanganan kebakaran bahan bahaya beracun.

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* terkait sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Belum adanya rencana induk sistim pemadam kebakaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pelayan masyarakat dalam peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
3. Peningkatan kapasitas personil Damkar belum berbanding lurus dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;
4. Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemadam kebakaran;
5. Peningkatan kesejahteraan keselamatan personil Damkar belum sebanding lurus dengan resiko kerja yang tinggi;
6. Belum tersosialisasikannya secara menyeluruh tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran baik di tiap OPD, nagari dan masyarakat sehingga mengakibatkan keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran belum teroptimalkan dalam pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Rekomendasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya non kebakaran :

1. Perlu adanya rencana induk sistim pemadam kebakaran sebagai dokumen perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kebakaran;
2. Perlunya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
3. Perlunya dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
4. Perlunya komitmen pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran;

5. Perlunya sosialisasi dan kesepahaman antar OPD, nagari dan masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dalam pelayanan langsung terhadap masyarakat.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Jenis pelayanan dasar Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	72 Orang	69 Orang	95,83 %
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	12 Orang	45 Orang	375 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.420 Orang	2.390 Orang	98,76 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	493 Orang	493 Orang	100 %

Analisis realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan kriteria :

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
- Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah 95,83 %, dari APBD dengan rincian :

- a. Fasilitas anak didik ke Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PSBD Palembang, PSBL Dharma Guna Bengkulu dan Panti Harapan Ibu Kalumbuak Padang) sebanyak 6 Orang;
- b. Alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 63 orang terdiri dari :
 - ✓ Bantuan Kursi Roda sebanyak 35 orang;
 - ✓ Bantuan Alat Bantu Dengar sebanyak 11 orang;
 - ✓ Bantuan Tongkat 1 Kaki sebanyak 16 orang;
 - ✓ Bantuan Tongkat 4 Kaki sebanyak 1 orang.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
- b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang tertangani tahun 2020 adalah sebanyak 375 %, dari APBD dengan rincian sebanyak 45 orang melalui kegiatan fasilitas anak didik ke Panti Rehabilitasi Sosial PSAABR “Budi Utama” Lubuk Alung, PSBR “Harapan” Padang Panjang, Panti Sosial Anak Trimurni Padang Panjang, Balai Rehsos Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru.

3. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota pasal 27 dengan kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
- b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah 98,75 % dari APBD dengan rincian :

- a. Bantuan permakanan lansia sebanyak 2.197 orang;
- b. Bantuan sandang lansia sebanyak 46 orang;

- c. Bantuan alat bantu cacat bagi lansia 107 orang;
 - d. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia sebanyak 30 orang.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

Sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria :

- a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 tahun sampai dengan 60 tahun;
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
- c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
- d. Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang peduli.

Pada Tahun 2020, maupun tahun sebelumnya Dinas Sosial tidak ada melaksanakan kegiatan tersebut, karena kegiatan ini tidak menjadi urusan pokok dari Dinas Sosial, tetapi berada pada kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja namun berdasarkan kerjasama lintas sektoral hal ini dapat dilakukan setelah adanya kegiatan operasional oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten maupun Kota Payakumbuh.

5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial disaat bencana dan pasca bencana terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2020 terjadi bencana alam banjir, longsor, dan angin kencang, korban terdampaknya sebanyak 399 Jiwa. Bencana Sosial yaitu kebakaran korban yang terdampak sebanyak 94 Jiwa, yang masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) (Beras, Telur, Mie Instans) dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids, terpal, matras, sodek, kual, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial).

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD jumlah anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 yaitu anggaran Perubahan adalah :

1. Alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.7.054.060.187,- dengan rincian:
 - Belanja Tidak langsung sebesar Rp.2.788.003.280,-.
 - Belanja langsung sebesar Rp.4.266.056.907,-.
2. Realisasi keuangan keseluruhan sebesar Rp.6.652.773.301,- atau 94,31%.
 - Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.638.366.422,- atau sebesar 94,63%.
 - Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.4.014.406.879,- atau sekitar 94,10%.

Adapun anggaran perubahan tahun 2020 untuk pencapaian SPM Dinas Sosial adalah :

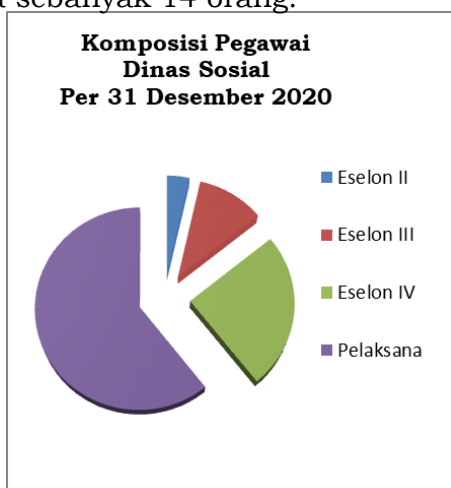
No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ✓ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma ✓ Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	129.196.470	120.443.324
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar ✓ Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	40.784.975	40.310.995
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ✓ Kegiatan Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia	2.072.660.000	1.998.030.744
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ✓ Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	96.865.613	53.738.000

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 28 Orang PNS dan 27 orang Non PNS;
2. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 79 Orang;
3. Jumlah TSKK sebanyak 13 Orang;
4. Jumlah Pendamping PKH sebanyak 66 Orang;
5. Jumlah Anggota Tagana Sebanyak 25 Orang.

Jumlah pegawai/sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak orang, terdiri 28 orang PNS dan 27 orang Non PNS/Pegawai Kontrak. Pejabat struktural sebanyak 14 orang dan pelaksana sebanyak 14 orang.



Eselon II	: 1 orang
Eselon III	: 4 orang
Eselon IV	: 9 orang
Pelaksana	: 14 orang
PTT	: 1 orang
THL	: 26 orang

No	Golongan (Pegawai Negeri/Kontrak)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
1	IV	9 orang
2	III	13 orang
3	II	6 orang
4	PTT/ THL	27 orang
Jumlah		55 orang

No	Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2020
1	S2	3 orang
2	S1	28 orang
3	D IV	2 orang
4	D III	5 orang
5	SLTA	16 orang
6	SLTP	1 orang
Jumlah		55 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum sempurnanya database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Minimnya anggaran untuk penanganan PMKS dari APBD;
3. Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PMKS;
4. Kurangnya pemahaman terhadap SPM dikalangan pengambil keputusan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi :

1. Melakukan pendataan minimal 1 kali 5 tahun dan uji publik dan up dating data setiap tahun terhadap PMKS;
2. Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan PMKS;
3. Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial;
4. Perlunya pembinaan lebih lanjut baik dari Kementerian maupun provinsi terhadap seluruh *Stakeholder* yang mendukung pencapaian SPM di daerah.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Pendidikan. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa	1.656.946.652	1.632.162.906
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	250.319.000	239.846.900
Program Pendidikan Non Formal		
Kegiatan Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	137.405.200	130.020.200
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	10.351.750	10.084.250
Program Pendidikan Anak Usia Dini		
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	40.094.200	34.801.500
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	45.784.000	39.290.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	108.734.000	107.380.000
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	115.755.000	94.550.000
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	84.933.950	76.860.000

4.7.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Kesehatan. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS KESEHATAN		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak		
Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi	28.667.000	28.467.000
Jaminan Persalinan	3.235.566.309	1.899.952.371
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita	5.080.000	3.880.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
Pengendalian Penyakit Tidak Menular	16.410.000	15.105.000
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza	3.352.000	3.345.000
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular		
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	18.770.000	15.155.000
Komisi Penanggulangan AIDS	38.510.000	1.340.000

4.7.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 Penerapan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
Pembangunan jaringan air bersih/air minum	7.421.462.000	6.904.155.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
Penyediaan prasarana dan prasarana air limbah	6.834.186.800	6.499.132.500
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	66.916.800	42.465.000

4.7.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN		
Program Pengembangan Perumahan		
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	4.070.642.000	4.049.588.714

4.7.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.7.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
Pengendalian Keamanan Lingkungan	573.680.277	571.751.600

4.7.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.477.000	17.415.000
Program Pemulihan Daerah Daerah Pasca Bencana		
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	32.568.000	32.403.450
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	12.590.259	12.555.960
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.085.000	11.030.000
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam	17.913.300	15.047.000
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam	33.400.000	33.400.000
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	2.652.500	2.650.000
Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	156.711.000	132.238.967

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Pengadaan perlengkapan peralatan SAR	6.636.400	6.631.000
Piket Pos Penanggulangan Bencana dan pengungsi	100.020.000	94.800.000
Sosialisasi tentang bencana alam	13.571.800	13.410.026
Peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan bencana	15.732.700	15.335.756
Kesiapsiagaan / pembentukan kelembagaan	31.380.000	31.350.000
Pengembangan dan peningkatan operasional PUSDAL OP PB	27.060.000	19.740.000
Peningkatan simulasi /pelatihan penanggulangan bencana	14.672.400	14.578.200

4.7.7. Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS PEMADAM KEBAKARAN		
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.264.520.000	4.248.784.020
Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	4.248.860.000	4.234.042.020
Investigasi kejadian kebakaran	8.600.000	8.583.000
Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	7.060.000	6.159.000

4.7.8 BIDANG URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial merupakan OPD utama pelaksana urusan Sosial. Rincian program dan kegiatan, alokasi dana pada APBD 2020 penerapan SPM bidang urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
DINAS SOSIAL		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
Kegiatan Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia	2.072.660.000	1.998.030.744
Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	96.865.613	53.738.000
Program Pembinaan Anak Terlantar		
Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	40.784.975	40.310.995
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	57.943.800	52.397.500
Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	71.252.670	68.045.824

5.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. LPPD Tahun 2020 yang dilaporkan telah memuat :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
 - c. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan

berjalan baik, dikarenakan sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur dan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
- b) Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- e) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Tahun ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, LPPD Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota . Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.